

**LPPD**  
**TAHUN**  
**2022**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**



**insun medal**

**KABUPATEN SUMEDANG**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 tepat waktu. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LPPD ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak-hak yang diperoleh daerah berdasarkan hasil capaian kinerja sesuai rencana kerja yang telah direncanakan.

LPPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 memuat gambaran tentang penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2022 secara jelas dan terukur. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Berbagai upaya dilakukan oleh segenap pihak untuk tetap konsisten dan terarah sesuai dengan penetapan kinerja di masing-masing bidang urusan guna mewujudkan Visi “ **Sumedang SIMPATI (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, Kreatif) Pada Tahun 2023**”.

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Sumedang yang telah berperan aktif menyampaikan data dan informasi. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran dan masukan, untuk penyempurnaan penyusunannya.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 29 Maret 2023

BUPATI SUMEDANG,

**Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**INSPEKTORAT**

Alamat: Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Komplek Pemerintahan Kabupaten Sumedang 45323  
e-mail: inspektorat.kab.sumedang@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Sumedang, 21 Maret 2023

**INSPEKTUR DAERAH,**



**NASAM, S.E., Ak.**

NIP 196407071987031005



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
SURAT PERNYATAAN REVIU OLEH APIP .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar .....	xix
Daftar Grafik .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>I-1</b>
1.1.1. Penjelasan Umum .....	I-1
a. Undang-undang Pembentukan daerah .....	I-6
b. Data geografis wilayah .....	I-8
1. Batas Administrasi Daerah .....	I-8
2. Luas Wilayah .....	I-8
3. Topografi .....	I-10
4. Klimatologi .....	I-11
c. Jumlah Penduduk .....	I-15
1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin .....	I-15
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia .....	I-18
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	I-19
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	I-20
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang....	I-21
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang .....	I-30
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	I-37
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	I-39
a. Permasalahan Pembangunan Daerah..	I-39
b. Isu Strategis .....	I-70
c. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	I-99
1. Visi Kepala Daerah .....	I-99
2. Misi Kepala Daerah .....	I-101
3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 .....	I-105



4. Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	I-108
5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	I-109
d. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan menengah .....	I-127
e. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	I-145
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal ....	I-181
a. Dasar pertimbangan penerapan SPM.....	I-181
b. Dasar Penerapan SPM .....	I-182
c. Kebijakan Umum Daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM .....	I-183
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	II-1
2.1.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia .....	II-1
2.1.2 Kemiskinan .....	II-2
2.1.3 Ketenagakerjaan .....	II-5
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	II-7
2.1.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	II-10
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	II-13
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	II-13
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	II-51
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	II-63
2.3.1 Angka Harapan Hidup (AHH) .....	II-59
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-65
b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-66
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-66
d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional....	II-67
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-67
f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-69



	g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-69
2.3.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .....	II-70
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-70
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-70
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-71
	d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional....	II-71
	e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-72
	f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-73
	g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-73
2.3.3	Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) .....	II-74
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-74
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-74
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-75
	d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional	II-75
	e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-75
	f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-77
	g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-77
2.3.4	Persentase Penduduk Miskin .....	II-78
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-78
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-78
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-79
	d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional .....	II-79



	e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-81
	f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-82
	g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-82
2.3.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-84
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-84
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-84
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-85
	d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional....	II-85
	e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-86
	f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-87
	g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-87
2.3.6	Indek Pemberdayaan Gender (IDG).....	II-88
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-88
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-88
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-89
	d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional....	II-89
	e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-90
	f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-91
	g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-91
2.3.7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	II-92
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-92
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-92



	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-93
	d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional....	II-93
	e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-94
	f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-94
	g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-95
2.3.8		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	II-96
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-96
	b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-97
	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-97
	d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional....	II-98
	e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-98
	f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-99
	g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-101
2.3.9		Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap.....	II-108
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-108
	b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-108
	c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-109
	d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	II-110
	e.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-110
	f.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-111
2.3.10		Rasio Jaringan Irigasi.....	II-112
	a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-113





	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-113
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-113
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-114
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-115
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-116
2.3.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-116
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-116
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-118
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-118
	d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional.....	II-119
	e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-119
	f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-120
	g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-122
2.3.12	Indeks Risiko Bencana.....	II-125
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-125
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-125
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-126
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-126
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-127
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-128
2.3.13	Opini BPK.....	II-129
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-129



	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-129
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-130
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-130
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-132
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-133
2.3.14	Nilai Sakip Kabupaten.....	II-136
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-136
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-136
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-138
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-139
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-141
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-142
2.3.15	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-145
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-145
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-146
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-147
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-147
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-152
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-153
2.3.16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	II-153
	a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-153
	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-155



c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-155
d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-156
e.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-158
f.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-160
2.3.17	Pengeluaran Per Kapita.....	II-162
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-162
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-163
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-163
d.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional .....	II-164
e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-164
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-165
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-166
2.3.18	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	II-167
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-167
b.	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-167
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-168
d.	Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional .....	II-168
e.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-169
f.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-170
g.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-170
2.3.19	Jumlah UMKM.....	II-171
a.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	II-171



	b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	II-172	
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-173	
	d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	II-174	
	e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	II-175	
	f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	II-176	
<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>III-1</b>
	3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	III-1
	3.2	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pusat/Kementrian .....	III-2
	3.3	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten .....	III-5
	3.4	Permasalahan dan Solusi .....	III-14
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>IV-1</b>
	4.1	Urusan Pendidikan .....	IV-1
	4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-1
	4.1.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah .....	IV-1
	4.1.3	Realisasi .....	IV-1
	4.1.4	Alokasi Anggaran .....	IV-6
	4.1.5	Dukungan Personil .....	IV-8
	4.1.6	Permasalahan dan Solusi .....	IV-12
	4.2	Urusan Kesehatan .....	IV-16
	4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-16
	4.2.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah .....	IV-17
	4.2.3	Realisasi .....	IV-18
	4.2.4	Alokasi Anggaran .....	IV-20
	4.2.5	Dukungan Personil .....	IV-21
	4.2.6	Permasalahan dan Solusi .....	IV-21
	4.3	Urusan Pekerjaan Umum .....	IV-23
	4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-23
	4.3.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah .....	IV-24
	4.3.3	Realisasi .....	IV-24
	4.3.4	Alokasi Anggaran .....	IV-26
	4.3.5	Dukungan Personil .....	IV-27
	4.3.6	Permasalahan dan Solusi .....	IV-32
	4.4	Urusan Perumahan Rakyat .....	IV-33
	4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-33



4.4.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah .....	IV-34
4.4.3	Realisasi .....	IV-
4.4.4	Alokasi Anggaran .....	IV-35
4.4.5	Dukungan Personil .....	IV-36
4.4.6	Permasalahan dan Solusi .....	IV-37
4.5	Urusan Sosial .....	IV-38
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-38
4.5.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah .....	IV-38
4.5.3	Realisasi .....	IV-39
4.5.4	Alokasi Anggaran .....	IV-42
4.5.5	Dukungan Personil .....	IV-43
4.5.6	Permasalahan dan Solusi .....	IV-43
4.6	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	IV-44
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-44
4.6.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah .....	IV-44
4.6.3	Realisasi .....	IV-45
4.6.4	Alokasi Anggaran .....	IV-46
4.6.4	Dukungan Personil .....	IV-48
4.6.5	Permasalahan dan Solusi .....	IV-49
4.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	IV-50
4.7.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	IV-50
4.7.2	Target Pencapaian SPM oleh daerah .....	IV-53
4.7.3	Realisasi .....	IV-54
4.7.4	Alokasi Anggaran .....	IV-56
4.7.5	Dukungan Personil .....	IV-58
4.7.6	Permasalahan dan Solusi .....	IV-58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal.</b>
1.1	Luas Wikayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan .....	I-8
1.2	Iklim Per Bulan Berdasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2022 .....	I-11
1.3	Jumlah Hari Curah Hujan Menurut Bulan Pada Tahun 2022.....	I-13
1.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2022.....	I-16
1.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022.....	I-18
1.6	Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	I-19
1.7	Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan.....	I-19
1.8	Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Sumedang.....	I-20
1.9	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 202.....	I-32
1.10	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	I-34
1.11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	I-37
1.12	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas.....	I-40
1.14	Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan Upaya Tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung.....	1-68
1.15	Alternatif dan Rekomendasi Skenario terhadap Data Indikator TPB yang „sudah tercapai, sudah dilaksanakan“ dan „tidak ada data“.....	1-74
1.16	Indikator SDGs bersifat Makro.....	I-89
1.17	Indikator SDGs bersifat outcome Program	I-91
1.18	Indikator SDGs dalam RENSTRA	I-92
1.19	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat	I-104
1.20	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2018-2023 (Sebelum Perubahan)	I-110
1.21	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2021-2023 (Setelah Perubahan)	I-117
1.22	Indikasi Pembangunan Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023	I-121
1.23	Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas	I-141



	Daerah Perubahan RKPD Tahun 2022	
1.24	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	I-164
2.5	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya...	II-60
2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-60
2.7	Jumlah Kematian Ibu.....	II-61
2.8	Kasus Kematian Bayi.....	II-61
2.9	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022.....	II-62
2.10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022.....	II-63
2.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-64
2.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-64
2.13	Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022	II-66
2.14	Indikator Kinerja Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022.....	II-66
2.15	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022.....	II-67
2.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Sebelumnya	II-67
2.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJM.....	II-68
2.18	Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2022	II-70
2.19	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022.....	II-72
2.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-72
2.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-73
2.22	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022.....	II-78
2.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-79
2.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD.....	II-79
2.25	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022.....	II-81
2.26	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2022.....	II-83
2.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pemberdayaan	



	Gender Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	II-84
2.28	Perbandingan Realisasi Kinerja IDG Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-84
2.29	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2022.....	II-86
2.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-86
2.31	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022.....	II-87
2.32	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-87
2.33	Perbandingan Realisasi Kinerja IKUB Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-88
2.34	Skor tiap Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang.....	II-89
2.35	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKUB Tahun 2022.....	II-90
2.36	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	II-92
2.37	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-93
2.38	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-93
2.39	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022.....	II-95
2.40	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-95
2.41	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-96
2.42	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022	II-97
2.43	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	II-98
2.44	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-98
2.45	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-98
2.46	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2022.....	II-101
2.47	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-101
2.48	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	II-103
2.49	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-103





2.50	Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD	II-103
2.51	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022.....	II-104
2.52	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-105
2.53	Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2022	II-106
2.54	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur.....	II-107
2.55	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.....	II-108
2.56	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-108
2.57	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2022.....	II-109
2.58	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 202.....	II-109
2.59	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022.....	II-111
2.60	Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022...	II-111
2.61	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-112
2.62	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-112
2.63	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2022.....	II-113
2.64	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022.....	II-114
2.65	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	II-115
2.66	Perbandingan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-116
2.67	Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-116
2.68	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022.....	II-117
2.69	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-118
2.70	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	II-118
2.71	Kriteria IKLH.....	II-119
2.72	Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-120
2.73	Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-120
2.74	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKLH Tahun 2022.....	II-122
2.75	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-122



2.76	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-123
2.77	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya.....	II-1124
2.78	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Dengan Target Akhir RPJMD.....	II-125
2.79	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-126
2.80	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-126
2.81	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022.....	II-127
2.82	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-127
2.83	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD.....	II-128
2.84	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022.....	II-129
2.85	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022.....	II-130
2.86	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022.....	II-133
2.88	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-133
2.89	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-133
2.90	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2022.....	II-134
2.91	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022.....	II-136
2.92	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022.....	II-137
2.93	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.....	II-140
2.94	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-141
2.95	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD.....	II-141
2.96	Nilai Rata- Rata Per Unsur Layanan Tahun 2022.....	II-141
2.97	Kendala, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat.....	II-144
2.98	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022.....	II-144
2.99	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian	



	Kinerja Opini BPK Tahun 2021.....	II-145
2.100	Domain dan Aspek Penilaian SPBE.....	II-147
2.101	Realisasi Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik Tahun 2022.....	II-147
2.102	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik Tahun 2022.....	II-148
2.103	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya.....	II-148
2.104	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya.....	II-148
2.105	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Tahun 2022 Dengan Target Akhir RPJMD.....	II-149
2.106	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2022.....	II-152
2.107	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022.....	II-153
2.108	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	II-153
2.109	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD .....	II-154
2.110	Realsiasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022.....	II-159
3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	III-1
4.1	Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal 2021 Sub Bidang Pendidikan .....	IV-7
4.2	Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal 2022 Sub Bidang Kesehatan .....	IV-20
4.3	Capaian Realisasi Anggaran APBD dan APBN Penerapan SPM Tahun 2022 Sub Bidang Pekerjaan Umum .....	IV-26
4.4	Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten sumedang Per 31 Desember 2022 .....	IV-27
4.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	IV-34
4.6	Capaian Realisasi SPM Tahun 2022 Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	IV-36
4.7	Target SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2022 .....	IV-38
4.8	Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2022 .....	IV-39
4.9	Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2022 .....	IV-42
4.10	Capaian/Realisasi SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang 2021 .....	IV-47
4.11	Capaian/Realisasi SPM Badan Penanggulangan Bencana	



## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sumedang	I-10
1.2	Visi, Misi, Arahkan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan .....	I-66
1.3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ....	I-74
1.4	Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Sumedang 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 .....	I-100
1.5	Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 dengan Visi, Misi RPJMD Prov. Jawa Barat 2018-2023 .....	I-101
2.b	IPM dan Perubahannya dari 2021 ke 2022 .....	II-1
2.c	Tingkat Kemiskinan dan Perubahannya 2021 ke 2022 (%) .....	II-3
2.d	Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	II-4
2.e	Jumlah Penduduk Miskin	II-4
2.f	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	II-5
2.g	TPT dan Perubahannya dari 2021 ke 2022	II-6
2.h	TPT Tahun 2022 dan Pertumbuhannya di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	II-6
2.i	UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	II-7
2.j	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang di bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)	II-8
2.k	Lapangan Usaha Realisasi PMDN Triwulan I tahun 2022 di Jawa Barat	II-9
2.l	Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-10
2.m	Gini Ratio dan Perubahannya dari 2021 ke 2022	II-11
	Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Sumedang	II-11
2.n	Proporsi Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang	II-12
6.1	Kawasan Strategis/Khusus Kabupaten Sumedang ...	VI-23



## DAFTAR GRAFIK

<b>Nomor Grafik</b>	<b>Judul Grafik</b>	<b>Halaman</b>
1.1.1	Jumlah Hari Curah Hujan Menurut Bulan Pada Tahun 2022 .....	I-14
1.1.2	Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk .....	I-17
2.1.1	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat .....	II-67
2.1.2	Perbandingan rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat .....	II-72
2.1.3	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat ....	II-75
2.1.4	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia .....	II-79
2.1.5	Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .....	II-80
2.1.6	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2022 .....	II-86
2.1.7	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional .....	II-90
2.1.8	Perbandingan IKUB Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2022 .....	II-94
2.1.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia .....	II-98
2.1.10	Perbandingan IKLH Tahun 2022 Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional .	II-119
2.1.11	Perkembangan Nilai SAKIP .....	II-138
2.1.12	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang .....	II-146
2.1.13	Perbandingan Pengeluaran Per-Kapita Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat .....	II-164
2.1.14	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia .....	II-169
2.1.15	Jumlah UMKM Tahun 2018 – 2022 .....	II-173



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Penjelasan Umum**

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
  - a. Capaian kinerja makro Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
  - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah  
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.
  - c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah  
Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang



merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2) Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah Provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

3) Dasar Hukum Penyusunan LPPD Tahun 2022

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor





- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);

32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

33. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 15 Desember 2022 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

**a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.**

Kabupaten Sumedang merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Sebelum berbentuk



kabupaten, Sumedang merupakan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sumedang Larang. Sebelum bernama Sumedang Larang, cikal bakalnya bernama Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Kemudian ketika kekuasaan kerajaan berpindah kepada putranya, nama kerajaan berganti menjadi Himbar Buana dan kemudian berganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang.

Kerajaan Sumedang Larang menjadi pewaris kekuasaan Kerajaan Padjadjaran ketika Kerajaan Padjadjaran runtuh setelah menerima empat orang Kandaga Lante Kerajaan Padjadjaran beserta simbol kerajaan berupa Mahkota Binokasih. Pada saat itu wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang semakin luas sebagai warisan dari Kerajaan Padjadjaran. Sepeninggal Prabu Geusan Ulun, kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang melemah menyebabkan banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang. Dan akhirnya kekuasaannya hanya meliputi Parakanmuncang, Bandung dan Sukapura saja. Dan ketika Kerajaan Mataram memperluas kekuasaannya sampai ke wilayah Jawa Barat, Sumedang memilih untuk tunduk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram dengan status bukan lagi sebagai kerajaan namun lebih sebagai sebuah kabupaten.

Ketika penjajah Belanda atau VOC bisa menguasai wilayah Jawa Barat dari kekuasaan Kerajaan Mataram, pihaknya membagi-bagi wilayah Jawa Barat menjadi beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Sumedang.

Untuk peresmian Kabupaten Sumedang sendiri sebagai sebuah Kabupaten di bawah pemerintahan Propinsi Jawa Barat dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 2851).



**b. Data geografis wilayah**

1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

2. Luas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

Selanjutnya luas wilayah Kabupaten berdasarkan kecamatan serta jumlah desa/kelurahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3	4
1	Jatinangor	2.570	12
2	Cimanggung	4.305	11
3	Tanjungsari	4.325	12
4	Sukasari	3.904	7
5	Pamulihan	5.377	11
6	Rancakalong	5.605	10
7	Sumedang Selatan	9.675	10/4
8	Sumedang Utara	3.141	10/3
9	Ganeas	2.531	8
10	Situraja	5.668	15
11	Cisitu	6.410	10



No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3	4
12	Darmaraja	5.413	12
13	Cibugel	5.004	7
14	Wado	7.331	10
15	Jatinunggal	6.322	9
16	Jatigede	11.394	11
17	Tomo	7.541	9
18	Ujungjaya	8.692	9
19	Conggeang	11.186	12
20	Paseh	3.387	10
21	Cimalaka	4.763	14
22	Cisarua	1.452	7
23	Tanjungkerta	4.399	12
24	Tanjungmedar	6.687	9
25	Buahdua	11.156	14
26	Surian	7.630	9
<b>Jumlah</b>		<b>155.872</b>	<b>270 / 7</b>

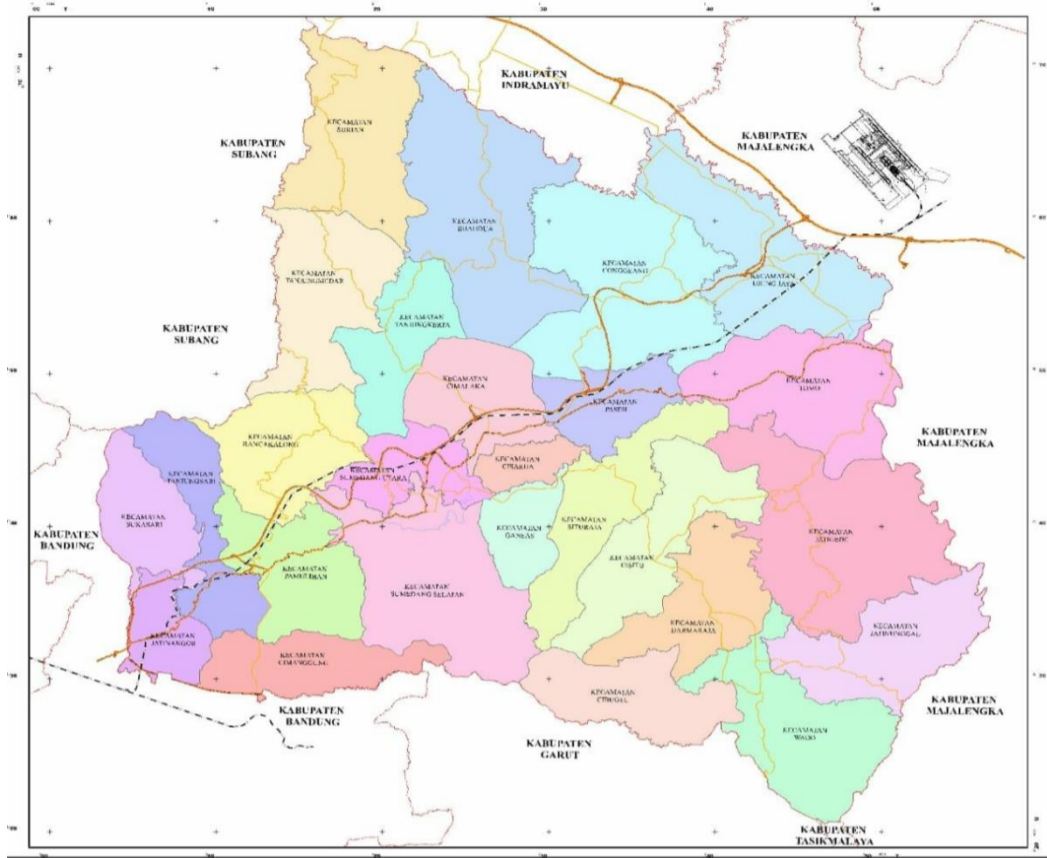
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Sumedang berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena sebagian diantaranya masuk dalam wilayah Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat dan juga sebagai penyangga Ibukota Propinsi. Hal ini menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki beberapa sektor unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut diantaranya yaitu industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Pembagian wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peta Administratif adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Peta Administratif Kabupaten Sumedang**



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

### 3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan kedalam 5 kelas, yaitu :

1. 0 - 8%, merupakan daerah datar dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan;
2. 8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;



3. 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

#### 4. Klimatologi

Secara umum wilayah Kabupaten Sumedang termasuk dalam Tipe B (Iklim Kering) menurut *kriteria Schmidt & Ferguson dalam Daldjoeni*, dengan nilai Q (perbandingan rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah) adalah 0,32% (berada pada kisaran nilai Q antara  $0,14 \leq 0,33$  yang merupakan kriteria tipe iklim B). Iklim dengan tipe B berarti iklim basah, sehingga hampir setiap vegetasi bisa tumbuh di tempat ini. Hal ini berarti bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sumedang pada umumnya cocok untuk pengembangan sistem pertanian dan perkebunan, dan baik untuk hampir semua jenis tanaman budidaya. Sebagian besar lahan di Kabupaten Sumedang merupakan lahan pertanian sebanyak 125.138 hektar, dan sisanya sebanyak 27.082 hektar merupakan lahan bukan pertanian.

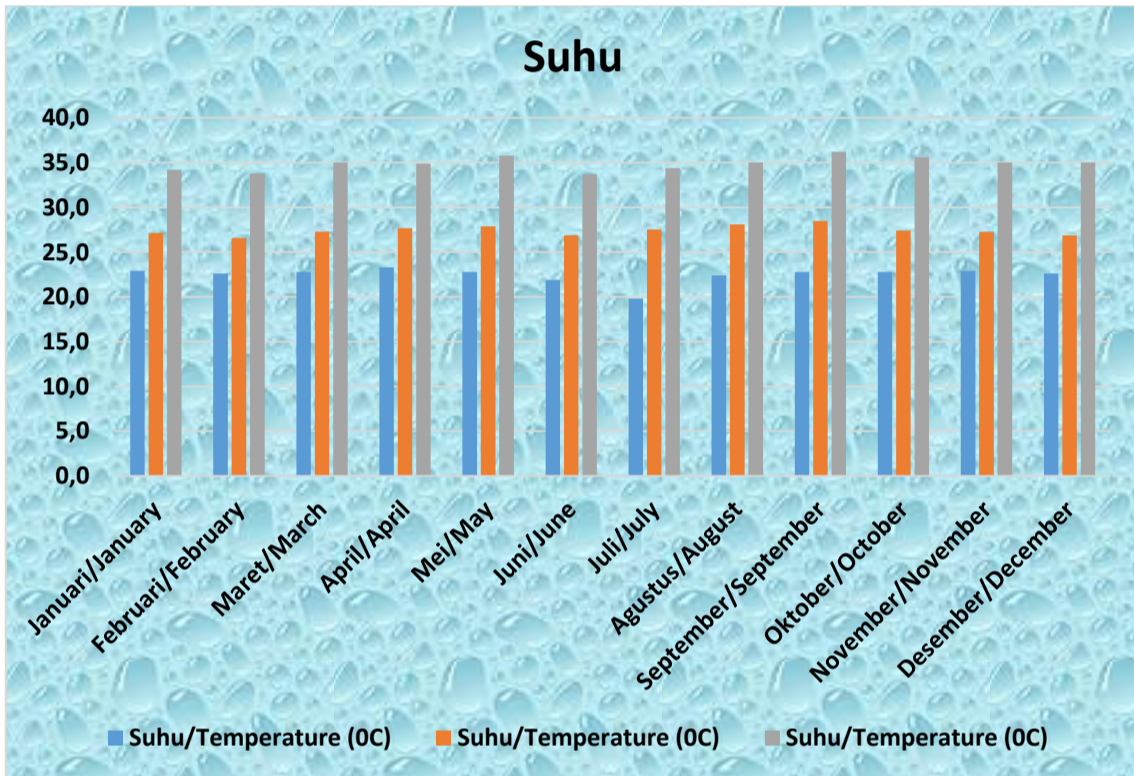
**Tabel 1.2**  
**Iklim Per Bulan Berdasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2022**

Bulan / Month	Suhu/Temperature (0C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Januari/January	22,9	27,2	34,2	51,0	85,8	98,0
Februari/February	22,6	26,6	33,8	64,0	88,9	99,0
Maret/March	22,8	27,3	35,0	56,0	88,7	99,0
April/April	23,3	27,7	34,9	60,0	87,2	98,0
Mei/May	22,8	27,9	35,8	52,0	85,3	99,0



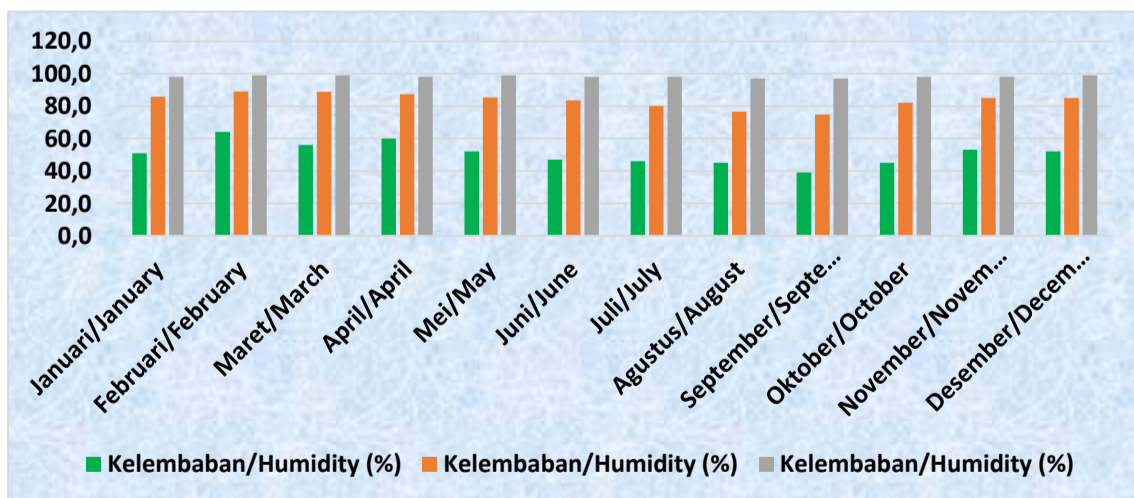


Bulan / Month	Suhu/Temperature (0C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Juni/June	21,9	26,9	33,7	47,0	83,5	98,0
Juli/July	19,8	27,5	34,4	46,0	80,0	98,0
Agustus/August	22,4	28,1	35,0	45,0	76,5	97,0
September/September	22,8	28,5	36,2	39,0	74,8	97,0
Oktober/October	22,8	27,4	35,6	45,0	82,0	98,0
November/November	22,9	27,3	35,0	53,0	85,0	98,0
Desember/December	22,6	26,9	35,0	52,0	85,0	99,0



Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2022, BPS

**Grafik 1.1**  
**Kelembaban**





Bulan / Month	Kecepatan Angin (m/det) Wind Velocity (m/sec)			Tekanan Udara Atmospheric Pressure (mb)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
-1	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Januari/January	0,0	2,0	12,0	999,8	1004,7	1009,4
Februari/February	0,0	1,5	9,0	999,3	1003,8	1007,6
Maret/March	0,0	1,3	12,0	998,3	1003,4	1008,1
April/April	0,0	1,4	10,0	999,3	1003,9	1008,0
Mei/May	0,0	1,2	8,0	999,5	1004,0	1007,9
Juni/June	0,0	1,0	7,0	1000,7	1004,5	1007,4
Juli/July	0,0	1,4	9,0	1000,2	1004,2	1009,5
Agustus/August	0,0	2,1	12,0	1000,7	1004,5	1007,8
September/September	0,0	1,4	8,0	999,0	1005,1	1009,3
Oktober/October	0,0	1,3	13,0	999,8	1004,5	1008,4
November/November	0,0	1,0	9,0	998,6	1003,9	1008,4
Desember/December	0,0	1,4	10,0	997,7	1003,3	1008,5

Berdasarkan Tabel di atas sepanjang tahun 2022 suhu udara maksimum rata-rata berada pada bulan September 28,94 dan terendah pada bulan Desember 26,87, Kelembaban maksimum rata-rata berada pada bulan Desember 87,83 dan terendah pada bulan September 68,85, Kecepatan angin maksimum rata-rata berada pada bulan September 1,54 menit/detik dan terendah pada bulan November 0,61 menit/detik, Tekanan Udara maksimum rata-rata berada pada bulan Februari 1 005,79 dan terendah pada bulan Desember 1 003,19, Curah Hujan maksimum berada pada bulan Februari 607 mm sebanyak 24 hari dan terendah pada bulan September 32 mm sebanyak 3 hari dan Penyinaran Matahari maksimum berada pada bulan September 94,67 % dan terendah pada bulan Februari 44,48 %.

Jumlah curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan tertinggi sepanjang Tahun 2022 di Kabupaten Sumedang terjadi pada Bulan Maret dan Bulan April 2022 yang mencapai 431,9 mm<sup>3</sup> dan 421,0 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan 24. Jumlah curah hujan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 tercatat sebesar 3.064,7 mm<sup>3</sup> dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada setiap bulannya terdapat hari hujan.

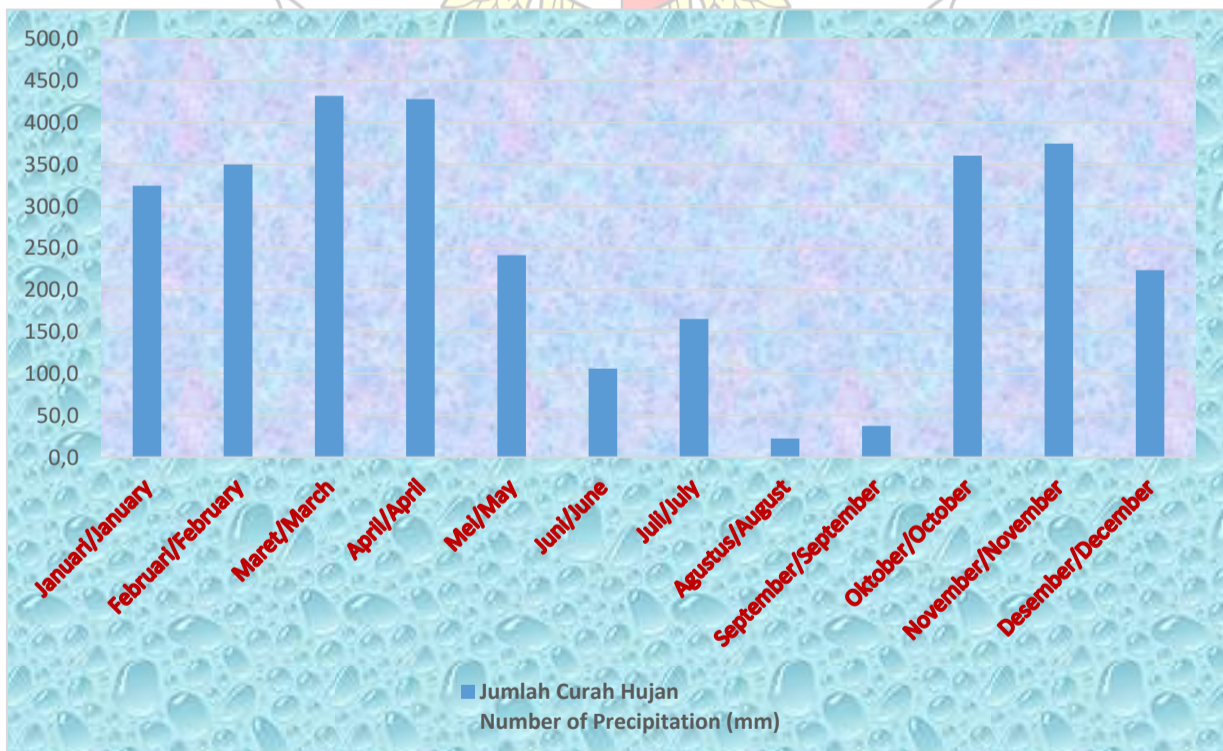
Adapun gambaran atas penjelasan tersebut dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut :



**Tabel 1.3**  
**Jumlah Hari Curah Hujan Menurut Bulan**  
**Pada Tahun 2022**

Bulan / Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
-1	-14	-15	-16
Januari/January	324,4	21	4,4
Februari/February	349,8	23	2,9
Maret/March	431,9	22	4,4
April/April	428,0	22	5,6
Mei/May	241,3	18	5,0
Juni/June	105,8	17	4,5
Juli/July	165,2	11	6,3
Agustus/August	22,3	2	6,8
September/September	37,3	6	6,0
Oktober/October	360,4	19	3,5
November/November	374,6	21	4,0
Desember/December	223,7	23	3,1

**JUMLAH CURAH HUJAN**  
**NUMBER OF PRECIPITATION (MM)**



Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2022



Adapun berdasarkan penggunaan lahan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan Lindung geologi; dan
7. Kawasan Lindung lainnya

b. Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan Hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perikanan;
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
6. Kawasan peruntukan industri;
7. Kawasan peruntukan pariwisata;
8. Kawasan peruntukan permukiman; dan
9. Kawasan peruntukan lainnya

c. **Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 1.187.620 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin meliputi 598.352 jiwa atau 50,45% penduduk laki-laki dan 589.268 jiwa atau 49,55% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 99.246 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 12.009 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.



**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	WADO	22.942	22.041	44.983
2	JATINUNGGAL	23.466	23.020	46.486
3	DARMARAJA	18.944	18.653	37.597
4	CIBUGEL	12.844	12.330	25.174
5	CISITU	15.664	15.426	31.090
6	SITURAJA	21.732	21.403	43.135
7	CONGGEANG	14.578	14.831	29.409
8	PASEH	19.386	19.345	38.731
9	SURIAN	6.014	5.995	12.009
10	BUAHDUA	16.579	16.898	33.477
11	TANJUNGSARI	43.791	43.140	86.931
12	SUKASARI	17.465	16.916	34.381
13	PAMULIHAN	32.341	31.841	64.182
14	CIMANGGUNG	46.077	44.474	90.551
15	JATINANGOR	47.045	45.693	92.738
16	RANCAKALONG	21.089	20.835	41.924
17	SUMEDANG SELATAN	41.322	40.801	82.123
18	SUMEDANG UTARA	51.023	50.246	101.269
19	GANEAS	13.332	13.020	26.352
20	TANJUNGGERTA	17.874	17.411	35.285
21	TANJUNGMEDAR	13.434	13.522	26.956
22	CIMALAKA	31.983	31.414	63.397
23	CISARUA	10.755	10.594	21.349
24	TOMO	11.711	11.912	23.623
25	UJUNGJAYA	15.752	16.028	31.780
26	JATIGEDE	11.209	11.479	22.688
	<b>JUMLAH</b>	<b>598.352</b>	<b>589.268</b>	<b>1.187.620</b>

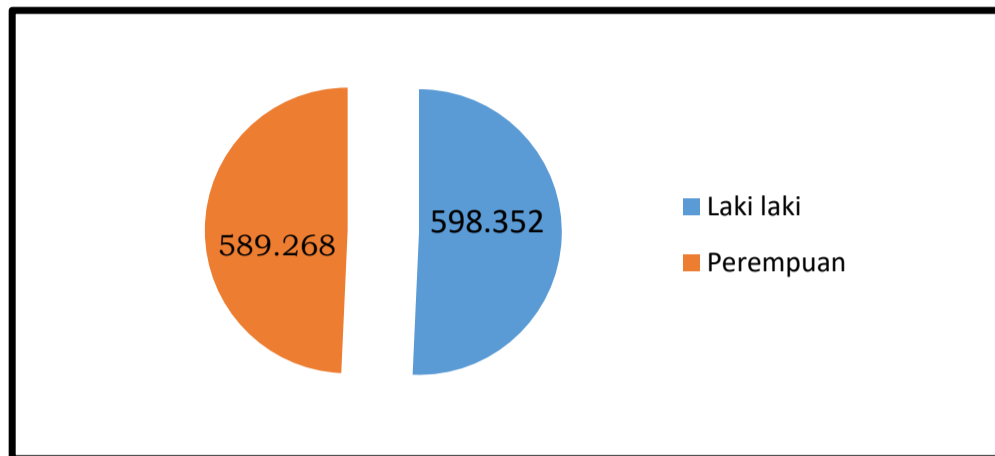
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, Per 30 Desember 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang semester II tahun 2022 berjumlah 1.187.620 jiwa, mengalami kenaikan 1,94% dibandingkan tahun sebelumnya semester II (tahun 2021) yang berjumlah 1.165.047 jiwa. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 sebanyak 427.146 keluarga dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 2,78.



Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 762 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 101,54%, artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Berikut dapat digambarkan dalam grafik dan tabel dibawah ini.

**Grafik 1.2**  
**Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk**



**Tabel 1.2**  
**Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio**

Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>	Sex Ratio
762 Jiwa	101,54%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang (diolah) 2022

## 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15 – 64 tahun dengan prosentase sebesar 66,20% atau sebanyak 771.259 jiwa sisanya 33,80% merupakan penduduk tidak produktif sebesar 393.788 jiwa yaitu terdiri dari penduduk usia 0 – 14 tahun yaitu sebesar 305.610 jiwa dan penduduk usia lanjut yaitu usia 59 tahun ke atas sebesar 88.178 jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Sumedang yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.

Pada tahun 2022, penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang berjumlah 771.259 jiwa, sedangkan penduduk non-produktif berjumlah 393.788 jiwa, sehingga Angka Ketergantungannya 51,06%. Angka Ketergantungan adalah persentase jumlah penduduk non produktif atas penduduk produktif. Rumusnya yaitu jumlah penduduk non-produktif dibagi penduduk yang produktif dikalikan



100%. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 51 orang penduduk usia non-produktif.

Dari data di bawah dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memberdayakan guna membangun Kabupaten Sumedang. Jumlah penduduk terbesar pada usia produktif ini merupakan modal dasar dalam pembangunan. Program-program pemerintah hendaknya mengarah kepada pendayagunaan penduduk pada usia ini.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang**  
**Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022**

No.	Kelompok Umur	Jumlah	
		n (jiwa)	%
1	2	3	4
1.	0 - 4	63.855	5,38
2.	5 - 9	92.871	7,98
3.	10 - 14	96.639	8,16
4.	15 - 19	79.115	7,08
5.	20 - 24	95.418	7,89
6.	25 - 29	92.081	7,68
7.	30 - 34	86.330	6,95
8.	35 - 39	75.717	6,95
9.	40 - 44	88.514	7,12
10.	45 - 49	76.251	6,58
11.	50 - 54	79.744	6,48
12.	55 - 59	71.349	5,69
13.	60 - 64	61.121	4,67
14.	65 - 69	47.329	3,60
15.	70 - 74	35.333	2,56
16.	> 75	45.953	4,07
<b>Jumlah</b>		<b>1.187.620</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, 2022

### 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat tergambarkan dalam tabel berikut :



**Tabel 1.6**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1	2	3	4
1.	Tidak/belum kerja	235.585	19,84
2.	Mengurus Rumah Tangga	323.526	27,24
3.	Pelajar /Mahasiswa	201.296	16,95
4.	Pensiunan	11.484	0,97
5.	PNS	14.864	1,25
6.	Petani / Pekebun	65879	5,55
7.	Pegawai swasta	73.291	6,17
8.	Buruh Harian Lepas	56.975	4,80
9.	Pedagang	15.414	1,30
10.	Wiraswasta	153.077	12,89
11.	Lain-lain	36.229	3,05
<b>Jumlah</b>		<b>1.187.620</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Berdasarkan jenis pekerjaan, masyarakat Kabupaten Sumedang mayoritas masih didominasi oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 27,24 %, Petani/Pekebun sebesar 5,60 %, pegawai swasta sebesar 5,55 %, bekerja sebagai buruh harian lepas sebesar 4,80% kemudian pegawai negeri sipil sebesar 1,25%. Kondisi penduduk yang belum / tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 235.585 jiwa atau sebesar 19,84 %, kondisi tersebut dikarenakan penduduk yang berusia tidak produktif yaitu usia 0-4 tahun dan > 59 tahun, dan sisanya merupakan pelajar/mahasiswa dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Sumedang masih cukup baik karena prosentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 79,72% sedangkan sisanya adalah belum / tidak bekerja dan masih berstatus pelajar.

#### 4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.7**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang**  
**Berdasarkan Pendidikan**

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum sekolah	206.146
2.	Belum tamat SD/ sederajat	108.297





No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
3.	Tamat SD/ sederajat	369.096
4.	SLTP/ sederajat	211.406
5.	SLTA/ sederajat	232.736
6.	D-1 dan D-2	3.673
7.	D-3 (Sarjana Muda)	12.619
8.	D-4 / S-1	40.984
9.	S-2	2.495
10.	S-3	168
<b>Jumlah</b>		<b>1.187.620</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2022

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 40.984 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 232.736 jiwa, SLTP/sederajat 211.406 jiwa, tidak/belum sekolah sebanyak 206.146 jiwa dan tamat SD/sederajat sebanyak 369.096 jiwa.

**d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang**

Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 Kecamatan, 270 Desa dan 7 Kelurahan, dengan nama-nama Kecamatan, Desa/Kelurahan seagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.8**  
**Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan**  
**Di Kabupaten Sumedang**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
1	Wado	10	1. Cimungkal	Desa
			2. Ganjarresik	Desa
			3. Cilengkrang	Desa
			4. Cikareo Selatan	Desa
			5. Cikareo Utara	Desa
			6. Wado	Desa
			7. Mulyajaya	Desa
			8. Sukajadi	Desa
			9. Cisurat	Desa
			10. Sukapura	Desa
2	Jatinunggal	9	1. Sirnasari	DESA
			2. Tarikolot	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			3. Sarimekar	Desa
			4. Banjarsari	Desa
			5. Sukamanah	Desa
			6. Cipeundeuy	Desa
			7. Cimanintin	Desa
			8. Pawenang	Desa
			9. Kirisik	Desa
3	Darmaraja	12	1. Darmaraja	Desa
			2. Darmajaya	Desa
			3. Sukamenak	Desa
			4. Sukaratu	Desa
			5. Cikeusi	Desa
			6. Cipeuteuy	Desa
			7. Cieunteung	Desa
			8. Karangpakuan	Desa
			9. Pakualam	Desa
			10. Neglasari	Desa
			11. Tarunajaya	Desa
			12. Ranggon	Desa
4	Cibugel	7	1. Jayamekar	Desa
			2. Buanamekar	Desa
			3. Cibugel	Desa
			4. Cipasang	Desa
			5. Tamansari	Desa
			6. Suka Raja	Desa
			7. Jayamandiri	Desa
5	Cisitu	10	1. Cisitu	Desa
			2. Situmekar	Desa
			3. Pajagan	Desa
			4. Cigintung	Desa
			5. Sundamekar	Desa
			6. Linggajaya	Desa
			7. Ranjeng	Desa
			8. Cilopang	Desa
			9. Cimarga	Desa
			10. Cinangsi	Desa
6	Situraja	15	1. Situraja Utara	Desa
			2. Situraja	Desa
			3. Mekarmulya	Desa
			4. Cikadu	Desa
			5. Kaduwulung	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			6. Karangheuleut	Desa
			7. Cijeler	Desa
			8. Ambit	Desa
			9. Malaka	Desa
			10. Sukatali	Desa
			11. Pamulihan	Desa
			12. Jatimekar	Desa
			13. Bangbayang	Desa
			14. Cijati	Desa
			15. Cicarimanah	Desa
7	Conggeang	12	1. Conggeang Kulon	Desa
			2. Conggeang Wetan	Desa
			3. Cipamekar	Desa
			4. Cibeureuyeuh	Desa
			5. Jambu	Desa
			6. Babakan Asem	Desa
			7. Padaasih	Desa
			8. Ungkal	Desa
			9. Karanglayung	Desa
			10. Cacaban	Desa
			11. Narimbang	Desa
			12. Cibubuan	Desa
8	Paseh	10	1. Paseh Kidul	Desa
			2. Paseh Kaler	Desa
			3. Legok Kidul	Desa
			4. Legok Kaler	Desa
			5. Bongkok	Desa
			6. Padanaan	Desa
			7. Pasireungit	Desa
			8. Cijambe	Desa
			9. Haur Kuning	Desa
			10. Citepok	Desa
9	Surian	9	1. Wanasari	Desa
			2. Wanajaya	Desa
			3. Pamekarsari	Desa
			4. Tanjung	Desa
			5. Surian	Desa
			6. Suriamukti	Desa
			7. Suriamedal	Desa
			8. Ranggalasari	Desa
			9. Nanjungwangi	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
10	Buahdua	14	1. Buahdua	Desa
			2. Hariang	Desa
			3. Karangbungur	Desa
			4. Mekarmukti	Desa
			5. Citaleus	Desa
			6. Nagrak	Desa
			7. Cibitung	Desa
			8. Sekarwangi	Desa
			9. Gendereh	Desa
			10. Panyindangan	Desa
			11. Cilangkap	Desa
			12. Bojongloa	Desa
			13. Cikurubuk	Desa
			14. Ciawitali	Desa
11	Tanjungsari	12	1. Gudang	Desa
			2. Tanjungsari	Desa
			3. Jatisari	Desa
			4. Margaluyu	Desa
			5. Kutamandiri	Desa
			6. Margajaya	Desa
			7. Raharja	Desa
			8. Cijambu	Desa
			9. Pasigaran	Desa
			10. Gunungmanik	Desa
			11. Kadakajaya	Desa
			12. Cinanjung	Desa
12	Sukasari	7	1. Sukasari	Desa
			2. Genteng	Desa
			3. Banyuresmi	Desa
			4. Nangerang	Desa
			5. Mekarsari	Desa
			6. Sindangsari	Desa
			7. Sukarapih	Desa
13	Pamulihan	11	1. Cigendel	Desa
			2. Cijeruk	Desa
			3. Pamulihan	Desa
			4. Haurgombong	Desa
			5. Cilembu	Desa
			6. Cimarias	Desa
			7. Cinangerang	Desa
			8. Mekarbakti	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			9. Sukawangi	Desa
			10. Ciptasari	Desa
			11. Citali	Desa
14	Cimanggung	11	1. Cimanggung	Desa
			2. Sindangpakuon	Desa
			3. Tegalmanggung	Desa
			4. Sindulang	Desa
			5. Sindanggalih	Desa
			6. Sawahdadap	Desa
			7. Cikahuripan	Desa
			8. Sukadana	Desa
			9. Mangunarga	Desa
			10. Cihanjuang	Desa
			11. Pasirnanjung	Desa
15	Jatinangor	12	1. Cikeruh	Desa
			2. Hegarmanah	Desa
			3. Cibeusi	Desa
			4. Cipacing	Desa
			5. Sayang	Desa
			6. Mekargalih	Desa
			7. Cintamulya	Desa
			8. Jatimukti	Desa
			9. Cisempur	Desa
			10. Jatiroke	Desa
			11. Cileles	Desa
			12. Cilayung	Desa
16	Rancakalong	10	1. Nagarawangi	Desa
			2. Cibunar	Desa
			3. Pangadegan	Desa
			4. Sukahayu	Desa
			5. Sukamaju	Desa
			6. Pamekaran	Desa
			7. Rancakalong	Desa
			8. Sukasirnarasa	Desa
			9. Cibungur	Desa
			10. Pasirbiru	Desa
17	Sumedang Selatan	14	1. Sukagalih	Desa
			2. Baginda	Desa
			3. Cipancar	Desa
			4. Citengah	Desa
			5. Gunasari	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			6. Sukajaya	Desa
			7. Margamekar	Desa
			8. Ciherang	Desa
			9. Margalaksana	Desa
			10. Mekar Rahayu	Desa
			11. Regolwetan	Kelurahan
			12. Kotakulon	Kelurahan
			13. Pasanggrahan Baru	Kelurahan
			14. Cipameungpeuk	Kelurahan
18	Sumedang Utara	13	1. Padasuka	Desa
			2. Mulyasari	Desa
			3. Girimukti	Desa
			4. Mekarjaya	Desa
			5. Margamukti	Desa
			6. Sirnamulya	Desa
			7. Kebonjati	Desa
			8. Jatihurip	Desa
			9. Jatimulya	Desa
			10. Rancamulya	Desa
			11. Kotakaler	Kelurahan
			12. Situ	Kelurahan
			13. Talun	Kelurahan
19	Ganeas	8	1. Ganeas	Desa
			2. Dayeuhluhur	Desa
			3. Cikoneng	Desa
			4. Sukaluyu	Desa
			5. Sukawening	Desa
			6. Tanjunghurip	Desa
			7. Cikondang	Desa
			8. Cikoneng Kulon	Desa
20	Tanjungkerta	12	1. Sukamantri	Desa
			2. Cipanas	Desa
			3. Gunturmekar	Desa
			4. Mulyamekar	Desa
			5. Banyuasih	Desa
			6. Kertamekar	Desa
			7. Kertaharja	Desa
			8. Cigentur	Desa
			9. Tanjungmekar	Desa
			10. Tanjungmulya	Desa
			11. Boros	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
21	Tanjungmedar	9	12. Awilega	Desa
			1. Cikaramas	Desa
			2. Wargaluyu	Desa
			3. Jingkang	Desa
			4. Kamal	Desa
			5. Kertamukti	Desa
			6. Tanjungwangi	Desa
			7. Sukamukti	Desa
			8. Sukatani	Desa
9. Tanjungmedar	Desa			
22	Cimalaka	14	1. Cimalaka	Desa
			2. Galudra	Desa
			3. Cibeureum Kulon	Desa
			4. Naluk	Desa
			5. Nyalindung	Desa
			6. Trunamanggala	Desa
			7. Cikole	Desa
			8. Cibeureum Wetan	Desa
			9. Mandalaherang	Desa
			10. Licin	Desa
			11. Citimun	Desa
			12. Serang	Desa
			13. Padasari	Desa
			14. Cimuja	Desa
23	Cisarua	7	1. Cisarua	Desa
			2. Ciuyah	Desa
			3. Cimara	Desa
			4. Bantarmara	Desa
			5. Cipandanwangi	Desa
			6. Cisalak	Desa
			7. Kebon Kalapa	Desa
24	Tomo	9	1. Tomo	Desa
			2. Tolengas	Desa
			3. Darmawangsi	Desa
			4. Marongge	Desa
			5. Jembarwangi	Desa
			6. Bugel	Desa
			7. Cipeles	Desa
			8. Karyamukti	Desa
			9. Mekarwangi	Desa



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
25	Ujungjaya	9	1. Ujungjaya	Desa
			2. Palabuan	Desa
			3. Palasari	Desa
			4. Keboncau	Desa
			5. Sakurjaya	Desa
			6. Kudangwangi	Desa
			7. Sukamulya	Desa
			8. Cipelang	Desa
			9. Cibuluh	Desa
26	Jatigede	11	1. Cijeungjing	Desa
			2. Kadujaya	Desa
			3. Lebaksiuh	Desa
			4. Cintajaya	Desa
			5. Copicung	Desa
			6. Mekarasih	Desa
			7. Ciranggem	Desa
			8. Cisampih	Desa
			9. Jemah	Desa
			10. Karedok	Desa
			11. Kadu	Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang 2022

#### e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa jenis perangkat daerah pada Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan serta Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaksud, juga mengatur mengenai kriteria tipologi perangkat daerah, kelembagaan rumah sakit daerah, nomenklatur perangkat daerah serta jabatan perangkat daerah. Implementasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Namun pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah





serta Peraturan lainnya tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum. Beberapa perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah ini meliputi aspek perubahan bentuk kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipologi B sebagaimana hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dengan pertimbangan aspek efektivitas pelaksanaan urusan, terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga pengalihan urusan pemerintahan ini berdampak pada perubahan nomenklatur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial dengan Tipologi A, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan disertai dengan peningkatan Tipologi yang semula Tipe B menjadi Tipe A. Selanjutnya perubahan kelembagaan Rumah sakit Daerah yang semula berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi unit organisasi bersifat khusus dibawah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aspek nomenklatur, dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah yaitu, yang semula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Aspek terakhir yang dilakukan adalah penyesuaian jabatan perangkat daerah khusus pada rumah sakit daerah.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Susunan Perangkat Daerah dimaksud, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah tipe A;



- b. Sekretariat DPRD tipe A,
- c. Inspektorat Daerah tipe A,
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggara sebagian Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  6. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
  7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
  8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  12. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggara Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;



13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
  14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian ;
  15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
  17. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
  18. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
  19. Dinas Perikanan Dan Peternakan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Peternakan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan ;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan Keuangan;
  4. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Buahdua tipe A;
  2. Kecamatan Cimalaka tipe A;
  3. Kecamatan Cimanggung tipe A;
  4. Kecamatan Conggeang tipe A;
  5. Kecamatan Darmaraja tipe A;
  6. Kecamatan Jatigede tipe A;
  7. Kecamatan Jatinangor tipe A;
  8. Kecamatan Pamulihan tipe A;
  9. Kecamatan Paseh tipe A;
  10. Kecamatan Situraja tipe A;
  11. Kecamatan Sumedang Selatan tipe A;
  12. Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
  13. Kecamatan Tanjungkerta tipe A;
  14. Kecamatan Tanjungsari tipe A;
  15. Kecamatan Wado tipe A;
  16. Kecamatan Jatinunggal tipe A;
  17. Kecamatan Rancakalong tipe A;
  18. Kecamatan Tomo tipe A;
  19. Kecamatan Ujungjaya tipe A;
  20. Kecamatan Cibugel tipe A;
  21. Kecamatan Cisarua tipe A;
  22. Kecamatan Cisitu tipe A;
  23. Kecamatan Ganeas tipe A;
  24. Kecamatan Sukasari tipe A;
  25. Kecamatan Surian tipe A;
  26. Kecamatan Tanjungmedar tipe A;
- g. Kantor terdiri dari :
- a. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah data pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang per 30 Desember 2022 sebanyak 8.636 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.9**

**Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

No.	Perangkat Daerah	Pejabat Struktural			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah Seluruh
		II	III	IV			
1	Sekretariat Daerah	5	11	4	25	129	174
2	Sekretariat DPRD	1	3	2	7	15	28
3	Inspektorat	1	5	1	44	14	65
4	Dinas Pendidikan	1	4	10	4762	269	5046
5	Dinas Kesehatan	1	5	41	823	79	949
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	5	22	13	146	186
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	4	2	8	30	45
8	Dinas Sosial	1	3	1	9	17	31
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	5	4	16	13	39
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	4	12	13	133	163
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	3	1	5	24	33
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	5	2	8	23	39
13	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	5	24	5	14	49
14	Dinas Perhubungan	1	5	17	5	32	60
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1	5	2	8	23	39
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	5	9	13	37	65
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	5	1	9	19	35
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	5	1	12	25	44
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	4	1	28	10	44
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	5	58	86	43	193
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	1	4	25	22	20	72
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1	6	2	15	32	56
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	4	2	14	22	42
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	5	9	4	39	58
25	Badan Pendapatan Daerah	1	5	9	2	35	52



No.	Perangkat Daerah	Pejabat Struktural			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah Seluruh
		II	III	IV			
26	Satuan Polisi Pamong Praja	1	5	19	30	15	70
27	Rumah Sakit Umum Daerah	1	7	1	380	85	474
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	4	1	0	9	15
29	Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Badan Bencana		1	4	0	10	15
30	Kecamatan Jatinangor		2	7	0	12	21
31	Kecamatan Cimanggung		2	7	0	7	16
32	Kecamatan Tanjungsari		2	7	0	10	19
33	Kecamatan Pamulihan		1	7	0	11	19
34	Kecamatan Sumedang Selatan		1	28	0	12	41
35	Kecamatan Sumedang Utara		2	22	0	16	40
36	Kecamatan Cimalaka		2	7	0	10	19
37	Kecamatan Paseh		2	7	0	7	16
38	Kecamatan Darmaraja		2	7	0	14	23
39	Kecamatan Situraja		2	5	0	12	19
40	Kecamatan Wado		2	5	0	4	11
41	Kecamatan Rancakalong		2	7	0	8	17
42	Kecamatan Tanjungkerta		2	6	0	5	13
43	Kecamatan Conggeang		2	7	0	7	16
44	Kecamatan Buahdua		1	6	0	7	14
45	Kecamatan Jatinunggal		2	6	0	4	12
46	Kecamatan Jatigede		2	7	0	6	15
47	Kecamatan Tomo		2	5	0	2	9
48	Kecamatan Ujungjaya		1	7	0	9	17
49	Kecamatan Cisit		2	7	0	6	15
50	Kecamatan Sukasari		2	7	0	6	15
51	Kecamatan Ganeas		2	6	0	3	11
52	Kecamatan Cisarua		2	7	0	8	17
53	Kecamatan Cibugel		2	6	0	5	13
54	Kecamatan Tanjungmedar		1	6	0	6	13
55	Kecamatan Surian		2	7	0	4	13
	<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>184</b>	<b>493</b>	<b>6366</b>	<b>1563</b>	<b>8635</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Sumedang 30 Desember 2022



#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target pendapatan daerah sebesar Rp. 2.976.931.534.658,00 terealisasi sebesar Rp. 2.742.302.348.926,26 atau 92,12%, dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3.180.852.190,00 terealisasi sebesar Rp. 2.508.111.059.375,00 atau 78,85%.

Dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.742.302.348.926,26 diperhitungkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.508.111.059.375,00 dan realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp. 108.604.646.639,61, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah sebesar Rp. 220.009.696.280,90. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2022 dapat melakukan efisiensi anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.10**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.976.931.534.658,00</b>	<b>2.742.302.348.926,26</b>	<b>92,12</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>531.458.638.880,00</b>	<b>457.051.458.858,26</b>	<b>86,00</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	237.977.066.250,00	210.992.206.126,00	88,66
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.129.543.526,00	7.732.139.319,00	47,94
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.638.338.095,00	12.643.497.231,00	100,04
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	264.713.691.009,00	225.683.616.182,26	85,26
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.445.472.895.778,00</b>	<b>2.283.176.104.768,00</b>	<b>93,36</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.106.844.724.840,00	1.983.393.241.645,00	94,14
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	338.628.170.938,00	299.782.863.123,00	88,53
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>2.074.785.300,00</b>	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0	2.074.785.300,00	
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.180.852.190.097,00</b>	<b>2.508.111.059.375,00</b>	<b>78,85</b>



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.174.405.964.869,00</b>	<b>1.788.874.414.235,00</b>	<b>82,27</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.236.237.935.089,00	1.103.250.173.080,00	89,24
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	852.462.461.630,00	631.057.827.851,00	74,03
5.1.03.	Belanja Bunga			
5.1.04.	Belanja Subsidi	180.000.000,00		
5.1.05.	Belanja Hibah	78.151.107.250,00	48.500.706.104,00	62,06
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	7.374.460.900,00	6.065.707.200,00	82,25
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>559.478.453.307,00</b>	<b>331.035.305.347,00</b>	<b>59,17</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	27.617.607.139,00	10.904.022.000,00	39,48
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.796.306.905,00	131.493.289.117,00	63,89
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.848.591.707,00	97.342.388.261,00	72,19
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	168.281.110.039,00	78.410.364.356,00	46,59
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.339.837.517,00	12.595.648.613,00	56,38
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	595.000.000,00	289.593.000,00	48,67
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>56.399.750.921,00</b>	<b>2.797.269.220,00</b>	<b>4,96</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	56.399.750.921,00	2.797.269.220,00	4,96
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>390.568.021.000,00</b>	<b>385.404.070.573,00</b>	<b>98,68</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	29.487.295.000,00	27.796.484.611,00	94,27
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	361.080.726.000,00	357.607.585.962,00	99,04
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(203.920.655.439,00)</b>	<b>234.191.289.551,26</b>	<b>(114,84)</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumedang 2022

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintahan Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2023 dilaksanakan atas dasar permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada disusun dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi pada akhir tahun ke-lima.

Pada awal Tahun 2022, RPJMD telah dilaksanakan selama dua Tahun. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas capaian perencanaan pembangunan sampai





dengan tahun ke-23 pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Capaian tersebut telah diuraikan pada Bab II kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang atas capaian kinerja pelayanan pemerintah di seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Kinerja pembangunan periode Tahun 2018 sampai Tahun 2022 sebagian besar telah memenuhi target sebagaimana tercantum pada RPJMD Tahun 2018-2023. Akan tetapi pada Tahun 2022 telah terjadi beberapa kondisi yang menyebabkan asumsi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi tidak sesuai dengan perkembangan Kabupaten Sumedang di masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian, terutama berkenaan dengan kodefikasi dan dampak kondisi Pandemi Covid-19.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Sumedang dapat dianalisis dengan menggunakan metode *gap analysis* atau analisis dengan membandingkan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Apabila terdapat gap maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar pada akhir Tahun RPJMD, kesejahteraan masyarakat tetap tercapai sesuai yang direncanakan yaitu masyarakat Sumedang yang SIMPATI. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Permasalahan yang saat ini telah teridentifikasi secara garis besar dapat dibagi dalam dua cakupan permasalahan, yaitu yang pertama identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan yang kedua adalah identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada urusan penyelenggaraan pemerintah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan. Adapun masing-masing identifikasi



permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan, masih tidak meratanya distribusi diantara kelompok masyarakat, dan rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Pandemi Covid-19 di awal Tahun 2019, mendorong pemerintah Kabupaten Sumedang harus merelokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak terkait penanganan Pandemi Covid-19. Berdasarkan kondisi tersebut, maka di Kabupaten Sumedang masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 1.11**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kemiskinan 10,26% pada Tahun 2020 masih sangat tinggi dibandingkan dengan target SDG's (0%);</li> <li>• Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi selama 5 Tahun terakhir (Tahun 2015 sebesar 0,349 meningkat menjadi 0,384 di Tahun 2020);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pelayanan dasar (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) masih terbatas dan belum merata;</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam;</li> <li>• Produktivitas sumber daya manusia yang masih rendah;</li> <li>• Kebijakan yang belum menerapkan konsep <i>pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment</i></li> <li>• dengan memperhatikan <i>community empowerment</i>;</li> </ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka semakin meningkat (7,15% pada Tahun 2019 meningkat menjadi 9,89% pada Tahun 2020).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya sistem pengembangan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan (pelatihan wirausaha, pendampingan usaha bantuan perijinan, akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan)</li> </ul>
2	Kualitas Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas jalan dan jembatan masih rendah;</li> <li>Kualitas infrastruktur perhubungan masih rendah;</li> <li>Kualitas permukiman dan sarana prasarana pendukungnya masih rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan prioritas kebutuhan layanan infrastruktur dasar tidak memadai (data dan informasi sebagai landasan pembuatan kebijakan sangat kurang);</li> <li>Perencanaan kurang terkoordinasi.</li> </ul>
3.	Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian IPM Kab. Sumedang masih dibawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat;</li> <li>Angka Harapan Hidup masih dibawah capaian provinsi;</li> <li>Rata-rata lama sekolah masih dibawah capaian provinsi;</li> <li>Harapan Lama sekolah masih dibawah standar UNDP;</li> <li>Pengeluaran per kapita masih dapat ditingkatkan seiring dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur tur penunjang layanan dasar;</li> <li>Masih kurangnya kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;</li> <li>Jangkauan akses ke pelayanan dasar terbatas karena ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas.</li> </ul>
4.	Struktur Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB;</li> <li>Kontribusi sektor swasta masih rendah (minat investasi rendah); Pertumbuhan sektor industri belum berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.</li> <li>Capaian PDRB Kabupaten Sumedang masih rendah (peringkat 14 dari total 27 kabupaten kota di Jabar Tahun 2020);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada sistem yang menyediakan akses permodalan dan pemasaran produk lokal;</li> <li>Pemanfaatan SDA lokal belum optimal; Belum terdorongnya produk-produk unggulan sebagai penciptaan peningkatan ekonomi rakyat masyarakat Kab. Sumedang.</li> <li>Pertumbuhan nilai tambah pada sektor pertanian masih rendah.</li> </ul>
5.	Rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen pemerintahan yang kurang baik;</li> <li>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berada pada posisi 83,80 (survei Tahun 2020).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesionalisme aparatur masih rendah dengan beban yang ada;</li> <li>Prosedur kerja sesuai standar pelayanan yang baik masih belum tersedia;</li> <li>Sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai.</li> </ul>

Sumber : FGD P-RPJMD



## 2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merinci permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah di Kabupaten Sumedang yang menjadi hak dan kewajiban setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.





**Tabel 1.12**

**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas**

No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
<b>PRIORITAS AKSELERASI PELAYANAN DASAR</b>				
1	Urusan Pendidikan	Masih rendahnya APK PAUD Sederajat	1. Masih kurangnya standar pelayanan pendidikan tingkat Usia Dini; 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan tingkat usia dini;	1. Melakukan pembinaan standar pendidikan pada jenjang PAUD; 2. Melakukan sosialisasi pendidikan jenjang PAUD untuk wilayah (kecamatan) yang APK dan APM PAUD nya rendah;
		Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan	1. Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2020, masih pada angka 8,51; 2. Angka partisipasi pada Tahun 2020 masih pada angka 3,00%;	Peningkatan program sekolah Paket A, B dan C;
		Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	Meskipun APK dan APM menunjukkan angka di atas 100 pada tahun 2019 namun terjadi penurunan pada tahun 2020 hal tersebut akibat tidak diketahui distribusi siswa beralamat Sumedang dan Siswa di luar Sumedang yang bersekolah di Sumedang serta siswa beralamat Sumedang bersekolah di luar Sumedang, terutama kelompok margin penduduk usia sekolah Sumedang yang tidak bersekolah.	Koordinasi antara Dinas Kependudukan Dinas Pendidikan merekap/melaporkan anak usia sekolah <i>by name by address</i> .
		Belum memadainya sarana dan prasarana sekolah	1. Belum meratanya ruang Lab IPA di jenjang SD-SMP; 2. Belum meratanya Lab Komputer di jenjang SD-SMP;	Membangun Lab IPA dan Lab Komputer di jenjang SD-SMP;



No	Bidang Urusan / Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Masih rendahnya persentase Guru yang bersertifikasi	Masih adanya guru yang belum berkualifikasi S1 berdampak pada kurangnya jumlah guru yang bersertifikat pendidik;	Melakukan bantuan pendidikan lanjutan untuk guru baik dari Pemerintah maupun Swasta (CSR);
		Karakter siswa harus terus dikembangkan	Asal siswa dari bermacam kalangan dan golongan menghasilkan berbagai macam karakter dan akhlak baik dan kurang baik,	Penyelenggaraan pendidikan berbasis Eksotis dan PERKASA
2	Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan belum optimal	Jumlah Nakes masih Kurang; Jumlah Sarpras (alkes) masih kurang untuk meningkatkan status RS Tipe B ke RS Tipe B Pendidikan; Jumlah tempat tidur rawat inap masih kurang.	Penambahan tenaga kesehatan ; Pengajuan kenaikan status RS Tipe B ke Tipe B Pendidikan; Penambahan jumlah tempat tidur (Pembangunan Rumah Sakit)
		Masih terdapat Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting sebanyak 12,05%	Kurangnya pendamping makanan tambahan ASI	Tersedianya bantuan MP ASI;
		Masih terjadi kasus Kematian Ibu	Belum adanya sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu sehingga adanya keterlambatan penanganan pasien Masih terdapat kasus komplikasi yang lahir di rumah sakit Sumedang dari penduduk di luar Kabupaten Sumedang yang melaporkan; Penanganan ibu hamil dan melahirkan di puskesmas belum sesuai standar karena SDM belum terlatih penanganan kegawatdaruratan neonatal;	Pelatihan penanganan kegawatdaruratan neonatal (Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus)
		Masih terjadi kasus Kematian Bayi	Banyak kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	Peningkatan kondisi dan gizi ibu hamil;
		Masih tingginya rasio Puskesmas per Satuan penduduk	Kurangnya jumlah puskesmas;	Peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) masih terjadi	Kasus DBD mencapai 707 kasus pada Tahun 2020	Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD dengan cara menjaga kebersihan lingkungan
		Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Rasio Bidan per 10.000 penduduk	Tidak ada pengangkatan PNS Nakes, PTT Nakes, maupun TKD Nakes; Kurang diminatinya praktek dokter di Sumedang	Mengadakan perekrutan Nakes dengan pola PPK BLUD; Pengajuan PNS Nakes dan PTT ke Pusat dan Provinsi
		Remaja perokok sebanyak 7,1%	Kurangnya pendidikan karakter pada anak usia sekolah Akses mudah bagi remaja untuk mendapatkan rokok	Penyebaran informasi secara intensif tentang bahaya merokok kepada para remaja Pelaksanaan secara konsisten regulasi kawasan tanpa rokok
		Cakupan peserta UHC 73,17%	Masih banyak penduduk yang tidak terdaftar JKN	Perbarui data DTKS untuk urusan JKN
3	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah tangga bersanitasi	Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat; Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes); Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal belum tersedia sehingga saat ini septitank masih dibuang ke sungai;	1. Menyediakan sarpras sanitasi; 2. Menyediakan tanah untuk sanitasi komunal; 3. Melaksanakan STBM. 4. Menyediakan sanitasi komunal; 5. Penyediaan layanan sedotan tinja.
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;	Menyediakan akses air bersih
		Lingkungan Permukiman Kumuh	Pertumbuhan penduduk miskin; Kurangannya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.	Konsistensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan angka kemiskinan.
		Rasio Rumah Layak Huni	Pertumbuhan penduduk miskin	Konsistensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan angka kemiskinan.



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
4	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase aparaturnya dan kendaraan pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah pegawai Petugas Damkar masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk serta jumlah kendaraan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang	Penambahan personil Petugas Damkar serta penambahan sarana Damkar
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan daerah	Tingginya pelanggaran Perda Masih banyaknya masyarakat yang menduduki lahan pemda secara ilegal	Konsistensi personil Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah
5	Urusan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Masih tingginya jumlah PMKS dan munculnya PMKS baru; belum adanya regulasi daerah tentang penanganan PMKS (penangan ODGJ, orang terlantar, korban bencana, kaum minoritas); Belum sinkronnya data penerima bantuan program pusat dengan data kabupaten/kota	Melakukan pemberdayaan sosial dan menyediakan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial; Penyusunan perda/perbup; Verifikasi data secara rutin.
<b>PRIORITAS PENGUATAN SUMEDANG AGAMIS</b>				
1.	Urusan Pendidikan	Belum semua siswa Pendidikan dasar memiliki sertifikat Diniyah	Belum optimalnya pendidikan dasar Agama Islam bagi siswa sekolah dasar dan menengah;	Melaksanakan program wajib belajar madrasah diniyah selama 4 tahun; Sertifikat diniyah menjadi salah satu persyaratan dalam melanjutkan sekolah ke tingkat menengah bagi siswa muslim.
2.	Urusan Kebudayaan	Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas; Belum optimal kontribusi budayawan lokal dalam pengembangan Kabupaten Sumedang sebagai daerah Puseur Budaya Sunda; Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara); Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya	Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta); Merangkul/mengkoordinasikan budayawan lokal untuk berkontribusi menyumbangkan ide dan gagasan dalam menciptakan suatu produk budaya yang dapat mewujudkan sumedang puseur budaya sunda; Melakukan pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya





No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
<b>PRIORITAS PENGUATAN KETAHANAN DAERAH</b>				
1.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR	1. Masih terbatasnya dokumen RDTR, sehingga yang menjadi dasar perizinan masih berdasarkan pada Perda RTRW Kabupaten; 2. Masih terbatasnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Masih terbatasnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;	1. Tersedianya dokumen RDTR sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW; 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang optimal; 3. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal;
2.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Sumedang merupakan kawasan rawan bencana tinggi	Belum komprehensifnya komunikasi dan informasi tentang rawan bencana	Terlaksananya KIE rawan bencana
		Belum bisa diprediksinya bencana Pandemi COVID 19 akan berakhir	Tingkat kesadaran masyarakat dalam merubah kebiasaan terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru belum optimal	Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid 19
3.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Responsif Gender	Kurangnya pemahaman masyarakat atas responfif gender	1. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan kaum disabilitas 2. Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan dan kepala keluarga disabilitas 3. Sarana publik yang inklusif.
		Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; 2. pemenuhan hak anak; 3. Peningkatan pelayanan korban tindak kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
		Pemberdayaan perempuan	Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan
4.	Urusan Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah dan pertamanan	1. Masih rendahnya cakupan ketersediaan TPS 2. Kurangnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau	1. Peningkatan pengelolaan sampah melalui 3R (recycle, reduce, reuse); 2. Optimalnya Penanganan dan pengurangan sampah



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Air Sungai masih rendah;</li> <li>2. Kualitas Udara masih rendah;</li> <li>3. Kualitas Tutupan Lahan/Vegetasi masih belum optimal</li> <li>4. Kualitas lingkungan hidup masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyerahan TPS dari Kemen PUPR sehingga memudahkan pengelolaan TPS</li> <li>4. Bertambahnya luasan RTH sesuai dengan standar</li> <li>1. Perketat AMDAL pada perusahaan yang mempunyai buangan limbah;</li> <li>2. Penerapan hari bebas kendaraan;</li> <li>3. Penghijauan</li> </ol>
5.	Urusan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skor Pola Pangan Harapan masih pada angka 89,10;</li> <li>2. Rendahnya ketersediaan pangan utama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan kebutuhan gizi;</li> <li>2. Peningkatan cadangan pangan sesuai jumlah penduduk;</li> <li>3. Izin ketat IMB di atas lahan persawahan.</li> </ol>
6.	Urusan Pertanian	Produksi komoditas pertanian yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan luas baku lahan pertanian (banyak pergeseran fungsi lahan pertanian);</li> <li>2. Masih kurangnya peralatan yang dapat mendukung sesuai kondisi geografis (dataran tinggi dan Bukit);</li> <li>3. Ketersediaan sumber air masih minim;</li> <li>4. Perlu adanya integrasi antara kewenangan pertanian (jaringan tersier) dalam hal jaringan irigasi pertanian dengan pupr dalam hal irigasi-pengairan (bendungan- jaringan primer, sekunder);</li> <li>5. Minat pemuda tani untuk bertani berkurang;</li> <li>6. Nilai tambah sektor pertanian komoditas strategis masih rendah;</li> <li>7. Masih adanya daerah rentan pangan (produksi padi tidak stabil, dampak relokasi jatigede);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penerbitan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>2. Perlu penyediaan peralatan pertanian yang mendukung geografis wilayah;</li> <li>3. Perlu penyediaan fasilitas sumber-sumber air dan jaringan irigasi pertanian serta jalan pertanian (infrastruktur pertanian);</li> <li>4. Peningkatan koordinasi antar sektor (leading sektor Bappeda)</li> <li>5. Penguatan pelaku usaha tani berbasis agrobisnis (pelatihan);</li> <li>6. Perlu ditambah pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis (sinergi dengan Dinas Industri dan Perdagangan);</li> <li>7. Penguatan cadangan pangan masyarakat;</li> <li>8. Tersedianya regulasi dalam mendukung diversifikasi pola konsumsi masyarakat;</li> </ol>



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			8. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah (ketergantungan terhadap konsumsi beras masih tinggi); 9. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan segar (penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian); 10. Masih lemahnya pengawasan terhadap pangan segar; 11. Belum memadai sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner, 12. Belum adanya rumah pemotongan hewan; 13. Belum adanya pasar hewan regional	9. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dalam memproduksi komoditas non beras; 10. Penyuluhan masyarakat untuk keamanan pangan segar; 11. Penindakan terhadap penggunaan bahan berbahaya untuk pangan segar. 12. Penyediaan sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner; 13. Pembangunan rumah pemotongan hewan; 14. Pembangunan pasar hewan regional
7.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan masih rendah Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah	1. Sarana dan prasarana budidaya-tangkap perikanan; 2. Belum optimalnya unit pembenihan perikanan (Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat); 3. Belum terintegrasinya kebijakan hulu dan hilir antar sektor (pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian); 4. Kesadaran masyarakat dalam konsumsi ikan masih kurang; 5. Belum terimplementasi regulasi terkait pelestarian perikanan dan penggunaan alat-alat perikanan yang ramah lingkungan.	1. Penyediaan sarpras perikanan budidaya-tangkap; 2. Penyediaan pakan ikan- induk ikan dan sarana pendukung lainnya; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pembenihan (Penyuluh); 4. Koordinasi antar sektor yang terkait ; 5. Menumbuhkan gerakan gemar makan ikan (diversifikasi produk pengolahan ikan, sosialisasi ke masyarakat); 6. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan
<b>PRIORITAS AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI</b>				
1.	Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	1. Masih rendahnya kondisi jalan yang mantap; 2. Masih rendahnya standar jalan yang dibangun oleh Pemerintah;	1. Peningkatan kualitas jalan dengan kondisi mantap; 2. Peningkatan kualitas jalan; 3. Peningkatan jembatan sesuai dengan standar kebinamargaan;



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			3. Banyaknya jembatan yang masih di bawah standar;	
		Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Permasalahan bidang Sumber Daya Air 1. Adanya penurunan kualitas system irigasi 2. Tumpang tindihnya data status daerah irigasi	1. Peningkatan kualitas system irigasi 2. Tertibnya data status daerah irigasi
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Permasalahan bidang Penataan Ruang 1. Masih terbatasnya dokumen RDTR, sehingga yang menjadi dasar perizinan masih berdasarkan pada Perda RTRW Kabupaten; 2. Masih terbatasnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; 3. Masih terbatasnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;	1. Tersedianya dokumen RDTR sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW; 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang optimal; 3. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal;
		Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis	Belum optimalnya pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis;	Meningkatkan kualitas pelatihan yang diukur melalui pre dan post test pada saat pelatihan
2	Urusan Tenaga Kerja	Masih tingginya angkatan kerja pencari kerja dan tingginya pengangguran akibat PHK.	1. Jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja; 2. kompetensi calon tenaga kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja; 3. pencari kerja yang telah ditempatkan tidak mengembalikan kartu kuning (yang sudah bekerja tidak melapor kembali ke disnaker); 4. Wajib lapor dari pihak perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan terutama dalam hal penerimaan pekerja/buruh. 5. Laporan rutin tentang keadaan jumlah pekerja/buruh dari perusahaan belum dilaksanakan sepenuhnya.	1. kerjasama dengan perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja Kab Sumedang dan sosialisasi Perpres No 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan dan meningkatkan pendataan perusahaan; 2. pelaksanaan jobfair serta meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan;



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			6. Banyaknya perusahaan yang merasionalkan pekerjanya akibat dari pandemi Covid 19.	3. Peningkatan motivasi bekerja, pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megalbalikan kartu kuning; 4. Kerjasama dengan Bidang pendidikan terutama Sekolah Kejuruan untuk membuka Jurusan sesuai formasi yang dibutuhkan baik di Perusahaan maupun Lemabaga lainnya.Wajib lapor baik data 5. pekerja/buruh baik penerima pekerjaan dan meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan 6. Pemanfaatan Balai Latihan Kerja sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan dan munculnya kemandirian dalam berwirausaha 7. Adanya pelatihan kewirausahaan bagi para korban PHK.
3	Urusan Perhubungan	Masih rendahnya kenyamanan dan keamanan pengguna jalan	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 2. Kurang tertatanya jaringan trayek angkutan umum	1. Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 2. Tertatanya jaringan trayek angkutan umum
4.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melemahnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; 2. Tingginya persaingan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya; 3. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi; 4. Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi.	Melakukan pembinaan tata kelola dan penguatan kelembagaan perkoperasian;



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Peningkatan UMKM belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha;</li> <li>2. Database UMKM belum tersedia secara akurat;</li> <li>3. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing;</li> <li>4. Kualitas produk dan kontinuitas produksi usaha mikro belum terjaga</li> <li>5. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan</li> <li>6. Cakupan pemasaran masih terbatas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Megoptimalkan pengelolaan data (melakukan pendataan/updating data UMK);</li> <li>2. Melakukan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif (proses hulu hingga hilir)</li> <li>3. Bantuan Modal Usaha bagi UMK dalam meningkatkan dan pengembangan usaha.</li> </ol>
5.	Urusan Perdagangan	Pembinaan pelaku usaha perdagangan masih kurang	Sub sektor perdagangan merupakan penyumbang ketiga terbesar pada PDRB Kabupaten Sumedang, namun perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha masih kurang	Peningkatan pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha perdagangan
		Pengawasan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mata rantai terlalu panjang sehingga mempengaruhi harga jual</li> <li>2. Kecilnya nilai tambah yang diterima produsen</li> </ol>	Memberikan pendidikan manajemen pemasaran bagi produsen
		Revitalisasi Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan social</li> <li>2. Kondisi pasar rakyat yang representatif belum merata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervensi Pemda dalam menyelesaikan permasalahan sosial</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat</li> </ol>
6.	Urusan Perindustrian	Belum akuratnya data industri kecil menengah	Industri kecil menengah jarang melaporkan usahanya sehingga terlambat terdeteksi oleh Pemda	Pemutakhiran data
		Sertifikasi hasil industri	Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi halal dan PIRT	Pemda menjadi penghubung untuk proses sertifikasi
		Laju Pertumbuhan Industri pengolahan berkontraksi minus 1,46%	Banyak industri pengolahan yang terdampak akibat pandemic Covid 19	Perlu adanya intervensi Pemerintah Daerah untuk mendorong keberlangsungan industri pengolahan.



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
7.	Urusan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum sebanding dengan potensi investasi</li><li>2. Pelayanan perizinan yang belum optimal</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya aturan yang overlapping satu dengan lainnya, sehingga menghambat proses perizinan;</li><li>2. Implementasi perda/perbup terkait insentif-disinsentif belum optimal;</li><li>3. Masih adanya oknum (internal-eksternal) yang menghambat proses perizinan;</li><li>4. Belum mendukung infrastruktur wilayah dalam konteks peningkatan investasi (lintas sektor);</li><li>5. Belum efektifnya fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan PTSP;</li><li>6. Belum bisa menyediakan data investasi yang jelas dan <i>update</i></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu adanya koordinasi untuk mensinergikan antara peraturan pusat dan daerah;</li><li>2. Penyederhanaan peraturan daerah yang ada;</li><li>3. Pembaruan regulasi yang mengatur investasi;</li><li>4. Pemberiaan insentif-disinsentif sesuai perda;</li><li>5. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan;</li><li>6. Koordinasi kepada dinas terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi;</li><li>7. Tim Teknis ditetapkan setiap Tahun;</li></ol>
8	Urusan Pariwisata	<p>Rendahnya kunjungan wisata</p> <p>Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang sampai skala nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Infrastruktur/sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai (khususnya akses jalan menuju destinasi wisata);</li><li>2. Terbatasnya pelaksanaan event festival/pagelaran seni, budaya, olahraga;</li><li>3. Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya;</li><li>4. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;</li><li>5. Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</li></ol> <p>Sub sektor ekonomi kreatif masih membidik pasar lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revitalisasi/penataan kawasan pariwisata;</li><li>2. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta);</li><li>3. Melakukan promosi pariwisata seni dan budaya;</li><li>4. Pembangunan galeri ekonomi kreatif sekaligus kepariwisataan;</li><li>5. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penggerak ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas produk sub sektor ekonomi kreatif;</li><li>2. Penciptaan pasar pada level nasional,</li></ol>



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
<b>PRIORITAS PENGUATAN INOVASI PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>				
1.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimnya alat dan perlengkapan perekaman dan pencetakan KTP elektronik;</li><li>2. Ketersediaan blanko KTP El tidak kontinue karena mengikuti blanko yang disediakan kementerian (Ditjen Adminduk);</li><li>3. Perlakuan masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukan masih sangat rendah ??Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen pencatatan sipil</li><li>4. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan pencetakan akte kelahiran;</li><li>5. Program/kegiatan percepatan kepemilikan akte kelahiran baru membidik target 0-18 th (bayi dan usia sekolah);</li><li>6. Pelayanan online belum ada;</li><li>7. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran bagi usia lebih dari 38 Tahun keatas masih rendah;</li><li>8. Akte kematian jarang diurus oleh masyarakat;</li><li>9. Data yang sudah ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD pengguna disebabkan kewenangan penerbitan user id ada di Kemendagri.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perekaman dan pencetakan KTP elektronik;</li><li>2. Perlunya sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang pemahaman pentingnya dokumen kependudukan;</li><li>3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pencetakan akte kelahiran;</li><li>4. Percepatan kepemilikan akte kelahiran untuk usia lebih dari 18 Tahun.</li></ol>
2.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Peningkatan pengelolaan desa belum optimal	Desa dengan status Desa Cepat Berkembang masih sedikit	Peningkatan kualitas perencanaan desa, inovasi kegiatan dan ketajaman prioritas pembangunan desa.





No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal	1. Masih terdapat LKD dan LAD yang belum memenuhi standar; 2. Belum optimalnya BUMDes yang maju, berkembang dan mandiri	Dinas berperan aktif dalam pembinaan penerapan Siskeudes
		3. Kualitas penerapan Siskeudes belum optimal	Penerapan Siskeudes belum optimal	Perlunya peningkatan peran kecamatan dalam sistem pengelolaan aset dan keuangan desa.
		4. Kualitas dan kuantitas data sosial ekonomi desa masih rendah	Tingkat pengelolaan data dan informasi yang rendah	Optimalisasi Integrasi Pengolahan dan Informasi data sosial ekonomi
3.	Urusan Komunikasi dan Informatika	Layanan komunikasi dan informasi	Masih terdapat wilayah <i>blind spot</i>	1. Pelayanan fasilitas wifi gratis sampai ke pelosok desa 2. Penguatan jaringan telekomunikasi di wilayah <i>blind spot</i>
		Nilai SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020 berada pada 3,81 poin (ideal 5)	Nilai SPBE dinilai sangat tinggi, namun untuk mencapai nilai memuaskan (>4) terdapat penilaian tambahan berupa penilaian instrument domain manajemen SPBE yang terdiri atas jaringan, infrastruktur dan aplikasi yang harus diaudit oleh BPPT	1. Peningkatan jaringan, infrastruktur dan aplikasi 2. Komponen infrastruktur harus terfasilitasi Cloud
4.	Urusan Statistik	Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	1. Belum tersedianya data yang akurat dan berkualitas; 2. Belum tersedianya data real time	Super Apps yang mengintegrasikan semua system aplikasi ke Command Center
5.	Urusan Persandian	Pengamanan Informasi daerah	Skor pengamanan informasi daerah 275 pada Tahun 2020 (skor tertinggi 645 menurut ISO 270001)	Peningkatan keamanan informasi daerah memenuhi 113 kontrol keamanan informasi sesuai ISO 270001



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
6.	Urusan Perpustakaan	Minimnya minat baca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya bahan pustaka (eksemplar dan judul) sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang;</li> <li>2. Masih rendahnya pemeliharaan koleksi bahan pustaka</li> <li>3. Materi dan tampilan bahan bacaan kurang menyesuaikan dengan perkembangan generasi milenial</li> </ol>	Penambahan dan pemeliharaan koleksi dan jumlah eksemplar bahan pustaka
7.	Urusan Perencanaan	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum sama nya pemahaman Perencanaan Pembangunan antara PD Perencana dengan PD teknis</li> <li>2. Perencanaan yang dilakukan masih ego sektoral</li> <li>3. Keterlibatan masyarakat/ stakeholder masih rendah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>4. Perencanaan belum didasarkan pada hasil kajian (<i>by evidence</i>)</li> <li>5. Keterlambatan penyampaian kebijakan Nasional dan Provinsi kepada Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM Perencana</li> <li>2. Penambahan jumlah fungsional Perencana</li> <li>3. Peningkatan koordinasi horizontal antar sektor dan Lintas Perangkat Daerah</li> <li>4. Peningkatan koordinasi vertical dengan perangkat daerah provinsi dan kementerian/ lembaga</li> <li>5. Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam proses perumusan perencanaan pembangunan</li> <li>6. Peningkatan penelitian dan pengembangan permasalahan pembangunan di daerah</li> </ol>
		Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dokumen perencanaan yang belum specific, measurable, achievable, relevant dan timebound (SMART)</li> <li>2. Pendekatan perencanaan tidak menggambarkan holistic, integratif, thematic dan spasial (HITS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyamaan pemahaman Perencanaan di internal satuan Perangkat Daerah mulai dari pelaksana sampai dengan pejabat tinggi pratama;</li> <li>2. Kolaborasi dan koordinasi antar elemen di internal satuan Perangkat Daerah</li> </ol>
8.	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Hasil kelitbangan belum diimplementasikan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memiliki fungsional peneliti</li> <li>2. Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan</li> <li>3. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan litbang daerah dengan kementerian/lembaga pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan fungsional peneliti</li> <li>2. Peningkatan kuantitas fungsional di bidang kelitbangan</li> <li>3. Penyebarluasan informasi rencana kelitbangan kepada semua Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya</li> </ol>



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
				4. Penyebarluasan hasil kelitbangan kepada semua Perangkat Daerah dan <i>Stakeholder</i> lainnya 5. Koordinasi kelitbangan antar kabupaten/kota dan pemerintah provinsi serta kementerian/ Lembaga di tingkat pusat.
9.	Urusan Pengawasan	Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang	1. Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3; 2. Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah; 3. Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal; 4. Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal; 5. Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi; 6. Tingkat kapabilitas APIP/IACM masih berada pada level 3; 7. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas 8. Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal	1. Penambahan jumlah auditor fungsional; 2. Peningkatan kompetensi pemeriksaan bidang infrastruktur, PBJ, Perencanaan, dan Investigasi; 3. Peningkatan intensitas pendampingan SPIP kepada Perangkat Daerah; 4. Peningkatan intensitas pendampingan evaluasi Sakip kepada Perangkat Daerah
10	Urusan Administrasi Pemerintahan (Kesekretariatan Daerah)	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Masih sulitnya pemenuhan data dari seluruh Perangkat Daerah untuk penyusunan LPPD	Perlunya penggunaan sistem informasi data LPPD yang terintegrasi Penguatan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah
		Masih rendahnya kualitas SAKIP (Level BB pada Tahun 2020)	Masih rendahnya kualitas SAKIP (Level BB pada Tahun 2020)	Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP pada Perangkat Daerah



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Reformasi birokrasi harus ditingkatkan	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan berkelanjutan atas situasi yang mendukung reformasi birokrasi
		Masih perlu ditingkatkan capaian target kinerja Perangkat Daerah	Masih perlu ditingkatkan capaian target kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan pengawasan dan bimbingan pada Perangkat Daerah
11.	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Masih kurangnya kompetensi, kinerja, disiplin ASN dan pelayanan kepegawaian yang bersih dan melayani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya PNS mendapat kesempatan pendidikan dan pelatihan</li> <li>Masih kurang fokusnya antara kebutuhan diklat dengan unit organisasinya</li> </ol>	Harus ditingkatkan kesempatan PNS dalam mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS
			Belum efektifnya koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan (setiap Perangkat Daerah yang mengirimkan pegawai atas undangan provinsi/K/L tidak menginformasikan kepada BKPSDM)	Meningkatkan koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lainnya (Kasubag Umum Kepegawaian) lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan.
			Masih banyak jumlah pejabat yang belum mendapatkan kesempatan diklat sebagai syarat menduduki jabatan;	Membuat skala prioritas pejabat yang sudah menduduki jabatan dalam mendapatkan kesempatan diklat untuk syarat menduduki jabatan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya identifikasi kebutuhan jabatan fungsional tertentu;</li> <li>Belum adanya perhitungan beban kerja untuk kebutuhan jumlah jabatan fungsional tertentu.</li> </ol>	Melakukan koordinasi dengan bagian organisasi setda dalam identifikasi jabatan fungsional tertentu;
12	Urusan Administrasi Pemerintahan (Kesekretariatan DPRD)	Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jadwal kegiatan DPRD yang tidak disiplin belum sesuai dengan ketersediaan anggaran;</li> <li>Masih banyaknya penyampaian proposal aspirasi yang bukan merupakan tugas kesekretariatan DPRD;</li> <li>Adanya pemahaman sebagian anggota DPRD bahwa kewenangannya harus difasilitasi secara penuh;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Juklak dan Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;</li> <li>Penyediaan tenaga fungsional perancang produk hukum.</li> </ol>



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Masih rendahnya kualitas notulensi persidangan;</li> <li>5. Masih rendahnya produktivitas penyusunan Perda;</li> <li>6. Belum adanya tenaga fungsional perancang produk hukum.</li> </ul>	3.
13.	Urusan Keuangan Daerah	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas layanan pendataan masih rendah;</li> <li>2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur;</li> <li>3. Belum ada sistem baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan;</li> <li>4. Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan terhadap kolektor desa;</li> <li>2. Penerbitan regulasi dengan penyertaan system reward and punishment;</li> <li>3. Menyusun system perencanaan pendapatan daerah;</li> <li>4. Kajian analisis potensi pajak daerah</li> </ul>
		Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat ketidakkonsistenan anggaran kas dengan pelaksanaan pengajuan pembayaran;</li> <li>2. Sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian belum terintegrasi;</li> <li>3. Sistem informasi akuntansi dengan asset belum terintegrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terhadap PD yang masih belum konsisten dalam pengajuan pencairan;</li> <li>2. Integrasi system kepegawaian dan penggajian;</li> <li>3. Integrasi system akuntansi dan asset.</li> </ul>
14.	Urusan Kesatuan Bangsa Politik	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideology negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya potensi konflik antar suku agama, ras dan antar golongan</li> <li>2. Belum optimalnya koordinasi forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda)</li> <li>3. Belum optimalnya pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem kewaspadaan daerah dalam menghadapi konflik,</li> <li>2. Peningkatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat</li> <li>3. Peningkatan koordinasi forum-forum strategis masyarakat</li> <li>4. Peningkatan kondisi yang kondusif di masyarakat</li> <li>5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes</li> </ul>



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi		6. Peningkatan pembinaan Ormas berkategori aktif.
<b>URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN SERTA URUSAN PENUNJANG LAINNYA</b>				
1.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB 2. Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal	Angka TFR masih tinggi 1. Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi 2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Peningkatan Peran DPPKB sebagai leading sektor pengendalian penduduk Peningkatan Peran DPPKB sebagai leading sektor keluarga berencana
2.	Urusan Kepemudaan dan olahraga	1. Peningkatan jumlah atlet berprestasi 2. Masih kurangnya wirausahawan muda	1. Masih terbatasnya pelaksanaan event olahraga; 2. Masih terbatasnya sarana prasarana di bidang olahraga 3. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi para pemuda	1. Melakukan pembinaan kepada Cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi; 2. Memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlit disabilitas; 3. Meningkatkan penyelenggaraan event olahraga tingkat kabupaten maupun tingkat nasional; 4. Penyediaan sarpras olahraga 5. Pelatihan dan pembinaan wirausahawan muda



No	Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
3.	Urusan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap kearsipan</li><li>2. Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan</li><li>3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan</li><li>4. Belum tersedianya sistem elektornik kearsipan</li><li>5. Belum adanya regulasi daerah tentang kearsipan</li><li>6. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan di setiap PD</li><li>7. Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan PD tentang pentingnya kearsipan</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan (gedung, depo)</li><li>3. Penyediaan sistem elektornik kearsipan</li><li>4. Penyusunan Perbup Kearsipan</li></ol>
4.	Urusan Kehutanan	Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat	Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal	Pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar Tahura
5.	Urusan Transmigrasi	Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya kuota Transmigran dari Provinsi</li><li>2. Belum adanya legalitas hak kepemilikan tanah pada Transmigran lokal ( Tanah tersebut masih milik kas Desa )</li><li>3. Pengalokasian dana pemberangkatan Transmigran yang dulu dibiayai dari Pusat sekarang menjadi beban Kabupaten</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu adanya kesepakatan pemenuhan kuota transmigran antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang</li><li>2. Harus adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk kepemilikan Tanah ( Tukar guling Tanah )</li><li>3. Perlunya adanya dana dari tingkat kabupaten untuk penanganan Transmigran/ Pemberangkatan Transmigran</li></ol>

Sumber : Bapppeda 2021 (diolah)



## **b. Isu Strategis**

### **1. Telaahan Isu Strategis Internasional**

Isu-Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Sumedang antara lain:

#### 1) Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala/ *Internet Of Things (IoT)*, sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industry keempat berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambilalih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi dan robotik.

#### 2) Society 5.0

Society 5.0, didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Di





Society 5.0, itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung.

### 3) Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *Green Economic Global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Lokal Government on Blue Economy*. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Surabaya. Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan *Green Economy* yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun



akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

#### 4) Penerapan Sumber Energi Alternatif Sebagai Antisipasi Sumber Energi Tak Terbaharukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun an-organik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global. Menanggapi isu energi baru terbarukan ini, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada panas bumi (*geothermal*), energi biomassa, surya (*solar*) dan Bahan Bakar Nabati (BBN);



2. Penyediaan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan guna menurunkan biaya produksi;
  3. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan;
  4. Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi energi terbarukan dalam negeri (peralatan penyulingan BBN, *solar cell* dan panel harus menggunakan produksi dalam negeri);
  5. Pengalokasian dana dengan skema khusus (*smart funding*) untuk pengembangan energi terbarukan diluar BBM, khususnya untuk skala kecil;
  6. Pemerintah melakukan pengaturan dan pengalokasian dana dari program *Clean Development Mechanism* (CDM), sehingga insentif karbon kredit dapat memberi manfaat pada publik.
- 5) Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/ Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini, menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



## **2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Visi RPJMN Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (Nawa Cita), maka perlu memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antara lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi bagian yang diprioritaskan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023.

### **3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia



Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan kawasan bahan baku, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-undang Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



**Gambar 4.1**  
**Visi, Misi, Arahannya Presiden dan 7 Agenda Pembangunan**



#### 4. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: **Jabar Juara Lahir Batin**: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. **Inovasi**: pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. **Kolaborasi**: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar



tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa**, melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif**, melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil**, melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan PusatPusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sepanjang tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah.

Atas dasar itulah maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesuaikan kembali Prioritas Pembangunan Daerahnya dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terdiri dari:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;





5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi.

#### 5. Telaahan RPJMD Kabupaten Berbatasan Kab. Sumedang

Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

**Tabel 4.13**

#### **Telaahan RPJMD Daerah Lain**

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
1.	Kabupaten Garut	Tahun 2019-2024	<b>VISI :</b> "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera" <b>MISI :</b> 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
			4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.	
2.	Kabupaten Subang	Tahun 2018 - 2023	<p><b>VISI :</b> "KABUPATEN SUBANG YANG BERSIH, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKARAKTER"</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat;</li> <li>2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang Berkarakter Kebudayaan Lokal dan Pemerataan Pembangunan Perdesaan;</li> <li>3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Berdaya Saing serta Perluasan Lapangan Kerja;</li> <li>4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan Kelautan, serta Penggalian Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;</li> <li>5. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup;</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor .. Tahun 2021 .. tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023
3.	Kabupaten Indramayu	Tahun 2016 - 2021	<p><b>VISI :</b> 'Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah' (Indramayu Remaja Tiga)</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;</li> <li>2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;</li> <li>3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;</li> <li>4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
			<p>5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;</p> <p>6. Memperkuat Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p>	
4.	Kabupaten Majalengka	Tahun 2018 - 2023	<p><b>VISI :</b> Mewujudkan Tata Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;</li> <li>Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;</li> <li>Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.</li> <li>Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ..Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023
5.	Kabupaten Tasikmalaya	Tahun 2016 - 2021	<p><b>VISI :</b> "KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN"</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.</li> <li>Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.</li> <li>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).</li> <li>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
6.	Kabupaten Bandung	Tahun 2016 - 2021	<p><b>VISI:</b> “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan</li> <li>2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan</li> <li>3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan</li> <li>4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</li> <li>5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif</li> <li>6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup</li> <li>7. Meningkatkan Kemandirian Desa</li> <li>8. Meningkatkan reformasi birokrasi</li> <li>9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

## 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 dan merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Sumedang. Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 adalah “**Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis, dan Demokratis pada Tahun 2025**”. Visi tersebut dapat diringkas menjadi “**SUMEDANG SEHATI**”.

Kabupaten Sumedang yang **Sejahtera** ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Sumedang yang memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan bermatapencarian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.



**Agamis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha kuasa, sesuai keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistem keagamaan nasional; **Demokratis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang makin dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, partisipasi masyarakat berlandaskan kesetaraan gender yang makin dewasa dalam proses penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pewarisan nilai nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri;
3. Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD tahap ke-4 pembangunan Sumedang diharapkan makin mencerminkan sebuah lingkungan masyarakat daerah yang mantap kesejahteraannya, mantap dalam kehidupan berdemokrasi yang dewasa dan jiwa solidaritas mantap dalam menjaga kesatuan dan persatuan nasional serta kehidupan sosial yang makin menempatkan agama sebagai wahana untuk menyeimbangkan jatidirinya selaku makhluk beragama dan makhluk sosial yang beragam. Dari tahapan dan prioritas pada RPJMD ke-4 ini, terdapat fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu:

1. Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-3 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-4;



2. Pengembangan sistem insentif daerah dalam penyelenggaraan kemitraan pembangunan di sektor swasta, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, jaringan energi tepat guna perdesaan serta jaringan transportasi ke lingkungan perdesaan;
3. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supportin sistem bagi aktivitas ekonomi kreatif;
4. Peningkatan pelaksanaan implementasi falsafah Pancasila dalam perikehidupan sosial dan berpemerintahan dengan keseimbangan penerapan nilai-nilai keagamaan yang beraam dalam suasana penuh toleransi;
5. Pemantapan reformasi birokrasi yang menopang pelayanan berorientasi *customer satisfaction*;
6. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supporting sistem bagi aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dewasa dalam berinteraksi dengan pembangunan politik daerah;
7. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik guna penerapan kehidupan sosio politik masyarakat daerah yang telah matang dalam melaksanakan norma-norma konstitusi negara dan Pancasila;
8. Penataan penyesuaian kewenangan dalam wilayah kecamatan;
9. Meningkatkan proteksi terhadap potensi, gangguan terhadap masyarakat;
10. Meningkatkan kemandirian desa;
11. Pemantapan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi dan nasional (antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol cisumdawu serta rencana induk pusat pemerintahan) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
12. Pemantapan penyiapan data dan analisis potensi daerah untuk penyusunan RPJPD 2025-2050;
13. Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan yang akurat; dan



14. Pemeliharaan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.

## 7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana gambar 4.2 dibawah ini. Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin ketuhanan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

**Gambar 1.2**  
**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**  
**Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang**  
**Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**





Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan perlu adanya perubahan perencanaan. Termasuk dalam konteks KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang telah disusun rekomendasi hasil dari analisis KLHS terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan pada Tabel 4.14 di bawah ini.







**Tabel 1.14**

**Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan Upaya Tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung**

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
<b>PILAR SOSIAL</b>				
1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausaha baru</li> <li>2. Melakukan pemberdayaan pada PMKS</li> <li>3. Mendorong produktifitas petani gurem</li> <li>4. Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja</li> <li>5. Mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan</li> <li>6. Menggerakkan UMKM dan ekonomi kreatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>5. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga</li> </ol>
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1 (a)	Belum terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan	Perlu ditingkatkan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan sampai dengan 98%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan</li> <li>2. Rumah Sakit Umum Daerah</li> </ol>
	1.3.1. (d)	Masih kurangnya rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Perlu dilakukan sinkronisasi data masyarakat miskin antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>3. Badan Pusat Statistik</li> <li>4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> </ol>



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1 (a)	Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang pentingnya menggunakan fasilitas kesehatan	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana /Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Kesehatan
	1.4.1. (d)	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatkan penyediaan sarana air minum	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
1.5 Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Masih adanya korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana saat ini mencapai 9 orang per 100.000 orang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana</li> <li>Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)</li> </ul>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1. (a)	Masih kurangnya lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)</li> </ul>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1. (e)	Masih tingginya risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana</li> <li>Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)</li> </ul>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.1.Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang Tahun.	2.1.1(a)	Masih adanya Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga kekurangan gizi</li> <li>Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat</li> </ul>	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
2.2. Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima Tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga baduta <i>stunting</i></li> <li>Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	2.2.1.(a)	Masih adanya Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua Tahun/baduta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi <i>stunting</i></li> <li>Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	2.2.2*	Masih adanya Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi malnutrisi/ wasting</li> <li>Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(a)	Rendahnya Prevalensi anemia pada ibu hamil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(c)	Masih rendah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi malnutrisi/ wasting</li> <li>Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil</li> <li>Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil</li> <li>Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	3.1.2.(a)	Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirnya terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang pentingnya menggunakan fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka	3.2.1*	Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil</li><li>• Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan</li><li>• Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita</li><li>• Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita</li></ul>	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3.2.2*	Masih adanya Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil</li><li>• Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan</li><li>• Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita</li><li>• Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita</li><li>• Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan</li></ul>	
Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.2. (a)	Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil</li><li>• Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan</li><li>• Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita</li><li>• Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita</li><li>• Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan</li></ul>	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Masih adanya Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan penanganan HIV	Dinas Kesehatan
	3.3.2.(a)	Masih tingginya resiko masyarakat terjangkit TB karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan penanganan TB	Dinas Kesehatan
	3.3.1.(a)	Masih tingginya kejadian masyarakat yang terjangkit demam berdarah karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan penanganan demam berdarah	Dinas Kesehatan
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(a)	Masih adanya penduduk merokok pada umur ≤18 Tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengawasan orang tua, guru, dan masyarakat terhadap anak kurang dari usia 18 Tahun dan</li> <li>• Penyusunan regulasi penjualan rokok kepada pembeli rokok pada usia anak kurang dari 18 Tahun.</li> </ul>	Dinas Kesehatan
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang MKJP	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (JKD).	perlu sinkronnya data kependudukan masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Dukcapil; dan jangkauan luas wilayah yang sangat besar	- Dinas Kesehatan - Badan Pusat Statistik - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang dampak kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)</li> </ul>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang dampak kekerasan seksual</li> </ul>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial
<b>PILAR EKONOMI</b>				
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per Tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita</li> <li>Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung untuk meningkatkan investasi</li> <li>Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal</li> <li>Meningkatkan kualitas SDM</li> <li>Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas UMKM dan Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>Dinas Peternakan dan Perikanan</li> <li>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Perumahan dan Pertanahan</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
	8.1.1.(a)	Masih rendahnya PDB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita</li> <li>Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung untuk meningkatkan investasi</li> <li>Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal</li> <li>Meningkatkan kualitas SDM</li> <li>Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas UMKM dan Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>Dinas Peternakan dan Perikanan</li> <li>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Perumahan dan Pertanahan</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Menyamakan persepsi bahwa perempuan bekerja di sektor formal dianggap lebih prestisius daripada yang bekerja pada sektor non formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial</li> </ol>



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Mengurangi pengaruh2 faktor lingkungan yang menyebabkan penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, adanya pengaruh faktor gaya hidup.	1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Peningkatan jumlah dan kemampuan pekerja yang ahli dan terampil dalam sektor pariwisata	1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a)	Belum tercapainya jalan dengan kondisi mantap.	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas jalan dan jembatan Peningkatan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan jalan baru	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.1.(a)	Minimnya pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui industri manufaktur.	1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi





TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Masih tingginya tingkat kesenjangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru</li> <li>Melakukan pemberdayaan pada PMKS</li> <li>Mendorong produktifitas petani gurem</li> <li>Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja</li> <li>Mendorong peningkatan sector pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan</li> <li>Mengerakan UMKM dan ekonomi kreatif</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial</li> <li>Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</li> </ol>
	10.1.1. (a)	Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru</li> <li>Melakukan pemberdayaan pada PMKS</li> <li>Mendorong produktifitas petani gurem</li> <li>Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja</li> <li>Mendorong peningkatan sector pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan</li> <li>Mengerakan UMKM dan ekonomi kreatif</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial</li> <li>Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</li> </ol>



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>				
6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (a)	Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyediaan sarana air minum</li> </ul>	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air</li> </ul>	1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Kesehatan
	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan hyginies terhadap sanitasi tempat umum</li> </ul>	1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Kesehatan
	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan hyginies terhadap sanitasi tempat umum</li> <li>Penyuluhan penggunaan sanitas rumah tangga</li> </ul>	Dinas Kesehatan
11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1. (a).	Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kabupaten Sumedang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan upaya penyebaran informasi peringatan dini bencana</li> <li>Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)</li> <li>Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.</li> <li>Perlu disusun kajian kebencanaan termasuk menyusun kontijensi plan, mitigasi dll</li> </ul>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6 Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1. (a).	Masih tingginya sampah perkotaan yang belum tertangani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jangkauan pelayanan penanganan sampah</li> </ul>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
11.7 Pada Tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.2. (a)	Masih adanya korban dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja</li> </ul>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial
12.5 Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Masih rendahnya timbulan sampah yang diolah dengan sistem 3R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengelolaan sampah 3R (recycle, reduce, reuse)</li> </ul>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1. (a).	Berkurangnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah</li> </ul>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>				
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1. (d)	Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang optimal (A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu penyempurnaan indikator kinerja utama sesuai dengan standar</li> <li>Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja</li> </ul>	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kemampuan masyarakat (kompetensi) agar mempunyai kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD</li> </ul>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial



TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 Tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	• Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	• Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	• Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	• Meningkatkan jumlah PPID yang memiliki sertifikat .	Sekretariat Daerah



RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 juga perlu memperhatikan indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi terhadap ketercapaian indikator pada empat pilar TPB maka dirumuskan alternatif dan rekomendasi skenario sebagai berikut:





**Tabel 1.15**  
**Alternatif dan Rekomendasi Skenario terhadap**  
**Data Indikator TPB yang ‘sudah tercapai, sudah dilaksanakan’ dan ‘tidak ada data’**

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	TPB	Klasifikasi	Total Jumlah Indikator	Rekomendasi Tahun 2019-2023	Perangkat Daerah
1	PILAR SOSIAL	1. TPB1 : Tanpa Kemiskinan 2. TPB2 : Tanpa Kelaparan 3. TPB3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. TPB4 : Pendidikan Berkualitas 5. TPB5 : Kesenjangan Gender	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	31	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai	Seluruh Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	21	1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB 2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi 3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik	1. Seluruh Perangkat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	PILAR LINGKUNGAN	1. TPB6 : Air Bersih & Sanitasi Layak 2. TPB11 : Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan 3. TPB12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 4. TPB15 : Kehidupan/ ekosistem di Daratan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	4	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai	Seluruh Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	8	1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB 2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi 3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik	1. Seluruh Perangkat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	PILAR EKONOMI	1. TPB8 : Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi 2. TPB9 : Industri, Inovasi, & Infrastruktur 3. TPB10 : Berkurangnya Kesenjangan	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	3	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai	Seluruh Perangkat Daerah



No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	TPB	Klasifikasi	Total Jumlah Indikator	Rekomendasi Tahun 2019-2023	Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB</li> <li>2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Perangkat Daerah</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah</li> </ol>
4	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	1. TPB16 : Kedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan	4	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapa	Seluruh Perangkat Daerah
			Tidak Ada Data	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB</li> <li>2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen</li> <li>4. pelaporan secara periodik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Perangkat Daerah</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah</li> </ol>

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)

Indikator-indikator SDG's bersifat makro yang perlu difokuskan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 antara lain sebagai berikut :



**Tabel 1.16**  
**Indikator SDGs bersifat Makro**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)
<b>TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN</b>				
1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	Badan Pusat Statistik (Susenas)
<b>TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF &amp; MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA</b>				
8.1.1		Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Badan Pusat Statistik
8.1.1. (a)		PDRB per kapita	PDRB per kapita	Badan Pusat Statistik
<b>TUJUAN 10 : MENGURANGI KESEJARAN INTRA DAN ANTAR NEGARA</b>				
10.1.1.(a)		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	Badan Pusat Statistik
10.1.1		Koefisien Gini	Indeks Gini	Badan Pusat Statistik
<b>TUJUAN 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh</b>				
16.6.1.(b)		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)

Indikator-indikator SDG's bersifat *Outcomes* Program yang perlu difokuskan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 antara lain sebagai berikut :





**Tabel 1.17**  
**Indikator SDGs bersifat outcome Program**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN</b>				
1.4.1 (d)		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pertanahan
<b>TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>				
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pertanahan
6.2.1.(b)		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pertanahan
<b>TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH , MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI</b>				
9.1.1. (a)		Kondisi mantap jalan nasional	Persentase Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)

Indikator-indikator SDG's yang perlu difokuskan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 -2023 antara lain sebagai berikut

**Tabel 1.18**  
**Indikator SDGs dalam RENSTRA**

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
<b>TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN</b>				
1.5.1 (e)		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Persentase kelurahan/desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Jumlah Dokumen rencana penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH
<b>TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN</b>				
2.2.2 (c)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi Ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan
<b>TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>				
5.2.2 (a)		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)





Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Visi, misi yang menjadi dasar dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018 – 2023. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Adapun Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diupayakan diukur melalui indikator yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 tidak merubah Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Akan tetapi terjadi perubahan indikator sasaran sebagai dampak diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta peraturan penyerta lainnya.

#### **a. Visi dan Misi Kepala Daerah**

##### **1. Visi Kepala Daerah**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”***

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlnaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Sejahtera** : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**Agamis** : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial



dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Maju :** Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**Profesional :** *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

**Kreatif :** masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.



## 2. Misi Kepala Daerah

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

### 1. Misi Pertama: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.

Misi ini dimaksudkan untuk: perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

### 2. Misi Kedua: Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.

Misi ini dimaksudkan agar : setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.



Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

**3. Misi Ketiga: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

Misi ini dimaksudkan untuk : Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai.

Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain.

**4. Misi Keempat: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan



Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual.

Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

#### **5. Misi Kelima: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut.

Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses.

Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.



### 3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah **“Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis Dan Demokratis Pada Tahun 2025 (Sumedang Sehati)”** yang pada periode keempat diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”**.

**Misi 1 jangka panjang** “Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat” diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 2** “Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”.

**Misi 2 jangka panjang** “Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri” diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 3** “Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal” dan **Misi 5** “Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang”.

**Misi 3 jangka panjang** “Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila” diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 1** “Memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat secara mudah dan terjangkau ” dan Misi 2 “Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”.

**Misi 4 jangka menengah** “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 4** “Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”.

**Misi 5 jangka menengah** “Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia” diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 3** “Mengembangkan

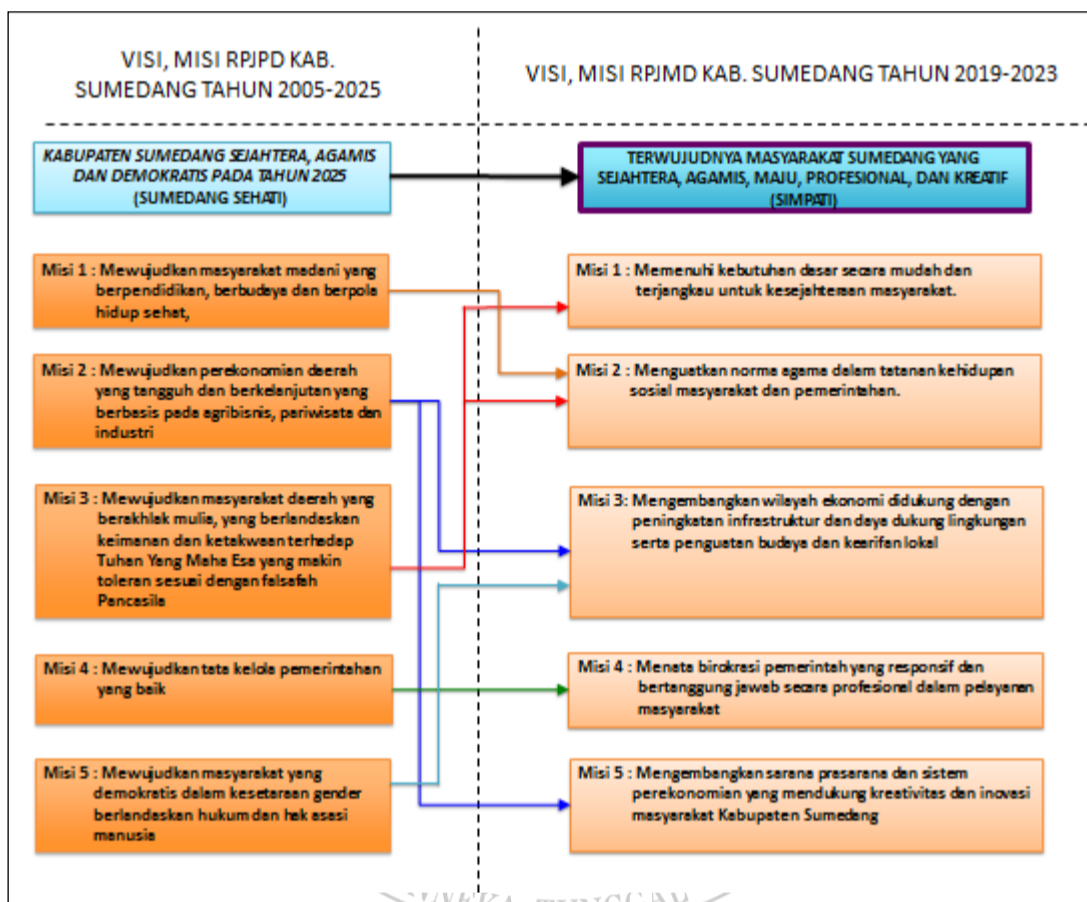




*wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal”*

Pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Visi dan Misi Sumedang Simpati tidak mengalami perubahan atau sama dengan yang tercantum pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023. Lebih lanjut uraian mengenai hal ini dapat disimak pada Gambar 1.3 di bawah ini.

**Gambar 1.3**  
**Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Sumedang 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023**

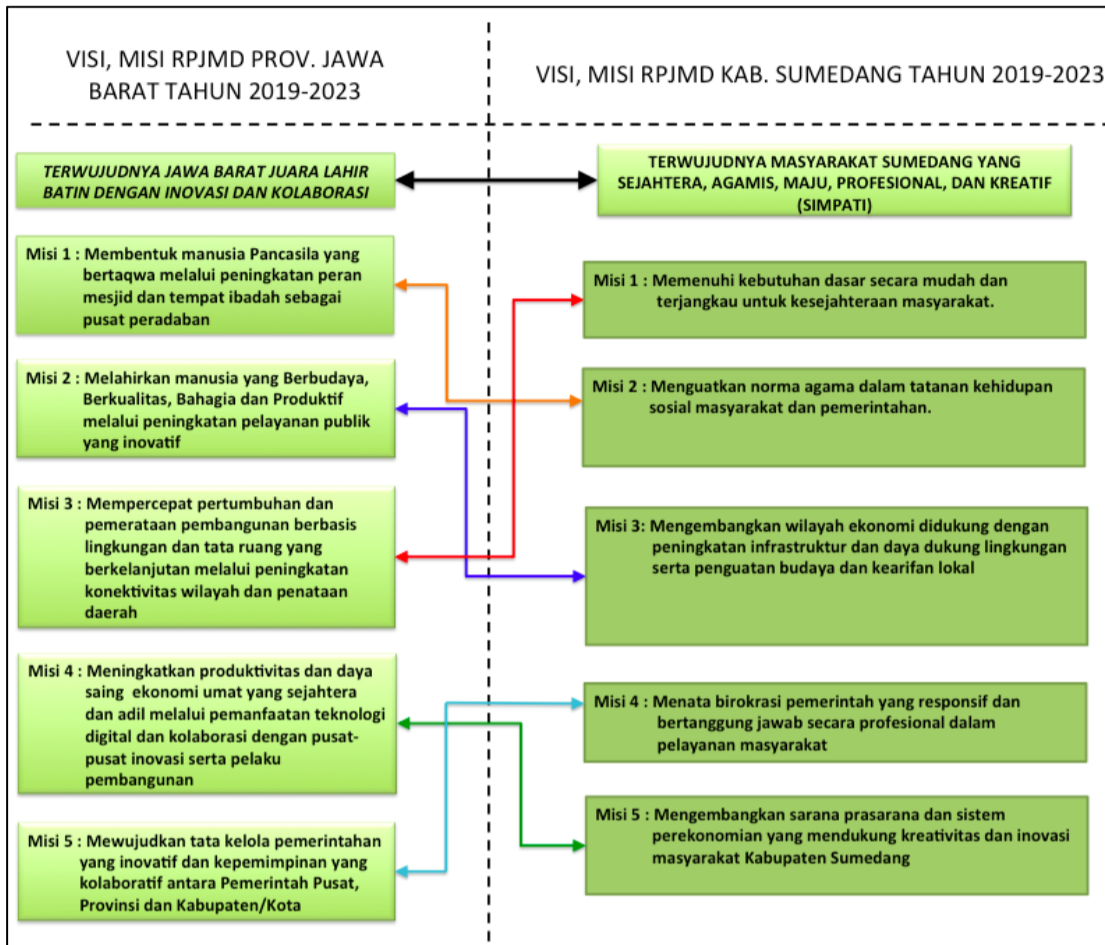


#### 4. Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi misi Provinsi dengan visi misi Kabupaten/kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Sumedang dengan substansi visi misi Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.4**  
**Keselarasn Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 dengan Visi, Misi RPJMD Prov. Jawa Barat 2018-2023**



### 5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



**1. Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

- Tujuan 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan  
Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata  
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata  
Tujuan 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak  
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak

**Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

- Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat  
Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan  
Sasaran 3 : Meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  
Sasaran 4 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

**2. Misi Kedua : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

- Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang  
Sasaran 1 : Memperkuatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama  
Sasaran 2 : Memperkuatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar

**Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

- Tujuan : Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang  
Sasaran : Memperkuatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama

**3. Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

- Tujuan 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata  
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air  
Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat  
Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis  
Sasaran 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah  
Sasaran 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata  
Sasaran 6 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang  
Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan



Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana

#### **Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketahanan Daerah

Sasaran 6 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 8 : Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

#### **4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**

##### **RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT

##### **Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 3 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah

#### **5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**

##### **RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif

Sasaran 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

##### **Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat



Untuk menciptakan sinergitas tujuan dan sasaran antara RPJMD Kabupaten Sumedang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dirumuskan sinkronisasi sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1.19**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat**

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
<b>MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau</b>			<b>Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban</b>
Tujuan 1.1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Terkait dengan Tujuan 2.1 Provinsi		Tujuan 1.1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Terkait dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan		Terkait dengan Sasaran 2.1.3 Provinsi	
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Penanggulangan PPKS		Terkait dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi	
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		Terkait dengan Sasaran 2.1.2 Provinsi	
<b>MISI 2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</b>			<b>Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif</b>
Tujuan 2.1 Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Terkait dengan Tujuan 1.1 Provinsi		Tujuan 2.1. Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 2.1.1 Memperkuat kondisi kehidupan kerukunan umat beragama		Terkait dengan Sasaran 1.1.1 Provinsi	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar
			Sasaran 2.1.2 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
			Sasaran 2.1.3 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
			Sasaran 2.1.4 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional



Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
			Tujuan 2.2 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah Sasaran 2.2.1 Meningkatkan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal Sasaran 2.2.2 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
<b>MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal</b>			<b>Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah</b>
Tujuan 3.1 Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan	Terkait dengan Tujuan 3.1 Provinsi		Tujuan 3.1 Terwujudnya Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
Sasaran 3.1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Kawasan industri		Terkait dengan Sasaran 3.1.2; 3.1.3; dan 4.1.3. Provinsi	Sasaran 3.1.1. Meningkatkan infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
Sasaran 3.1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis		Terkait dengan Sasaran 3.1.2 Provinsi	Sasaran 3.1.2 Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
Sasaran 3.1.3 Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata		Terkait dengan Sasaran 4.1.2 provinsi	Sasaran 3.1.3 Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Sasaran 3.1.4 Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang perekonomian		Terkait dengan Sasaran 3.1.2 dan 3.1.3 Provinsi	Sasaran 3.1.4 Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Sasaran 3.1.5 Meningkatkan Ketahanan Daerah		Terkait dengan Sasaran 3.2.3 Provinsi	Sasaran 3.1.5 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
Sasaran 3.1.6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Terkait dengan sasaran 3.2.1 Provinsi	Tujuan 3.2 Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Sasaran 3.1.7 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Terkait dengan sasaran 3.2.1 dan 3.2.2 Provinsi	Sasaran 3.2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat



Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat
			Sasaran 3.2.2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik Sasaran 3.2.3 Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana
Sasaran 3.1.8 Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Terkait dengan Tujuan 4.1 Provinsi	Terkait dengan sasaran 4.1.4 Provinsi	Sasaran 4.1.4 Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi
<b>MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.</b>			<b>Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan</b>
Tujuan 4.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Terkait dengan Tujuan 5.1 Provinsi		Tujuan 4.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi	Sasaran 4.1.1 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi	Sasaran 4.1.2 Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah		Terkait dengan Sasaran 5.1.1 Provinsi	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat Sasaran 4.1.4 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
<b>MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang</b>			<b>Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>
Tujuan 5.1 Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Terkait dengan Tujuan 4.1 Provinsi		Tujuan 5.1 Terwujudnya good governance dan whole of government
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kompetensi dan produktivitas masyarakat		Terkait dengan Sasaran 4.1.3 Provinsi	Sasaran 5.1.1 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel Sasaran 5.1.2 Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.



## Program Unggulan

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Pada RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 9 (sembilan) program unggulan sedangkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi 8 (delapan) program unggulan. Perubahan tersebut sebagai hasil penelaahan kembali program unggulan pada dokumen visi-misi. Adapun Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

RPJMD 2018-2023	Perubahan RPJMD 2018-2023
1. Sumedang Agamis	1. Sumedang Agamis
2. Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan sampai tingkat desa	2. Rumah Besar Fakir Miskin sampai Tingkat Desa
3. Sumedang Buludru	3. Sumedang Buludru
4. Pemenuhan Pelayanan Dasar	4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
5. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas	5. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas
6. Pengembangan Pariwisata	6. Pengembangan Pariwisata
7. Pengembangan Agribisnis	7. Pengembangan Agribisnis
8. Peningkatan Profesionalisme ASN	8. Profesionalisme ASN
9. Membangun Sumedang Preneurship	9. Membangun Sumedang Preneurship

Adapun penjelasan setiap program unggulan, adalah sebagai berikut:

### 1. Sumedang Agamis.

Program unggulan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mengedepankan peningkatan mental dan spiritual dengan penguatan perwujudan nilai-nilai agama pada tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

### 2. Rumah Besar Fakir Miskin Sampai Tingkat Desa.

Rumah besar fakir miskin merupakan bentuk penanganan fakir miskin, anak terlantar dan lansia yang terintegrasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan serta dengan mendorong optimalisasi peran RT/RW, DKM, pontren, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

### 3. Sumedang Buludru.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Sumedang yang hijau, bersih, indah dan nyaman. Kabupaten Sumedang pernah dijuluki





sebagai Kota Buludru pada tahun 1960 an dan memperoleh Piala Adipura pada Tahun 1984. Integrasi peran pemerintah dan masyarakat serta memperkuat budaya dan kearifan lokal memiliki peran penting dalam perwujudan Sumedang Kota Buludru.

#### **4. Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Program ini bertujuan mengakselerasi kewajiban pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Pelayanan pendidikan dasar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu untuk optimalisasi sistem kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat
3. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

#### **5. Pembangunan Infrastruktur.**

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas menjadi salah satu program unggulan karena akan berdampak pada penguatan aksesibilitas wilayah, pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian daerah.

#### **6. Pengembangan Pariwisata.**

Kabupaten Sumedang memiliki Sumber Daya Alam, budaya, dan kearifan lokal yang sangat layak untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. Pengembangan wisata ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Kabupaten Sumedang juga telah menyatakan sebagai Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) dimana filosofis “Insun Medal Insun Madangan”, serta nilai manajerial SPBS “Rayawan Jati Sunda dimana menjadi nilai-nilai dalam pengembangan pariwisata dan pengembangan budaya daerah.

#### **7. Pengembangan Agribisnis**

Sektor pertanian (termasuk perikanan dan peternakan) secara tradisi menjadi bagian kehidupan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumedang. Pengembangan sektor pertanian menuju agribisnis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

#### **8. Profesionalisme ASN.**

Profesionalisme ASN sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan. Peningkatan kinerja ASN diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Indeks Profesionalisme ASN



## 9. Membangun Sumedang Preneurship

Membangun Sumedang Preneurship berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda (GARUDA), penyediaan sarana prasarana dan transformasi digital.

Kebijakan dari Pemerintah pasca penetapan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Pandemi Covid-19 telah membawa arahan baru bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pada hakikatnya perubahan perencanaan pembangunan ini merupakan proses adaptasi terhadap perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama masalah pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan yang dialokasikan untuk mengatasi permasalahan dampak pandemic Covid-19.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka perumusan tujuan dan sasaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023 mengalami perubahan. Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan, dan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 1.20**  
**Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kabupaten Sumedang 2018-2023 (Sebelum Perubahan)**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
<b>MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU</b>									
<b>1</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>72,07</b>	<b>72,26</b>	<b>72,29</b>	<b>72,44</b>	<b>72,43</b>	<b>72.51-72.70</b>
1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	13	14	10	21	8
		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	140	114	120	137	94
		Persentase Stunting Balita	Persen	32,2	29	8,7	26	12,05	23
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85	82,5	87	100	90
		IKM Rumah Sakit	poin	83,7	90	98,92	91	96,12	92
<b>2</b>	<b>Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata</b>	<b>Rata - rata lama sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>8,1</b>	<b>8,29</b>	<b>8,27</b>	<b>8,48</b>	<b>8,51</b>	<b>8.50-8.57</b>
		<b>Angka harapan lama sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>13</b>	<b>13,22</b>	<b>12,96</b>	<b>13,44</b>	<b>12,97</b>	<b>12.91-12.98</b>
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	106,83	106,83	106,93	99,34	107,03
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	103,42	103,62	103,62	103,72	97,96	103,82
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,34	105,23	105,44	97,45	105,55
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	102,99	102,78	103,19	88,51	103,40
		APK PAUD	Persen	88,44	89,53	89,53	89,62	80,6	89,71
		Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	1,63	1,63	1,9	3	2,1



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
3	Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,76	8,96	7,14	8,16	10,26	10,75-9,71
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,4	94,87	95,01	95,34	95,18	95,81
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	68,7	69,23	70,57	69,77		70,80
3.1	Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	9,11	8,45	8,1	7,65
3.2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100
		Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	549,7	650	0	701
		Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya	Persen	0,7	1,7	0,7	2,7	9,7	3,70
<b>MISI 2 : Menguatkan Norma Agama dalam Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat dan Pemerintahan</b>									
1	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	n/a	73	n/a	73,5



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1.1	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	0	73	0	73,5
1.2	Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	0	0	100	100	100
<b>MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA Penguatan BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL</b>									
<b>1</b>	<b>Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>6,48</b>	<b>6,74</b>	<b>6,32</b>	<b>7,01</b>	<b>(-1,12)</b>	<b>3.66 - 4.70</b>
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	66,8	70,75	70,8	76,96	74,80
		Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	31,27	98,47	42,12	79,04	51,83
		Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62	62,02	64	64,46	60
1.2	Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	58,45	59,85	88,32	61,24	50,74	62,64
		Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	10.044	10.284	10.280	10.524	10.428	10,764



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1.3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :							
		Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,14	n/a	10,24	n/a	10,34
		Tanaman Hortikultura	Persen	3,2	4	19,14	4,7	n/a	5,40
		Perkebunan	Persen	4,12	4,2	4	4,8	n/a	5,50
		Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	Persen	3,68	4,3	18,79	4,9	5,78	5,50
	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	3,15	4	n/a	4,6	3,48	58,18	
1.4	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	87,3	n/a	88,5	89,1	89,60
1.5	Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498.472	598.166	81.494	717.800	717.800	861.360
1.6	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Jumlah Investasi	Nilai di (Rpx1.000)	1.106.170.000	1.216.787.000	915.825.600	1.338.465.700	1.338.465.700	1.606.158.840.000
2	<b>Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>58,68</b>	<b>58,92</b>	<b>59,01</b>	<b>59,18</b>	<b>70,89</b>	<b>63,85</b>
	<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>Poin</b>	<b>162</b>	<b>155</b>	<b>157</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	145	



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
2.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,89	48,09	100,12	48,29	133,13	48,49
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,29	80,49	100,14	80,69	105,64	80,89
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	50,57	50,86	100,2	51,22	113,84	51,63
		Persentase penanganan sampah	Persen	n/a	80	99,98	75	99,97	70
		Persentase pengurangan sampah	Persen	n/a	20	99,9	25	99,92	30
		Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,04	100	11,07	100	11,11
		Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80	80,67	80,13	81,33	80,34	82,00
		Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,3	0,3	0,27	0	0,15
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	80	79,92	83	80,45	85
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55	60	55,23	65	55,29	70
		Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	70,22	100	75,11	100
2.2	Pengurangan indeks resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	155		150	142	145



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
<b>MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT.</b>									
	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>Opini</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Poin</b>	<b>56,05</b>	<b>65</b>	<b>79,34</b>	<b>70</b>	<b>66,74</b>	<b>75</b>
		<b>Nilai Kabupaten SAKIP</b>	<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>
1.1	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	80	82	90	85	90
		Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	8	8	7	7	6
1.2	Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	65	22,38	70	66,74	75,00
		Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	75,94	100
		Nilai Kabupaten LPPD	Angka	3,092	3,15	3,15	3,3	n/a	3,45
		Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36	60	80	80	80	





NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1.3	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59	65	59,45	70	65,03	75,00
		Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,9	60	60,88	66,25	74,47	72,50
<b>Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas</b>		<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	<b>Poin</b>	<b>80,74</b>	<b>81</b>	<b>82,27</b>	<b>83</b>	<b>83,80</b>	<b>86</b>
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	80	80	83	83	85
		Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	84,95	85,25	86,25	86,25	87,23
2.2	Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT	Nilai SPBE	Poin	2,46	3	2,51	3,3	3,81	3,60
<b>MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG Mendukung KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG</b>									
<b>Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing</b>		<b>Pengeluaran per kapita</b>	<b>Rp (juta)</b>	<b>9,67</b>	<b>10,06</b>	<b>10,406</b>	<b>10,38</b>	<b>10,217</b>	<b>30.75-32.08</b>
		<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>7,04</b>	<b>6,55</b>	<b>7,63</b>	<b>6,35</b>	<b>9,89</b>	<b>8.51-9.35</b>
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	4,59	4,89	4,89	5,19	n/a	5,49
		Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,29	5,32	5,32	5,35	n/a	5,398
		Cakupan Koperasi Aktif	Persen	72,93	75	77,41	78	38,39	81



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	2019		2020		2021	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	
	1.2	Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	7,63	6,35	9,89	8.51-9.35
			Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	2.800	17.467	1.557	18.467

**Tabel 1.21**  
**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kabupaten Sumedang 2021-2023**  
**(Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KONDISI AKHIR	
				2022	2023		
<b>MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU</b>							
'1	<b>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Poin</b>	<b>71.93-72.48</b>	<b>72.40-73.37</b>	<b>73.37</b>	
		<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persen</b>	<b>10.41-9,54</b>	<b>9,70-7,56</b>	<b>10,75-9,71</b>	
	1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72.65-72.82	72.70-73.20	73.20
	1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.58-8.80	8.81-9.00	9.00
			Angka Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12.99-13.04	13.05-13.12	13.12
	1.3	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8.95-9,70	7,56-8,94	8,94
	1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,28	96,75	96,75
Indeks Pemberdayaan Gender			Poin	70,84	71,37	71,37	



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KONDISI AKHIR
				2022	2023	
<b>MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang</b>	<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Poin</b>	<b>74</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>
1.1	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	74	74,5	74,5
<b>MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL</b>						
	<b>Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>10.41-9,54</b>	<b>9,70-7,56</b>	<b>7,56</b>
		<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>Poin</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	persen	2.20 - 4.15	4.15 - 6.40	6.40
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3.45-5.28	3.76-5.59	5,59
1.3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	4.50-6.01	8.77-10.27	10.27
1.4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	74,65	77,65	77,65
1.5	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,49	0,52	0,52
1.6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	persen	89,4	90,2	90,2
1.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,26	64,67	64,67
1.8	Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	20	30	30
<b>MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT.</b>						
	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Poin</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A	A	A



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KONDISI AKHIR
				2022	2023	
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89	92	92
1.3	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,1	4,2	4,2
<b>MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG</b>						
	<b>Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing</b>	<b>PDRB per Kapita</b>	<b>Rp (juta)</b>	<b>32.09-33.84</b>	<b>33.85-34.70</b>	<b>34.70</b>
	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.78-7.99	8.18-6.95	6,95





## **b. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Menengah**

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Menengah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, bahwa indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi Pembangunan Strategis sebagaimana tabel 1.22 di bawah ini:



**Tabel 1.22****Indikasi Pembangunan Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023**

No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
<b>I.</b>	<b>Perwujudan Struktur Ruang</b>			
<b>1</b>	<b>Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah</b>			
1.2.1	Prasarana Transportasi			
1.2.1.1.	Jaringan Jalan Raya dan Jembatan			
a.	Pengembangan Jalan Bebas Hambatan ( Jalan Tol Cisumdawu )	Cileunyi – Sumedang - Dawuan (Cisumdawu)	APBN/Swasta	2019-2023
b.	Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Arteri	1 Batas Kota Cileunyi-Nagreg (Rancaekek- Cileunyi-Cicalengka/ Parakanmuncang)	APBN	2021-2023
		2 Jalan Raya Cipacing (Cileunyi),	APBN	2020-2023
		3 Jalan Raya Rancaekek (Rancaekek)	APBN	2020-2023
		4 Jalan Raya Cileunyi (Cileunyi) / Cileunyi- Jatinangor	APBN	2021-2023
		5 Jalan Jatinangor-Batas Kota Sumedang	APBN	2020-2023
		6 Jalan Raya Jatinangor (Jatinangor)	APBN	2020-2023
		7 Jalan Raya Tanjungsari (Tanjungsari)	APBN	2020-2023
		8 Jalan Pangeran Kornel (Sumedang)	APBN	2020-2023
		9 Jalan Palasari (Sumedang)	APBN	2020-2023
		10 Batas Kota Sumedang-Cijelag	APBN	2021-2023
		11 Jalan Prabu Gajah Agung/Pang. Sugih (Sumedang)	APBN	2020-2023
		12 Cijelag-Kadipaten	APBN	2020-2023
c.	Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Kolektor Primer -3 (JKP-3)	1 Ruas jalan Sumedang-Batas Sumedang/ Subang (Cikaramas)	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		2 Ruas jalan Sumedang-Situraja	APBN/APBD Provinsi	2021-2023




No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
		3 Ruas jalan Jalan Raya Situraja(situraja)	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		4 Ruas jalan Situraja-Darmaraja	APBN/APBD Provinsi	2020-2023
		5 Ruas jalan raya Prabu Tajimalela (Sumedang)	APBN/APBD Provinsi	2020-2023
		6 Ruas jalan Lebakjati-Rancakalong-Selaawi	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		7 Ruas jalan SP Kirisk (Wado)-BTS.Sumedang Garut	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		8 Ruas jalan Wado-Batas Kabupaten Sumedang/ Majalengka (Krisik)	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		9 Ruas jalan Cijelag-BTS Sumedang-Indramayu	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		10 Ruas jalan BTS Sumedang/Indramayu-Cikamurang	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
		11 Ruas jalan Parakan Muncang-Warung Simpang	APBN/APBD Provinsi	2021-2023
	d. Rencana pengembangan jalan kolektor Primer-3 (JKP-3)	Ruas Jalan Sukasari - Lembang	APBN/APBD Provinsi	2020-2023
	e. Peningkatan status kewenangan lokal Primer menjadi jalan kolektor primer-3 (JKP-3)	1 Ruas jalan Legok-Conggeang	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		2 Ruas jalan Conggeang-Buahdua	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		3 Ruas jalan Buahdua-Burujul	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		4 Ruas jalan Burujul-Sanca	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		5 Ruas Jalan Ujungjaya-Conggeang	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		6 Ruas jalan Ujungjaya-Palrasah	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		7 Ruas jalan Cae- Lemahsugih (Batas majalengka)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		8 Ruas jalan Jalan Kolonel Ahmad Syam (Jatinangor-Dangdeur);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		9 Ruas jalan Jalan lingkaran timur Jatigede (Wado Jatigede)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		10 Ruas jalan Lingkaran Utara Jatigede	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
f	Peningkatan kualitas jalan lokal primer	11 Ruas jalan lingkar selatan Jatigede (Situraja – Wado)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		12 Ruas jalan Alternatif Cadas Pangeran.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		1 Cimalaka – Cipadung;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		2 Citengah - Cisoka;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		3 Cisoka – Cibubut;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		4 Cibubut – Cibugel;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		5 Cibugel – BTS. Garut;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		6 Warung Ketan – Cicau;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		7 Tanjungsari – Genteng;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		8 Gudang – Cijambu;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		9 Parakan muncang – Tegal manggung;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		10 Cicabe – Cisempur;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		11 Kadakajaya – Sukasari;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		12 Nanggerang – Genteng;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		13 Cilayung – Cinumbangan;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		14 Caringin – Lio;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		15 Lio – Jatiroke;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		16 Barukondang – Kiarapayung;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		17 Tegalmanggung – Sindulang;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
18 Cikuda – Nanggerang;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023		





No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target	
		19 Cikuda – Cisempur;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		20 Ciromed – Cikandang;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		21 Cikadu - Talun;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		22 Jayalaras – Cipacing;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		23 Nangerang – Gunung lingga;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		24 Jalan Angkrek;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		25 Legok – Sukatali	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		26 Babakan bandung – Limus nunggal.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023	
		g Pembangunan baru jalan lokal primer	1 Jalan Lingkar Selatan (Dano – Samoja);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
			2 Jalan Lingkar Utara (Samoja - Cimalaka);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
			3 Jalan Poros Tengah (Tegal Kalong – Karapyak);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
			4 Lingkar Kareumbi (Baginda - Mekarbakti);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
			5 Pasir ringkik – Batudua Gn Lingga;	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
			6 Ujungjaya – Maudin.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		h Rencana Pengembangan dan Relokasi jalan kolektor primer-1 (JKP-1)	1 Jalan Kolektor (K-2) Darmaraja -Wado	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
			2 Jalan lingkar timur Jatigede (Wado Jatigede);	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
			3 Jalan Lingkar Barat Jatigede (Cisitu -Jatigede)	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
		i Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Jembatan pada Jalan Arteri dan Kolektor	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2019-2023
			Jembatan pada jalan lokal danl lokal primer	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2019-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
1.2.1.2.	Jaringan Prasarana Angkutan Darat dan Angkutan Umum Masal			
a	Optimalisasi Terminal Type A	Terminal Ciakar (Perkotaan Sumedang)	APBN	2021-2022
b	Terminal Type B	Terminal Tipe C di Kecamatan Wado dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2021-2022
c	Pembangunan baru Terminal Tipe C	Kecamatan Sumedang Utara, Tanjungkerta, Conggeang, Buahdua, Rancakalong, Sumedang Selatan, Situraja, Tanjungsari, Tomo, Cibugel, dan Jatigede	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2020-2023
d	Pembangunan Terminal Barang	Kec. Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	2022-2023
1.2.1.3.	Pembangunan Jaringan Angkutan Penyeberangan			
a	Pembangunan Dermaga / Sub Dermaga	Waduk Jatigede	APBD Kab/Prov, APBN	2022-2023
1.2.1.4.	Jaringan Jalan Kereta Api			
	Jalan Kereta Api			
a	Reaktivasi Jalur KA	Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
b	Pengembangan Jalan KA	Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
c	Pengembangan Stasiun KA	Perkotaan Jatinangor, Tanjungsari, Perkotaan Sumedang, Perkotaan Tomo dan kawasan industri Ujungjaya	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022
d	Pembangunan stasiun kereta api cepat (LRT)	Kecamatan Jatinangor	APBD Prov, APBN, Swasta/Publik	2022
1.2.2.	Prasarana Energi			
1.2.2.1.	Pengembangan jaringan prasarana energi panas bumi Gunung Tampomas (PLT Panas Bumi/Geotermal)	Gunung Tampomas	APBD Prov/kab, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
1.2.2.2.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Wilayah perkotaan	Swasta/Publik	2020-2023
1.2.2.3.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)	Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Wado dan Kecamatan Tomo	Swasta/Publik	2020-2023
1.2.2.4.	PLTA Waduk Jatigede	Waduk Jatigede		2020-2023
1.2.2.5.	Pengembangan Desa Mandiri Energi	Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan lainnya yang berpotensi menghasilkan biogas		2021-2022
1.2.2.6.	Pengembangan Jaringan dan kapasitas Listrik	Kabupaten Sumedang		2021-2023
1.2.2.7.	Pengembangan Mikrohidro/ energi lainnya	Kabupaten Sumedang	Swasta/Publik	2021-2023
1.2.3.	Prasarana Telekomunikasi			
1.2.3.1.	Peningkatan kapasitas sistem sambungan telepon	Kacantel Limbangan, Kadipaten, Rancaekek, Subang, Sumedang dan Tanjungsari	PT. Telkom/Swasta	2022-2023
1.2.3.1.	Pengembangan Base Tranceiver Station Bersama	Tersebar di Kabupaten Sumedang	PT. Telkom/Swasta	2022-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
1.2.4.	Prasarana Sumber Daya Air			
1.2.4.1.	Prasarana Air Baku/Air Bersih			
a	Peningkatan prasarana dan per luasan air baku/bersih Perkotaan	Permukiman perkotaan di Kab. Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN	2020-2023
b	Peningkatan prasarana dan per luasan air baku/bersih perdesaan	Permukiman perdesaan di Kab. Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
1.2.4.2.	Pengembangan waduk, situ dan embung			
a	Pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS)	1 WS Cimanuk-Cisanggarung yang merupakan WS Lintas Provinsi; dan	APBN	2020-2023
b	Pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Cimanuk, DAS Cipunagara, DAS Citarum; dan DAS Cipanas.	APBN/APBD Prov	2022-2023
c	Pengembangan prasarana waduk, bendung dan situ	1 Waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede; 2 Waduk Sadawarna di Kecamatan Surian; 3 Waduk Cipasang di Kecamatan Cibugel; 4 Waduk Kadumalik di Kecamatan Jatinunggal; 5 Waduk Cipanas Saat di Kecamatan Ujungaya; 6 Waduk Citarik di Kecamatan Cimanggung; 7 Bendung Rengrang di Kecamatan Paseh; 8 Bendungan Cipanas di Kecamatan Conggeang; 9 Situ Cilembang di Kecamatan Buahdua; 10 Situ Lembang di Kec. Rancakalong; dan 11 Situ Pangeran di Kecamatan Tanjungkerta	APBN/APBD Prov APBN/APBD Prov APBN/APBD Prov APBN/APBD Prov APBN/APBD Prov APBN/APBD Prov APBN/APBD Prov APBN/APBD Prov APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023 2022-2023 2022-2023 2022-2023 2022-2023 2019-2023 2022-2023 2022-2023 2022-2023 2022-2023 2022-2023
1.2.4.3.	Prasarana Irigasi			
a	Pengembangan jaringan irigasi DI Kewenangan Provinsi	1 DI Sentig 2 DI Ujungjaya	APBD Prov APBD Prov	2022-2023 2023
b	Pengembangan jaringan irigasi DI lintas kabupaten	1 DI Depok 2 DI Cangkuang 3 DI Ciranjeng	APBD Prov APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023 2022-2023 2023
c	Pengembangan jaringan irigasi DI kewenangan kabupaten	Seluruh DI yang ada di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
1.2.4.4.	Prasarana Waduk/Bendungan			
a	Pembangunan Infrastruktur umum di sekitar Waduk Jatigede	Kecamatan Jatigede	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	b Pengembangan antisipasi Genangan Waduk Sadawarna	Kecamatan Surian	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022
	1.2.4.5. Sistem Pengendalian Banjir			
	a Pengembangan embung-embung dan sistem resapan air untuk menampung air hujan dan sekaligus sebagai pengendali banjir	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	b Pemasangan tembok penahan banjir pada sungai besar di kawasan perkotaan	Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Tomo, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2023
	c Pengerukan dan pembesihan sampah pada sungai pada kawasan perkotaan	DAS Cimanuk, DAS Citarum, DAS Cipanas, dan DAS Cipunagara	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2023
	d Peningkatan normalisasi saluran drainase pada kawasan permukiman	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	1.2.5. Prasarana Pengelolaan Lingkungan			
	1.2.5.1. Sistem pengelolaan sampah			
	a Optimalisasi TPA Cibeureum Wetan menjadi sistem <i>Sanitary Landfill</i>	Kecamatan Cimalaka	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	b Pengembangan TPA	1 Cijeruk Kecamatan Pamulihan 2 Sukanyiru Kecamatan Wado	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	c Pengembangan TPA regional Cirebon Raya sebagai alternatif lokasi TPA	Perkotaan ujungjaya dan tomo	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2023
	d Pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit		APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	e Pengembangan TPA Ramah Lingkungan berbasis masyarakat	Masing-masing PPK	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2022
	f Pengembangan TPS	Masing-masing IKK	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2022
	g Pengembangan Proses Pemilahan sampah	Masing-masing PPL hingga tingkat di Bawahnya	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2022
	1.2.5.2. Limbah Cair dan B3			
	a Pengembangan sistem pembuangan limbah rumah tangga di permukiman perkotaan dan perdesaan	Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2021-2022



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	b Pengembangan sistem IPAL terpadu industri	1 Kecamatan Ujungjaya	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2023
		2 Jatinangor-Cimanggung	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2023
		3 Kecamatan Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2023
	c Penampungan LimbahBatu Bara	Zona Industri Ujungjaya		2020-2022
	d Pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit	Kawasan Perkotaan Jatinangor - Cimanggung dan Perkotaan Sumedang	APBD /Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022
	e Pengembangan sistem Pengelolaan limbah pertanian	Seluruh kecamatan di Kab. Sumedang	APBD /Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2022
	1.2.5.3. Drainase			
	a Pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman Perkotaan dan perdesaan	Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	b Pemeliharaan sistem drainase untuk mendukung permukiman Perkotaan dan perdesaan	Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	1.2.6. Sitem sistem jaringan prasarana lainnya			
	1.2.6.1. Penetapan jalur evakuasi bencana	Di seluruh desa/kampung yang ada di Kab. Sumedang yang diindikasi sebagai Daerah rawan bencana	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	a Pemetaan kawasan bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	b Jalur dan Ruang Evakuasi bencana alam	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	c Pemasangan tanda / Peringatan dini terhadap daerah rawan Bencana / mitigai bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	1.2.6.2. Rawan Banjir	Kec. Cimanggung, Sumedang Selatan, Ujungjaya, Tomo, Buahdua dan Surian	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	a Normalisasi Sungai	DAS Cimanuk, DAS Citarum, DAS Cipanas, dan DAS Cipunagara	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2022-2023
	b Rehabilitasi drainase	Jatinangor, Cimanggung	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	c Pengembangan drainase	Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	d Sistem resapan buatan	Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2019-2023
	e Jalur dan Ruang Evakuasi bencana alam	Kabupaten Sumedang	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
<b>II. Perwujudan Pola Ruang</b>				
1	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>			
	2.1.1. <b>Kawasan Hutan Lindung</b>			
	2.1.1.1. Pemeliharaan kawasan hutan lindung;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.2. Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.3. Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan represif, persuasif, dan preventif secara kontinu dengan pemanfaatan secara lestari;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.4. Rehabilitasi dan redeliniasi kawasan hutan;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.5. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.6. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.7. Rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah.	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.10. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.1.11. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.1.1.11. Pengembangan hutan dan tanaman tahunan	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua	APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;			
	2.1.2.1. Pengendalian dan pelestarian terhadap daerah resapan air	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.2.2. Pembuatan sumur resapan pada kawasan permukiman, kawasan industri, dan area rawan banjir dan kekeringan	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	202023
	2.1.3. Kawasan perlindungan setempat;			
	2.1.3.1. Pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sempadan waduk, sempadan sungai, danau dan waduk	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	2.1.4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;			
	2.1.4.1. Penataan dan pelestarian Hutan Cagar Alam Gunung Jagat	Hutan Cagar Alam Gunung Jagat	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.1.4.2. Penataan dan Pelestarian Taman Hutan Raya (TAHURA) Gn. Kunci dan Gn. Palasari	Taman Hutan Raya (TAHURA) Gn. Kunci dan Gn. Palasari	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.4.3. Penataan dan Pelestarian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas	Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.1.5. Kawasan rawan bencana alam;			
	2.1.5.1. Menurunkan bahaya lonsor dengan pembuatan terasering, penghijauan kawasan rawan bencana gerakan tanah	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.5.2. Peningkatan dan perbaikan saluran drainase pada kawasan rawan bencana banjir	Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Ujungjaya, Tomo, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.5.3. Peringatan bahaya pada kawasan rawan bencana angin puting beliung	Kecamatan Cimanggung, Cimalaka, Cisarua, Ujungjaya dan Wado	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.5.4. Antisipasi dan evakuasi terhadap kawasan rawan bencana Gempa Bumi	Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Buahdua, Cimalaka, Cimanggung, Cisarua, Cisitu, Conggeang, Darmaraja, Ganeas, Jatigede, Jatinangor, Jatinunggal, Pamulihan, Paseh, Rancakalong, Situraja, Sukasari, Surian, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Tanjungsari, Tomo, Ujungjaya; dan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.5.5. Meningkatkan kapasitas direncanakan jalur dan tempat evakuasi bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.1.5.6. Pemasangan tanda / peringatan dini terhadap daerah rawan bencana / mitigasi bencana	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.6. Kawasan lindung geologi;			
	2.1.6.1. Pengendalian dan pengawassan terhadap kawasan Cekungan Air Tanah (CAT)	Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua dan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.6.2. Pembuatan deliniasi zona kritis, zona rawan dan zona aman pada kawasan cekungan air tanah	Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua dan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.6.3. Pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sempadan mata air	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar dan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.1.7. Kawasan lindung lainnya			
	2.1.7.1. Pelestarian terhadap kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	APBN/APBD Prov /Swasta/Publik	2021-2023
	2.1.7.2. Penyediaan dan penataan terhadap ruang terbuka hijau publik pada kawasan perkotaan	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.1.7.3. Pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau privat pada pada halana rumah / gedung	Tersebar di 26 Kecamatan	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
2	Perwujudan Kawasan Budidaya			
	2.2.1. Kawasan Hutan Produksi			
	2.2.1.1. Penetapan tata batas kawasan Hutan produksi terbatas	Kecamatan Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatigede, Tomo, Conggeang, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.1.2. Pemanfaatan/Penguasaan Hutan produksi terbatas secara lestari	Kecamatan Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatigede, Tomo, Conggeang, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.1.3. Penetapan tata batas kawasan Hutan produksi tetap	Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan, Wado, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.1.4. Pemanfaatan/Penguasaan Hutan produksi tetap secara lestari	Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan, Wado, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.2. Kawasan Hutan rakyat			





No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.2.1. Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat lestari	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.2.2. Pemanfaatan/ Pengembangan Hutan dengan melibatkan masyarakat/ sebagai inti dalam pola PIR	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.2.3. Pemanfaatan/Pengusahaan dan Pengembangan hutan rakyat dan plasma dalam pola PIR	Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian	APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.3. Kawasan Peruntukan Pertanian			
	2.2.3.1. Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.2. Pelestarian dan pemanfaatan sumber mata air dalam mendukung sektor pertanian (Pembuatan embung / kolam penampungan air)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.3. Penyusunan kajian dan regulasi peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBD Kab	2019-2023
	2.2.3.4. Pengembangan perkebunan rakyat dengan melibatkan masyarakat atau sebagai inti dalam pola Perkebunan inti Rakyat (PIR);	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	
	2.2.3.5. Pengembangan kegiatan peternakan;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.6. Optimalisasi budidaya peternakan;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.7. Pengembangan budidaya peternakan;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.8. Pengembangan peternakan besar dan kecil;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.9. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.10. Pengembangan kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.11. Budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.3.12. Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, serta berada di luar area rawan banjir dan longsor;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.13. Dalam penetapan komoditas kopi, selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.14. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan permukiman dalam perkebunan masing-masing.	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.15. Peningkatan dan pengembangan potensi unggulan serta penguatan kelembagaan terhadap para pelaku pertanian, industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (Agrobisnis)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.16. Penguatan industri pertanian dalam mendukung sektor pariwisata (Agrowisata)	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.3.17. Peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan petani/buruh tani serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan petani / buruh tani	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.4. <u>Kawasan Peruntukan perikanan</u>			
	2.2.4.1. Pengembangan budidaya perikanan kolam dan mina padi	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.4.2. Pengembangan perikanan perairan umum	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.4.3. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk mendukung Kawasan wisata Waduk Jatigede	Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.4.4. Pembangunan sarana dan prasarana minapolitan kawasan Tampomas dan Kawasan Waduk Jatigede	Kecamatan Cimalaka, Tanjungkerta, Paseh, Buahdua, conggeang, Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darnaraja, Situraja dan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.5. <u>Kawasan Peruntukan Pertambangan</u>			
	2.2.5.1. Penataan dan penelitian zonasi potensi pertambangan;	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
	2.2.5.2. Pendataan Ulang izin usaha pertambangan;	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023



No.	Program Utama		Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.5.3.	Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan terhadap aktivitas pertambangan	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
	2.2.5.4.	Reboisasi tanaman untuk menahan tanah; dan	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
	2.2.5.5.	Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya yang merupakan <i>enclave</i> dalam kawasan budidaya lainnya, dengan prosedur teknis dan legal yang berlaku.	Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian	APBN/APBD Prov	2022-2023
	2.2.6. Kawasan Peruntukan Industri				
	2.2.6.1.	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri Besar	Kecamatan Cimanggung, Jatinangor, Ujungjaya, Tomo dan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022
	2.2.6.2.	Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dalam rangka mendukung <i>Aerocity</i> Kertajati;	Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
			Kawasan Hutan Produksi Ujungjaya dan Tomo	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.6.3.	Pengembangan Kawasan Industri Buahdua dalam rangka mendukung <i>Aerocity</i> Kertajati;	Kecamatan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.6.5.	Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan tol Cisumdawu di PKL, PPK, dan PPL serta desa dan kelurahan yang potensial;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.6.6.	Membuka peluang sebesar-besarnya bagi IKM untuk berinvestasi pada <i>rest area</i> Tol Cisumdawu;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.6.7.	Menempatkan produk usaha mikro, kecil dan menengah pada <i>rest-rest area</i> dengan pola kemitraan;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.6.8.	Pengembangan aneka produk olahan;	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.6.9.	Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.6.10.	Peningkatan kemampuan teknologi industri; dan	Kecamatan Ujungjaya, Tomo dan Buahdua	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023



No.	Program Utama		Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.6.11.	Penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri primer, sekunder, dan kolektor primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Congeang dan Ujungjaya	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata				
	2.2.7.1.	Pengembangan satuan kawasan wisata;	1 SKW Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
			2 SKW Kampung Toga	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
			3 SKW Cibimbing	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
			4 SKW Gunung Lingga	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
			5 SKW Tamphomas	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
			6 SKW Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
			7 SKW Cadaspangeran	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	2.2.7.2.	Penataan benda cagar budaya yang tergenang Waduk Jatigede;	Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.7.3.	Pengembangan obyek wisata utama;	Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.7.4.	Pengembangan budaya, pariwisata dan cagar budaya;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.7.5.	Pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.7.6.	Penyusunan kalender wisata kabupaten; dan	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020
	2.2.7.7.	Penyelenggaraan kegiatan festival gelar seni budaya.	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.7.8.	Pengembangan Gedung Pusat Informasi dan Komunikasi Kawasan Wisata Jatigede	Kawasan Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.7.9.	Pengembangan Gedung Moseum Sejarah dan Benda Cagar Budaya Jatigede	Kecamatan Cisitu	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022-2023
	2.2.7.10.	Peningkatan dan Pengembangan Sarana / Prasarana Pariwisata dan Olahraga	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2022
	2.2.7.11.	Penyelenggaraan festival gelar seni budaya	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.7.12.	Pengembangan terminal budaya pada kawasan wisata batudua	Kecamatan Rancakalong	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2022



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.7.13. Pengembangan geotheater Rancakalong	Kecamatan Rancakalong	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2021
	2.2.8. Kawasan Peruntukan Permukiman			
	2.2.8.1. Permukiman Perkotaan			
	a Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	b Penataan jalan lingkungan perkotaan	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	c Penataan pedestrian lingkungan perkotaan	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2021-2023
	d Penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal:	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	f Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin/Lansia/Anak terlantar/psikososial pada setiap Kelurahan	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	g Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana kesehatan di setiap kelurahan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	h Peningkatan dan pengembangan sarana ibadah di setiap kelurahan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	i Peningkatan pelayanan informasi dan telekomunikasi di setiap kelurahan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	j Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan di perkotaan	Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.8.2. Permukiman Perdesaan			
	a Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	b Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani	Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong,	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
		Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.		
	c Peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan pedesaan	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	d Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin/Lansia/Anak terlantar/psikososial pada setiap Desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	e Peningkatan dan Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan petani dan buruh tani setiap Desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	f Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana kesehatan di setiap desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	g Peningkatan dan pengembangan sarana ibadah di setiap desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	h Peningkatan pelayanan informasi dan telekomunikasi di setiap desa	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	i Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan di pedesaan	Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado.	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023
	2.2.9. Kawasan peruntukan Lainnya			
	2.2.9.1. Mengembangkan sarana dan prasarana instalasi pembangkit listri tenaga air parakan kondang di jatigede	Kecamatan Jatigede, Cibugel, Conggeang dan Surian	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.3. Meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang;	Kecamatan Jatigede	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.4. Pengembangan Kawasan Pendidikan Jatinangor sebagai Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) berbasis teknologi informasi;	Kecamatan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.5. Mengembangkan pendidikan tinggi; dan	Kecamatan Jatinangor	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023
	2.2.9.6. Menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan.	Tersebar di Kabupaten Sumedang	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2020-2023



No.	Program Utama	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target
	2.2.9.7. Peningkatan dan penataan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP)	Kecamatan Sumedang Utara	APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik	2019-2023

Sumber Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-20







### **c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan merupakan Program prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 secara rinci dan terukur dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :





**Tabel 1.23**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**  
**Perubahan RKPD Tahun 2022**

Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
1 Penguatan Sumedang Agamis	1. Revolusi Mental	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	24,054,877,500	Sekretariat Daerah	
	2. Pemajuan Budaya			Mendorong pengembangan pendidikan karakter	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial, ekonomi dan Budaya)	100%	700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	410,000,000	
					3. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase OPK yang dikembangkan	72,73%	950,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
					4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar budaya yang diKelola Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	50% 15.,98%	550,000,000	
			5. Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan wisatawan museum	3.000 orang	100.000.000			
2 Akselerasi Pelayanan Dasar	1. Reformasi Sistem Pendidikan Daerah	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan	92.02%	341,726,657,401	Dinas Pendidikan	
				2. Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Minat Baca Masyarakat	0,82%	25,493,570,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	2. Reformasi Sitem Kesehatan Daerah		Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	25%	114,505,874,101	Dinas Kesehatan dan RSD Kabupaten Sumedang
				2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	60%	150,000,000	Dinas Kesehatan
				3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan Makanan dan Minuman Sesuai Standar	100%	488,876,000	
				4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif	20%	516,970,000	
				5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	9,05%	7,731,141,000	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	3. Peningkatan Perlindungan Sosial	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			1. Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	3.61%	1,646,400,000



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Persentase PPKS yang menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	6.33%		
					Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	53.33%		
				2. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi	40%	2,293,128,120	
					Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	33.08%		
				3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	98%	4.272.000.000	
				4. Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan bencana	100%	884,671,250	
				5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	100%	68,664,600	
	4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan	1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana	100%	300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				2. Program Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni		555,000,000	



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh		1,681,565,000	
				4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang dibangun dan dikembangkan		20,205,000,000	
	5. Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum dan Pengolahan Limbah Domestik		Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak	73,6%	11,510,603,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	1,57%	3,853,345,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	6. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rasio petugas Perlindungan masyarakat (1 orang setiap RT)	85%	4,979,993,421	Satuan Polisi Pamong Praja
					Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)	100%		
					Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani	100%		
				2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90%	2,151,625,800	Satuan Polisi Pamong Praja



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
3 Penguatan Ketahanan Daerah	1. Penguatan Adaptasi Perubahan Iklim Dan Mitigasi Bencana	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan	100%	375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
				2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Air (IKA)	64,79%	140,000,000			
					Indek Kualitas Udara (IKU)	85,74%				
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Tutupan Lahan	58,41 poin	1,211,500,000			
				Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik	4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	60%		130,000.000	
					5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase sengketa akibat pengaduan LH yang diselesaikan	100%		50,000,000	
				Mengurangi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim	6. Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%		3,515,790,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%			
Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%									
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RTR	60%	2,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
	8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan	18.72%	26,936,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				9. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99%	5,335,000,00	
	2. Penguatan Ketahanan Pangan	Memperkuat ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	100% 95% 100%	4,280,000,000 1,056,281,650 135,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3. Penguatan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PPKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD Responsip Gender Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Persentase Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	16.13% 100% 100% 100% 100% 17,31% 100%	1,250,000,000 200.000.000 400,000,000 50,000,000	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak	19,13%	300,000,000		
				6. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerekerasan yang ditangani	100%	447,900,000		
					Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%			
4	Akselerasi Pemulihan Ekonomi	1. Adaptasi UMKM dengan Platform 4.0	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja	1. Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	20%	704,200,000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
				Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda	2. Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang di kembangkan	0,22%	3,048,454,000	
					3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat	100%	2,995,916,550	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	100%			
					4. Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	882,800,000	
					5. Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	100%	882,800,000	
				Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	46,60%	89,157,187,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana pertanian	52,92%	11,127,380,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Cakupan pengembangan sarana pertanian	100%	3,219,400,000	Dinas Perikanan dan Peternakan





Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas tambahan lahan pertanian yang terairi	1.952 hektar	40,783,448,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	350,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
				4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	1,312,940,700	Dinas Perikanan dan Peternakan
				5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	95%	665,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian	12%		
				6. Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	100%	20,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
				7. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian	34%	3,559,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%	440,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
				9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%	1,840,000,000	
				10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum	100%	1,142,252,500	



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				11. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%	410,000,000	
	3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	10 OW	1,145,000,000	Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i>	2. Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	20 Objek	640,000,000	
				3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	16 Sub Sektor	650,000,000	
		Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif	4. Program Pengembangan Sumber Daya dan Pariwisata Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya	7 Event	955,000,000	
	Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang		Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan	5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	60%	275,000,000	Dinas Penanaman Modal
				6. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	400,000,000	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%	674,414,000	
				8. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	200,000,000	



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				9. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Yang Sehat	50,51%	75,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
				10. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian	12,08%	50,000,000	
				11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan	5,15%	353,258,200	
				12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	12,000,000	
				13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	42,90%	2,727,200,000	
				14. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Upaya stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	12 laporan	500,000,000	
				15. Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pengembangan ekspor	10%	190,000,000	
				16. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Metrologi Legal yang Sesuai Standar	100%	80,000,000	
				17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	5 kali	399,058,200	
				18. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pembangunan Kawasan Industri	40%	1,165,000,000	



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	4. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan akseibilitas aktivitas perekonomian masyarakat	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang	81,30%	145,317,177,054	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	50%	16,160,794,000	Dinas Perhubungan
5	Penguatan Inovasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Liputan di Media Sosial (Facebook Twitter Youtube)	1.850 Berita	3,246,737,000	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
			Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika	2. Program Aplikasi Informatika	Jumlah layanan SPBE	3 Layanan	8,816,957,350	
			Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi	3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD	100% 100% 100%	2,061,218,100	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Mengembangkan sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	95% 100% 95%		



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95%		
				5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90%	2,558,100,000	
	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			1. Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Minat Baca Masyarakat	0,82%	25,493,570,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2. Program Pendaftaran Penduduk				Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	97%	1,454,687,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3. Program Pencatatan Sipil				Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90%	504,817,400		
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Persentase Data Yang Dimanfaatkan	100%	894,690,000		
5. Program Penempatan Tenaga Kerja				Cakupan Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	882,800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
6. Program Pelayanan Penanaman Modal				Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	83%	330,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	3. Penguatan Kerjasama, Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	100%	870,400,200	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi	100%			



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	4. Penguatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori baik, persentase administrasi penyelenggaraan pemerintahan	100%	354,414,150	Sekretariat Daerah
				2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	100%	2,816,642,910	
				3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Keuangan	100%	26,939,238,000	Sekretariat DPRD
					Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Umum	100%		
					Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Persidangan	100%		
					Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Perundang-Undangan	100%		
				4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2,061,218,100	Badan Perencanaan Pembangua, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				5. Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	100%	5,302,225,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	91%	8,856,021,610	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah					
					Persentase Potensi Pajak Daerah	85%							
					Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar	90%							
					Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan	100%							
						7. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%	4,404,854,930	Inseptorat Kabupaten			
						8. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase elemen IACM yang terpenuhi	100%	1,894,102,500				
				5. Pengembangan Desa Mandiri				1. Program Penataan Desa	Cakupan desa yang menerima program penataan desa	20%	470,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
									2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa tertib administrasi	100%		8,945,356,100
									3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan	20%		3,513,750,000
				6. Penguatan Fungsi Pemerintahan Umum				1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	410,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik	100%	1,962,451,000	
				3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang di bina	100%	750,000,000	
				4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial ekonomi dan Budaya)	100%	700,000,000	
				5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik tidak menjadi lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	3,864,795,000	

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang





### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

#### a. Dasar pertimbangan penerapan SPM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan kesejahteraan umum akan membawa konsekuensi bahwa negara wajib memenuhi hak dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduknya. Dalam konteks negara Indonesia yang desentralistik, kewajiban untuk memenuhi ini juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya memang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem desentralistik, negara harus mampu menjamin kesamaan akses bagi semua warganegara dan penduduk terhadap pelayanan publik khususnya pelayanan dasar di manapun berada. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya standardisasi pelayanan secara nasional yang di dalamnya juga harus tetap memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil diskresi dalam rangka merespon kebutuhan pelayanan dasar.

Guna memastikan terpenuhinya standar capaian dalam bidang layanan tertentu serta mewujudkan adanya kesamaan kualitas dan akses terhadap layanan tersebut di semua daerah otonom, maka diperlukan adanya indikator-indikator yang jelas sebagai tolak ukur pelayanan dan disertai dengan target waktu pencapaiannya sehingga pencapaiannya akan terukur secara obyektif.

Indikator-indikator tersebut, dalam undang-undang pemerintahan daerah disebut sebagai standar pelayanan minimal, yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan. Berkenaan hal tersebut, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan



yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bermakna bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk



menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- b. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
- c. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut : *kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran*. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah yang mencapai 155.872 Ha dan berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lain di Jawa Barat, tentunya mempunyai permasalahan tersendiri dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah yaitu penyediaan sarana prasarana/infrastruktur, masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta permasalahan lain yang terkait dengan pelayanan dasar menjadi tugas utama bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Melalui penerapan indikator-indikator Bidang SPM diharapkan Pemerintah Daerah akan lebih fokus pada pemenuhan pelayanan yang mendasar kepada masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka penerapan SPM di daerah Kabupaten Sumedang adalah sejumlah 6 (enam) bidang urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.

### **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

#### **Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Pencapaian SPM dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah khususnya Daerah Kabupaten Sumedang sehingga pada akhirnya terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah di lingkungan Kabupaten Sumedang.

#### **Tujuan**

Tujuan dari pelaporan Kinerja Pencapaian SPM adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana terwujudnya penerapan SPM di daerah yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya. Laporan Pencapaian SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaporan kinerja pencapaian SPM adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah atau pada perangkat daerah pengampu SPM dalam menerapkan 6 bidang SPM

#### **b. Dasar penerapan SPM**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022, (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 119)

**c. Kebijakan Umum Daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM**

Kebijakan daerah Selain program unggulan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 1.  
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program Peningkatan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
1.	<b>Dinas Pendidikan</b>			
	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Siswa PAUD yang melanjutkan kejenjang SD/MI	Dinas Pendidikan
	Pendidikan dasar	Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan
			Angka melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD		Dinas Pendidikan	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP			
	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan baik			
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Dinas Pendidikan	
Pendidikan kesetaraan	Program kesetaraan	Angka Partisipasi Murni Paket A		
		Angka Partisipasi Murni Paket B		
		Angka Partisipasi Murni Paket C		
2.	<b>Kesehatan</b>			
	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase Anemia pada Ibu hamil	Dinas Kesehatan



No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program Peningkatan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat		Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase BBLR	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita		Persentase balita gizi lebih	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		Persentase balita kurus	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif		Persentase anak 1-7 dan 10 mendapat screening kesehatan	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada lanjut		Persentase lansia yang mendapat screening Kesehatan	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Penyakit tidak menular dan Surveilans epidemiologi	Persentase Penanganan Penyakit tidak menular sesuai standar	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan jiwa berat			Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan		Persentase penanganan penyakit menular sesuai standar	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency)			Dinas Kesehatan
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>			
	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari – hari dan	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase air minum yang terbangun	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman	Luas pengurangan permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Fasilitasi pengadaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>5.</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat</b>			
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja
			Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang ( 1 Orang setiap RT)	
		Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Penegakan yang tertangani	



No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program Peningkatan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
	Pelayanan informasi rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Desa/Kelurahan rawan bencana yang mendapatkan informasi peringatan dini bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan		Persentase korban bencana yang diberikan bantuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase kecepatan Respon bencana kurang 24 Jam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (Response Time) Daerah layanan wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase penyandang disabilitas yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		Persentase Tuna Sosial yang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		Persentase Tuna Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti		Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran Kepala Daerah. Program prioritas untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran Kepala Daerah diantaranya adalah standar pelayanan minimal (SPM) untuk tahun 2018-2023 dengan jenis layanan indicator program dalam tabel 1.24 dibawah ini.





**Tabel 1.24**

**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang  
Tahun 2018-2023**

No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					
	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Siswa PAUD yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Dinas pendidikan
	Pendidikan dasar	Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	Dinas pendidikan
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP			
			Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik			
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP			
	Pendidikan kesetaraan.	Program Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni Paket A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan
			Angka Partisipasi Murni Paket B			
			Angka Partisipasi Murni Paket C			
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>					
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan



No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar Cakupan Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase BBLR			
	Pelayanan kesehatan balita;		Persentase balita gizi lebih			
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;		Persentase balita kurus			
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;		Persentase anak kelas 1-7 dan 10 mendapat screening kesehatan			
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;		Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan			
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Survei/Ins epidemiologi	Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular sesuai standar			
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;		Persentase Penanganan Penyakit Menular sesuai standar			
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;					
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan					
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus					



No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sarana air minum yang terbangun	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	1. Prosentase Sanitasi yang terbangun 2. Jumlah SPALD yang terbangun	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;  Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Luas Pengurangan Permukiman kumuh 2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)				Persentase Sarana, Prasarana dan Utulitas Umum yang dibangun dan dikembangkan		
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT</b>					
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)	Satuan Polisi Pamomg Praja
			Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)		Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani	Satuan Polisi Pamomg Praja



No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Peraturan Daerah yang Tertangani			
	Pelayanan informasi rawan bencana	Prgrm Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; d		Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam		Persentase Penanganan Pasca Bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Satuan Polisi Pamomng Praja
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>					
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	Dinas Sosial



No	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;		Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar			
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;		Persentase Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial			





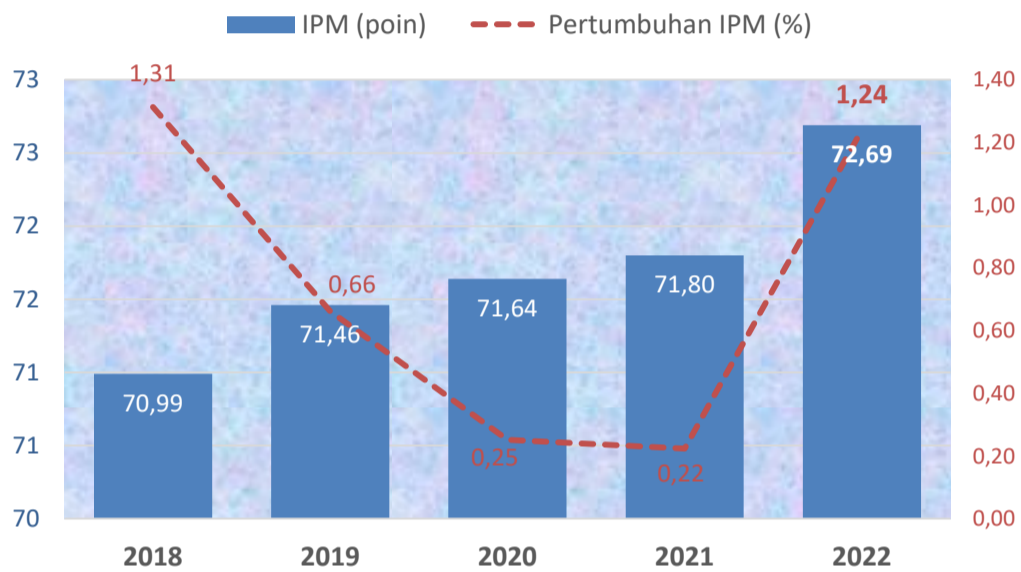
## BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1 Capaian Kinerja Makro

#### 2.1.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Capaian Kinerja Makro IPM Kabupaten Sumedang dalam 4 tahun terakhir 2022 mampu kembali meningkat cukup tinggi (0,89 poin) hingga mencapai (72,69 poin) dari tahun 2021 sebesar (71,80 poin), dan masih mampu meningkat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19.

#### Indek Pembangunan Manusia



Sumber: BPS, 2022

**Gambar 2.a.** IPM dan Perubahannya dari 2021 ke 2022

IPM Kabupaten Sumedang memang masih sedikit lebih rendah dibandingkan IPM Jawa Barat (73,12), namun pertumbuhan IPM Kabupaten Sumedang (0,43 poin) lebih cepat dari Jawa Barat (0,67 poin). Posisi IPM Kab. Sumedang masih menempati posisi 11 dari 27 Kab/Kota di Jabar.

**Tabel 2.1.****IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2022**

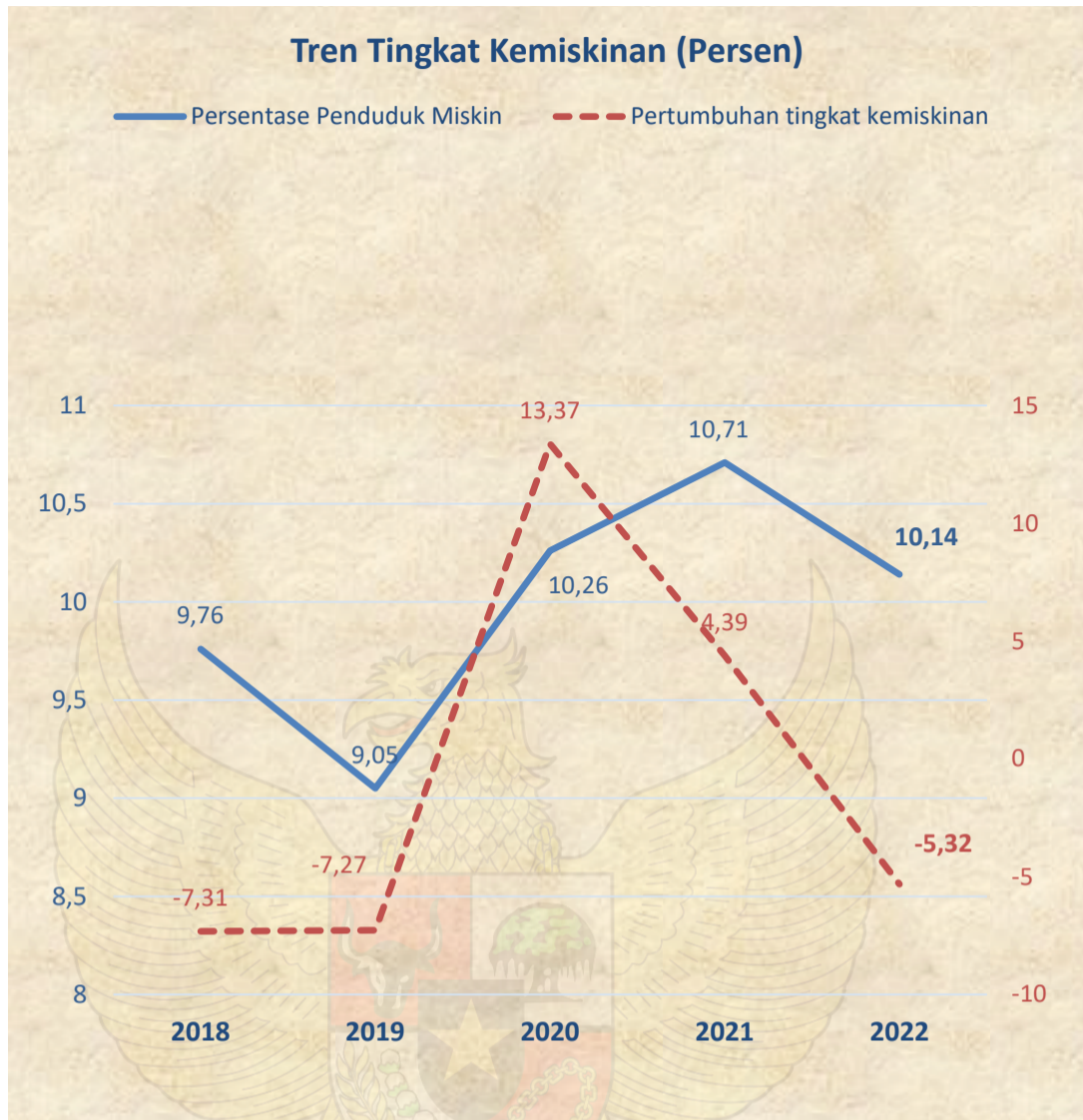
WILAYAH	UHH	%UHH	RLS	%RLS	HLS	%HLS	PPP	%PPP	IPM	%IPM	Rank
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
JAWA BARAT	73,23	73,52	12,61	12,62	8,61	8,78	10.934	11.277	72,45	73,12	
Bogor	71,36	71,65	12,49	12,50	8,31	8,34	10.410	10.860	70,60	71,20	16
Sukabumi	71,21	71,54	12,24	12,25	7,10	7,11	8.850	9.210	67,07	67,64	24
Cianjur	70,32	70,58	12,00	12,01	7,19	7,20	8.052	8.244	65,56	65,94	27
Bandung	73,72	74,01	12,70	12,71	9,07	9,08	10.307	10.588	72,73	73,16	10
Garut	71,59	71,85	12,03	12,15	7,53	7,83	7.961	8.227	66,45	67,41	25
Tasikmalaya	69,67	69,95	12,54	12,59	7,48	7,73	7.829	8.177	65,90	66,84	26
Ciamis	72,02	72,30	14,20	14,28	7,90	8,00	9.259	9.428	70,93	71,45	15
Kuningan	73,78	74,03	12,23	12,24	7,80	7,88	9.409	9.620	69,71	70,16	17
Cirebon	72,18	72,47	12,27	12,28	7,10	7,40	10.368	10.791	69,12	70,06	19
Majalengka	70,46	70,76	12,23	12,24	7,31	7,49	9.591	9.950	67,81	68,56	22
<b>Sumedang</b>	<b>72,62</b>	<b>72,91</b>	<b>12,98</b>	<b>12,99</b>	<b>8,52</b>	<b>8,72</b>	<b>10.262</b>	<b>10.776</b>	<b>71,80</b>	<b>72,69</b>	<b>12</b>
Indramayu	71,84	72,15	12,26	12,27	6,52	6,83	9.810	10.166	67,64	68,55	23
Subang	72,58	72,92	11,71	11,78	7,11	7,20	10.854	11.294	69,13	69,87	18
Purwakarta	71,18	71,47	12,12	12,13	8,10	8,11	11.669	12.193	70,98	71,56	13
Karawang	72,33	72,62	12,10	12,19	7,78	7,96	11.522	11.927	70,94	71,74	14
Bekasi	73,81	74,04	13,10	13,11	9,30	9,53	11.341	11.757	74,45	75,22	8
Bandung Barat	72,52	72,79	11,88	11,89	8,20	8,22	8.546	9.044	68,29	69,04	20
Pangandaran	71,60	71,89	12,08	12,11	7,85	8,03	9.065	9.389	68,28	69,03	21
Kota Bogor	73,82	74,13	13,42	13,43	10,53	10,63	11.716	12.058	76,59	77,17	5
Kota Sukabumi	72,58	72,85	13,58	13,59	9,81	10,14	10.942	11.229	74,60	75,40	7
Kota Bandung	74,46	74,75	14,21	14,23	10,99	11,00	16.996	17.639	81,96	82,50	1
Kota Cirebon	72,44	72,74	13,13	13,14	10,12	10,33	11.810	12.087	75,25	75,89	6
Kota Bekasi	75,19	75,48	14,10	14,11	11,31	11,44	15.903	16.239	81,95	82,46	2
Kota Depok	74,62	74,92	13,93	13,94	11,46	11,47	15.420	15.926	81,37	81,86	3
Kota Cimahi	74,21	74,50	13,81	13,82	11,08	11,21	12.019	12.500	78,06	78,77	4
Kota Tasikmalaya	72,34	72,63	13,46	13,47	9,52	9,53	10.213	10.578	73,31	73,83	9
Kota Banjar	71,19	71,49	13,24	13,25	8,77	8,78	10.476	10.967	71,92	72,55	11

Sumber: BPS (2022)

**2.1.2 Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang sebelum pandemi Covid-19 sudah mencapai 1 digit dengan rata-rata persentase penurunan sekitar 7% dari capaian tahun sebelumnya. Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, dan pada 2022 kembali dapat diturunkan menjadi 10,14% dari 10,71% atau mampu menurun 0,57% dibandingkan 2021.





Sumber : BPS, 2022

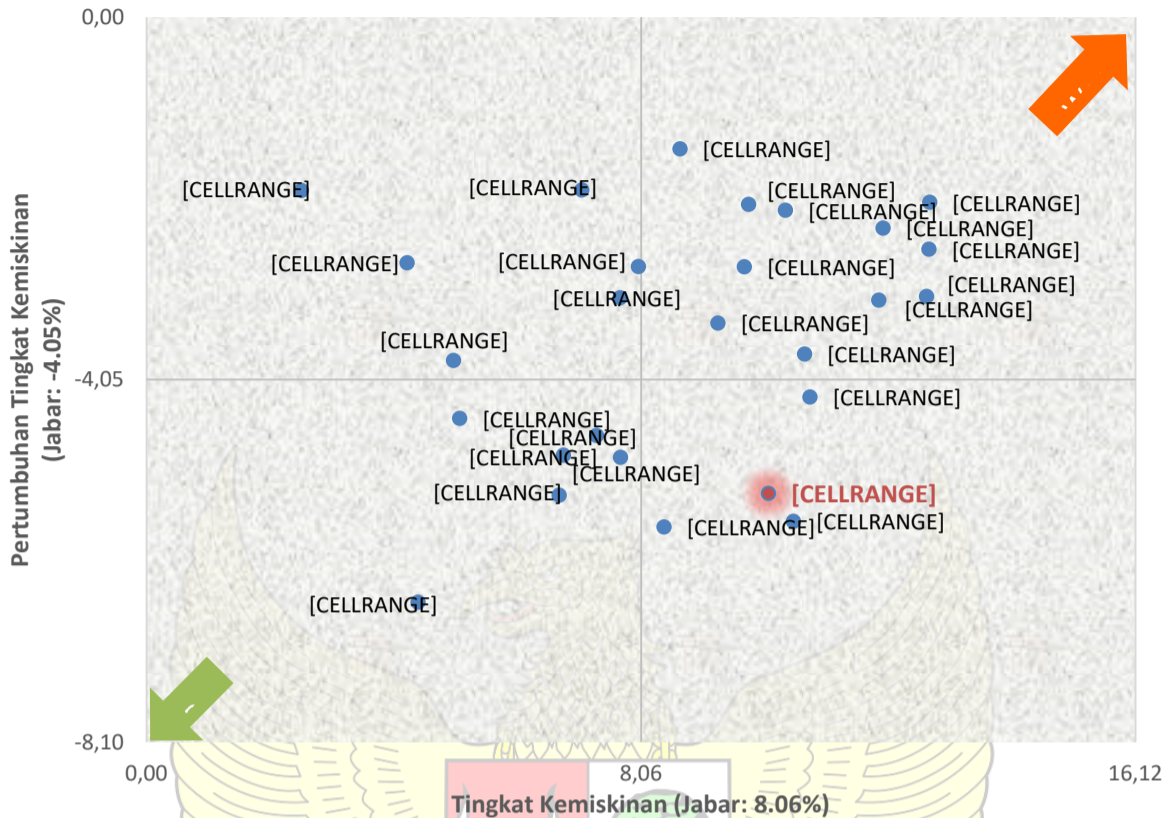
**Gambar 2.b.** Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2021 ke 2022 (%)

Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang (10,14%) meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (8,06%), namun pertumbuhan penurunan tingkat kemiskinan Sumedang (- 5,32%) mampu lebih cepat dari Jawa Barat (-4,05%). Bahkan gap tingkat kemiskinan dari 2021 ke 2022 (-0,57 % poin) menjadi ke2 terbaik di Jabar.



### Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

**Gambar 2.c.** Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Selain pertumbuhan kemiskinan yang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang juga masih relatif lebih baik dari jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 126 ribu jiwa, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang jika dirata-ratakan sekitar 155 ribu jiwa. Jika dikomparasikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin maka posisi Kab. Sumedang masih berada di kuadran 2 yang lebih baik dari sisi jumlah penduduk miskin namun kurang menguntungkan dari persentase penduduk miskinnya.

#### 2.1.3 Ketenagakerjaan

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 2022 walaupun masih siatiasi pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK masih terjadi. Kondisi yang lebih baik terjadi di 2022 dimana TPT mengalami penurunan, baik di tingkat nasional, Jawa Barat, maupun Kab. Sumedang. Namun, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang mampu turun lebih baik dibandingkan Jawa Barat, meski masih lebih rendah dari



penurunan di level nasional Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2022 menurun ke 7,72 persen dari tahun 2021 sebesar 9,18 persen.

### Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)



Sumber : BPS, 2022

**Gambar 2.f.** TPT dan Perubahannya dari 2021 ke 2022

Jika dibandingkan kondisi pengangguran dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi Kab. Sumedang berada di kuadran terbaik karena mampu menurunkan TPT lebih tinggi dari capaian Jawa Barat. Kelebihan lainnya, Kab. Sumedang meskipun memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat, dan tidak semua kab/kota mengalami kenaikan UMK, namun TPT masih bisa lebih rendah dari Jabar.

#### 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang selama masa



pandemi covid 19 mengalami penurunan, namun dengan berjalannya waktu dengan situasi pandemi covid 19 berstatus melandai kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang secara perlahan mengalami peningkatan kearah positif hal tersebut dapat kita lihat dari data BPS Kabupaten Sumedang bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,03 % dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3.17% ini menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,13 jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial, dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut antara lain adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power party*). Dengan demikian, sebagai akumulasi yang mewakili ketiga aspek ini, IPM diukur sebagai komposit dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli.

Dalam rangka memastikan tercapainya target pembangunan secara ekonomi dan sosial yang efisien dan efektif, diperlukan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah dengan menilai perkembangan indikator makro ekonomi dan indikator makro sosial. Pertumbuhan indikator makro ekonomi diikuti oleh pertumbuhan indikator makro sosial. Indikator makro sosial dipergunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan dapat meningkatkan kondisi sosial masyarakat melalui penilaian pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan indikator ekonomi melihat keberhasilan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pengukuran pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kemandirian daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah, indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, dan indeks daya beli dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.



## Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2022

[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen), 2020-2022

[back](#) [xlsx](#)

Data series subyek PDRB Menurut Kabupaten/Kota juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.

Data Series: **2016-2022** 2017-2019 2014-2016 2011-2013

Search:

Wilayah Jawa Barat	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen)		
	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	-2,52	3,74	5,45
Bogor	-1,76	3,55	5,25
Sukabumi	-0,91	3,74	5,12
Cianjur	-0,77	3,48	5,04
Bandung	-1,80	3,56	5,35
Garut	-1,26	3,58	5,08
Tasikmalaya	-0,98	3,43	4,70
Ciamis	-0,14	3,66	5,02
Kuningan	0,11	3,56	5,53
Cirebon	-1,08	2,47	4,09
Majalengka	0,89	4,75	6,63
Sumedang	-1,12	3,17	5,03
Indramayu	-1,58	0,58	2,88
Subang	-1,15	2,18	4,21
Purwakarta	-2,13	3,42	5,24
Karawang	-3,80	5,85	6,31
Bekasi	-3,39	3,62	5,30
Bandung Barat	-2,41	3,46	5,34
Pangandaran	-0,05	3,67	5,03
Kota Bogor	-0,41	3,76	5,65
Kota Sukabumi	-1,49	3,71	5,35
Kota Bandung	-2,28	3,76	5,41
Kota Cirebon	-0,98	3,05	5,10
Kota Bekasi	-2,58	3,22	4,96
Kota Depok	-1,92	3,76	5,24
Kota Cimahi	-2,26	4,19	5,92
Kota Tasikmalaya	-2,01	3,57	5,01
Kota Banjar	0,94	3,49	4,19

Catatan: 2019: angka sementara; 2020: angka sangat sementara.  
Sumber: BPS

Sumber data BPS 2022





Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,36	-2,24	0,51	-0,69
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,19	3,24	0,57	4,97
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,97	3,23	9,88	4,58
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,83	-3,65	0,86	9,64
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>6,33</b>	<b>-1,12</b>	<b>3,17</b>	<b>5,03</b>

**Gambar 2.i.** data PDRB dari BPS Tahun 2022

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2022 Kabupaten Sumedang menduduki posisi peringkat ke 11 dari 27 Kabupaten dan Kota tingkat Jawa Barat.



### 2.1.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan Per kapita Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 mencapai 32,130 (Ribu Rupiah) untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 34,464 (Ribu Rupiah) dengan selisih perubahan kenaikan sebesar 2.334 (Ribu Rupiah) pada tahun 2022.

#### Pendapatan Per Kapita Tahun 2022 sebesar 34.464 (Ribu Rupiah)

**Tabel 13.2.5** Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (ribu rupiah), 2018–2022  
*Per Capita Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Regency/Municipality in Jawa Barat Province (thousand rupiahs), 2018–2022*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2020	2021	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
Bogor	37 535	40 389	43 586	45 339	48 096
Sukabumi	25 040	26 968	24 836	25 616	27 165
Cianjur	19 009	20 373	19 241	20 002	21 232
Bandung	30 394	33 526	34 206	35 590	38 455
Garut	20 349	22 116	22 480	23 356	25 346
Tasikmalaya	19 428	20 925	20 120	20 855	22 378
Ciamis	24 474	26 273	26 048	27 218	29 472
Kuningan	21 186	23 152	21 996	22 805	24 682
Cirebon	20 908	22 506	21 869	22 833	24 468
Majalengka	23 429	25 812	24 708	25 930	28 289
Sumedang	28 292	30 341	30 821	32 130	34 464
Indramayu	43 579	46 279	43 308	44 072	48 494
Subang	23 762	25 983	25 209	26 292	28 386
Purwakarta	66 201	71 580	67 349	69 976	74 345
Karawang	92 272	98 626	91 873	98 726	107 067
Bekasi	84 155	88 370	102 419	107 788	114 338
Bandung Barat	26 019	28 209	26 088	26 879	28 653
Pangandaran	26 064	28 206	27 195	28 366	30 445
<b>Kota/Municipality</b>					
Bogor	38 530	42 403	44 100	45 921	49 755
Sukabumi	35 163	37 928	35 926	37 209	39 820
Bandung	105 601	113 177	116 056	121 126	133 378
Cirebon	68 419	74 398	70 468	72 749	78 004
Bekasi	31 031	33 330	37 999	39 527	42 421
Depok	27 620	30 079	34 358	35 659	38 226
Cimahi	48 107	54 268	56 715	59 906	65 257
Tasikmalaya	30 145	32 213	30 223	31 556	34 050
Banjar	22 463	23 508	22 184	22 892	23 812
<b>Jawa Barat</b>					

Sumber data: BPS 2023

### 2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19, gini ratio Kab. Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,384, dan pada tahun 2021 ketimpangan kembali menurun ke 0,359, tetapi pada tahun 2022 terjadi sedikit naik ke 0,394.



## Data Ketimpangan Pendapatan dari Tahun 2020,2021 dan 2022

Wilayah Jawa Barat	Gini Rasio Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	0.403	0.412	0.417
Bogor	0.381	0.396	0.400
Sukabumi	0.334	0.343	0.309
Cianjur	0.350	0.372	0.313
Bandung	0.414	0.386	0.370
Garut	0.352	0.322	0.302
Tasikmalaya	0.343	0.378	0.378
Ciamis	0.336	0.342	0.337
Kuningan	0.361	0.349	0.345
Cirebon	0.338	0.339	0.355
Majalengka	0.336	0.354	0.367
<b>Sumedang</b>	<b>0.384</b>	<b>0.359</b>	<b>0.394</b>
Indramayu	0.319	0.321	0.300
Subang	0.350	0.329	0.360
Purwakarta	0.414	0.388	0.367
Karawang	0.327	0.374	0.353
Bekasi	0.372	0.340	0.373
Bandung Barat	0.376	0.356	0.368
Pangandaran	0.335	0.320	0.294
Kota Bogor	0.412	0.441	0.430
Kota Sukabumi	0.397	0.436	0.482
Kota Bandung	0.402	0.427	0.459
Kota Cirebon	0.421	0.489	0.468
Kota Bekasi	0.352	0.401	0.441
Kota Depok	0.344	0.367	0.394
Kota Cimahi	0.380	0.415	0.408
Kota Tasikmalaya	0.366	0.414	0.405
Kota Banjar	0.312	0.341	0.362

Sumber: Badan Pusat Statistik

Source Url: <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/>

Access Time: January 17, 2023, 1:52 pm

**Gambar 2.n.** sumber data BPS tahun 2022 ketimpangan pendapatan dari tahun 2020,2021 dan 2022

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan adalah melalui pembenahan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat agar lebih efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain upaya menekan tingkat *inclusion error* (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan *exclusion error* (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) (Smeru, 2020).

Program prioritas bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka menurunkan ketimpangan pendapatan yaitu dengan program Empat Masagi Ke Lima Pancer yaitu diantaranya :

1. Ketahanan Pangan
2. Hilirisasi Industri dan Agro Bisnis
3. Digitalisasi Ekonomi
4. Sumedang Parawisata
5. Zero Stunting dan Penurunan Kemiskinan

Program Empat Masagi Ke Lima Pancer kegiatannya mulai dilaksanakan pada tahun 2023, dengan menurunkan angka ketimpangan





pendapatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang akan menurun dan otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Capaian kinerja makro Kabupaten Sumedang Tahun 2022 menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,80	72,69	0,89
2	Angka Kemiskinan	10,71	10,14	0,57
3	Angka Pengangguran	9,18	7,72	1,46
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,17	5,03	1,86
5	Pendapatan Per kapita	32.130	34.464	2.334
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,359	0,394	0,035

Capaian kinerja makro kabupaten sumedang pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan ke arah positif.

Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2021 mencapai 71,80 poin untuk tahun 2022 mengalami kenaikan 0,89 poin menjadi 72,6 poin.

Angka Kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 10,71 % untuk tahun 2022 mengalami penurunan 0,57 % menjadi 10,14%.

Angka Pengangguran pada tahun 2021 mencapai 9,18 % untuk tahun 2022 mengalami penurunan 1,46 % menjadi 7,72 %.

Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 mencapai 3,17 % untuk tahun 2022 mengalami kenaikan 1,86 % menjadi 5,03%.

Pendapatan Per kapita pada tahun 2021 mencapai 32.130.000 untuk tahun 2022 mengalami kenaikan 2.334.000 menjadi 34,464.000

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) pada tahun 2021 mencapai 0,359 poin untuk tahun 2022 mengalami kenaikan 0,035 poin menjadi 0,394 poin.

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan



dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	509	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.350	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24.544	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.883	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.933	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	734	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	459	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	711	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	610	Dinas Pendidikan	
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda	377	Dinas Pendidikan	
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100270	Dinas Pendidikan	
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.563	Dinas Pendidikan	
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.024	Dinas Pendidikan	
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3.021	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.774	Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.380	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.216	Dinas Pendidikan	
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.024	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.364	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	762	Dinas Pendidikan	
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.414	Dinas Pendidikan	
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.141	Dinas Pendidikan	
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tandatamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	471	Dinas Pendidikan	
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah	62	Dinas Pendidikan	
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	413	Dinas Pendidikan	
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	330	Dinas Pendidikan	
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetara an terakreditasi (Negeri dan Swasta)	28	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.376	Dinas Pendidikan	
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	968	Dinas Pendidikan	
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	158	Dinas Pendidikan	
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	103	Dinas Pendidikan	
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	53	Dinas Pendidikan	
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	31	Dinas Pendidikan	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/ kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	796	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan	
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	708	Dinas Kesehatan	
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	708	Dinas Kesehatan	
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	708	Dinas Kesehatan	
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	708	Dinas Kesehatan	
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	35	Dinas Kesehatan	
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35	Dinas Kesehatan	
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	106,25	Dinas PUTR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	441	Dinas PUTR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	Dinas PUTR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (m)	1	Dinas PUTR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	10	Dinas PUTR	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota	10	Dinas PUTR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	336	Dinas PUTR	
		1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	68.89	Dinas PUTR	
		2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	36,78	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	1	Dinas PUTR	
		1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DPKPP	
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab /Kota	Ada	DPKPP	
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaran SPAM		DPKPP	
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		DPKPP	
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		DPKPP	
		1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1	DPKPP	
		2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	240098	DPKPP	
		3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	240098	DPKPP	
		4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1	DPKPP	
		5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1	DPKPP	
		6) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	1	DPKPP	
		7) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		DPKPP	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1	DPKPP	
		9) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1	DPKPP	
		10) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	1	DPKPP	
		11) Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1	DPKPP	
		12) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	1	DPKPP	
		13) Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1	DPKPP	
		14) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan emenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1	DPKPP	
		1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah sederhana) yang deret laik fungsi		Dinas PUTR	
		2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	171	Dinas PUTR	
		3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan / Gedung	Ada	Dinas PUTR	
		4) Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan / Gedung		Dinas PUTR	
		5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	21	Dinas PUTR	
		6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	21	Dinas PUTR	
		7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1	Dinas PUTR	
		8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	1	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	774368	Dinas PUTR	
		2) Panjang jalan yang dibangun	774368	Dinas PUTR	
		3) Panjang jembatan yang dibangun	58	Dinas PUTR	
		4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur / fungsi)	17498,9	Dinas PUTR	
		5) Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	774368	Dinas PUTR	
		6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	12044,03	Dinas PUTR	
		7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUTR	
		8) Panjang jalan yang dipelihara	47434,33	Dinas PUTR	
		9) Panjang jembatan yang dipelihara	774368	Dinas PUTR	
		1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/ kota	271	Dinas PUTR	
		2) Jumlah tenaga kerja operator/ teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	271	Dinas PUTR	
		3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknisi / analisis di wilayah kabupaten/kota	271	Dinas PUTR	
		4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2	Dinas PUTR	
		5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten / kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	Dinas PUTR	
		6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	Dinas PUTR	
		2) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	419	Dinas PUTR	
		3) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab / kota	1	Dinas PUTR	
		4) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	271	Dinas PUTR	
		5) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	271	Dinas PUTR	
		6) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknisi /analisis di wilayah kab/kota	271	Dinas PUTR	
		7) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota	290	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1	Dinas PUTR	
		9) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	47	Dinas PUTR	
		10) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan Dinas PUTR pengawasannya	419	Dinas PUTR	
		11) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	47	Dinas PUTR	
		12) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas PUTR	
		13) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
		14) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUTR	
		15) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	290	Dinas PUTR	
		16) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		17) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usahadengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	47	Dinas PUTR	
		18) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	419	Dinas PUTR	
		19) Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	47	Dinas PUTR	
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1	DPKPP	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	1	DPKPP	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1	DPKPP	
		4. Jumlah unit rumah korban rencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1	DPKPP	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1	DPKPP	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	1	DPKPP	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1	DPKPP	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	1	DPKPP	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	1	DPKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	335	DPKPP	
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	DPKPP	
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	DPKPP	
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	DPKPP	
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1	DPKPP	
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	1	DPKPP	
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	1109	DPKPP	
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	3196	DPKPP	
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	326	DPKPP	
		19. Jumlah rumah di kab / kota	354583	DPKPP	
		20. Jumlah unit Peningkatan kualitas RTLH	3196	DPKPP	
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	3196	DPKPP	
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	1	DPKPP	
		23. Rasio rumah dan KK	1		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	1	DPKPP	
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	39	DPKPP	
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	17125	DPKPP	
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	17125	DPKPP	
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	17125	DPKPP	
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	17125	DPKPP	
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	17125	DPKPP	
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	1	DPKPP	
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	1	DPKPP	
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	1	DPKPP	
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab / Kota yang ditangani	150	Sat Pol PP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4274	Sat Pol PP	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	15	Sat Pol PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Sat Pol PP	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	18	Sat Pol PP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	805	Sat Pol PP	
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah / legal	100	BPBD	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD	
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal	100	BPBD	
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,25	BPBD	
		4. Persentase warga negara yang ikut Pelatihan	0,25	BPBD	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0,84	BPBD	
		5. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,84	BPBD	
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD	
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kab.	88	SAT POL PP	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	5	SAT POL PP	
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	83	SAT POL PP	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kel/desa	5	SAT POL PP	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	231	SAT POL PP	
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Permen Dagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	100	SAT POL PP	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	183	SAT POL PP	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4	SAT POL PP	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	6530	Dinas Sosial	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1520	Dinas Sosial	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	17	Dinas Sosial	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1843	Dinas Sosial	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	Dinas Sosial	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1253	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	63	Dinas Sosial	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	202	Dinas Sosial	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1	Dinas Sosial	
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	Dinas Sosial	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	1	Dinas Sosial	
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1	Dinas Sosial	
		14. Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	51	Dinas Sosial	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan /atau pusat kesejahteraan sosial		Dinas Sosial	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat		Dinas Sosial	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	Dinas Sosial	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	81	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinas Sosial	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	Dinas Sosial	
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	779	Dinas Sosial	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	779	Dinas Sosial	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	4 unit	Dinas Sosial	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	520	Dinas Sosial	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	51	Dinas Sosial	
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan sosial yang tersedia	51	Dinas Sosial	
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota.	32	Disnaker Trans	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	1	Disnaker Trans	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	Disnaker Trans	
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	Disnaker Trans	
		2. Persentase instruktur Bersertifikat kompetensi	100	Disnaker Trans	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0,63	Disnaker Trans	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	25,64	Disnaker Trans	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	84,6	Disnaker Trans	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	949	Disnaker Trans	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Disnaker Trans	
		8. Persentase penyerapan lulusan	26.8	Disnaker Trans	
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	100	Disnaker Trans	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100	Disnaker Trans	
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	230	Disnaker Trans	
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	12,7	Disnaker Trans	
		2. Data tingkat produktivitas total	0	Disnaker Trans	
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	0	Disnaker Trans	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	25	Disnaker Trans	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	30826	Disnaker Trans	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skalaupah	100	Disnaker Trans	
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	96,4	Disnaker Trans	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,43	Disnaker Trans	
		7. Jumlah mogok kerja	0	Disnaker Trans	
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0	Disnaker Trans	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnaker Trans	
		10. Umlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker Trans	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11. Jumlah perselisihan PHK	0	Disnaker Trans	
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3723	Disnaker Trans	
		13. Jumlah perselisihan yang Diselesaikan melalui Perundingan bipartite	8	Disnaker Trans	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota Yang diberdayakan	0	Disnaker Trans	
		15. Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	61,5	Disnaker Trans	
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	0	Disnaker Trans	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	10431	Disnaker Trans	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	64	Disnaker Trans	
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Disnaker Trans	
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	Disnaker Trans	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Disnaker Trans	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kab / Kota	0	Disnaker Trans	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	8595	Disnaker Trans	
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Disnaker Trans	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	230	Disnaker Trans	
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan yang diterbitkan	0	Disnaker Trans	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100	Disnaker Trans	
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnaker Trans	
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	2,5	Disnaker Trans	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten /kota yg telah dilatih PUG	54	DPPKBP3A	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yg sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota	17	DPPKBP3A	
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	10	DPPKBP3A	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DPPKBP3A	
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DPPKBP3A	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	DPPKBP3A	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DPPKBP3A	
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapat pelatihan	1	DPPKBP3A	
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	31504	DPPKBP3A	
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	DPPKBP3A	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kab / kota	1	DPPKBP3A	
		12. Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	DPPKBP3A	
		13. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	DPPKBP3A	
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DPPKBP3A	
<b>9</b>	<b>Pangan</b>	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	12	DPKP	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	4	DPKP	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	DPKP	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	10	DPKP	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	DPKP	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	0	DPKP	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	DPKP	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	10	DPKP	
<b>10</b>	<b>Pertanahan</b>	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati / Walikota	1	DPKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. SK Bupati / Walikota tentang PenetapanTanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum / Absentee dan Daftar Subyek	1	DPKPP	
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Maksimum / Absentee	1	DPKPP	
		4. Dokumen Izin membuka tanah	1	DPKPP	
		5. Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	1	DPKPP	
11	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA)	41,71	DLHK	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,17	DLHK	
		c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	58,82	DLHK	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	DLHK	
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	280	DLHK	
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten / kota	7	DLHK	
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	0	DLHK	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DLHK	
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLHK	
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	3	DLHK	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	1. Penerbitan akta perkawinan	27	Disdukcapil	
		2. Penerbitan akta perceraian	2	Disdukcapil	
		3. Penerbitan akta kematian	3365	Disdukcapil	
		4. Penyajian data kependudukan	1187620	Disdukcapil	
13	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas PMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas PMD	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	13360	Dinas PMD	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	270	Dinas PMD	
14	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/ Kota</b>	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	DPPKB&P3A	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	DPPKB&P3A	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26,78	DPPKB&P3A	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	DPPKB&P3A	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23	DPPKB&P3A	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DPPKB&P3A	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,29	DPPKB&P3A	
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	DPPKB&P3A	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	81,70	DPPKB&P3A	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	67,58	DPPKB&P3A	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	43	DPPKB&P3A	
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	47,62	Dishub	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	59,05	Dishub	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	Dishub	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	24,73	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan disediakan di Dinas kominfo	100	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase perangkat daerah yg menunakan akses internet yg disediakan dinas kominfo	100	Diskominfo Sanditik	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yg disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dn sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	Diskominfo Sanditik	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dgn Permen Kominfo Nomor 5 tahun 2015 Tahun 2015	100	Diskominfo Sanditik	
		5. Persentase perangkat daerah yg memiliki portal dan situs web yg sesuai standar	100	Diskominfo Sanditik	
		6. Persentase perangkat daerah yg mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UU.	100	Diskominfo Sanditik	
		7. Persentase layanan SPBE (Layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yg memanfaatkan Sertifikat elektronik	100	Diskominfo Sanditik	
		8. Persentase system elektronik yg terdaftar sesuai ketentuan peraturan undang-undangan	100	Diskominfo Sanditik	
		9. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yg terintegrasi dgn sisitem penghubung layanan pemerintah	100	Diskominfo Sanditik	
		10. Persentase perangkat daerah yg menggunakan layanan pusat data pemerintahan	100	Diskominfo Sanditik	
		11. Persentase perangkat daerah yg menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Diskominfo Sanditik	
		12. Persentase perangkat daerah yg memperbaharui datanya sesuai siklus jns data (sesuai renstra kominfo)	100	Diskominfo Sanditik	
		13. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Diskominfo Sanditik	
		14. Persentase perangkat daerah yg mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Diskominfo Sanditik	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15. Persentase ASN pengelola TIK yg tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Diskominfo Sanditik	
		16. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Diskominfo Sanditik	
		17. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	Diskominfo Sanditik	
		18. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Diskominfo Sanditik	
		19. Persentase layanan informasi public yg dilaksanakan sesuai dgn strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Diskominfo Sanditik	
17	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota</b>	1. Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,77	DKPP	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	DKPP	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,27	DKPP	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,27	DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33,23	DKPP	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	1	DKPP	
		7. Persentase koperasi yang telah Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1	DKPP	
		8. Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1	DKPP	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Kota	20,31	DKPP	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0,76	DKPP	
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1	DKPP	
		12. Persentase koperasi yang diberikan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dukungan fasilitasi pendampingan	10,81	DKPP	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	8,87	DKPP	
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data	68,82	DKPP	
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,41	DKPP	
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,78	DKPP	
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,27	DKPP	
<b>18</b>	<b>Penanaman Modal</b>	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	DPMPTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSP	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	14	DPMPTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	14	DPMPTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2602	DPMPTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	425	DPMPTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3	DPMPTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	425	DPMPTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	41	DPMPTSP	
<b>19</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	225	Disparbudpora	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Disparbud pora	
		3. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	534	Disparbud pora	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	120	Disparbud pora	
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan 2 pendidikan	125	Disparbud pora	
		6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2	Disparbud pora	
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	1	Diskominfo Sanditik	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	Diskominfo Sanditik	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Diskominfo Sanditik	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	5	Diskominfo Sanditik	
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5	Diskominfo Sanditik	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	1	Diskominfo Sanditik	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	1	Diskominfo Sanditik	
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.	100	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	100	Diskominfo Sanditik	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.	0,35	Diskominfo Sanditik	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan.	100	Diskominfo Sanditik	
<b>22</b>	<b>Kebudayaan</b>	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	12	Disparbud pora	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	12	Disparbud pora	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	12	Disparbud pora	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	30	Disparbud pora	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	39	Disparbud pora	
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten / kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	39	Disparbud pora	
		7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disparbud pora	
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	9	Disparbud pora	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	9	Disparbud pora	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2880	Disparbud pora	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	12113	Disparbud pora	
		12. Pengelolaan, pengamanan pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2880	Disparbud pora	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Disparbud pora	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Disparbud pora	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disparbud pora	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	1	Disparbud pora	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disparbud pora	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	Disparbud pora	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2	Disparbud pora	
<b>23</b>	<b>Perpustakaan</b>	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3671	Dinas Arpus	
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	7164	Dinas Arpus	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,73	Dinas Arpus	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	53,755	Dinas Arpus	
		5. Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	3	Dinas Arpus	
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	25	Dinas Arpus	
		7. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2	Dinas Arpus	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	10	Dinas Arpus	
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Arpus	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Arpus	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Arpus	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	3,98	Dinas Arpus	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1	Dinas Arpus	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1	Dinas Arpus	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan / kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	1	Dinas Arpus	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Arpus	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1	Dinas Arpus	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Arpus	
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	21602	Diskanak	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Diskanak	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	0	Diskanak	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi / dan penguatan kelembagaan)	19	Diskanak	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	207790	Diskanak	
<b>26</b>	<b>Pariwisata</b>	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	75	Disparbud pora	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	3	Disparbud pora	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	Disparbud pora	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11410	Disparbud pora	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2	Disparbud pora	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0	Disparbud pora	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Disparbud pora	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Disparbud pora	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	87	Disparbud pora	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	23	Disparbud pora	
<b>27</b>	<b>Pertanian</b>	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	3.557	DPKP	
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	79	DPKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	154	DPKP	
		4. Persentase prasaran yang digunakan	100	DPKP	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	95,65	DPKP	
		6. Persentase Fasilitasi penanggulangan bencana	0	DPKP	
<b>28</b>	<b>Kehutanan</b>	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	DPLH	
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	DPLH	
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	DPLH	
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	DPLH	
<b>29</b>	<b>Energi dan SDM</b>	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	1	SETDA/ BAGIAN EKONOMI	
<b>30</b>	<b>Perdagangan</b>	1a. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan Toko swalayan	100	DKPP	
		1b. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan	100	DKPP	
		2. Persentase penerbitan TDG	100	DKPP	
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0	DKPP	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu, untuk :	0	DKPP	
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bhn berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat Kab	0	DKPP	
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	DKPP	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	DKPP	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	DKPP	
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	32.89	DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	5,31	DKPP	
		10. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	DKPP	
<b>31</b>	<b>Perindustrian</b>	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yg lokasinya di daerah kabupaten/kota	1	DKPP	
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1	DKPP	
		3. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yg diterbitkan	1	DKPP	
		4. Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bg industri kecil dan menengah yg diterbitkan	1	DKPP	
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota yg masuk dalam SIINas terhadap ttl populasi perusahaan industri kcl, menengah dn perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	3,85	DKPP	
<b>32</b>	<b>Transmigrasi</b>	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	Disnaker Trans	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	Disnaker Trans	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	40	Disnaker Trans	



## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,0395	Dinas Pendidikan	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,462	Dinas Pendidikan	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	90,269	Dinas Pendidikan	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	53,468	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,06	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Dinas Kesehatan	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	Dinas Kesehatan	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Dinas Kesehatan	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,57	Dinas Kesehatan	
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,02	Dinas Kesehatan	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,28	Dinas Kesehatan	
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,90	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,45	Dinas Kesehatan	
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,20	Dinas Kesehatan	
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota	85,64	Dinas PUTR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	1	Dinas PUTR	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	68,62	Dinas PUTR	
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	75,93	Dinas PUTR	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,98	Dinas PUTR	
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas PUTR	
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,54	Dinas PUTR	
		8. Rasio tenaga operator/ teknisi analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,75	Dinas PUTR	
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas PUTR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	<b>Perumahan Rakyat</b>	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas DPKPP	
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas DPKPP	
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	2,737	Dinas DPKPP	
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,66	Dinas DPKPP	
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4.84	Dinas DPKPP	
5	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Sat Pol PP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100	Sat Pol PP	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD	
		5. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	73,864	Sat Pol PP	
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6,42	Sat Pol PP	
6	<b>Sosial</b>	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	Dinas Sosial & P3A	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial & P3A	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Disnaker trans	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,62	Disnaker trans	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	38,60	Disnaker trans	
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17,71	Disnaker trans	
		5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	39,74	Disnaker trans	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,211	DPPKBP3A	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,0027	DPPKBP3A	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,42	DPPKBP3A	
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	295,57	Dinas DPKP	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas DPKPP	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	87,5	Dinas DPKPP	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100	Dinas DPKPP	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	Dinas DPKPP	
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	Dinas DPKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Dinas DPKPP	
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	63,35	DLHK	
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	85,284	DLHK	
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab.	48,571	DLHK	
12	Administrasi kependudukan	1. Perekaman KTP Elektronik	97,29	DISDUKCAPIL	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	33,44	DISDUKCAPIL	
		3. Kepemilikan akta kelahiran	96,99	DISDUKCAPIL	
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	92,72	DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Dinas PMD	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	31,61	Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08	DPPKBP3A	
		1. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR)	79,94	DPPKBP3A	
		2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,57	DPPKBP3A	
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas kabupaten	72	Dinas Perhubungan	
		2. V/C Ratio di jalan kab/kota	0,20	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas KOMINFO	100	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Diskominfo Sanditik	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,29	Diskominfo Sanditik	
17	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.</b>	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	38,794	DKPP	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	8,867	DKPP	
18	<b>Penanaman Modal</b>	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-128,796	DPMPSTP	
19	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10,03	Disparbud pora	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	21,07	Disparbud pora	
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	92	Disparbud pora	
20	<b>Statistik</b>	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo Sanditik	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Diskominfo Sanditik	
21	<b>Persandian</b>	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	20,03	Diskominfo Sanditik	
22	<b>Kebudayaan</b>	1. Terlestarikannya cagar budaya	100	Disparbud pora	
23	<b>Perpustakaan</b>	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,71	Dinas Arpus	
		2. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	12,16	Dinas Arpus	
24	<b>Kearsipan</b>	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	78,98	Dinas Arpus	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Dinas Arpus	
25	Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	100,148	Disperta	
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11410	Disparbud pora	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	97,92	Disparbud pora	
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	15,47	Disparbud pora	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,682	Disparbud pora	
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,220	Disparbud pora	
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	694,195	DPKP	
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	0	DPKP	
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahun .....	1		
29	Energi dan SDM	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1	Setda/Bagian Ekonomi	
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	9,304	DKPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	32,887	DKPP	
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	5,315	DKPP	
<b>31</b>	<b>Perindustrian</b>	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten / Kota	-29,63	DKPP	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	DKPP	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DKPP	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DKPP	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100	DKPP	
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75	DKPP	
<b>32</b>	<b>Tansmigrasi</b>	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1	Disnaker trans	
		2. Jumlah pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	Disnaker trans	
		3. &nbs .....			



### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)</b>	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,89	BKAD	
		2. Rasio PAD	18,92	BKAD	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,26	BKAD	
		6. Opini Laporan Keuangan	8	BPKAD	
2	<b>Urusan Pemerintahan (Pengadaan)</b>	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	LPBJ Setda	
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	64,838	LPBJ Setda	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	21,719	LPBJ Setda	
		4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	189,039	LPBJ Setda	
3	<b>Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)</b>	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81,247	BKPSDM	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,36	BKPSDM	
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,38	BKPSDM	
4	<b>Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)</b>	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	21,14	BKAD	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,006	BKAD	
		3. Assets Management	4	BKAD	
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	19,47	BKAD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	115,57	BKAD	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 5 dokumen ----- x100% 5 dokumen	100	BKAD	

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72.65-72.82
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.58-8.80
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.99-13.04
3.	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.41-9,54
4.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,28
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,84
5.	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	74
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	2.20 - 4.15
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3.45-5.28
8.	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	4.50-6.01
9.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	74,65
10.	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49
11.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,4
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,1





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
13.	Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	20
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK	Kategori Opini	A WTP
14.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89
15.	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,1
16.	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.78-7.99

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

### 2.3.1 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2022 sebesar antara 72,65-72,82 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 72.91 tahun atau capaian kinerja sebesar 100,12% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai melebihi target.

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Angka Harapan Hidup Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,65 s.d 72,82	72.91	100%	Kinerja sangat tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

#### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2022 meningkat sebesar 0.29 tahun dengan capaian kinerja 100,12%, berikut tabel perbandingan dengan tahun 2021 :



**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,63	72,62	99,99%	72,65 s.d 72,82	72.91	100,12%	Realisasi kinerja meningkat dan capaian kinerja tercapai melebihi target

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah AHH adalah 73,20 tahun dan realisasi pada tahun 2022 adalah 72.91 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk AHH pada tahun keempat RPJMD 2018-2023 Perubahan adalah 99.60%.

**Tabel 2.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

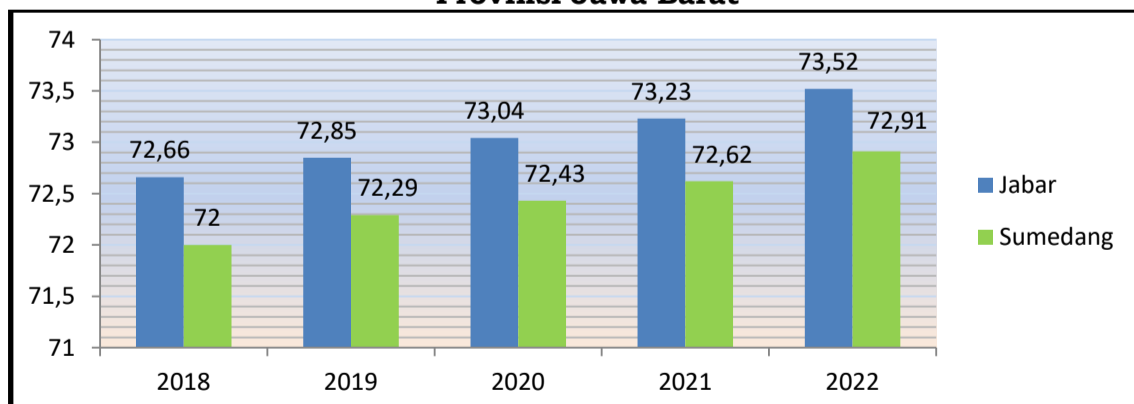
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2022	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Angka Harapan Hidup	73,20 tahun	72.91 tahun	99.60%

Sumber : BPS dan RPJMD (diolah)

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sumedang memperlihatkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai 2022, walaupun selalu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.1**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat**



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Angka harapan hidup diantaranya dipengaruhi oleh jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Pada tahun 2022, jumlah kematian ibu sebanyak 17 kasus kematian dari 15.987 kelahiran hidup dengan dengan rasio 107/100.000 kelahiran hidup dari target rasio sebesar 100/100.000 kelahiran hidup. Kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan kasus kematian ibu, diantaranya :

**Tabel 2.7  
Jumlah Kematian Ibu**

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	Pendarahan	3
2	Hipertensi	3
3	Jantung	3
4	Covid-19	1
5	Lainya	7
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

kasus kematian bayi sebanyak 233 kasus dari 15.987 kelahiran hidup dengan rasio 14/1.000 kelahiran hidup dari target 18/1.000 kelahiran hidup. Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan kasus kematian bayi.

**Tabel 2.8  
Kasus Kematian Bayi**

NO	JENIS KASUS	Usia 0-28 hari	Usia 29 hari s.d 11 Bulan	Usia 12 bulan s.d 59 bulan	JUMLAH
1	Berat Badan Lahir Rendah	82	-	-	82
2	Asfiksia	37	-	-	37
3	Insfeksi	2	-	-	2
4	Kel. Kongenital	14	12	2	28
5	Pneumonia	-	7	1	8
6	Diare	-	7	1	8
7	Meningitis	-	1	-	1
8	Demam Berdarah	-	1	6	7
9	Covid-19	-	2	1	3
10	Lainnya	21	26	10	57
	<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>233</b>

Solusi :

1. Peningkatan pelayanan PONED dengan mendatangkan dokter spesialis Kebidanan ke Puskesmas Poned.



2. Audit kematian ibu dan bayi secara rutin setiap 3 bulan sekali.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan baik di Puskesmas maupun di PONED.
5. Optimalisasi PSC 199 yaitu pelaksanaan program layad rawat.

**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja AHH tahun 2022 adalah sebesar Rp. 114,540,703,305.00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 101,975,106,542.00 dengan capaian realisasi anggaran 89,03% seperti yang tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja**  
**Angka Harapan Hidup Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.526.057.305,00	101.036.401.252,00	88.99
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100.00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	488.876.000,00	437.826.220,00	89.55
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	475.770.000,00	450.879.070,00	94.76
<b>JUMLAH</b>	<b>114,540,703,305.00</b>	<b>101,975,106,542.00</b>	<b>89.03</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja AHH tahun 2022 adalah sebesar Rp.12,565,596,763.00 atau 10.97%

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja Angka Harapan Hidup, yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Indikator kinerja program antara lain :

- a. Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar, dengan target 100% dan realisasinya 92.23% atau capaian kinerja 94.17%.
- b. Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang sesuai standar, dengan target 100% dan realisasinya 35 PKM atau capaian kinerja 100%.



2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan  
Indikator kinerja program yaitu Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar dengan target 90% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman  
Indikator kinerja program yaitu Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar dengan target 100% dan realisasi 100%.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Indikator kinerja program Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga dengan target 60% dan realisasinya 82.4% atau capain kinerjanya 59.12%.

### 1) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2022 sebesar 8,58 tahun s.d 8.80 tahun dan realisasinya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebesar 8,72 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,09% (kinerja sangat tinggi).

**Tabel 2.10**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.58 s.d 8.80	8,72	99,09%	kinerja sangat tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

#### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi rata-rata lama sekolah meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2021 RLS sebesar 8,52 tahun sehingga pada tahun 2022 terdapat peningkatan 0,20 tahun atau sekitar 2,35%.



**Tabel 2.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,67	8,52	98,27%	8.58 s.d 8.80	8.72	99,09 %	Realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Meningkat

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Di dalam RPJMD 2018-2023 perubahan , target jangka menengah RLS adalah 8.58-8.80 tahun dan realisasi pada tahun 2022 adalah 8.72 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk RLS pada tahun ketiga RPJMD adalah 96.89%.

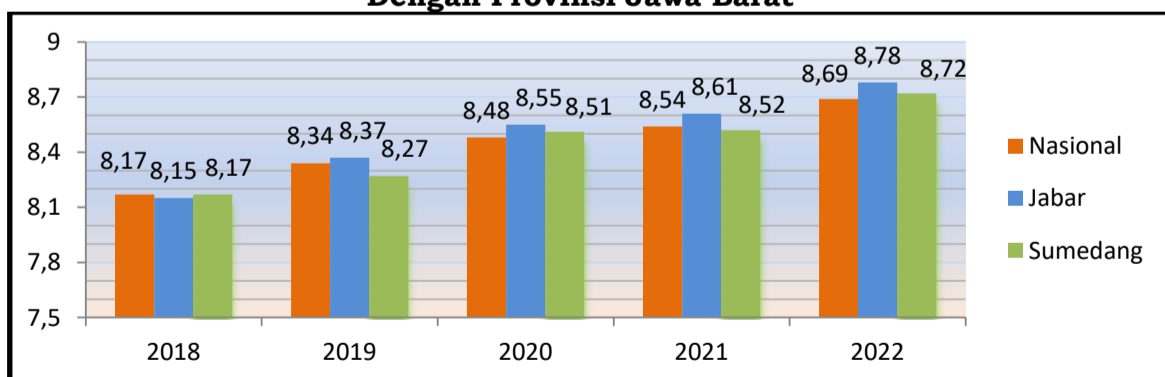
**Tabel 2.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022**  
**Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Rata-Rata Lama Sekolah	9,00 tahun	8.72 tahun	96.89%

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Capaian RLS Kabupaten Sumedang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai 2022 walaupun selalu berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat, akan tetapi pada tahun 2022 berada di atas capaian nasional.

**Grafik 2.2**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang**  
**Dengan Provinsi Jawa Barat**



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Capaian RLS didukung oleh capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan sebesar 53,47% dan persentase siswa bersertifikat diniyah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan PKBM yang cukup tersebar di wilayah Kab. Sumedang.
2. Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa tetap bersekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi
3. Bantuan Pendidikan berupa BOPD Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sehingga pendidikan lebih terjangkau.
4. Bantuan Pendidikan berupa BOP untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan sehingga usia 7-21 tahun dapat melanjutkan pendidikan melalui Kesetaraan dengan lebih terjangkau.

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik, terutama sekolah baru.
2. Belum maksimalnya akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, seperti biaya pendidikan yang murah dan terjangkau, pendidikan gratis untuk anak-anak tidak mampu, ketersediaan sekolah yang dekat dengan pemukiman, ketersediaan ruang kelas untuk menampung siswa, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan proses pembelajaran, memperbesar peranan pemerintah di dalam memenuhi biaya pendidikan terutama untuk biaya investasi dan biaya operasional.
3. Tidak ada Bantuan Pendidikan bagi warga berusia 22 tahun ke atas untuk melanjutkan pendidikan.

Solusi :

1. Pemberdayaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik.
2. Memberlakukan sistem Zonasi pada proses PPDB.
3. Sosialisasi program, Pendidikan kepada para orang tua murid .
4. Mempermudah proses rekomendasi pendirian PKBM di daerah-daerah yang padat penduduk dan keterbatasan sarana transportasi agar tidak terbebani biaya transportasi.



**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja RLS pada tahun 2022 adalah Rp. 42.173.447.550,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 41.894.262.849,00 atau 99,34%.

**Tabel 2.13**  
**Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	42.173.447.550,00	41.894.262.849,00	99.34

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja RLS tahun 2022 sebesar Rp. 279.184.701,00 atau 0,66%.

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program Penunjang Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator kinerja Program untuk membidik RLS tahun 2022 yaitu :

**Tabel 2.14**  
**Indikator Kinerja Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022**

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	100	53,47	53,47%
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	100	92,04	92,04%

Faktor Pendukung :

APK PAUD didukung dengan adanya Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD yang besar sekali manfaatnya untuk operasional.

Faktor Penghambat :

Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah.

Solusi :

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Himpaudi dan IGTKI sosialisasi pentingnya pendidikan pra sekolah kepada masyarakat.

**2) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja “Angka Harapan Lama Sekolah” tahun 2022 sebesar 12.99-13.04 tahun dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik





realisasinya sebesar 12,99 tahun atau capaian kinerja sebesar 99,62% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,99 s.d 13,04	12,99	99,62	Kinerja sangat tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sumedang meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun tidak signifikan. Angka HLS tahun 2021 sebesar 12,98 tahun dan pada tahun 2022 sebesar 12,99 tahun, sehingga pada tahun 2022 terdapat peningkatan 0,01 tahun atau sekitar 0,08%.

**Tabel 2.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,66	12,98	95,02%	12,99 s.d 13,04	12,99	99,62%	Realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Meningkat

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah HLS adalah 13,12 tahun dan realisasi pada tahun 2022 adalah 12,99 tahun, sehingga capaian kinerja jangka menengah untuk HLS pada tahun ketiga RPJMD adalah 99,01%.



**Tabel 2.17**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini**  
**Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD**

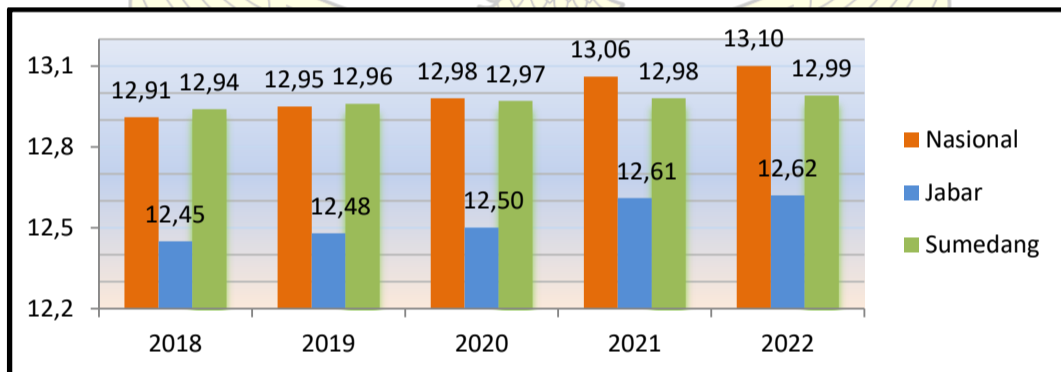
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Angka Harapan Lama Sekolah	13,12 tahun	12,99 tahun	99,01%

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang dan RPJMD (diolah)

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Dari tahun 2018 sampai 2022, HLS Kabupaten Sumedang selalu lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.3**  
**Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat**



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Capaian kinerja HLS ditunjang oleh capaian APK SD sebesar 91,44%; APK SMP 99,84%; APM SD 85,76%; APM SMP 87,68%; APK PAUD 92,43%; dan Persentase PAUD yang terakreditasi 45,34%.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. APK SD/SMP di dorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terasa manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Juga didukung adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besar sekali manfaatnya untuk operasional sekolah, utamanya Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin dalam meringankan biaya untuk melanjutkan pendidikan yang



lebih tinggi.

2. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar.
3. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah.

Faktor Penghambat :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang ada seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), membebaskan biaya pendidikan, Program Indonesia Pintar, Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Sekolah Gratis.
2. Belum maksimalnya akses dan layanan Pendidikan agar setiap masyarakat dapat melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya
3. Belum maksimalnya pencapaian angka wajib belajar 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar yang berakibat belum maksimalnya.
4. Kompetensi guru belum sesuai kebutuhan KBM (mutu dan kompetensi guru rendah)
5. Kemampuan guru dalam penguasaan IT masih rendah
6. Aktifitas KKG dan MGMP di kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal untuk mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya belajar dan budaya berbagi ilmu sesama guru
7. Penyebaran guru belum merata / Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu
8. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil akibat pengaruh intervensi politik
9. Kekurangan guru PNS
10. Jumlah murid pada sekolah tertentu kurang dari 10 dalam satu kelas

Solusi :

1. Pemerintah daerah mempermudah ijin belajar untuk guru, serta memberikan beasiswa dan kemudahan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 untuk menempuh pendidikan. Bagi yang tidak memungkinkan (dikarenakan usia mendekati pensiun) dapat diberikan pelatihan agar kompetensinya dapat setara dengan guru D4/S1
2. Pemerintah daerah memberikan pelatihan IT secara berkala kepada guru-guru melalui KKG atau MGPM dengan bekerja sama dengan berbagai tenaga atau rewalan ahli IT atau guru-guru IT
3. Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada KKG/MGMP yang aktif mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi guru



4. Pemerintah daerah meredistribusi guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan guru, atau melakukan rotasi guru secara berkala
5. Pemerintah daerah bersama DPRD Komisi Pendidikan membuat aturan khusus terkait rotasi guru secara berkala, misalnya 3 atau 5 tahun sekali berdasarkan analisis kebutuhan sehingga semua guru pasti dirotasi dan mengurangi intervensi politik, serta mengalokasikan dana untuk pembangunan dan renovasi perumahan yang layak bagi guru di daerah terpencil
6. Pemerintah daerah menerapkan multigrade dan multisubject, guru bisa mengajar mata pelajaran serumpun dan mengajar di kelas jenjang berbeda
7. Pemerintah daerah melakukan analisis populasi anak usia sekolah dengan satuan pendidikan terdekat, dan pemerintah daerah mengambil sikap terkait sekolah yang hanya memiliki siswa kurang dari 10 pada setiap kelas, baik melakukan merger sekolah serta menyarankan siswa tersebut untuk bersekolah di sekolah lain atau membina sekolah tersebut agar mendapatkan siswa sesuai kondisi sekolah

**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja HLS pada tahun 2022 adalah Rp. 310.149.443.827,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 290.250.306.605,00 atau 93,58%.

**Tabel 2.18**  
**Realisasi Anggaran Per Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	310.149.443.827,00	290.250.306.605,00	93,58

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja HLS tahun 2022 sebesar Rp. 19.899.137.222,00 atau 6,42%.

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program Penunjang Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan. Indikator kinerja Program untuk membidik Angka HLS tahun 2022 yaitu :



Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun dalam Pendidikan SD	Persen	100	89,39	89,39%
Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun dalam Pendidikan SMP	Persen	100	90,27	90,27%

Faktor Pendukung :

Didalam juknis Pemanfaatan dana BOS, sudah dapat mengalokasikan dana BOS untuk perawatan gedung sekolah untuk gedung atau ruangan dengan tingkat kerusakan ringan

Faktor Penghambat :

1. Banyak ruang kelas/ guru / tata usaha / perpustakaan / laboratorium /lainnya yang memiliki intensitas kerusakan berat.
2. Perbandingan jumlah ruang kelas terhadap siswa tidak sesuai peraturan (rombel tidak ideal) dan Kurangnya fasilitas: kelas, perpustakaan, laboratorium.
3. Penumpukkan siswa di wilayah tertentu (disparitas satuan pendidikan).
4. Bangunan tidak ramah anak dan kebutuhan khusus lainnya.

Solusi :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan pemetaan kondisi ruang kelas berdasarkan zona pendidikan. Sesuai dengan hasil pendataan dan pemetaan. Pemda memberikan prioritas alokasi anggaran kepada pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas berdasarkan kondisi ruang yang rusak berat, dan Penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD.
2. Sekolah dalam satu zona saling mendukung baik secara infrastruktur maupun PTK melalui sharing resources dan redistribusi guru.
3. Penguatan peran gotong royong tripusat pendidikan dalam zona dengan mendorong orang tua dan masyarakat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.
4. Penedapankan isu gender dan difabel, serta pengembangan mulok yang ramah anak.

### 3) PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2022 sebesar 10,41-9,54 dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang sebesar 10,14% atau capaian kinerja sebesar 93,71% (Sangat Tinggi). Target kinerja tidak tercapai.



**Tabel 2.19**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya penanggulangan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,41 s.d 9,54	10,14%	93,71	Sangat tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Target kinerja Persentase Penduduk Miskin pada RPJMD di rubah dengan alasan karena melihat dari capaian kinerja tahun sebelumnya yang rendah dikarena kondisi yang dialami pasca Pandemi Covid-19 dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini sehingga perlu dilakukan evaluasi atas target dan capaian kinerja yang dapat terukur dan dapat dicapai (SMART) .

Dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi dan capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 mengalami penurunan. Persentase jumlah penduduk miskin tahun 2021 sebesar 10,71% sedangkan tahun 2022 sebesar 10,14.% atau terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,57%.

**Tabel 2.20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022**  
**dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya penanggula ngan MPKS serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,36	10,71	54,48%	10.41 s.d 9,54	10,14	93,71%	Realisasi dan Capaian Kinerja meningkat

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Persentase Penduduk Miskin adalah 7,56% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 10,14%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase



Penduduk Miskin pada tahun ketiga RPJMD adalah 65,87

**Tabel 2.21**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022**  
**Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

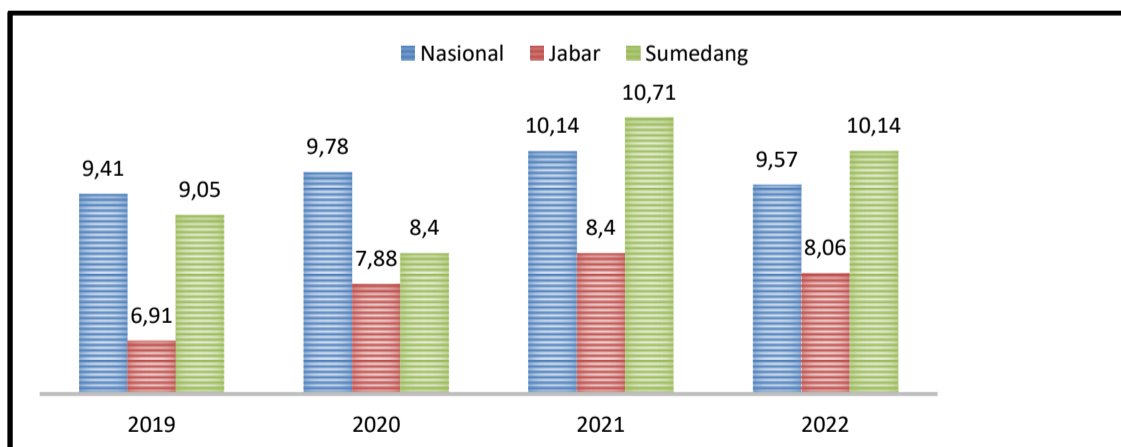
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Persentase Penduduk Miskin	7,56%	10,14%	65,87%

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Sumedang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Sumedang masih berada di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum. Dengan demikian masyarakat Sumedang masih memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang rendah atau di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di semua wilayah di Indonesia. Persentase kemiskinan tahun 2022 untuk tingkat Nasional 9,57% turun 0,57% dari tahun 2021, persentase kemiskinan tingkat provinsi turun 8,06 atau turun 3,34% dari tahun 2021 sementara untuk Kabupaten Sumedang berada di posisi 10.14% atau turun 5,32%.

**Grafik 2.4**

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia**

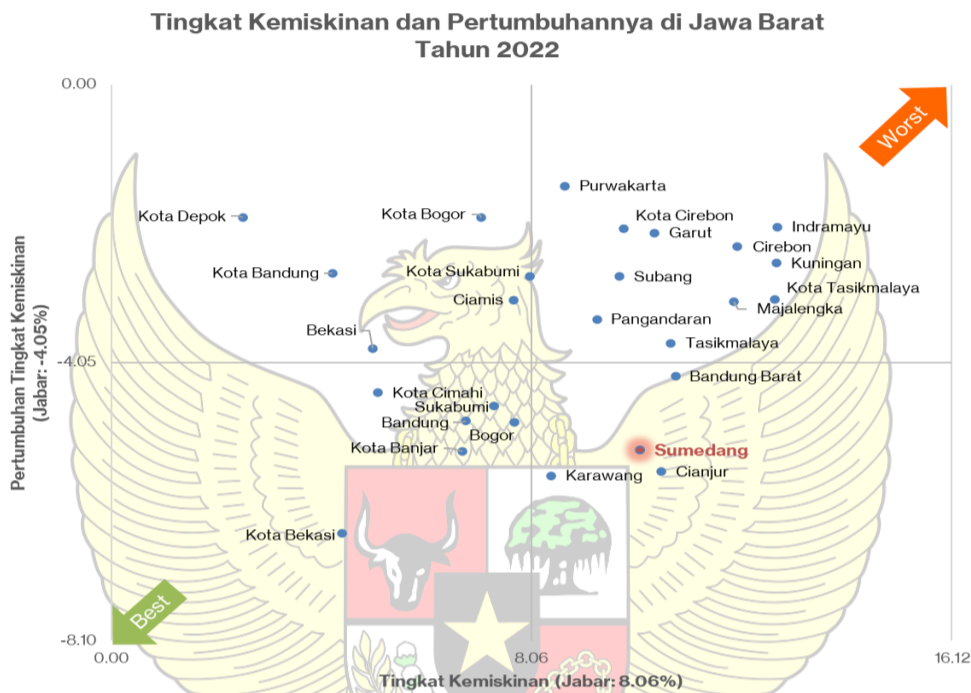


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)



Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

**Grafik 2.5**



Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang (10,14%) meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (8,06%), namun pertumbuhan penurunan tingkat kemiskinan Sumedang (- 5,32%) mampu lebih cepat dari Jawa Barat (-4,05%). Bahkan gap tingkat kemiskinan dari 2021 ke 2022 (- 0,57 % poin) menjadi ke2 terbaik di Jabar.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

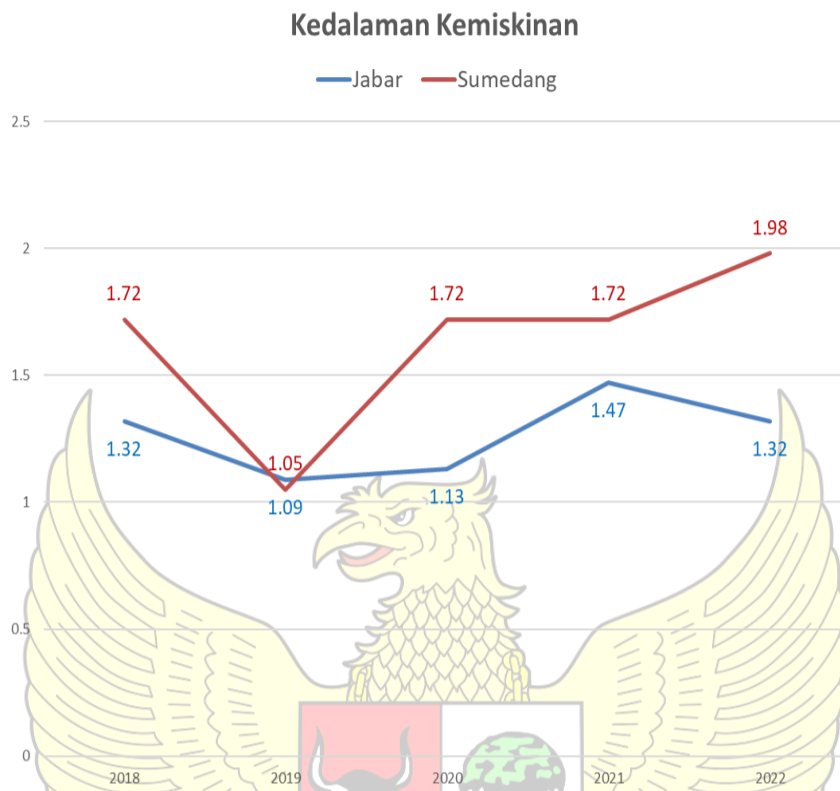
Tingkat kemiskinan penduduk pun tidak lepas dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan antara Kabupaten





Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

**Grafik 2.6**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumedang dan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022**



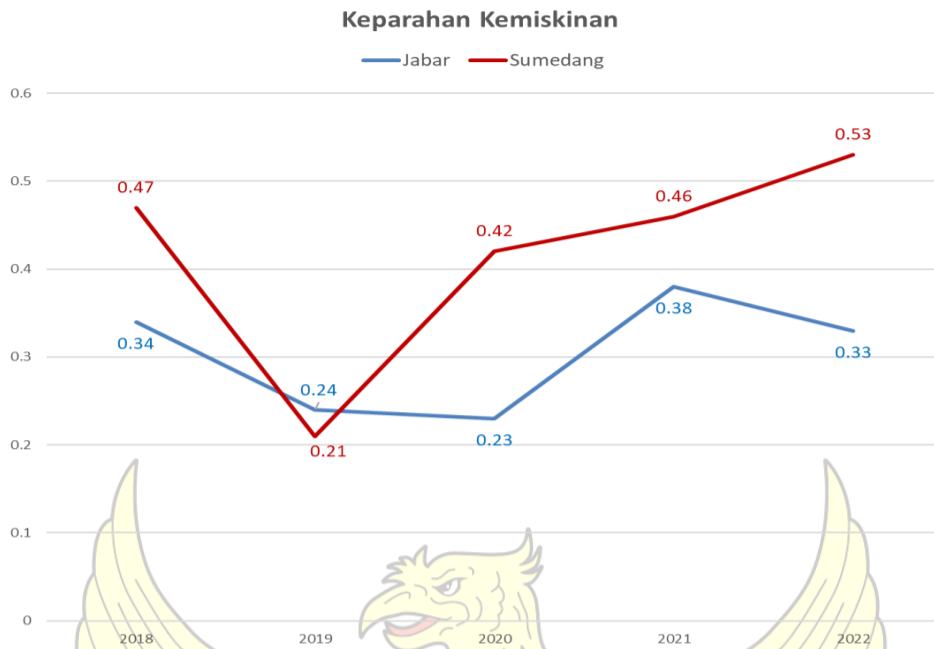
Sumber. BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Berdasarkan Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan semakin besar effort yang diperlukan untuk mengeluarkan penduduk miskin dari kemiskinan, khususnya pasca pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pengeluaran pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang masih belum membaik atau belum merata.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang juga cenderung meningkat. Capaian terendah P2 terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,21% lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,24%. Namun Tahun berikutnya capaian P2 meningkat. indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin terutama dipicu adanya pandemi Covid-19. Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan disajikan sebagai berikut.



## Grafik 2.7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Selain ketimpangan di antara penduduk miskin meningkat di tahun 2022, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara umum yang diukur dengan gini ratio juga masih fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, ketimpangan masih berada dalam kategori rendah ( $< 0,4$ ) sejak 2019.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

Dampak pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam hal penurunan kemiskinan. Peningkatnya penduduk miskin saat pandemi mengakibatkan penurunan pendapatan, penurunan kegiatan ekonomi, dan meningkatnya angka pengangguran, penurunan daya beli konsumen, Penurunan kegiatan ekonomi serta banyak para pelaku ekonomi gulung tikar disebabkan oleh penurunan permintaan pasar, kesulitan bahan bahan baku, dan meningkatnya ongkos produksi. Kemudian, adanya peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh hilangnya pekerjaan buruh migran, tenaga kerja baru tidak terserap pasar kerja, dan terjadinya PHK dan lain-lain.

Kendala

1. Penerima manfaat bantuan sosial masih terdapat yang diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa sebagai pendukung sistem layanan rujukan terpadu di tingkat kabupaten belum



berjalan secara optimal

3. Peranan petugas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum optimal.
4. Keterbatasan pagu anggaran APBD untuk penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
5. Database jumlah rumah yang belum dan sudah diserahkan belum terinventarisir dengan baik hal ini disebabkan adanya keterlambatan laporan dari pengembang/pengelola perumahan.

Solusi :

1. Optimalisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi kelayakan terhadap penerima bantuan sosial melalui mekanisme Musyawarah perencanaan di tingkat desa dan kelurahan untuk diusulkan ketidaklayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG.
2. Peningkatan kapasitas fasilitator Puskesmas melalui Dinas Sosial.
3. Peningkatan kapasitas PSKS (TKSK dan PSM).
4. Optimalisasi program rutilahu tepat sasaran prioritas.
5. Intensifitas pengelolaan data base rumah tidak layak huni dan monitoring evaluasi rumah yang belum dan sudah diserahkan secara berkala.

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kebijakan dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang terdiri dari empat program utama, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator program Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target 58,33% dengan realisasi 85% capaian kinerja 100%. (kinerja sangat tinggi)
- 2) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan indikator program Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar dengan target 98% dengan realisasi 97,82% capaian kinerja 99,82% (kinerja sangat tinggi)
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target 100% realisasi 100 % atau capaian kinerja 100% (kinerja sangat tinggi)
- 4) Program Pengembangan Perumahan dengan target kinerja “Rasio Rumah Layak Huni”. Pada tahun 2022 target kinerja sebesar 82,67% dan realisasinya 82,40% atau capaian kinerja sebesar 99,67% (kinerja sangat tinggi).



**g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 sebesar Rp.13.786.920.700,00 yang terdiri dari 6 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.13.723.921.040,00 atau 99,54%.

Program	Pagu	Realisasi	%
Pogram Rehabilitasi Sosial	2,266,715,940.00	2,257,339,150.00	99,59
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,967,475,500.00	4,266,490,500.00	85,89
Program Pemberdayaan Sosial	650,343,200.00	631,052,452.00	97,03
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9,545,078,000.00	8,918,409,958.00	93,43
Program Pengembangan Perumahan	300,000,000.00	293,237,000.00	97,75
<b>Jumlah</b>	<b>17.729.612.640.00</b>	<b>16.366.529.060.00</b>	<b>92,31</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Penduduk Miskin tahun 2022 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

**5) INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender” tahun 2022 sebesar 96,28 poin dan realisasinya berdasarkan data dari BPS sebesar 95,09 poin atau capaian kinerja sebesar 98,76% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

**Tabel 2.22**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,28	95,09	98,76%	Sangat Tinggi

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)*

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi IPG tahun 2022 yaitu 95,09 poin dengan capaian kinerja 98,76%, sementara realisasi IPG tahun 2021 terealisasi 96,18 poin dengan capaian kinerja 99,34%. Sehingga pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi sebesar 1,09 poin.



**Tabel 2.23**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender**  
**Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsisi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,81	95,18	99,34%	96,28	95,09	98,76%	Realisasi menurun dan capaian kinerja menurun

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Indeks Pembangunan Gender adalah 96,75 poin dan realisasi pada tahun 2022 adalah 95,09 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IPG pada tahun keempat RPJMD 2018-2023 sebesar 98,28%.

**Tabel 2.24**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target**  
**Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Indeks Pembangunan Gender	96,75 poin	95,09poin	98,28%

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

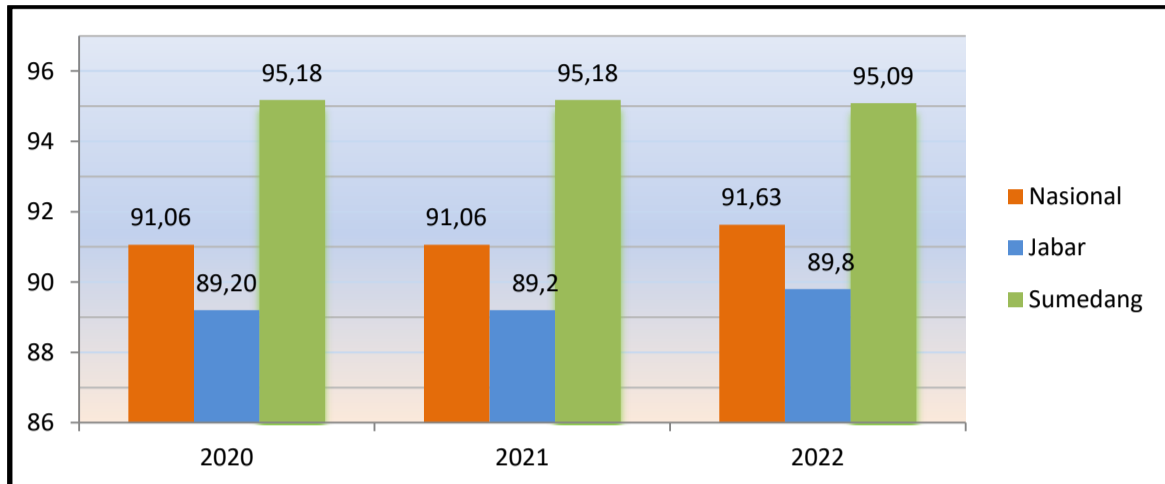
IDG Kabupaten Sumedang tahun 2022 masih di bawah rata-rata nasional, namun berada diatas capaian Provinsi Jawa Barat. IDG Kabupaten Sumedang meskipun sudah berada di atas rata-rata Jawa Barat, dari grafik dibawah dapat dilihat peningkatan yang dicapai dimana untuk Nasional dari 76,26 meningkat 0,33 poin menjadi 76,59 poin, untuk Provinsi Jawa Barat dari 70,62 poin meningkat 0,6 poin menjadi 71,22 poin, dan untuk Kabupaten Sumedang dari 70,13 poin meningkat 2,10 poin menjadi 72,23 poin, hal ini diluar ekspektasi dari sisi capaian target dapat melebihi target dan disi lain peningkatannya cukup besar yaitu 2,10 poin. Untuk tahun berikutnya diharapkan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sumedang bisa lebih meningkat lagi melalui berbagai cara seperti peningkatan kompetensi perempuan menjadi tenaga profesional agar dapat memberikan sumbangan lebih besar pada pendapatan rumah



tangga misalnya melalui peningkatan literasi dan interaksi digital. **rafik**

## 2.24

### Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2022



Sumber : BPS Kab. Sumedang

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam peningkatan Indeks Pembangunan Gender terdapat langkah-langkah alternatif/solusi antara lain :

1. Pengembangan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di seluruh Desa/Kelurahan berkolaborasi dengan berbagai Program yang ada di Desa/Kelurahan.
2. Pelatihan Vokasional Sekoper Cinta (IT, Digital Marketing, Skin Care, Kuliner)
3. Pembentukan, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok PEKKA
4. Monitoring dan Pembinaan Usaha Perorangan Sekoper Cinta.
5. Pemberian advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan
6. Pemenuhan layanan tindak lanjut pengaduan bagi perempuan korban kekerasan.
7. Pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk kemandirian keluarga dari segi ekonomi.
8. Melakukan pembinaan dan KIE kepada Keluarga Sejahtera 1 yang termasuk PUS memiliki anak 2 untuk ber-KB
9. Pemberian Bantuan Peralatan Usaha dan Perlengkapan Kepada Kelompok UPPKS

#### f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IDG tahun 2022 adalah



Rp.413.192.000,00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.384.510.000,00 atau 93,06%.

**Tabel 2.25**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks**  
**Pembangunan Gender Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	800.000.000,00	795.957.080,00	99,49
Program Perlindungan Perempuan	6,116,850,000.00	5,656,151,000.00	92,47
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	300.000.000,00	277.436.560,00	92,48
<b>Jumlah</b>	<b>7.216.850.000,00</b>	<b>6.729.544.640,00</b>	<b>93,26</b>

Capaian kinerja IDG tahun 2022 sebesar 101,96% dan realisasi anggaran program sebesar 93,82%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,14%.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	101,96%	93,82%	8,14%	Efisien

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender, yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
Indikator kinerja program yaitu Persentase OPD Responsif Gender dengan target 45,16% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja 221,43%. Program ini terdiri dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Indikator Kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera tahun 2022 yaitu :



- a. Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan (BKB, BKR, BKL) dengan target 18,30% dan Realisasinya 18,35% atau Capaian Kinerja Sebesar 100,27% dapat diartikan Capaian Sangat Tinggi itu dikarenakan partisipasi keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan meningkat.
  - b. Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS dengan target 3,53% dan Realisasinya 3,56% atau Capaian Kinerja Sebesar 100,85% dapat diartikan Capaian Sangat Tinggi itu dikarenakan jumlah keluarga Pra S dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS meningkat.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator kinerja program yaitu Persentase Pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga bagi Perempuan dengan Target 100% dan Realisasinya 100% atau Capaian Kinerja 100% dapat diartikan Capaian Sangat Tinggi.

## 7) INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2022 target kinerja “Indeks Kerukunan Umat Beragama” sebesar 74 poin dan realisasinya adalah 75,32 poin atau capaian kinerja sebesar 101,78% (kinerja sangat tinggi). target kinerja melebihi target.

**Tabel 2.31**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya kehidupan agamis yang di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74	75,32	101,78%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Survey IKUB Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2021, IKUB tahun 2022 realisasinya 75,32 capaian kinerjanya melebihi target dari semula 98,93% menjadi 101,78%.

**Tabel 2.32**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Umat Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**





Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,5	72,2	98,93%	74	75,32	101,78%	Realisasi meningkat Capaian Kinerja melebihi target

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah IKUB adalah 74 poin dan realisasi pada tahun 2022 adalah 75,32 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKUB pada tahun keempat RPJMD sebesar 101,10%.

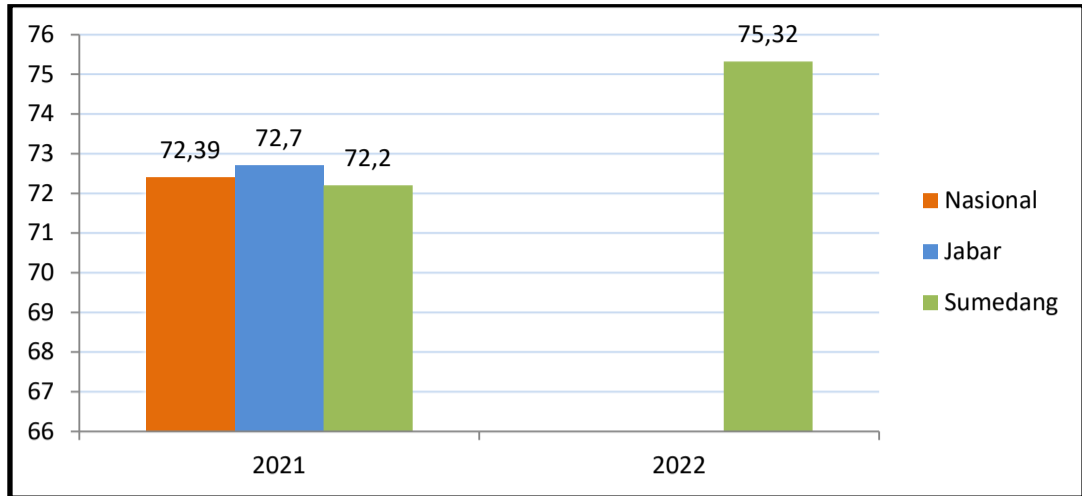
**Tabel 2.33**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja IKUB Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,5 poin	75,32 Poin	101.10%

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Pada tahun 2022 IKUB Kabupaten Sumedang sebesar 75,32 poin, Rilis Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi maupun Nasional yang bersumber dari kemenag.go.id. sampai dengan laporan ini di susun belum rilis sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang.

**Grafik 2.10**  
**Perbandingan IKUB Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022**



Sumber : Kemenag : [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Survey Kerukunan Umat Beragama tahun 2022 ditujukan untuk memetakan kerukunan umat Bergama di Kabupaten Sumedang. Informasi kerukunan tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi utama, yaitu dimensi toleransi, dimensi kesetaraan dan dimensi Kerjasama. Adapun rata-rata dari setiap dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.34**  
**Skor tiap Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang**

No	Dimensi	Skor	Korelasi
1	Toleransi	96,54	0,6130
2	Kesetaraan	84,07	0,2481
3	Kerjasama	33,40	0,6430

Hasil skor dimensi tersebut menunjukkan bahwa Toleransi di Kabupaten SUMedang sebesar 96,40 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sumedang saling menghargai dan dapat menerima tetangga yang berbeda agama selama saling menghargai dan tidak mengganggu, selain itu responden juga dapat beranggapan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama hal tersebut ditunjukkan pada skor kesetaraan sebesar 84,07, untuk dimensi Kerjasama mendapatkan skor 33,40 yang mendapatkan skor terendah yang menjadi penyebab dimensi Kerjasama rendah dikarenakan sebaran umat beragama dan sarana ibadah yang tidak sama.



Beberapa Langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama anantara lain :

1. Workshop FKUB dengan para tokoh agama dalam Peningkatan Kewaspadaan, toleransi, kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama di Kabupaten Sumedang;
2. Kegiatan monitoring Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) hari-hari besar keagamaan Idul Fitri, Natal dan tahun baru untuk menjaga kondusifitas daerah dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan kegiatan hari hari besar kegamaan dalam toleransi serta kesetaraan antar umat beragama;
3. Penyelenggaraan kegiatan Rakor Forkopimda, Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Penanganan Konflik Sosial adalah kegiatan yang menunjang kondusifitas di Daerah cegah dini, tangkal dini untuk mengantisipasi/menangani berbagai potensi konflik yang terjadi sehingga tidak terjadi/menimbulkan konflik di Kabupaten Sumedang;
4. Bintek Wawasan kebangsaan, kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental, kegiatan Bela Negara dan Kemah Pembauran kebangsaan adalah kegiatan yang menjaga kondusifitas daerah untuk memperkuat rasa kesatuan bangsa, nasionalisme, dan ideologi wawasan kebangsaan di kalangan pelajar, ras, suku, adat dan etnis di Kabupaten Sumedang;
5. Pendataan jumlah penduduk pemeluk agama dan pendataan tempat ibadah.
6. Mitigasi konflik dengan penguatan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dan stakeholder.

**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IKUB tahun 2022 adalah Rp. 9.491.510.250,00 yang terdiri dari 6 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.308.114.250,00 atau 98,07%.

**Tabel 2.35**  
**Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKUB Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	310,000,000.00	308,089,650.00	90,38
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	1,242,451,000.00	1,241,794,665.00	99,95



Etika Serta Budaya Politik			
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	500,000,000.00	499,743,950.00	99,95
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	350,000,000.00	348,500,000.00	99,57
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,664,795,000.00	2,783,251,800.00	75,95
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,456,590,100.00	3,420,017,090.00	98,94
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20,884,016,421.00	20,503,933,144.00	98,18
<b>Jumlah</b>	<b>30,407,852,521.00</b>	<b>29,105,330,299.00</b>	<b>95,71</b>

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja IKUB tahun 2022 sebesar Rp.1,302,522,222.00 dari anggaran Rp.30,407,852,521.00 dengan tingkat efisiensi sebesar 4,29%

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama, yaitu :

- 1) Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  
Indikator kinerja program adalah Tingkat Pendidikan Partai Politik dengan target 100% dan realisasinya dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
Indikator kinerja program adalah Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif dengan target 100% dan realisasinya 100%.
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  
Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan, target 100% dan realisasinya



- 100%, capaian kinerja 100%.
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial  
Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
  - 6) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Indikator kinerja program adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, dan ketentraman dengan target 100% dan realisasinya 100%.
  - 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  
Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
  - 8) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial  
Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional, target 100% dan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%.
  - 9) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator kinerja program yaitu Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, terdiri dari kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
  - 10) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Indikator kinerja program yaitu Persentase konflik SARA yang ditangani dengan baik, dengan target 100% dan tercapai 100%. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, terdiri dari kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

## 8) LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dengan target 4.70-5.70 terealisasi 5,03% dengan capaian 88,25% hasil dari perhitungan realisasi dibagi target tertinggi (5.03 : 5:70) x 100%.

**Tabel 2.36**

*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022*

*Sumedang Simpati 2023 II-103*



### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4.70-5.70	5,03	88,25%	Sangat Tinggi

Sumber : BPS

#### b. Perbandingan Antara dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi dan capaian mengalami kenaikan. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 3,17% dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,03% dengan kenaikan sebesar 1,86%.

**Tabel 2.37**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.66 - 4.70	3,17	67,44	4.70 - 5.70	5,03	88,25	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

#### c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah adalah 7% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 5.03%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Pada tahun keempat RPJMD sebesar 71,86%. Dengan demikian target jangka menengah telah terlampaui.

**Tabel 2.38**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7%	5.03%	71.86%

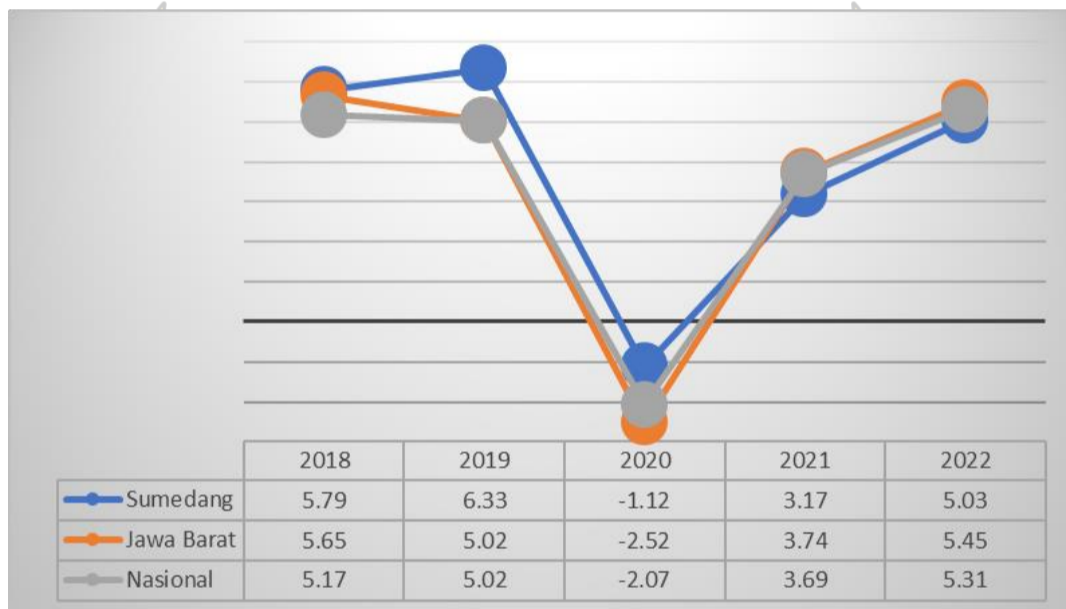


**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten tahun 2022 hanya berada sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, namun apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional perbedaannya cukup signifikan sebesar 0,28 poin.

**Grafik 2.11**

**Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2022 Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional**



Sumber : BPS Kab. Sumedang (diolah)

Jika dilihat dari grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang senantiasa mengalami percepatan. Kabupaten Sumedang sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,12% pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali pada pertumbuhan positif sebesar 3,17% dan 5,03% pada Tahun 2022. Meskipun demikian, pertumbuhannya masih dibawah pertumbuhan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan Indikator Makro. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Indikator LPE ini di dukung oleh indikator-indikator kinerja mikro yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah/Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan akan dijelaskan secara rinci pada masing-masing indikator.



Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang mendukung atas Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang :

1. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan target 2.20 - 4.15 persen
2. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan target 3.45-5.28 persen
3. Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan target 4.50-6.01 persen
4. Indeks Kualitas Infrastruktur dengan target 74,65 persen
5. Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,49 poin
6. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 89,4 persen
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 71,1 poin.
8. Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang dengan target 20 persen

#### **(9) LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN**

##### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan” tahun 2022 sebesar 2,2 – 4,15 dan realisasinya 6,85 atau capaian kinerja sebesar 165,06% (kinerja sangat tinggi), capaian kinerja melebihi target

**Tabel 2.39**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Penanggungjawab
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,20 s.d 4,15	2,20 s.d 4,15	6,85	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

##### **b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan yang terdapat pada table berikut:





**Tabel 2.40**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,38	3,39	63.01%	2,20 s.d 4,15	6,85	165%	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan adalah 6,4% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 6,85%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun ke empat RPJMD sebesar 107,03%.

**Tabel 2.41**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

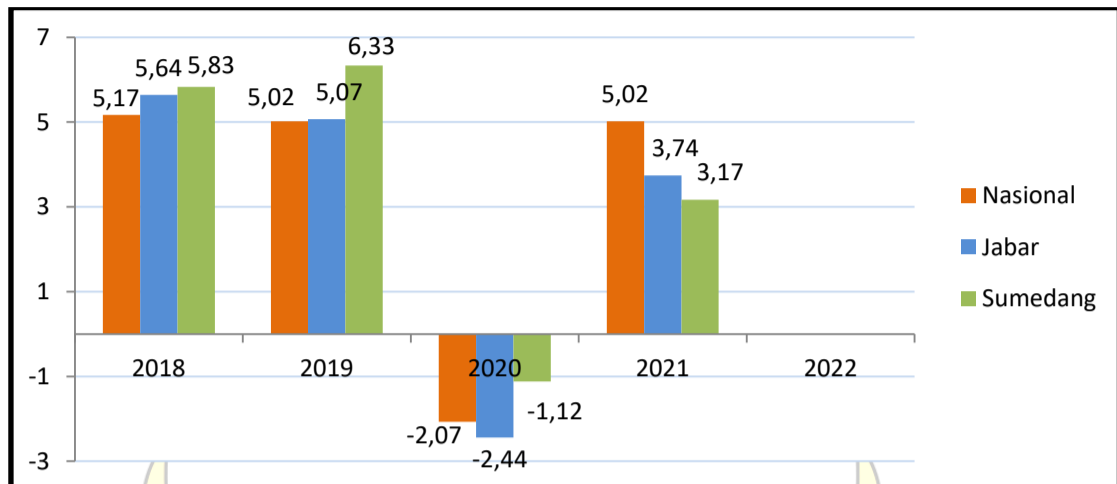
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	4,53% - 7,88 %	6,85%	86,93%

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat akan tetapi bisa diatas nasional,. Walaupun demikian, Pertumbuhan ekonomi Sumedang mampu meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021. Optimisme Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang akan meningkat lagi ditunjukkan dengan akan terbitnya peraturan daerah tentang RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten). Berikut merupakan perbandingan Laju pertumbuhan sector industry pengolahan Kabupaten Sumedang dengan Provinsi dan Nasional berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022.



**Grafik 2.12**  
**Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia**



Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Penyebab keberhasilan atas capaian target peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan program fasilitasi PIRT gratis
2. Kerjasama dengan kementerian Perindustrian terkait fasilitasi sertifikat halal, Bersama UIN melakukan pendampingan ke IKM untuk mendapatkan sertifikat halal secara mudah dan gratis.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah

1. Masih lemahnya daya saing IKM dalam hal pemasaran dan kualitas produk,
2. Dari hasil evaluasi terhadap IKM terdapat kelemahan pengelolaan manajemen keuangan dimana pengelolaan keuangan tidak di pisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan.
3. Sementara alternatif dan solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 diantaranya :
4. Dukungan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung iklim usaha yang kondusif dengan akan terbitnya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
5. Peningkatan kompetensi pelaku IKM melalui berbagai macam kegiatan seperti pelatihan peningkatan pengolahan industry, pelatihan pengemasan dan lain-lain.



**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tahun 2022 adalah Rp. 1,015,000,000.00 yang terdiri dari satu program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 983,442,300.00 atau 96,89%.

**Tabel 2.42**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,015,000,000.00	983,442,300.00	96,89
<b>JUMLAH</b>	<b>1,015,000,000.00</b>	<b>983,442,300.00</b>	<b>96,89</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tahun 2022 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan ditunjang oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja Persentase Pembangunan Kawasan Industri. Dengan target tahun 2022 sebesar 30% realisasi sebesar 6,85% dengan capaian 165,1% (melebihi target).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program yaitu masih lemahnya dalam hal inventarisasi data-data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data sementara solusi yang telah dilakukan yaitu memaksimalkan pendataan lewat akun SIINAS Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

**10) LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 sebesar 3.45-5.28 persen dan realisasinya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebesar 4,18% atau capaian kinerja sebesar



79,17% (kinerja tinggi).

**Tabel 2.43**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Penanggung jawab
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3.45 s.d 5.28	4,18	79,17	Tinggi	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Dinas Peternakan dan Perikanan

Sumber : BPS

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi dan capaian mengalami penurunan. Menurun.

**Tabel 2.44**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					3.45-5.28			Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dibandingkan dengan tahun 2021 untuk laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,91% seperti yang tertera pada table berikut.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	N/A	-0.27	-	3.45 s/d 5.28	4,18	79,17%	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun



Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah adalah 5,59 % dan realisasi pada tahun 2022 adalah 4,18 %, sehingga capaian kinerja jangka menengah pada tahun keempat RPJMD sebesar 74,78%

**Tabel 2.45**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,59%	4,18%	74,78%

Sumber : RPJMD dan BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diantaranya adalah seperti pada tabel berikut :

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
1	Jumlah produksi komoditas Tanaman Pangan :	Ton	647.544	636.114	98,23%	Sangat Tinggi
	a. Padi	Ton	414.398	457.401	110,38%	
	b. Jagung	Ton	117.816	64.954	55,13%	
	b. Tanaman Pangan Lainnya	Ton	115.330	113.759	98,64%	
2	Jumlah Produksi komoditas Hortikultura	Ton	247.937	266.096	107,32%	Sangat Tinggi
3	Jumlah Produksi komoditas Perkebunan	Ton	7.547	8.505	112,70%	Sangat Tinggi
4	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Ton	8.405,99	8.411,70	100,07%	Sangat Tinggi
5	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	5,18	5,86	113,11%	Sangat Tinggi

1. Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan tahun 2022 untuk komoditas jagung dan tanaman pangan lainnya tidak mencapai target disebabkan oleh penurunan luas tanam jagung dikarenakan ketergantungan petani terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah, ketergantungan ini disebabkan oleh harga benih jagung yang tinggi, menurunnya minat



petani dalam usaha budidaya ubi kayu dikarenakan harga jual rendah, dan penurunan produktivitas dari komoditas tanaman pangan lainnya karena curah hujan yang tinggi.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah melakukan penyuluhan, pengamatan dan pengendalian OPT serta ikut mendorong pengajuan usulan regulasi harga jual ubi kayu ke pemerintah.

## 2. Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura” tahun 2022 sebesar 247.937ton dan realisasinya 266.096 ton atau capaian kinerja sebesar 107,32% (sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2022). Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura” tahun 2022 merupakan hasil dari penanganan pembangunan pertanian yang difokuskan disentra komoditas hortikultura, penanganan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) disentra komoditas hortikultura, intensifikasi secara masif disentra komoditas hortikultura dan Ekstensifikasi disentra komoditas hortikultura.

## 3. Jumlah Produksi komoditas Perkebunan

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan” tahun 2022 sebesar 7.547 ton dan realisasinya 8.505 ton atau capaian kinerja sebesar 112,7% (sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2022). Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan” tahun 2022 diantaranya dikarenakan adanya kegiatan intensifikasi komoditas kakao dan lada, peningkatan produktivitas komoditas tebu disebabkan pemeliharaan yang intensif dan kemarau basah sehingga beberapa komoditas perkebunan meningkat produksinya.

## 4. Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan

Beberapa hal yang mendukung tercapainya realisasi laju pertumbuhan subsektor perikanan antara lain :

- a. Ketersediaan benih ikan yang baik;
- b. Faktor lingkungan yang sangat mendukung/baik untuk dilakukan budidaya;
- c. Peningkatan keterampilan para pembudidaya ikan;
- d. Pangsa pasar yang mudah dicari dengan harga yang cukup stabil.

Dalam peningkatan laju pertumbuhan subsektor perikanan telah di



ambil Langkah-langkah antara lain :

- a. Optimalisasi balai benih ikan yang merupakan sumber pembenihan yang menghasilkan benih ikan yang berkualitas yang nantinya akan di sebarkan kepada masyarakat pembudidaya, dan ke depan diharapkan balai benih ikan bisa menghasilkan calon indukan ikan (parent stock) dari induk ikan grand parent stock (khusus ikan nila) yang rencana akan disebarakan k eke unit pembenihan rakyat.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, dan pengolahan /pemasaran hasil perikanan.
- c. Pembinaan teknis dan kelembagaan pembudidaya ikan.
- d. Optimalisasi pemanfaatan lahan marginal dengan pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan lahan sawah untuk pembudidayaan mina padi.

5. Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan

Persentase penigkatan produktivitas peternakan tahun 2022 dihitung dari rata-rata populasi ternak ( sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging dan itik) dan peninhkatan produksi peternakan (daging, telur dan susu). Persentase peningkatan produktivitas peternakan tahun 2022 sebesar 5,86 persen dari target 5,18 persen. Capaian ini didapat dari peningkatan populasi ternak untuk sapi potong, kambing, domba, ayam ras pedaging, ayam buras, dan itik.

Adapun kendala yang dihadapi pada tahun 2022 yaitu pada bulan Maret 2022 terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dimana sebanyak 3.115 ekor ternak terjangkit penyakit PMK akan tetapi hal ini dapat segera ditangani dengan melakukan pengobatan dan pencegahan dini agar tidak menular lebih luas. Sehingga dari sekian banyak ternak yang terjangkit Sebagian besar dapat disembuhkan.

**d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan sebesar Rp.31,433,956,195.00 terdiri dari 8 (delapan) program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.29,774,093,315.00 atau capaian realisasi anggaran sebesar 94,72%

**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9,106,152,070.00	8,849,309,514.00	97.18



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,243,098,000.00	15,973,826,152.00	92.64
Program Perizinan Usaha Pertanian	20,000,000.00	19,210,000.00	96.05
Program Penyuluhan Pertanian	3,172,190,000.00	3,077,430,596.00	97.01
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	80,000,000.00	78,077,728.00	97,60
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,182,516,125.00	1,172,510,004.00	99.15
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	245,000,000.00	236,022,290.00	96.34
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	465,000,000.00	445,784,759.00	95.87
<b>JUMLAH</b>	<b>31,433,956,195.00</b>	<b>29,774,093,315.00</b>	<b>94,72</b>

Sumber : LRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan (diolah)

Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 sebesar 4,18%, dan realisasi anggaran program sebesar 94,72%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 94,72%

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) -(4)	(6)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	79,17%	94,72%	-	Tidak efisien

Tingkat efisiensi tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari seratus persen

#### a. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang capaian kinerja anatar lain :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja :
  - a. Cakupan Ketersediaan Sarana Pertanian dengan target sebesar 52,92% dan realisasi 52,92 % atau capaian kinerja sebesar 100% di tunjang oleh kegiatan utama antara lain :
    - Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.





- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Cakupan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target sebesar 47,08% dan realisasi 47,08% atau capaian kinerja sebesar 100%, indikator ini ditunjang oleh kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
  - a. Indikator kinerja program yang di ampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu Luas tambahan lahan pertanian yang terairi dengan target sebesar 1.952 Hektar dan realisasinya 1.952 hektar atau capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Indikator Kinerja program yang diampu oleh dinas Peternakan dan perikanan tercapai 85,71% dari target 100%. Factor penyebabnya adalah keteidaktersediaanya dan dikembangkannya jalan usaha tani dan sumber-sumber air sementara untuk prasarana yang baru dapat disediakan dan dikembangkan antara lain : lahan kebun rumput, Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Pasar Hewan, Klinik Hewan/Poskeswan/Pos IB, data dan informasi peternakan.
- 3) Indikator kinerja program yaitu Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100 % atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Program Perizinan Pertanian.

Indikator kinerja program yaitu Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Program Penyuluhan Pertanian

Indikator kinerja program yaitu Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian dengan target sebesar 34% dan realisasinya 34% atau capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 6) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator kinerja antara lain :
  - a. Indikator kinerja Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian dengan target sebesar 95% dan realisasinya 95% atau capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Indikator kinerja Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target sebesar 12% dan realisasinya 12% atau capaian kinerja sebesar 100%.



7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator kinerja program yaitu Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target sebesar 100% dan realisasinya 97,76% dengan capaian kinerja sebesar 97,76%. Ketidaktercapaian target kinerja ini dari hasil laporan dilapangan yaitu potensi budidaya perikanan berupa kolam air tenang, mina padi dan kolam air deras belum dapat dikelola seluruhnya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya, pembudidaya perikanan di kalangan generasi muda sangat minim, keterbatasan sarana dan prasarana pembudidaya dan keterbatasan permodalan usaha,

8) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Indikator kinerja Program yaitu Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ada sebanyak 60 (enam puluh) unit telah dilakukan pembinaan. Upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk hasil budidaya maupun hasil tangkapan serta untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Dalam mendukung program ini pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan master plan di Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede

**11) LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum tahun 2022 sebesar 4.50-6.01persen dan realisasinya sebesar 4,56% atau capaian kinerja sebesar 75,82% (kinerja sedang).

**Tabel 2.48**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Penanggungjawab
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	Persen	4.50 s.d 6.01	4,56	75,82	Sedang	Disparbudpora

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**



Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Laju Pertumbuhan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2022 mengalami kenaikan dan capaian kinerjanya mengalami penurunan. Realisasi kinerja naik 0.157 persen, sementara capaian kinerjanya menurun 177.05 %. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun sebelumnya.

**Tabel 2.49**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	Persen	0.23 s.d 1.74	4,40	252,87%	4.50 s.d 6.01	4.56	75,82	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum adalah 10.27 Persen dan realisasi pada tahun 2022 adalah 4.56 Persen, sehingga capaian kinerja jangka menengah Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum pada tahun keempat RPJMD sebesar 44.37%.

**Tabel 2.50**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	10,27 Persen	4.56%	44.37%

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum pada tahun 2022 di tunjang dengan antara lain :



1. Peningkatan yang signifikan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang yang mencapai 1.292.953 orang dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 648.004 orang.
2. Pelestarian Cagar Budaya pun turut andil dalam peningkatan laju pertumbuhan sector penyediaan akomodasi dan makan minum walaupun dengan pebebanan anggaran yang dirasa masih kurang memadai.
3. Serta promosi pariwisata yang selalu di lakukan oleh dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Sumedang yang selalu intens dalam melaksanakan promosi yang dibantu oleh pihak – pihak lainnya.

Dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdapat kelemahan yaitu :

1. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kebudayaan
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi ilmu sejarah, ilmu filolog.

Solusi yang telah dilakukan :

1. Upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kebudayaan
2. Pengadaan pegawai dengan kualifikasi ilmu sejarah, ilmu filolog

#### **d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum tahun 2022 adalah Rp. 2.682.073.714,00 yang terdiri dari 5 (lima) program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.528.663.824,00 atau 94,28%.

**Tabel 2.51**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Skor Pola**  
**Pangan Harapan Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Kebudayaan	900,000,000.00	899,280,710.00	99,92
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	225,000,000.00	224,787,000.00	99,91
Program Pengelolaan Permuseuman	50,000,000.00	49,900,000.00	99,80
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	887,073,714.00	785,423,514.00	88,54
Program Pemasaran Pariwisata	620,000,000.00	619,172,600.00	99,87
JUMLAH	2,682,073,714.00	2,528,663,824.00	94,28



Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2022 sebesar 94,28%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 48,14%.

**Tabel 2.52**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	142,42%	94,28%	-	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tidak dapat dihitung karena realisasi kurang dari 100%

**e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu :

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Indikator kinerja program yaitu Persentase OPK yang dikembangkan dengan target sebesar 72,73% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 137,49%. Capaian kinerja sangat baik dengan capaian melebihi target hal ini dikarenakan telah terlaksananya kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan target kinerja yaitu jumlah pelestarian(pertunjukan) kesenian tradisional sebanyak 81 laporan telah tercapai, serta seni budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan tercapai 100%.

2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Indikator kinerja program yaitu Persentase cagar budaya yang dilestarikan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 70% atau capaian kinerja sebesar 70%. Target kinerja tidak tercapai dikarenakan kurangnya dukungan anggaran yang diberikan sehingga tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tersebut.

3) Program Pengelolaan Permuseuman.

Indikator kinerja program yaitu jumlah kunjungan wisatawan museum dengan target 3,000 orang dan realisasinya 10,613 orang atau capaian



kinerja sebesar 353.77%. Capaian kinerja melebihi target hal ini di dukung oleh telah dilonggarkannya aturan pemerintah mengenai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di daerah Sumedang sehingga masyarakat sudah dapat keluar rumah dan mengunjungi tempat-tempat wisata.

4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Indikator kinerja Program yaitu Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan dengan target sebanyak 6 ODTW dan realisasi 3 ODTW atau capaian kinerja sebesar 50%. Target kinerja tidak tercapai Indikator kinerja program tersebut didukung oleh : 1)Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Penyusunan DED Situs Baterai), 2) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota :

- a. Penataan Kawasan Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Buricak Burinong;
- b. Penataan Area Landing Paralayang Buricak Burinong; dan
- c. Penataan Objek Daya Tarik Wisata Marongge.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran dikarenakan sebagian besar anggaran pada belanja modal (kontraktual) yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sedangkan Solusinya adalah dengan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan agar dapat mengajukannya sesuai dengan kontrak, sehingga penyerapan atau realisasi anggaran dapat meningkat.

5) Program Pemasaran Pariwisata.

Indikator kinerja Program yaitu Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan dengan target 14 Event (keseluruhan dari event yang dilaksanakan oleh Disparbudpura Kabupaten Sumedang) dan realisasinya 12 Event atau capaian kinerja sebesar 85,71%. Target kinerja tidak tercapai Indikator kinerja program tersebut didukung oleh :

- a. Kegiatan Hardfest dari Bidang Pariwisata yang berlokasi di Lingkar Timur Jatigede;
- b. Kegiatan Pagelaran Pameran dari Bidang pariwisata yang berlokasi di D.I. Yogyakarta;
- c. Kegiatan Mantaps dari Bidang Ekonomi Kreatif yang berlokasi di Gedung Creative Center (GCC);
- d. Kegiatan Sumedang Creative Center Festival dari Bidang Ekonomi Kreatif yang berlokasi di Gedung Creative Center (GCC);



- e. Kegiatan Film Pendek;
- f. Kegiatan Sumedang One Creative Of Art (SOCA) dari Bidang Ekonomi Kreatif yang berlokasi di Gedung Creative Center (GCC);
- g. Kegiatan Ngalaksa dari bidang Kebudayaan;
- h. Kegiatan Mapag Sri dari Bidang Kebudayaan;
- i. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dari Bidang Kebudayaan;
- j. Senam Sumedang SIMPATI dari Bidang Pemuda dan Olahraga;
- k. Kegiatan Event Olahraga Tradisional dari Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- l. Kegiatan Event Olahraga dalam rangka Haornas dari Bidang Pemuda dan Olahraga.

## 12) INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR

Indeks Kualitas Infrastruktur dihitung dari panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan dikalikan 100%.

$$\frac{(50\% \times \text{Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan})}{(50\% \times \text{Indeks Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi})}$$

### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Indeks Kualitas Infrastruktur" tahun 2022 sebesar 74,56 dan realisasinya sebesar 77,58 atau capaian kinerja sebesar 103,93% (kinerja Sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

**Tabel 2.53**  
**Realisasi Kinerja**  
**Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2022**

NO	Parameter	Realisasi Tahun 2022	
		KM	Indeks Kualitas Infrastruktur
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	86,54	Indeks Kualitas Infrastruktur = ( 50 % x 86,54) + (50% x 68,62) = 77,58
2	Indeks Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	68,62	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

**Tabel 2.54**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Kualitas Infrastruktur**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Indeks Kualitas Infrastruktur	Point	74,65	77,58	103,93%	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas PUPR ,DPKPP dan DISHUB Kab. Sumedang

### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 20.633,40 Ha tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2021 karena berbeda Indikator.

**Tabel 2.55**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Saran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Indeks Kualitas Infrastruktur	Point	71,65	n/a	n/a	74,65	77,58	103,93 %	Capaian melebihi target

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Indeks Kualitas Infrastruktur adalah 74,65 dan realisasi pada tahun 2022 adalah 77,58, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Indeks Kualitas Infrastruktur pada tahun keempat RPJMD adalah 99,91%.

**Tabel 2.56**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Indeks Kualitas Infrastruktur	77,65	77,58	99,91%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Sumedang adalah:

1. Peningkatan Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap
2. Peningkatan Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Yang baik dan peningkatan areal cakupan pelayanan Daerah Irigasi





3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang menghasilkan data base rambu-rambu lalu lintas yang tersebar berdasarkan ruas jalan di Kabupaten Sumedang.
4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota dengan data base harian rata-rata kendaraan untuk tiap ruas jalan dikabupaten sumedang.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Sumedang tahun 2022 sebesar Rp.171.616.376.525,00 yang terdiri dari 3 program, sedangkan realisasinya sebesar Rp.109.253.146.501,00 atau 63,67%.

**Tabel 2.57**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	110.897.614.273,00	49.782.424.113,00	44,89
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	49.870.084.000,00	48.756.135.490,00	97,77
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10,848,678,250.00	10,724,586,898.00	98,86
<b>Jumlah Total</b>	<b>171.616.376.525,00</b>	<b>109.263.146.501,00</b>	<b>63,67</b>

Sementara untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.58**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Indeks Kualitas Infrastruktur	103,93%	63,67%	40,26%	Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang



#### **f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur, yaitu :

##### **1. Program Penanganan Jalan dan Jembatan**

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2022 yaitu Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik dan Sedang dengan target sebesar 81,30% dan realisasinya 86,54% atau capaian kinerja sebesar 106,44 %. Target kinerja melebihi target dikarenakan dengan adanya penanganan rekonstruksi jalan Pada Tahun 2022 sepanjang 17,528 Km, rehabilitasi jalan sepanjang 12,044 Km, pemeliharaan rutin dan berkala sepanjang 47,434 Km dapat menambah kondisi jalan baik dan sedang menjadi 693,513km. Dengan kondisi jalan baik dan sedang menjadi 693,513km maka Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap adalah 86,54 % sehingga Capaian Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan adalah 86,54

##### **2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Indikator kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tahun 2022 yaitu Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target sebesar 46,60% dan realisasinya 46,85% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai karena Adanya penanganan Sub Kegiatan meliputi Rehabilitasi Jaringan, Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adanya penanganan sepanjang 35.929,88 m' dapat menambah panjang irigasi dalam kondisi baik menjadi 991.257,83 m' (45,85%) dan menghasilkan Luas Area Irigasi yang terairi menjadi 20.633,40Ha dan berpengaruh pada capaian Indeks Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi yaitu 68,62

##### **3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2022 yaitu Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan target sebesar 64,96% dan realisasinya 55,66% atau capaian kinerja sebesar 86,68 %. Target kinerja tidak tercapai. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan alokasi penempatan titik lokasi rambu sehingga terjadi perubahan spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemasangan rambu sebagai akibat adanya rekayasa lalu lintas di wilayah sumedang kota.
- b. Perubahan spesifikasi jenis lampu yang semula jenis Pijar beralih ke jenis Hemat Energi/LED dan pelaksanaan meterisasi Kwh meter



untuk pengadaan dan Pemasangan PJU/PJL dengan Rujukan Teknis Spesifikasi mengacu pada PM no.27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

### 13) INDEKS KETAHANAN DAERAH

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Ketahanan Daerah” tahun 2022 sebesar 0,49 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah 0,49 poin atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi) dan target kinerja tercapai.

**Tabel 2.59**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49	0,49	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Tool BPBD Provinsi Jawa Barat

**Tabel 2.60**  
**Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022**

(Sumber : Tool BPBD Prov. Jawa Barat)

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.61	0.49	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.90		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.47		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.52		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.43		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.51		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.31		

Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Sumedang Tahun 2022 diatas, bahwa nilai Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0.49 poin dengan TINGKAT KAPASITAS DAERAH SEDANG yang diukur melalui 7 Indeks Prioritas, sebagai berikut :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan sebesar 0,61 poin.



2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,90 poin.
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,47 poin.
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,52 poin
5. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,43.
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,51 poin.
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,31 poin.

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 realisasi indeks ketahanan daerah 0,47 poin dan pada tahun 2022 naik menjadi 0,49 poin,

**Tabel 2.61**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	Poin	0,47	0,47	100%	0,49	0,49	100%	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

Sumber : Tool BPBD Provinsi Jawa Barat

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target jangka menengah Indeks Ketahanan Daerah adalah 0,51 poin sehingga bila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2022 dengan target Jangka Menengah terdapat selisih 0,2 poin, dengan capaian kinerja bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 96,07%.

**Tabel 2.62**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Indeks Ketahanan Daerah	0,51 poin	0,49	96,07%

Sumber : RPJMD dan tool BPBD Provinsi Jawa Barat diolah



**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah di pengaruhi oleh beberapa sub indikator antara lain :

1. Persentase Penanganan PraBencana dengan target kinerja 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% dengan keberhasilan capaian atas penyediaan data/informasi tentang jenis dan risiko bencana, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana, tersedianya data/informasi rencana penanggulangan bencana, tersedianya data/informasi rencana kontijensi, penguatan kelembagaan dan pembentukan Destana (Desa Tanggap Bencana), pelaksanaan koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana, penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast dan Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan system peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat.
2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana target kinerja 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% yaitu dengan keberhasilan capaian atas respon cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam, terlaksananya koordinasi system komando pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan tugas penanganan darurat bencana, serta capaian persentase pencarian korban yang berhasil dicari dari 709 orang dan berhasil 709 orang (100%)
3. Persentase Penanganan Bencana target kinerja 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% yaitu dengan capaian terlaksananya sistem dasar peanggulangan bencana.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Risiko Bencana tahun 2022 adalah Rp. 6,571,915,800.00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6,479,856,874.00 atau 98,60%.

**Tabel 2.63**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penanggulangan Bencana	3,113,290,000.00	3,050,281,850.00	97,98
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,151,625,800.00	2,148,355,800.00	99,85



Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	465,000,000.00	445,784,759.00	95,22
Program Penanganan Bencana	842,000,000.00	835,434,465.00	99,22
<b>Jumlah</b>	<b>6,571,915,800.00</b>	<b>6,479,856,874.00</b>	<b>98,60</b>

Capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi anggaran program sebesar 99,45%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,76%.

**Tabel 2.64**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja**  
**Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	100%	99,45%	0,55%	Efisien

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana, yaitu :

- 1) Program Penanganan Bencana  
Indikator kinerja program yaitu Persentase Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan tercapai 100%, dan Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan sebanyak 51 Orang. Program ini dikhususkan untuk pemberian bantuan kepada korban bencana.
- 2) Program Penanggulangan Bencana Indikator kinerja program yaitu :
  - Jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan informasi peringatan dini bencana dengan target 277 desa/kelurahan dengan capaian kinerja 100%.
  - Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan target 15 desa/kelurahan dengan realisasi 3 desa/kelurahan atau capaian kinerja 20%.
  - Persentase kecepatan respons bencana kurang dari 24 jam dengan



target 100% dan tercapai 100%.

- Persentase korban bencana yang diberikan bantuan dengan target 100% dan realisasinya 100%.
- Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan dengan target 100% dan realisasinya 40%.

3) Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator kinerja program adalah Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) target 90% dan realisasinya 84,16%, capaian kinerja 93,51%. Kendalanya dikarenakan ada beberapa kasus kebakaran yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau sehingga sehingga tidak terlayani sesuai waktu tanggap 15 menit (response timerate).

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 465.000.000,00 dngan realisasi sebesar Rp.445.784.759,00 atau 95,87% dengan hasil capaian Kinerja kegiatan 100%.

### 13) SKOR POLA PANGAN HARAPAN

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 sebesar 89,40 persen dan realisasinya berdasarkan data hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Sumedang sebesar 87,10 poin atau capaian kinerja sebesar 97,43% (kinerja sangat tinggi).

**Tabel 2.65**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Penanggungjawab
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,40	87,10	97,43	Sangat Tinggi	1. DPKP 2. DKUK MPP

Sumber : BAPPPEDA Kab. Sumedang

#### b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

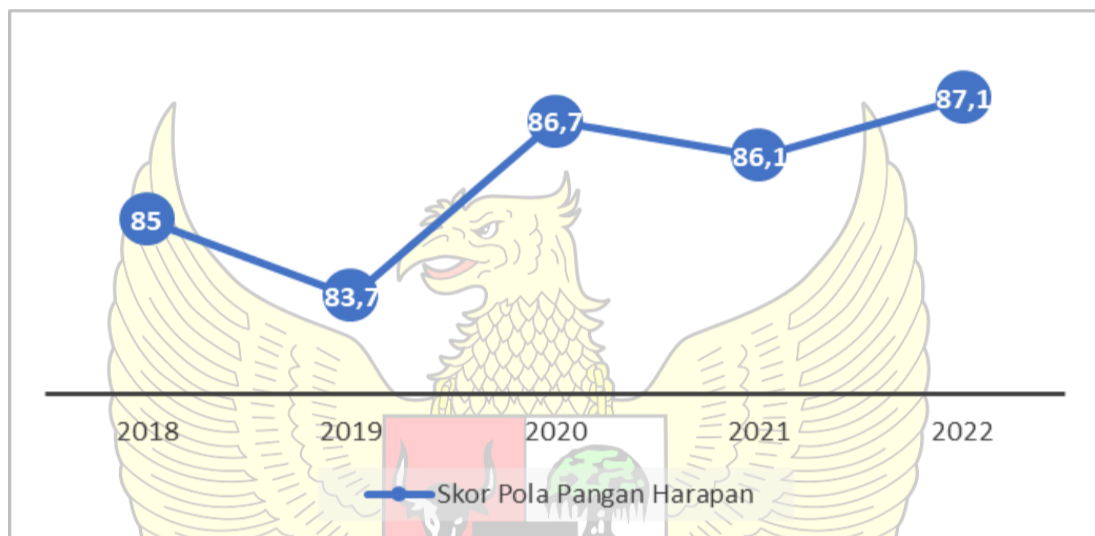
Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Skor Pola Pangan Harapan mengalami peningkatan 1 poin.



**Tabel 2.66**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	88	87,1	99,0	89,40	87,10	97,43%	Realisasi dan Capaian Kinerja Menurun

**Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah adalah 90,2 poin dan untuk capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 97,43%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Skor Pola Pangan Harapan pada tahun keempat RPJMD sebesar 96,56%. Dengan demikian target jangka menengah telah terlampaui.

**Tabel 2.67**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Skor Pola Pangan Harapan	90,2 poin	87,10 poin	96,56%

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi**





## yang Telah Dilakukan

Beberapa hambatan yang dihadapi adalah adanya keterbatasan dalam penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah. Kenaikan konsumsi beras terjadi karena meningkatnya laju produksi padi di Kabupaten Sumedang dan semua pemanfaatan lahan pada prioritas komoditi pajale, sehingga produksi komoditi kelompok pangan lainnya belum begitu optimal, hal ini diprediksi berpengaruh terhadap konsumsi karbohidrat (beras), sehingga tidak tersedianya lahan untuk penanaman tanaman diluar padi, karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk program pemerintah Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Sedangkan lahan pekarangan belum dimanfaatkan dengan optimal. Tidak seluruh kecamatan mengajukan desa yang termasuk kategori miskin tinggi (rawan pangan) untuk mendapatkan intervensi/penanganan rawan pangan. Alokasi intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi. Sedangkan ancamannya adalah situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri termasuk Kabupaten Sumedang, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan.

Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor ketahanan pangan adalah mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat, Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan good agriculture practices (GAP), Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan, Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu, Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani, Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia),

### e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 adalah Rp. 5,368,591,650.00 yang terdiri dari program. Sedangkan realisasinya sebesar



Rp. 5,314,469,000.00 atau 98,99%.

**Tabel 2.68**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	4,088,000,000.00	4,070,110,000.00	99,56
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	878,321,650.00	857,623,750.00	97,64
Program Pengawasan Keamanan Pangan	135,000,000.00	128,735,250.00	95,36
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	267,270,000.00	258,000,000.00	96,53
<b>Jumlah</b>	<b>5,368,591,650.00</b>	<b>5,314,469,000.00</b>	<b>98,99</b>

Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 sebesar 97,43% dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung karena target tidak tercapai.

**Tabel 2.69**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	97,43%	98,99 %	-	Tidak Efisien

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang indikator Skor Pola Pangan Harapan, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. Indikator kinerja program yaitu Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola dengan target sebesar 100
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Indikator kinerja program yaitu Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita dengan target sebesar 94,5%.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan Indikator kinerja program yaitu Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan target sebesar 100%.
- 4) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang



Penting. Indikator kinerja Program yaitu Presentase Pengawasan dan Pengendalian Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting dengan target sebesar 12 Laporan.

#### 14) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

##### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2022 sebesar 71,1 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil pengujian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yang bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang berakreditasi terhadap tingkat pencemaran air sungai dan udara ambient serta data tutupan lahan hasil pencitraan Kenetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didapatkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 63,35 poin atau capaian kinerja sebesar 89,10%. Kinerja tinggi.

**Tabel 2.70**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,1	63,35	89,10%	Tinggi

Sumber : DLHK Kab. Sumedang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 63,35 poin termasuk kriteria “SEDANG”. Poin tersebut merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) sebesar 45,71 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 82,17 poin, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 58,82 poin. Perhitungan dengan rumus baru sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LH Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH untuk tahun 2020-2024, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = (0,367 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Dengan kriteria Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.71**  
**Kriteria IKLH**



No	Nilai/Skor	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	70 – 89,9	Baik
3	50 – 69,9	Sedang
4	25 – 49,9	Buruk
5	0 – 24,9	Sangat Buruk

Pada tahun 2022 perhitungan IKLH dilakukan melalui aplikasi IKLH yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana Kabupaten/Kota dan Provinsi hanya menginput data hasil pengujian kualitas air, udara dan data tutupan lahan melalui link <https://ppkl.menlhk.go.id>.

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi dan capaian kinerja IKLH mengalami kenaikan. Realisasi IKLH naik 1,09 poin, sedangkan capaian kinerjanya menurun 15,59%.

**Tabel 2.72**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,47	62,26	104,69%	71,10	63,35	89,10 %	Realisasi meningkat dan Capaian Kinerja Menurun

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023, target di tahun akhir jangka menengah IKLH adalah 71,8 poin dan realisasi pada tahun 2022 adalah 63,35 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKLH pada tahun keempat RPJMD sebesar 88,23%.

**Tabel 2.73**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,8 poin	63,35 poin	88,23%



**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. dengan hasil sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air

Parameter yang digunakan untuk mengukur IKA adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air dilakukan pada air sungai. Pengambilan sampel kualitas air (sungai) di Kabupaten Sumedang dilakukan di 7 (tujuh) lokasi sungai, yaitu sungai Cikeruh, Citarik, Cikijing, Cimande, Cigarut, Cipeles, dan Cimanuk. IKA diperoleh dari hasil perhitungan Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan cara input data parameter hasil uji laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi. Target Indikator Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 yaitu 48,69 poin, dengan realisasi 45,71 poin

Fluktuasi dan belum tercainya kinerja indikator Indeks Kualitas Air terjadi karena :

- a. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh aktifitas sosial ekonomi di Daerah Aliran Sungai (DAS).
- b. Belum optimalnya sosialisasi dan pengawasan lingkungan.
- c. Kapasitas Unit Laboratorium DLHK Kabupaten Sumedang belum terakreditasi, sehingga belum dapat melaksanakan pemantauan kualitas air secara mandiri.

Solusi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengawasan lingkungan hidup, salah satunya melalui Program Citarum Harum.
- b. Melaksanakan kerja sama dengan Laboratorium yang terakreditasi, khususnya dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari hasil pengujian laboratorium terhadap 2 (dua) parameter yaitu NO<sub>2</sub> yang menunjukkan kandungan pencemaran dari bahan bakar bensin dan SO<sub>2</sub> yang menunjukkan kandungan pencemaran dari bahan bakar solar.



Target Indikator Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 yaitu 81,09 poin, dengan realisasi 82,17 poin, atau capaian kinerja 101,3%. Dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerjanya mengalami peningkatan.

### 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai IKTL diperoleh dari hasil perhitungan Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan cara input data parameter hasil uji laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi. Target Indikator Nilai IKTL Tahun 2022 yaitu 59,86 poin, dengan realisasi 58,82 poin, atau capaian kinerja sebesar 98,3%. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaian kinerjanya mengalami penurunan.

Penurunan capaian kinerja indikator IKTL disebabkan oleh keterbatasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan alih fungsi lahan. Solusi yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja IKTL adalah meningkatkan kualitas RTH dan keanekaragaman hayati lainnya.

#### d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja IKLH tahun 2022 adalah Rp. 7,486,350,000.00 yang terdiri dari 8 program utama. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7,341,130,465,00 atau 98,06%.

**Tabel 2.74**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKLH**  
**Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	30,000,000.00	29,900,000.00	99,67
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	102,500,000.00	100,113,250.00	97,67
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	605,000,000.00	599,792,474.00	99,14
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	45,000,000.00	44,702,500.00	99,34
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20,000,000.00	5,475,000.00	27,37
Program Pengelolaan Persampahan	4,270,800,000.00	4,198,225,700.00	98,30
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2,291,050,000.00	2,243,121,541.00	97,90
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	120,000,000.00	119,800,000.00	99,83
<b>Jumlah Total</b>	<b>7,486,350,000.00</b>	<b>7,341,130,465.00</b>	<b>98,06</b>



Capaian kinerja IKLH tahun 2022 sebesar 89,10% dan realisasi anggaran program sebesar 98,06%, dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

**Tabel 2.75**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	89,10%	98,06%	-	Tidak Efisien

**e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu :

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja program yaitu Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasinya 4 dokumen atau capaian kinerja sebesar 100%.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.

Indikator kinerja program yaitu Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Indikator kinerja program yaitu indeks tutupan vegetasi (ITV) dengan target sebesar 0,41 poin dan realisasinya sebesar 0,41 poin atau capaian kinerja sebesar 100 %.

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Indikator kinerja Program yaitu Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten dengan target sebesar 34,04% dan realisasinya 34,04% atau capaian kinerja sebesar 100%.

5) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja Program yaitu Persentase penyelesaian sengketa PPLH dengan target sebesar 100% dan realisasinya 34,04% atau capaian kinerja sebesar 34,04%. kegiatan tersebut bersifat situasional



tergantung kepada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jika dilihat dari indeks kualitas pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sepertinya sudah lebih baik sehingga pengaduan menjadi lebih berkurang.

6) Program Pengelolaan Persampahan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan tahun 2022 yaitu Persentase Penanganan sampah dengan target sebesar 73% dan realisasinya 80,07% atau capaian kinerja sebesar 79,96%. Indikator kinerja program tersebut didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Sampah.

7) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Indikator kinerja program yaitu Persentase pengelolaan kawasan konservasi dengan target 66% dan realisasinya 66%, capaian kinerja 100%. Target tercapai

8) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Indikator kinerja Program yaitu Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan dengan target sebesar 18,72% dan realisasinya 18,72% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

15) **Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja “Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang” tahun 2022 sebesar 20% atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi).

**Tabel 2.76**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	persen	20	20	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Sumedang

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dihitung karena indikator Persentase peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang dimulai muncul pada RPJMD Perubahan,

**Tabel 2.77**





### Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	N/A	N/A	-	20	20	100%	Realisasi Meningkat

#### c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target akhir jangka menengah Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang adalah 30% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 20%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang sebesar 66,67%.

**Tabel 2.78**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2022
Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	30%	20%	66,67%

#### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang di dukung oleh capaian persentase jumlah investor di Kabupaten Sumedang ditargetkan meningkat 60% dari tahun 2021. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 2022, capaian kinerja peningkatan jumlah investor di Kabupaten Sumedang terealisasi sebesar 62% dengan capaian kinerja sebesar 103,63%. Capaian tersebut diperoleh dari data peningkatan kegiatan investasi yang ditanamkan oleh para investor tahun 2022 sebanyak 425 LKPM dibandingkan tahun 2021 sebanyak 351 LKPM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. belum tersedianya data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai kondisi daerah hasil analisis yang bisa dikembangkan menjadi potensi investasi unggulan daerah



2. belum tersedianya dokumen strategi promosi investasi yang lengkap sebagai bahan acuan pelaksanaan promosi investasi

Alternatif/solusi yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan perumusan dan penyusunan data potensi unggulan yang sesuai dengan kondisi daerah dengan berbagai pihak,
2. Penyusunan studi kelayakan potensi investasi unggulan daerah'
3. Penerapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
4. Perumusan dan penyusunan dokumen strategi promosi investasi

#### e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah Rp.626,640,000.00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 599,828,877,00 atau 95,72%.

**Tabel 2.79**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Moda	226,640,000.00	223,460,627,00	98,60
Program Promosi Penanaman Modal	400,000,000.00	376,368,250.00	94,09
<b>Jumlah</b>	<b>626.640.000,00</b>	<b>599,828,877.00</b>	<b>95,72</b>

Sumber : LRA DPMPTSP (diolah)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah sebesar 4,28%.

**Tabel 2.80**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	100%	95,72%	4,28%	Efisien

#### f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Penanaman



Modal di Kabupaten, antara lain :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Indikator kinerja program yaitu Persentase Peningkatan Jumlah Investor dengan target 40% dan realisasinya 85,29% atau capaian kinerja 213,24%.
- 2) Program Promosi Penanaman Modal  
Indikator kinerja program Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang dengan target 5% pada tahun 2022 dan realisasinya 16,8% atau capaian kinerja 336%, melebihi target.

## 16) NILAI SAKIP

Nilai SAKIP Kabupaten adalah nilai dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan akumulasi nilai dari 4 komponen yaitu : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Kinerja. Nilai SAKIP berupa interval poin untuk setiap kategori.

Nilai SAKIP berupa interval poin untuk setiap kategori. Target nilai SAKIP Kabupaten Sumedang tahun 2021 adalah kategori A (interval 80,01 poin – 90,00 poin). Cara menghitung capaian kinerja untuk target berupa interval mengacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021, apabila realisasi berada pada interval nilai maka capaiannya 100%. Kemudian apabila realisasi berada di bawah nilai interval terendah (80 poin) maka capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi dengan nilai interval terendah. Begitu pula apabila realisasi melebihi nilai interval tertinggi (90,00 poin) maka capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi dengan nilai interval tertinggi.

### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Nilai SAKIP Kabupaten” tahun 2021 adalah Kategori A (80,01 – 90,00) sedangkan realisasinya berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/988/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 adalah BB (76,15) atau capaian kinerja sebesar 95,18% (kategori kinerja tinggi). Target kinerja tidak tercapai..

**Tabel 2.81**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Penganggungjawab
Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A	BB	95,18	Tinggi	Seluruh OPD



kinerja dan keuangan							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : LHE Kemen PANRB, 2022.

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

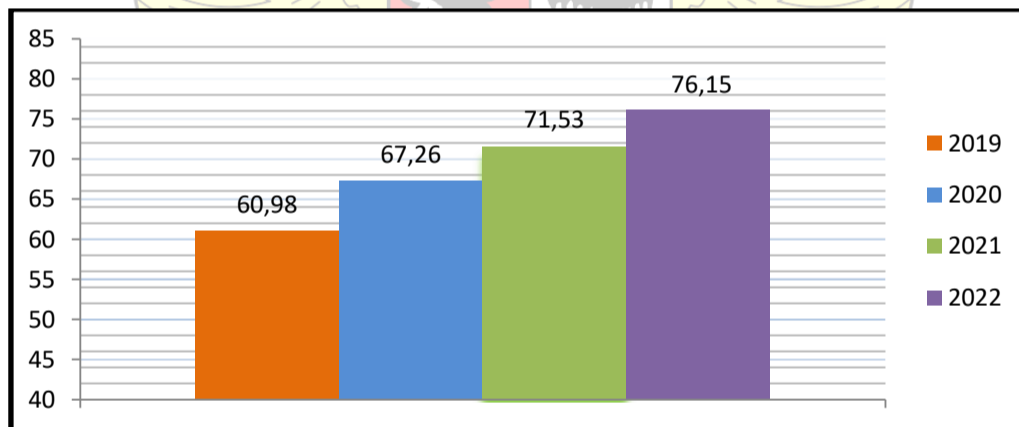
Sebelumnya, pada tahun 2021 target nilai SAKIP Kabupaten adalah kategori A dan realisasinya adalah kategori BB dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 89,40%.

**Tabel 2.82**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator or Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A	BB	89,40%	A	BB	95,18	Capaian Kinerja Meningkat

Sumber : LHE Kemen PANRB, 2021 dan 2022.

**Diagram 2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang Dari Tahun Awal RPJMD**



Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan tren terus meningkat. Peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dari 60,98 poin sampai dengan tahun 2022 menjadi 76,15 poin (Predikat BB) naik 15,17 poin.

**a. Perbandingan Kinerja Dengan Target Akhir Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Nilai Sakip Kabupaten adalah kategori A dan realisasi pada tahun 2022 adalah BB, sehingga capaian kinerja jangka menengah Nilai Sakip Kabupaten pada tahun keempat RPJMD sebesar 95,14%.

**Tabel 2.83**



**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	95,14%

**b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

No	Kendala	Solusi
1	Masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup	Pelaksanaan reviu sasaran strategis dan indikator kinerja
2	Penjenjangan kinerja terutama dari level Kepala Perangkat Daerah sampai ke level di bawahnya belum mengacu sesuai dengan Peremnpnan RB nomor 89 tahun 2021	Optimalisasi penerapan aplikasi MAKSITI sebagai aplikasi penjenjangan kinerja dari level Kepala Perangkat Daerah sampai dengan level terbawah
3	Setiap level OPD belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Memastikan OPD memantau secara berjenjang atas pengukuran capaian kinerja dibawahnya dengan melakukan dialog kinerja secara berkala.
4	Penjabaran informasi atas beberapa capaian indikator kinerja PD masih terdapat kesalahan-kesalahan sehingga menyebabkan Analisa atas capaian kinerja tidak valid dan memberikan rekomendasi yang tidak sesuai.	Melaksanakan reviu atas dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah,
5	Perangkat Daerah Belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
6	Hasil laporan evaluasi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implemntasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah	Internalisasi Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 kepada tim evaluasi akuntabilitas internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya memenuhi persyaratan minimum requirement untuk memperoleh predikat A, maka untuk menjawab Permenpan RB nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja, pada Tahun 2022 telah dibangun aplikasi penjenjangan kinerja dan mulai diujicobakan pada bulan oktober 2022, pada tahun 2023 aplikasi penjenjangan kinerja mulai diterapkan secara menyeluruh kepada Perangkat Daerah.

**c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**



Anggaran yang mendukung capaian Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah Rp.2,175,372,550,771.00 yang terdiri dari 11 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.2,035,295,739,095.00 atau 93,56%.

**Tabel 2.84**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,661,465,973,219.00	1,577,953,794,162.00	94,97
Program Penataan Organisasi	333,550,000.00	329,616,449.00	98,82
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,912,118,100.00	1,888,487,650.00	98,76
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,879,647,400.00	3,851,904,529.00	99,28
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	452,115,171,921.00	397,577,637,786.00	87,94
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,918,100,000.00	1,851,673,633.00	96,54
Program Administrasi Pemerintahan Desa	7,610,356,100.00	7,580,191,339.00	99,60
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20,884,016,421.00	20,503,933,144.00	98,18
Program Perekonomian dan Pembangunan	2,499,746,910.00	2,441,821,935.00	97,68
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22,068,900,500.00	20,701,552,118.00	93,80
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	684,970,200.00	615,126,350.00	89,80
<b>Jumlah Total</b>	<b>2,175,372,550,771.00</b>	<b>2,035,295,739,095.00</b>	<b>93,56</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Nilai Sakip Kabupaten tahun 2022 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

**Tabel 2.85**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	95,14%	93,56	-	Tidak efisien

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**



Program penunjang Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program ini merupakan program penunjang semua pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang terdiri dari dukungan yang bersifat administratif, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, sarana prasarana, atau dukungan lainnya. Program ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah
2. Program Penataan Organisasi  
Program penataan organisasi merupakan program yang didalamnya terdapat kegiatan kegiatan terkait dengan keorganisasian, akuntabilitas kinerja dan tatalaksana dan peningkatan pelayanan public dengan indikator kinerja program indeks Reformasi Birokrasi dengan target 80 poin terealisasi sebesar 71,82 poin capaian kinerja 89,77% target tidak tercapai.
3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Capaian kinerja program yang menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator sasaran strategis dapat dilihat dalam pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menunjukkan hasil rata-rata sekitar 107,74 %. Keberhasilan pencapaian target kinerja program ini didukung oleh realisasi pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang terealisasi sampai 115,48 %, dan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %.
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Indikator kinerja program yaitu Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran dengan target 95% dan realisasinya 95% capaian kinerja 100%.target tercapai
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Indikator kinerja program yaitu Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) dengan target 100% dan realisasinya 100% target tercapai.
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa  
Indikator kinerja program yaitu Persentase Desa yang Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Desa dengan target 100% dan tercapai 100%. Target tercapai
7. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Indikator kinerja Program, yaitu:

- a. Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik" dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100%. realisasi terkait indikator kegiatan yang diukur berdasarkan Persentase Manajemen Pemerintahan kecamatan dan kelurahan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja kecamatan dan kelurahan berkategori "baik", diperoleh berdasarkan rata-rata nilai atas Capaian Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2022, dengan asumsi target capaian sebesar 70% dari total kecamatan berjumlah 26, minimal telah terdapat 18 Kecamatan harus bernilai 62,51-81,25 (Kategori Baik). Begitupun halnya dengan kelurahan, bahwa dari target 70 % kelurahan yang berjumlah 7, minimal terdapat 5 kelurahan bernilai 62,51-81,25 (berkategori baik)
  - b. Nilai LPPD dengan target skor sebesar 3,7 dan realisasinya sampai dengan penyusunan laporan ini belum karena menunggu rilis dari Kemendagri.
  - c. Persentase tertib administrasi kewilayahan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
  - d. Persentase Perangkat Daerah bidang Kesehatan, sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" serta fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan. dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
8. Program Perekonomian dan Pembangunan  
Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi dengan target 100% dan realisasinya sebesar 93.75% atau capaian kerjanya sebesar 93.75%
9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  
Indikator kinerja program yaitu terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tercapai 100%.
10. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Indikator kinerja program yaitu terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tercapai 100%.

## (17) OPINI BPK





**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/unqualified opinion, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/qualified opinion, Tidak Wajar/adversed opinion, dan Tidak Menyatakan Pendapat/disclaimer of opinion. Opini terbaik adalah WTP. Target kinerja “Opini BPK” tahun 2022 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah WTP atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

**Tabel 2.86**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Opini**  
**BPK Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Evaluasi BPKRI

Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Predikat WTP telah diraih selama 8 tahun berturut-turut .

**Tabel 2.88**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022 dengan**  
**Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	Realisasi dan Capaian Kinerja Stabil

Sumber : Hasil Evaluasi BPKRI

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Opini BPK adalah WTP dan realisasi pada tahun 2022 adalah WTP, sehingga capaian kinerja jangka menengah Opini BPK pada tahun keempat RPJMD sebesar 100%.



**Tabel 2.89**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Opini BPK	WTP	WTP	100%

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi**

Kabupaten Sumedang telah meraih Opini BPK WTP sebanyak 8 (Delapan) kali secara berturut-turut.

**Tabel 2.90**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK Tahun 2022	Keterangan
1	Prov Jawa Barat	WTP	11 kali WTP (dari Tahun 2011)
2	Kab. Bandung	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
3	Kab. Bandung Barat	WTP	2 kali WTP (dari Tahun 2011)
4	Kab. Bekasi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
5	Kab. Bogor	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
6	Kab. Ciamis	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
7	Kab. Cianjur	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
8	Kab. Cirebon	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
9	Kab. Garut	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
10	Kab. Indramayu	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
11	Kab. Karawang	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
12	Kab. Kuningan	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
13	Kab. Majalengka	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
14	Kab. Pangandaran	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
15	Kab. Purwakarta	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
16	Kab. Subang	WTP	4 kali WTP (dari Tahun 2011)
17	Kab. Sukabumi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
18	Kab. Sumedang	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
20	Kota Bandung	WTP	4 kali WTP (dari Tahun 2011)
21	Kota Banjar	WTP	11 kali WTP (dari Tahun 2011)
22	Kota Bekasi	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
23	Kota Bogor	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
24	Kota Cimahi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
25	Kota Cirebon	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
26	Kota Depok	WTP	11 kali WTP (dari Tahun 2011)
27	Kota Sukabumi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
28	Kota Tasikmalaya	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau**



## **Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dalam pencapaian WTP tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian komponen-komponen yang dijadikan bahan evaluasi OPINI BPK yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada komponen ke-4 yaitu efektivitas sistem pengendalian internal tidak lepas dari indikator kinerja yang secara langsung menjadi faktor utama efektivitas sistem pengendalian internal antara lain :

1. Indikator Tingkat Maturitas SPIP yang mana tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sumedang berada pada level 3
2. Indikator Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
3. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi
4. Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD

Untuk mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut, tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu terdapatnya perubahan di dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya kapasitas dan komitmen Sumber Daya Manusia, terdapatnya perubahan sistem informasi pencatatan pengelolaan keuangan, belum optimalnya peran pengawas internal, masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindak lanjuti dan kurangnya sinergitas antar stakeholder. Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Regulasi
  - Melaksanakan penyesuaian atas peraturan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - Melaksanakan reviu SOP
  - Membuat Manajemen Risiko
  - Memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Sumber Daya Manusia
  - Meningkatkan komitmen stakeholder dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual
  - Penguatan nilai organisasi melalui pakta integritas



- Melaksanakan sosialisasi/pelatihan/bimtek terkait akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah
- Melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan pelaporan keuangan melalui tatap muka dan melalui aplikasi klinik akuntans (klikakun.net)
- c. Teknologi Informasi
  - Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Melaksanakan Bimtek sistem informasi kepada seluruh OPD
- d. Sistem Pengendalian Internal
  - Optimalisasi peran pengawas internal daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review Laporan Keuangan
  - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban
  - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal dan eksternal
- e. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan
  - Membuat Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
  - Melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi
  - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPK untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Opini BPK tahun 2022 adalah Rp. 465.560.210.321,00 yang terdiri dari 5 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 410,746,770,365,00 atau 88,27%.

**Tabel 2.91**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Opini BPK**  
**Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	452,115,171,921.00	397,577,637,786.00	87,94
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,918,100,000.00	1,851,673,633.00	96,54
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,888,000,000.00	6,701,580,546.00	97,29
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,430,656,080.00	3,416,911,080.00	99,60



Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,208,282,320.00	1,198,967,320.00	99,23
<b>JUMLAH</b>	<b>465,560,210,321.00</b>	<b>410,746,770,365.00</b>	<b>88,27</b>

Capaian kinerja Opini BPK tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi anggaran program sebesar 88,27%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,73%.

**Tabel 2.92**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) –(4)	(6)
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	100%	88,27%	11,73%	Efisien

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Opini BPK, yaitu :

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 2 (Dua) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

a) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, indikator kinerja :

1. Penempatan uang daerah dan penatausahaan penempatan uang daerah; perhitungan alokasi dana transfer ke desa; rekonsiliasi data transaksi harian; perhitungan silpa RKUD; penatausahaan utang dan piutang daerah; penagihan piutang daerah; penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD .
2. RAK murni dan Perubahan SKPD, RAK Daerah, Surat Pencairan Dana (SPD).
3. Sosialisasi kebijakan dana transfer, lembar konfirmasi transfer, laporan realisasi belanja dana spesifik, laporan



realisasi DAU, laporan realisasi DTU, rekonsiliasi belanja dana spesifik, perhitungan silpa dana spesifik, fasilitasi penyaluran dana spesifik, rekonsiliasi dana desa.

4. Verifikasi SPM, register SP2D terbit, penerbitan SP2D, Advis SP2D, laporan posisi kas, evaluasi belanja, rekonsilias belanja, rekonsiiasi iuran jaminan kesehatan, rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan perangkat desa, rekonsiliasi iuran wajib pegawai, pemutakhiran ata penerima dana PFK, perhitungan alokasi dana transfer ke desa.
  5. Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban
  6. SK Tim, Modul Learning Management System (LMS), FG Evaluasi LMS, Workshop, bimbingan teknis, pendampingan aplikasi SIPD, evaluasi penatausahaan belanja.
- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, indikator kinerja :
1. Dokumen register penerimaan kas daerah dan register pengeluaran kas daerah.
  2. Berita acara rekonsiliasi neraca, berita acara rekonsiliasi LRA dan berita acara rekonsiliasi LO tahun anggaran 2021 per OPD.
  3. Laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2021.
  4. Laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2021.
  5. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.
  6. Laporan hasil tindak lanjut BPK.
  7. Dokumen analisa laporan pertanggunggunjgawaban pelaksanaan APBD.
  8. Dokumen panduan dan kebijakan akuntansi.
  9. Dokumen sistem dan prosedur akuntansi.
  10. Pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah.
  11. Dokumen laporan keuangan.



2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu: Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan indikator kinerja :

- Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Harga, HSPK dan SBU Tahun Anggaran 2022 yang benar dan akurat.
- Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Paket pemeliharaan Aplikasi pengelolaan BMD dan tersusunya dokumen pelaporan BMD disertai rincian BMD sesuai kondisi sebenarnya.
- Terbangunnya tanda batas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan pemasangan plang dan tanda batas pada asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Tersusunya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan berita acara penilaian barang milik daerah yang benar dan akurat.
- Laporan belanja modal sesuai dengan fisik barangnya.
- Tersusunya berita acara pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah.
- Dokumen rincian barang ke neraca.
- Pengurus barang yang mengikuti bimtek.

3) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Persentase pemenuhan unsur SPIP dari target 100% terealisasi 100 % dengan capaian 100%

4) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja antara lain :

1. Presentase pemenuhan elemen IACM dari target yang ditetapkan pada indikato kinerja Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM) adalah Level 3 Penuh. Hasil Quality Assurance (QA) Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Level 3 Penuh sesuai dari yang ditargetkan. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori Baik. dengan



capaian Kinerja 100%

2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah 100%. Hasil evaluasi perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan zona integritas adalah 100% atau 55 OPD sesuai dari yang ditargetkan. Dengan demikian capaian target indikator kinerja tersebut diatas sebesar 100% dengan kategori Baik.

5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Program yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 18.99% dan realisasinya 17.38% atau capaian kinerja sebesar 91.52%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 87.07% yang ditunjang Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah mencapai 98.90%, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah 98.63%, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah mencapai 98.41%, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah mencapai 98.85%, Penilaian PBB P2 dan BPHTB mencapai 93.63%, Penetapan Wajib Pajak mencapai 96%, Penagihan Pajak Daerah mencapai 87.17 serta Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah mencapai 97.61%.

**(18) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2022 sebesar 89 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil survey unit layanan publik yang berada di semua Perangkat Daerah se- Kabupaten Sumedang triwulan IV Tahun 2022 di dapat realisasi adalah 88,19 poin atau capaian kinerja sebesar 99,09% (kinerja sangat tinggi). Berdasarkan perhitungan hasil survei, diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 2.93**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89	88,19	99,09%	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi Kabupaten Sumedang tahun 2022





**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 85,60 poin sementara pada tahun 2022 tingkat kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang meningkat menjadi 88,19 poin naik sebesar 2,59 poin. Hal ini juga di buktikan dengan capaian atas evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB untuk Kabupaten Sumedang mendapatkan predikat Pelayanan Prima Kembali sementara untuk evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan public oleh Ombudsman RI yang semula masuk dalam zona kuning pada tahun 2022 meningkat dan mendapat predikat kepatuhan tinggi (zona hijau).

**Tabel 2.94**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86	85,60	99,55%	89	88,19	99,09%	Realisasi meningkat dan realisasi kinerja menurun

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Sumedang

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92 poin sehingga capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 95,86%.

**Tabel 2.95**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	92 poin	88,19 poin	95,86%

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**



**Tabel 2.96**  
**Nilai Rata- Rata Per Unsur Layanan Tahun 2022**

NO	UNSUR SKM	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,111)
U1	Persyaratan	3,48	0,383
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,47	0,382
U3	Waktu Penyelesaian	3,42	0,376
U4	Biaya/Tarif	3,89	0,428
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,47	0,382
U6	Kompetensi Pelaksana	3,49	0,384
U7	Perilaku Pelaksana	3,53	0,388
NO	UNSUR SKM	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,111)
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,43	0,377
U9	Sarana dan Prasarana	3,84	0,423
<b>Jumlah</b>			<b>3,5276</b>
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>			<b>88,19</b>
<b>Mutu Pelayanan</b>			<b>B</b>
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>			<b>BAIK</b>

#### A. Analisis Bivariat

Analisis ini dilakukan berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil pelaksanaan survei antara lain :

1. Bahwa unsur survey kepuasan masyarakat tertinggi adalah **Biaya/Tarif sebesar 3,89** naik 0,17 poin dari capaian Tahun 2021 sebesar 3,72;
2. Unsur layanan yang mendapatkan nilai rata-rata terendah adalah **Waktu Penyelesaian sebesar 3,42**. Akan tetapi mengalami kenaikan 0,09 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,33;
3. **Unsur Persyaratan dengan capaian 3,48** naik 0,12 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,36;
4. **Unsur Sistem Mekanisme Prosedur dengan capaian 3,47** naik 0,11 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,36;
5. **Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan capaian 3,47** naik 0,11 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,36;
6. **Kompetensi Pelaksana dengan capaian 3,49** naik 0,10 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,39;
7. **Perilaku Pelaksana dengan capaian 3,53** naik 0,06 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,47;
8. **Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan capaian 3,43** turun 0,02 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,45;



9. **Sarana dan Prasarana dengan capaian 3,84** naik 0,24 poin dari capaian tahun 2021 sebesar 3,60;

Berdasarkan hasil analisis dari capaian tahun 2022 8 (delapan) unsur mengalami kenaikan dari capaian Tahun 2021 sementara 1 (satu) unsur layanan mengalami penurunan sebesar 0,02 poin yaitu Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

## **B. Analisis Univariat**

Analisis Univariat yang akan kami uraikan merupakan analisis hubungan antara unsur – unsur penilaian survey yang kami laksanakan sebagai berikut :

1. Unsur Persyaratan dengan Unsur Sistem, Mekanisme Prosedur mengalami peningkatan dan akan saling berhubungan dan saling menunjang dikarena didalam unsur sistem, mekanisme Prosedur akan terdapat unsur persyaratan. capaian kenaikan unsur persyaratan akan naik seiring dengan sistem, mekanisme prosedur yang simple dan sesuai;
2. Unsur Persyaratan dengan unsur waktu penyelesaian mengalami peningkatan berdasarkan analisis yang kami laksanakan unsur ini sangat berhubungan dan ketergantungan dimana persyaratan lebih mudah, dan maka waktu penyelesaian akan relatif cepat;
3. Unsur persyaratan dengan unsur biaya/tarif dan unsur produk spesifikasi jenis layanan mengalami peningkatan berdasarkan dari analisis yang kami laksanakan terdapat hubungan yaitu unsur persyaratan yang di buat tergantung dari ada tidak adanya biaya pelayanan dan persyaratan yang di tetapkan juga tergantung dari jenis produk layanan karena setiap jenis produk layanan akan berbeda persyaratannya, dimana unsur persyaratan harus jelas sesuai dengan unsur jenis layanan/produk layanan;
4. Unsur sistem, mekanisme prosedur dengan unsur waktu penyelesaian dan unsur produk jenis layanan mengalami peningkatan dan dari hasil analisis kami saling berhubungan dan sudah cukup sesuai sehingga bisa mendongrak nilai survey kepuasan masyarakat;.
5. Unsur Kompetensi Pelaksana, unsur waktu penyelesaian, produk jenis layanan, perilaku pelaksana sudah cukup baik dimana unsur kompetensi pelaksana bisa mendorong unsur-unsur pelayanan yang lain capaiannya bisa lebih baik;
6. Unsur Perilaku Pelaksana mengalami peningkatan dan sangat berhubungan secara langsung dengan semua unsur layanan sehingga



perilaku pelaksana merupakan bagian penting pada proses pelayanan. Perilaku pelayanan dengan penerapan budaya layanan 3S (Senyum, Salam, Sapa), budaya perilaku berpakaian yang rapih dan lengkap. unsur perilaku pelaksana untuk tahun 2022 menunjukkan kenaikan nilai yang cukup baik;

7. Penanganan Pengaduan yang telah dilakukan terdapat dua cara yaitu secara elektronik (website dan aplikasi SP4N LAPOR) dan penanganan pengaduan secara langsung tatap muka. Penanganan pengaduan tersebut akan sangat bermanfaat terhadap peningkatan unsur-unsur IKM dimana dengan adanya pengaduan dari masyarakat, penyelenggara pelayanan publik dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang harus secepatnya dibenahi. Akan tetapi hasil survey menunjukkan bahwa unsur penanganan pengaduan mengalami penurunan berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terdapat kendala dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan dari segi waktu penyelesaian, dimana masyarakat tidak mau tahu pengaduan yang mereka sampaikan dapat di realisasikan secepatnya padahal terkait pengaduan yang sifatnya harus dilakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal serta penanganan pengaduan yang diharuskan membebaskan pembiayaan tidak bisa di realisasikan begitu saja tanpa ada persetujuan berbagai pihak.

**Tabel 2.97**

**Kendala, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Survei  
Kepuasan Masyarakat**

No	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Waktu penyelesaian pengaduan khusus pengaduan yang melibatkan pihak eksternal dan memerlukan pembiayaan yang besar tidak bisa di selesaikan dalam jangka waktu yang singkat	Harus dilaksanakan Forum Konsultasi Publik kembali pada beberapa Unit Pelayanan Publik yang tingkat jangka waktu penyelesaiannya perlu ada perbaikan/pembenahan	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
2	Aplikasi SP4N Lapor yang belum bisa terintegrasi secara menyeluruh dengan aplikasi pengaduan yang ada di Kabupaten Sumedang	Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, SP4N LAPOR, Website	Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, SP4N LAPOR, Website pada masing-masing unit layanan dan aplikasi sejenisnya

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 adalah Rp.141,482,929,063.00 yang terdiri dari



program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 135,168,851,262.00 atau 95,54%.

**Tabel 2.98**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Opini BPK**  
**Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Kepegawaian Daerah	5,259,425,700.00	4,501,080,004.00	85,58
Program Pendaftaran Penduduk	1,426,382,600.00	1,361,370,750.00	95,44
Program Pencatatan Sipil	404,817,400.00	397,779,440.00	98,26
Program Pelayanan Penanaman Modal	244,425,000.00	236,090,675.00	96,59
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458,914,000.00	387,575,931.00	88,46
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50,570,000.00	50,536,000.00	99,93
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,888,000,000.00	6,701,580,546.00	97,29
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3,234,302,000.00	3,202,023,131.00	99,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	123,516,092,363.00	118,330,814,785.00	95,80
<b>Jumlah</b>	<b>141,482,929,063.00</b>	<b>135,168,851,262.00</b>	<b>95,54</b>

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 88,19% dan realisasi anggaran program sebesar 95,54%, tingkat efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena realisasi kurang dari 100%.

**Tabel 2.99**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Opini BPK**  
**Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,09%	85,61%	-	Tidak efisien

**f. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1) Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja :

- a. Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan dengan target kinerja 98% realisasi 98% capaian kinerja 100%



- b. Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan dengan target kinerja 98% realisasi 95,67% capaian kinerja 97,62%
  - c. Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan target kinerja 85% realisasi 99,05% capaian kinerja 101,10%
  - d. Persentase ASN yang berkinerja baik dengan target kinerja 100% realisasi 98 % capaian kinerja 98%
- 2) Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan target 98% dan realisasi 99,98% dengan capaian kinerja 103,07% (melebihi target).
  - 3) Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil target 98% dan realisasi 98,83% dengan capaian kinerja 100,85%
  - 4) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase Permohonan Penanaman Modal yang terfasilitasi, target 80% realisasi 76,06% capaian kinerja 95,08%
  - 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP target 80% realisasi 61,58% capaian kinerja 76,08%
  - 6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase data PM dan perizinan yang valid, target 100% dan realisasi kinerja 100% capaian kinerja 100%
  - 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak, target kinerja 91% dan realisasi 84,79% capaian kinerja 93,18%.
  - 8) Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah, target 50% dan realisasi 74,29% capaian kinerja 148,58%
  - 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Layanan BLUD yang memadai, target kinerja 100% realisasi 100%

## **19 ) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup beberapa domain aspek penilaian dengan pembobotan sebagai berikut :



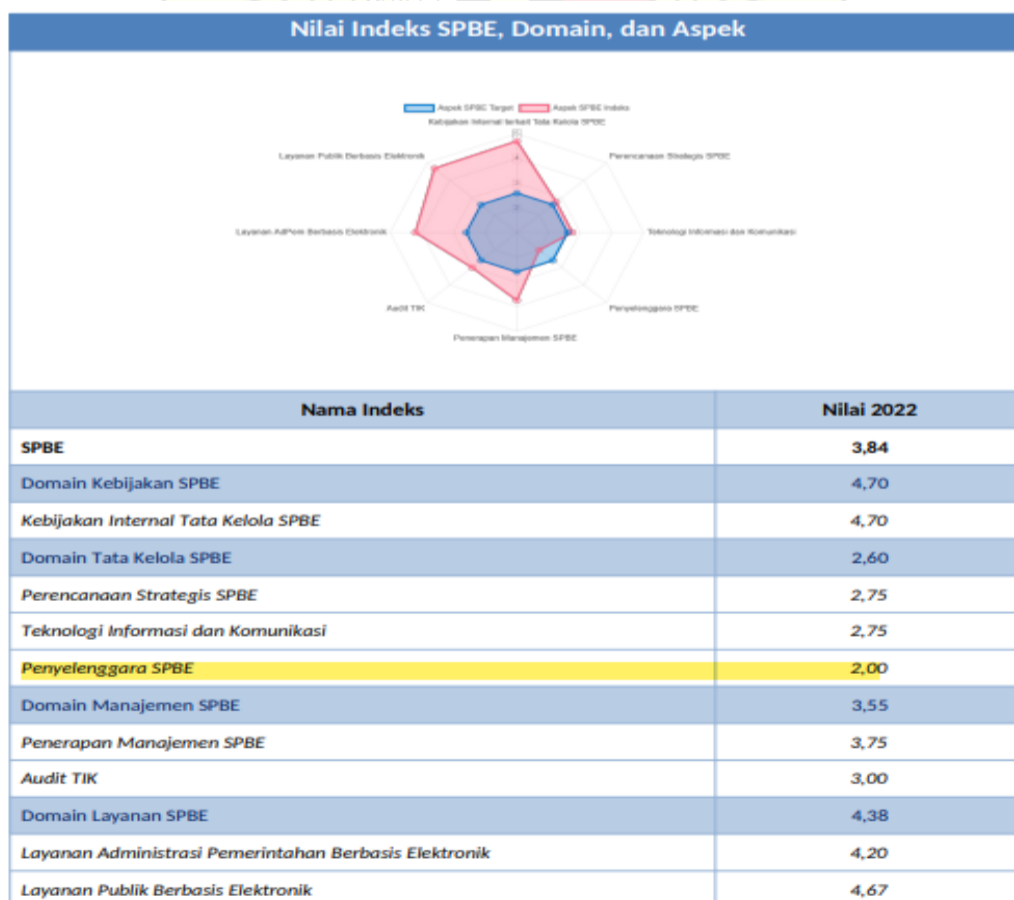
**Tabel 2.100**  
**Domain dan Aspek Penilaian SPBE**

Domain dan Aspek Penilaian Bobot		Predikat Indeks SPBE		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	5	< 1,8	Kurang
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Target kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” tahun 2022 sebesar 4,1 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil evaluasi untuk Indeks SPBE Kabupaten Sumedang adalah 3,84 poin atau capaian kinerja sebesar 93,66% (kinerja sangat tinggi).

**Tabel 2.101**  
**Realisasi Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022**





**Tabel 2.102**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks**  
**Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks SPBE	poin	4,1	3,84	93,66%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil evaluasi Indeks SPBE Kempanrb

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Dibandingkan tahun 2021, realisasi Indeks SPBE tahun 2022 naik 0,32 poin capaian kinerjanya meningkat sebesar 9,09%.

**Tabel 2.103**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Tahun**  
**2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	Indeks SPBE	Poin	4,0	3,52	88%	4,1	3,84	93,66%	Realisasi Meningkat

**Tabel 2.104**  
**Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	4	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	5	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4	2





No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	4
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2	4
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	5	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	4

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan, target akhir jangka menengah Indeks SPBE adalah 4,2 dan realisasi pada tahun 2022 adalah 3,84 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun keempat RPJMD sebesar 91,43%.

**Tabel 2.105**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Tahun 2022 Dengan Target Akhir RPJMD**

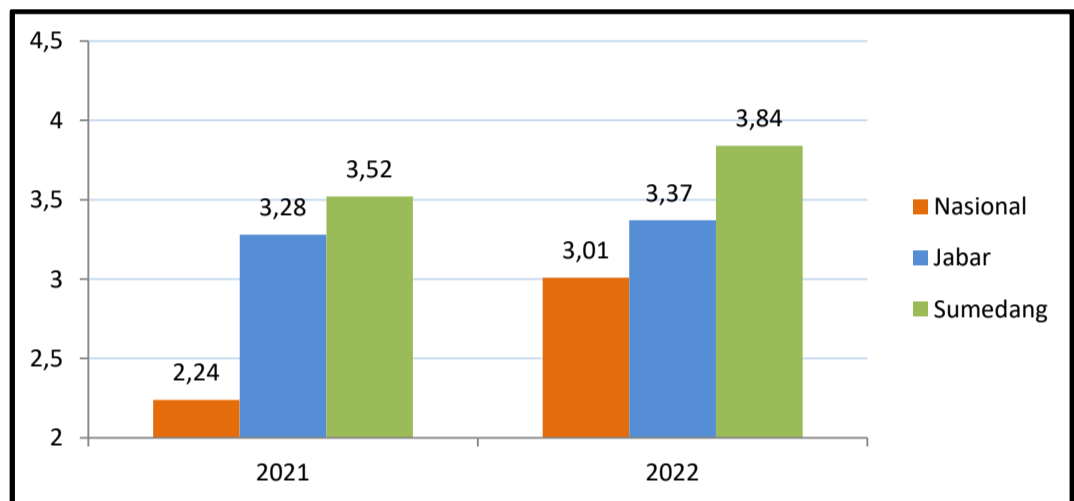
Indikator Kinerja	Target Akhir (Tahun 2023)	Sasaran RPJMD	Realisasi Sasaran RPJMD Tahun 2022	Target Akhir 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2022
Indeks SPBE	4,2 poin		3,84 poin		91,43%



#### **d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan, hal ini merupakan kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendukung pemerintah pusat dalam meningkatkan Indeks SPBE Nasional. Berikut kami sajikan grafik perbandingan Indeks SPBE Pemda Kabupaten Sumedang tingkat Provinsi dan Nasional:

**Grafik 2.**  
**Perbandingan Sistem SPBE Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional**



Sumber : Hasil Evaluasi Indeks SPBE Kemenpanrb

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di keluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di dapat beberapa penurunan pada aspek-aspek penilaian sebagai berikut :

- Tingkat kematangan Rencana dan Anggaran SPBE;
- Tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE yang masih perlu ditingkatkan;
- Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE;
- Tingkat kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah yang perlu ditingkatkan;
- Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi;



- Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah;
- Tingkat kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE;
- Tingkat kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE;
- Tingkat kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Solusi yang telah dan akan dilakukan :

- Membuat rencana dan anggaran SPBE yang terpadu dan dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran serta lakukan review dan tindaklanjuti hasil review;
- Membuat dan menerapkan inovasi proses bisnis yang dilakukan secara elektronik serta lakukan review dan tindaklanjuti hasil review;
- Membangun aplikasi berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang dikordinir oleh perangkat daerah yang membidangi TIK serta lakukan review dan tindaklanjuti hasil review;
- Optimalisasi layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional/pusat data lain serta lakukan review dan tindaklanjuti hasil review;
- Menerapkan jaringan intra pemerintah secara menyeluruh dan interkoneksi dengan jaringan intra pemerintah lain serta lakukan review dan tindaklanjuti hasil review;
- Memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem penghubung pemerintah nasional/lainnya serta lakukan review dan tindaklanjuti hasil review ;
- Pembentukan tim koordinasi dan dorong untuk mengkoordinasikan tugas dan program kerja kepada seluruh perangkat daerah serta lakukan review terhadap tugas/program kerja dan tindaklanjuti;
- Optimalisasi kolaborasi penerapan SPBE dengan seluruh perangkat daerah serta lakukan review dan tindaklanjuti hasil review;
- Menyusun dan melaksanakan strategi Pengelolaan Aset TIK serta melakukan review dan tindaklanjuti hasil review.

#### **f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2022 adalah Rp. 10.178.478.400,00 yang terdiri dari 3 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.757.526.584,00 atau 95,86%.



**Tabel 2.106**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian**  
**Kinerja Indeks SPBE Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Aplikasi Informatika	9.215.597.350,00	8.825.592.800,00	95,77
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	556.300.050,00	535.434.980,00	96,25
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	406.581.000,00	396.498.804,00	97,52
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.487.982.240,00	5,247,773,790.00	95,63
<b>Jumlah</b>	<b>10.178.478.400,00</b>	<b>9.757.526.584,00</b>	<b>95,86</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Pengeluaran Per Kapita tahun 2022 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Indeks SPBE, antara lain :

- 1) Program Aplikasi Informatika
  - a. Indikator kinerja program yaitu persentase perangkat daerah menggunakan layanan publik berbasis elektronik dengan target 95% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja 105,26%.
  - b. Indikator kinerja program yaitu persentase desa menggunakan layanan Publik berbasis elektronik dengan target 90% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja 111,11%.
- 2) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi  
Indikator kinerja program yaitu tingkat keamanan informasi dengan target 54,26% dan realisasinya 61,24% atau capaian kinerja 112,86%.
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
Indikator kinerja program yaitu Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja 100%.
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Indikator kinerja program yaitu Persentase Layanan kepada



Masyarakat dengan target 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja 100%.

## 20 ) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2022 sebesar 8,78 – 7,99 dan realisasinya berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumedang adalah 7,72 persen atau capaian kinerja sebesar 96,63% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tidak tercapai.

**Tabel 2.107**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Penanggung jawab
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,78 s.d 7,99	7,72	96,63%	Sangat Tinggi	1. Dinakertran 2. DKUKMPP 3. Disparbudpora

Sumber : BPS

### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 realisasinya meningkat 1,46%.

**Tabel 2.108**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,15	9,18	50,73 %	8,78 – 7,99	7,72	96,62 %	Realisasi dan capaian kinerja Meningkat

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 6,95% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 7,72%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun keempat RPJMD sebesar 88,92%.



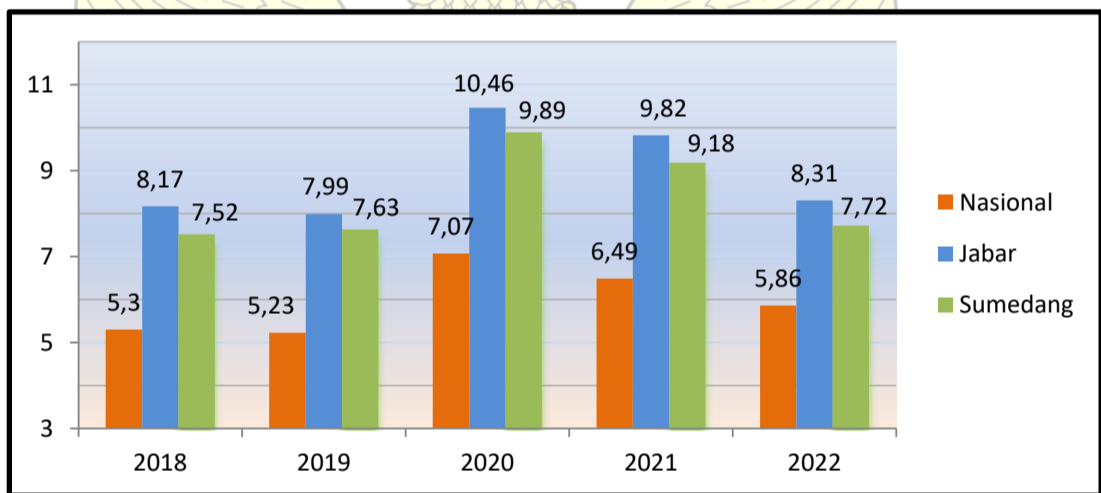
**Tabel 2.109**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,95%	7,72%	88,92%

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumedang dari tahun 2018-2021 selalu di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Namun, berada di atas rata-rata nasional.

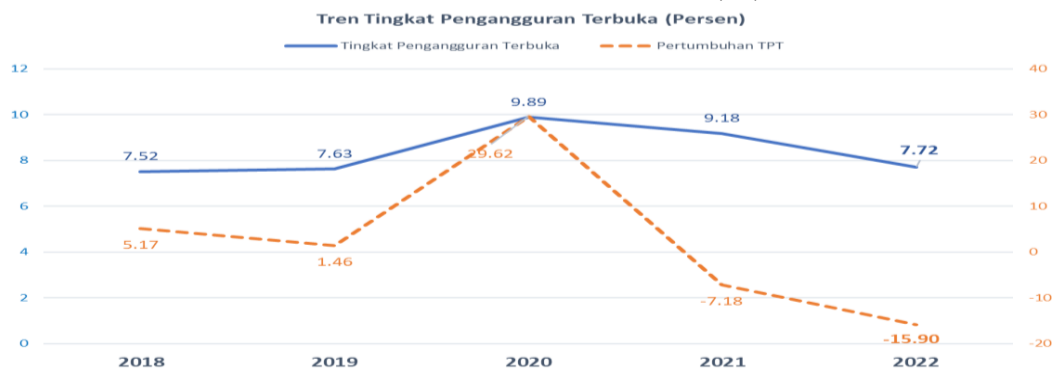
**Grafik 2.**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang**  
**Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia**



Sumber : BPS

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**Grafik 2.23**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018 – Tahun 2022 (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk mengetahui besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Diharapkan dengan mengetahui angka TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap supply tenaga kerja yang ada. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di tahun 2020. Setelah itu, TPT kembali menurun lebih cepat, bahkan di tahun 2022 sudah mendekati kondisi sebelum pandemi. Diasumsikan bahwa di Kabupaten Sumedang masih terdapat 7,72% persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, penyebabnya sangat beragam salah satunya dimungkinkan disebabkan oleh kinerja pasar kerja dan kondisi ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu meningkatnya angka kemiskinan yang disebabkan pandemi Covid-19 berkorelasi positif dengan meningkatnya pengangguran terbuka. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan oleh hilangnya pekerjaan buruh migran, tenaga kerja baru tidak terserap oleh pasar kerja dan terjadinya PHK. UMK Sumedang tahun 2021 Rp.3.241.929,67 berada di atas rata-rata UMK Jawa Barat dan berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung, hal tersebut merupakan salah satu faktor melemahkan daya saing bagi masuknya investor ke Sumedang. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka Sumedang masih tetap berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan (pelatihan kewirausahaan), uji kompetensi calon pencari kerja, dan pelaksanaan magang.

Solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah peningkatan pendidikan keterampilan/vokasi, peningkatan investasi, membuka lapangan pekerjaan padat karya, menumbuhkan wirausahawan baru, serta pembangunan destinasi wisata yang dapat membuka peluang usaha bagi warga masyarakat sekitar.

#### **f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 adalah Rp.9.122.365.550,00 yang terdiri dari 9 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.994.364.028,00 atau



98,60%.

**Tabel 2.110**  
**Realsiasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja Tingkat**  
**Pengangguran Terbuka Tahun 2022**

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,980,916,550.00	2,957,271,580.00	99,21
Program Penempatan Tenaga Kerja	782,800,000.00	762,618,748.00	97,42
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	35.195.000,00	34.400.000,00	97,74
Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian	50.000.000,00	46.405.000,00	92,81
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	200,000,000.00	197,150,000.00	98,58
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	704,200,000.00	672,560,000.00	95,51
Program Pengembangan UMKM	2,869,254,000.00	2,854,725,550.00	99,49
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	605.000.000,00	597.772.900,00	98,81
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	895.000.000,00	871.460.250,00	97,37
<b>Jumlah</b>	<b>9.122.365.550,00</b>	<b>8.994.364.028,00</b>	<b>98,60</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program penunjang Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator kinerja Program yaitu Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka dengan berdasarkan target RPJMD murni 2018-2023 sebesar 6,15% dan

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator kinerja Program yaitu Jumlah Persentase Jumlah Koperasi yang mendapatkan penilaian Kesehatan dengan berdasarkan target RPJMD 2018-2023 perubahan sebesar 40% dengan realisasi 23,90% dengan capaian 59,75%

3. Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian

Indikator kinerja Program yaitu Persentase Koperasi yang mendapatkan





pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan berdasarkan target RPJMD 2018-2023 Perubahan sebesar 12,08% dengan realisasi 29,88% atau dengan capaian 247,35%

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator kinerja Program yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan dengan berdasarkan target RPJMD 2018-2023 Perubahan sebesar 5,15% dengan realisasi 9,96 % atau dengan capaian 193,40%

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator kinerja Program yaitu Persentase UMKM yang diberdayakan dengan berdasarkan target RPJMD 2018-2023 Perubahan sebesar 0,34% dengan realisasi 1,36% atau dengan capaian 136,38%

6. Program Pengembangan UMKM

Indikator kinerja Program yaitu persentase UMKM yang di kembangkan dengan berdasarkan target RPJMD 2018-2023 Perubahan sebesar 0,22% dengan realisasinya 0,2% atau capaian kinerja sebesar 90.91 %.

7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja Program yaitu Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan, dengan berdasarkan target RPJMD 2018-2023 Perubahan sebanyak 16 sub sektor dengan realisasinya 16 subsektor atau capaian kinerja sebesar 100 %. Capaian kinerja tercapai dengan di dukung oleh :

- a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif. Sumedang sudah memiliki gedung kreatif center, diharapkan menjadi tempat berekspresi, berkreatifitas, berkarya, berinovasi dan sebagai tempat inkubasi bagi pengembangan ekonomi kreatif di Sumedang. Hal ini bisa terlaksana bila ada sarana dan prasarana pendukung bagi pelaku ekonomi ekonomi kreatif untuk mengembangkan potensi sesuai sub sektornya, untuk tahun anggaran 2022, pengadaan perlengkapan sarana prasarana untuk sub sektor music yaitu perlengkapan studio musik untuk rekaman. Sarana prasarana untuk seni pertunjukan, ruang kelas/rapat, coffe shop, pengadaan partisi gambar untuk sub sektor senirupa/foto, dan etalase kriya, serta sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif Sumedang dari 16 sub sektor.



- b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif. Memfasilitasi kegiatan kegiatan FGD, sosialisasi, study komparasi, dan seminar untuk penyusunan rencana aksi pengembangan ke 16 sub sektor ekonomi kreatif Sumedang.

#### 8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja Program yaitu Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya, dengan berdasarkan target RPJMD 2018-2023 Perubahan sebanyak 120 orang dengan realisasinya 300 orang atau capaian kinerja sebesar 250%. Capaian kinerja tercapai dengan di dukung oleh:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Untuk Sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, meliputi kegiatan SOCA yaitu menggambar bersama oleh pelaku ekonomi kreatif dari sub sektor seni rupa, Sumedang Creative Festival yaitu kegiatan yang melibatkan partisipasi 16 sub sektor pelaku ekonomi kreatif, pengadaan event dalam rangka launching GCC, dan event dalam rangka malam anugrah film. Dan untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif melalui festival film Pendek Sumedang, dengan tujuan untuk mendorong para insan dan kreatif film untuk berkreasi dan mengembangkan sub sektor fil, animasi, dan video.
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan mengadakan pelatihan dan workshop digital marketing untuk para pelaku ekonomi kreatif dari 16 sub sektor untuk memasarkan produknya secara online.



## BAB III

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### 3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas



pembantuan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut serta laporan realisasi anggaran berupa neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang dari para kepala SKPD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan (medebewind) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah.

Setelah tahun anggaran berakhir tahun 2022 bagian Tapem sebagai Tim penyusun LPPD berkoordinasi dengan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sumedang berkaitan dengan pengalokasian dana tugas pembantuan pada tahun 2022.

Hasil berkoordinasi dengan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun 2022 kabupaten sumedang tidak mendapatkan pengalokasian dana tugas pembantuan.

Permasalahan secara umum pada penyelenggaraan tugas pembantuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diantaranya :

- Belum semua Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dapat menyampaikan informasi awal terkait pagu indikatif Tugas Pembantuan yang akan diberikan ke daerah sehingga keselarasan dalam perencanaan sulit terbangun

Solusi secara umum pada penyelenggaraan tugas pembantuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diantaranya :

- Proaktif dengan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi terkait potensi tugas pembantuan yang akan diberikan
- Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan pedoman terkait lainnya



## BAB IV

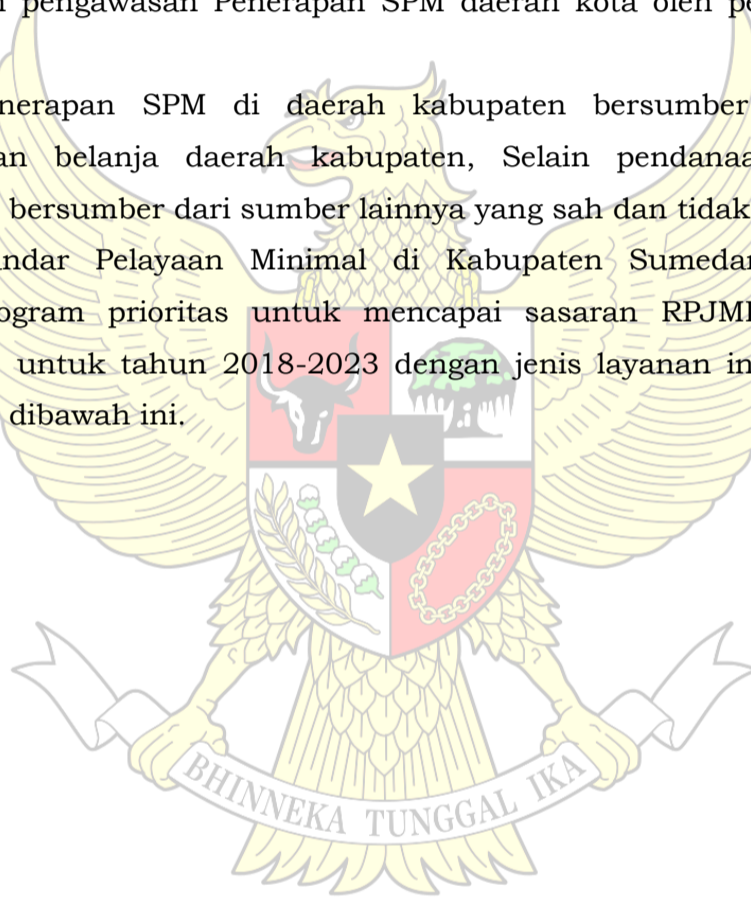
### 4.1. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi serta Laporan Penerapan SPM disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kota oleh perangkat Daerah kota.

Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, Selain pendanaan sebagaimana dimaksud, juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumedang tahun 2022 merupakan Program prioritas untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran Kepala Daerah) untuk tahun 2018-2023 dengan jenis layanan indikator program dalam tabel 4.1 dibawah ini.





**Tabel 4.1**  
**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022**

a. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



b. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan / atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		





c. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standard teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



d. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

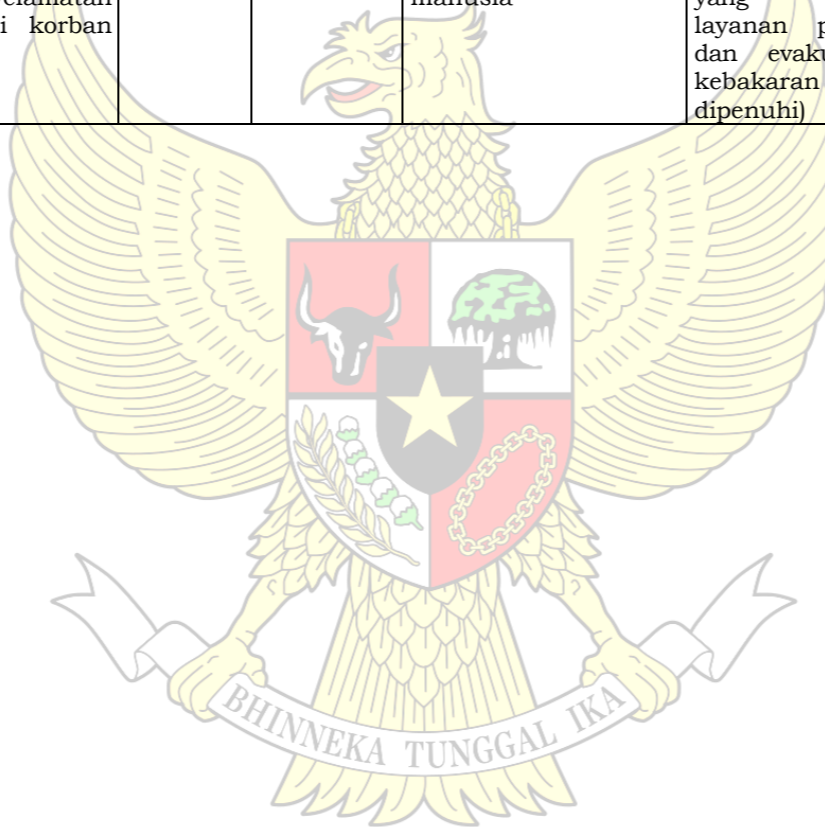


e. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	





f. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dan gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten /kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten / kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



**Tabel 4.2**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Pendidikan</b>					
	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Dinas pendidikan
	Pendidikan dasar	Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP			
			Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik			
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP			
	Pendidikan kesetaraan.	Program Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni Paket A			
			Angka Partisipasi Murni Paket B			
			Angka Partisipasi Murni Paket C			



NO	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>KESEHATAN</b>					
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Persentase BBLR		Cakupan Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	
	Pelayanan kesehatan balita;		Persentase balita gizi lebih			
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;		Persentase balita kurus			
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;		Persentase anak kelas 1-7 dan 10 mendapat screening kesehatan			
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;		Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan			
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Surveilans epidemiologi	Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular sesuai standar			
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;					
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;					
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan		Persentase Penanganan Penyakit Menular sesuai standar			
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus					



NO	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
	Memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sarana air minum yang terbangun	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	Persentase Sanitasi yang terbangun Jumlah SPALD yang terbangun	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luas Pengurangan Permukiman kumuh Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang dibangun dan dikembangkan		
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota					
5	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)	Satuan Polisi Pamomg Praja
			Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)			





NO	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani	Satuan Polisi Pamomng Praja
		Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani			
	Pelayanan informasi rawan bencana		Jumlah Desa / Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Pra	Badan penanggulangan bencana daerah
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan		Persentase Tanggap Darurat Bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;		Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam		Persentase Pasca Bencana	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Satuan Polisi Pamomng Praja
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			



NO	JENIS PELAYAN DASAR SPM	PROGRAM LAMA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM BARU	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
6	<b>SOSIAL</b>					
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	Dinas sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;		Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar			
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;		Persentase Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Dinas sosial
		Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial			



## 4.2. PENCAPAIAN SPM

### 4.2.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

#### a. Pengumpulan Data SPM

Pengumpulan data standard pelayanan minimal bidang pendidikan dimaksud dijabarkan dalam indikator-indikator yang menggambarkan sasaran/target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100%

#### 1. Anggaran

Pada dasarnya seluruh anggaran dari berbagai sumber yang dialokasikan untuk bidang Pendidikan adalah untuk memenuhi SPM baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang secara langsung menembak SPM adalah sebesar Rp. 159.367.749.540 ( Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah ). Dari anggaran tersebut realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 155.968.323.061 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah), dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan rincian tabel dibawah ini :



**Tabel 4.3**  
**Anggaran Standar Pelayanan Minimal 2022 Sub Bidang Pendidikan**

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM	TOTAL REALISASI DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	DINAS PENDIDIKAN	1 Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	97,64%	-	-	-	-	-	143,597,481,000	140,203,827,761
		2 Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	100	100%	-	-	-	-	-	3	3
		3 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100	99,96%	-	-	-	-	-	15.770.268.537	15.764.495.297
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>		-	-	-	-	<b>159.367.749.540</b>	<b>155.968.323.061</b>	



## 2. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Realisasi Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	<b>SPM</b>	TUNTAS PRATAMA			77.48 %
<b>01:00</b>	<b>Pendidikan Dasar Usia Dini</b>				
	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	:	<b>37,234</b>	<b>34,27</b>	<b>2,964</b>	<b>92%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				
		<b>Barang / Jasa</b>	<b>Barang / Jasa</b>	<b>Barang /</b>	<b>Persentase mutu</b>
		<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>
	<b>1 . Buku gambar</b>	5,141	2,7	<b>2,441</b>	<b>52.52 %</b>
	<b>2 . Alat mewarnai</b>	5,141	2,7	<b>2,441</b>	<b>52.52 %</b>
	<b>3 . Peserta Didik</b>	27,351	21,184	<b>6,167</b>	<b>77.45 %</b>
	<b>4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualitas S1/D-IV</b>	910 1,93	463 695	<b>447</b> <b>1,235</b>	<b>50.88 %</b> <b>36.01 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>40,473</b>	<b>27,742</b>	<b>12,731</b>	<b>269.38 %</b>
<b>02:00</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>				89.55 %
	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>71.75 %</b>
	• <b>Jumlah yang Harus Dilayani</b>	<b>172,087</b>	<b>154,332</b>	<b>17,755</b>	<b>90%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>17.81 %</b>
		<b>Barang / Jasa</b>	<b>Barang / Jasa</b>	<b>Barang /</b>	<b>Persentase mutu</b>
		<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>
	<b>1 . Buku teks pelajaran</b>	83,518	83,518	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>2 . Perlengkapan belajar</b>	83,518	83,518	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualitas S1/D-IV</b>	700	696	<b>4</b>	<b>99.43 %</b>
	<b>4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin)</b>	1,253	260	<b>993</b>	<b>20.75 %</b>
	<b>5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan peserta didik</b>	5,931	5,931	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>6 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yang berkualitas S1/D-IV</b>	143,035	141,923	<b>1,112</b>	<b>99.22 %</b>
	<b>7 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C</b>	8,694	8,209	<b>485</b>	<b>94.42 %</b>
	<b>8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C</b>	733	722	<b>11</b>	<b>98.50 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>327,382</b>	<b>324,777</b>	<b>2,605</b>	<b>712.32 %</b>
<b>03:00</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>				58.47 %
	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>42.78 %</b>
	:	<b>7,668</b>	<b>4,1</b>	<b>3,568</b>	<b>53%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>15.70 %</b>
		<b>Barang / Jasa</b>	<b>Barang / Jasa</b>	<b>Barang /</b>	<b>Persentase mutu</b>
		<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>
	<b>1 . Modul belajar</b>	4,1	4,1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</b>	177	177	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>3 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan peserta didik</b>	4,1	2,368	<b>1,732</b>	<b>57.76 %</b>
	<b>4 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yang berkualitas S1/D-IV</b>	241	185	<b>56</b>	<b>76.76 %</b>
	<b>5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yang berkualitas S1/D-IV (Kepala Sekolah) yang berkualitas S1/D-IV</b>	58	44	<b>14</b>	<b>75.86 %</b>
	<b>6 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yang berkualitas S1/D-IV (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualitas SMA/ sederajat</b>	32	16	<b>16</b>	<b>50.00 %</b>
	<b>7 . Perlengkapan belajar</b>	9,909	9,909	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>8 . PKBM Terakreditasi minimal C</b>	40	27	<b>13</b>	<b>67.50 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>18,657</b>	<b>16,826</b>	<b>1,831</b>	<b>627.88 %</b>

### 1. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)

Jumlah warga negara usia 7-15 tahun sebanyak 170.995 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 155.593 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 15.402 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 91%.



Jenis Layanan	Target	Realisasi
1. Buku Teks Pelajaran	133.75	-
2. Perlengkapan Belajar	133.75	-
3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	700	696
4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.253	260
5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	5.931	5.931
6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	133.75	-
7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8.694	8.209
8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	733	722

2. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebanyak 90,395 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 2,950 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 87,445 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 3%.

Jenis Layanan	Target	Realisasi
1. Modul Belajar	7.900	5.737
2. Jumlah rombongan belajar di PKBM	177	177
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-
4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	241	185
5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	58	44
6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	32	16
7. Perlengkapan Belajar	7.900	5737
8. PKBM Terakreditasi minimal C	40	27

3. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun sebanyak 37.073 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 30.985 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 6.088 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 84%.

Jenis Layanan	Target	Realisasi
1. Buku Gambar	24.474	500
2. Alat Mewarnai	24.474	500
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	24.474	500
4. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	910	463
5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.930	695



### 3. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

#### Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Pejabat Struktural			Fungsional Umum	Jumlah Seluruh
		II	III	IV		
1	Kecamatan Jatinangor		2	7	13	22
2	Kecamatan Cimanggung		2	7	9	18
3	Kecamatan Tanjungsari		2	7	10	19
4	Kecamatan Pamulihan		2	7	9	18
5	Kecamatan Sumedang Selatan		2	27	16	45
6	Kecamatan Sumedang Utara		2	22	15	39
7	Kecamatan Cimalaka		2	7	8	17
8	Kecamatan Paseh		2	7	6	15
9	Kecamatan Darmaraja		2	7	16	25
10	Kecamatan Situraja		2	7	13	22
11	Kecamatan Wado		2	7	6	15
12	Kecamatan Rancakalong		2	7	9	18
13	Kecamatan Tanjungkerta		2	7	6	15
14	Kecamatan Conggeang		2	7	8	17
15	Kecamatan Buahdua		2	7	7	16
16	Kecamatan Jatinunggal		2	7	6	15
17	Kecamatan Jatigede		2	7	6	15
18	Kecamatan Tomo		2	7	3	12
19	Kecamatan Ujungjaya		2	7	9	18
20	Kecamatan Cisit		2	7	6	15
21	Kecamatan Sukasari		2	7	7	16
22	Kecamatan Ganeas		2	7	3	11
23	Kecamatan Cisarua		2	7	7	16
24	Kecamatan Cibugel		2	7	5	14
25	Kecamatan Tanjungsari		2	7	6	16
26	Kecamatan Surian		2	7	4	13
<b>JUMLAH</b>			<b>52</b>	<b>217</b>	<b>213</b>	<b>482</b>

#### 1. Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didukung personil sebagaimana tabel berikut :

KECAMATAN	GTU/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Buahdua	33	19			52
Cibugel	51	33			84
Cimalaka	68	12			80



KECAMATAN	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Cimanggung	61	23			84
Cisarua	21	3			24
Cisitu	32	22	1		55
Conggeang	21	33			54
Darmaraja	26	16			42
Ganeas	41	18	1		60
Jatigede	14	35			49
Jatinangor	81	14			95
Jatinunggal	32	98			130
Pamulihan	83	41			124
Paseh	36	11	1		48
Rancakalong	56	40			96
Situraja	51	10	1		62
Sukasari	63	21			84
Sumedang Selatan	93	49			142
Sumedang Utara	58	51	2		111
Surian	17	17			34
Tanjungkerta	31	52			83
Tanjungmedar	32	41			73
Tanjungsari	101	67	8		176
Tomo	14	17			31
Ujungjaya	13	11			24
Wado	60	33			93
<b>Grand Total</b>	<b>1189</b>	<b>787</b>	<b>14</b>		<b>1990</b>

## 2. Taman Kanak-kanak (TK)

KECAMATAN	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Buahdua	15	1	3		19
Cibugel	8	4			12
Cimalaka	37	5	20		62
Cimanggung	50	6	2		58
Cisarua	19	4	3		26
Cisitu	23	3	1		27
Conggeang	12		3		15
Darmaraja	20		4		24
Ganeas	13		1		14
Jatigede	5	2			7
Jatinangor	74	1	3		78
Jatinunggal	20	10	2		32
Pamulihan	36	9	6		51
Paseh	33	3	8		44
Rancakalong	16		5		21
Situraja	27	5	7		39
Sukasari	26	2	2		30
Sumedang Selatan	68	6	11		85
Sumedang Utara	82	15	14		111
Surian	2	3	3		8





KECAMATAN	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Tanjungkerta	20	2	8		30
Tanjungmedar	14	3			17
Tanjungsari	62	3	9		74
Tomo	19				19
Ujungjaya	16	1	1		18
Wado	13		2		15
<b>Grand Total</b>	<b>730</b>	<b>88</b>	<b>118</b>		<b>936</b>

### 3. Pendidikan Dasar

#### a. Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar didukung personil sebagai berikut :

KECAMATAN	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Buahdua	3	86	128	34	251
Cibugel		68	78	32	178
Cimalaka		151	179	40	370
Cimanggung	21	164	165	116	466
Cisarua		56	53	11	120
Cisitu		83	120	18	221
Conggeang	21	85	104	20	230
Darmaraja		99	133	29	261
Ganeas		62	78	16	156
Jatigede		60	94	37	191
Jatinangor	81	166	144	79	470
Jatinunggal		138	137	57	332
Pamulihan	14	135	119	41	309
Paseh		63	110	22	195
Rancakalong		108	143	35	297
Situraja		102	150	23	275
Sukasari		43	45	33	121
Sumedang Selatan	41	202	245	56	544
Sumedang Utara	19	213	231	56	519
Surian		41	56	19	116
Tanjungkerta		95	139	18	252
Tanjungmedar		93	93	21	207
Tanjungsari	53	133	155	80	421
Tomo	7	50	87	19	163
Ujungjaya		68	104	22	194
Wado		91	142	46	279
<b>Grand Total</b>	<b>271</b>	<b>2655</b>	<b>3232</b>	<b>980</b>	<b>7138</b>



b. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama didukung personil sebagai berikut :

KECAMATAN	GTU/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Buahdua	15	24	41	6	86
Cibugel		33	27	9	69
Cimalaka	7	37	94	3	141
Cimanggung	100	55	60	15	230
Cisarua		10	22		32
Cisitu		32	58	5	95
Conggeang	6	21	45	4	76
Darmaraja	1	32	50	17	100
Ganeas		16	27	2	45
Jatigede	12	28	32	8	80
Jatinangor	162	91	98	7	358
Jatinunggal	18	39	42	7	106
Pamulihan	25	53	66	11	155
Paseh		22	47	5	74
Rancakalong	13	39	58	7	117
Situraja		56	86	7	149
Sukasari	9	10	27	3	49
Sumedang Selatan	36	99	183	10	328
Sumedang Utara	7	64	133	6	210
Surian		8	14	1	23
Tanjungkerta	23	29	45	3	100
Tanjungmedar		14	14	1	29
Tanjungsari	74	69	91	12	246
Tomo		21	33	3	57
Ujungjaya		18	38	4	60
Wado	6	54	51	16	127
<b>Grand Total</b>	<b>514</b>	<b>974</b>	<b>1482</b>	<b>172</b>	<b>3142</b>

4. Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan didukung personil sebagai berikut :

KECAMATAM	GTU/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Buahdua		1			1
Cibugel	7	1			8
Cimalaka	14	3			17
Cimanggung					
Cisarua	4				4
Cisitu		7	1		8
Conggeang	2	2	1		5
Darmaraja	4				4
Ganeas	6	1			7



KECAMATAM	GTY/PTY	NON ASN	PNS	PPPK	TOTAL
Jatigede					
Jatinangor	21	1			22
Jatinunggal	4				4
Pamulihan	14	2			16
Paseh	6	1			7
Rancakalong	6	1			7
Situraja	12		1		13
Sukasari	12	8			20
Sumedang Selatan	11				11
Sumedang Utara	9	2			11
Surian		1			1
Tanjungkerta	1	1			2
Tanjungmedar					
Tanjungsari	9	7			16
Tomo	3	1			4
Ujungjaya	9				9
Wado	9	3			12
<b>Grand Total</b>	<b>163</b>	<b>43</b>	<b>3</b>		<b>209</b>

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh, adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. APK/APM SD/SMP di dorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terasa manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Juga didukung adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besar sekali manfaatnya untuk operasional sekolah, utamanya Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin.
2. dalam meringankan biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP, Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan dan budaya sekitar.
4. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak daerah sesuai analisis kebutuhan.
5. Didalam juknis Pemanfaatan dana BOS, sudah dapat mengalokasi dana BOS untuk perawatan gedung sekolah untuk gedung atau ruangan dengan tingkat kerusakan ringan.



Faktor Penghambat :

1. Usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 13 tahun masih bersekolah di tingkat SD.
2. Usia peserta didik dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun masih bersekolah di tingkat SMP.
3. Peserta didik yang berada diperbatasan bersekolah keluar kabupaten atau dari luar kabupaten bersekolah kedalam kabupaten.
4. Kompetensi guru belum sesuai kebutuhan KBM (mutu dan kompetensi guru rendah).
5. Kemampuan guru dalam penguasaan IT masih rendah.
6. Aktifitas KKG dan MGMP di kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal untuk mengadakan kegiatan yang dapatmenumbuhkan budaya belajar dan budaya berbagi ilmu sesama guru.
7. Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu.
8. Penyebaran guru belum merata.
9. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil akibat pengaruh intervensi politik.
10. Kekurangan guru PNS.
11. Jumlah murid pada sekolah tertentu kurang dari 10 dalam satu kelas.
12. Banyak ruang kelas / guru / tata usaha / perpustakaan / laboratorium / lainnya yang memiliki intensitas kerusakan berat.
13. Perbandingan jumlah ruang kelas terhadap siswa tidak sesuai peraturan (rombel tidak ideal) dan Kurangnya fasilitas: kelas, perpustakaan, laboratorium.
14. Penumpukkan siswa di wilayah tertentu (disparitas satuan pendidikan).
15. Bangunan tidak ramah anak dan kebutuhan khusus lainnya.
16. Masih banyak PAUD yang belum terakreditasi.
17. Rendahnya kuota akreditasi untuk PAUD.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan target Indikator Sasaran yang di sampaikan ke BAPPPEDA.
2. Melaksanakan sosialisasi serta mengevaluasi Program dan kegiatan yang lebih membidik terhadap target sasaran kinerja Pendidikan.
3. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun anggaran agar tercipta keterpaduan, integritas, dan transparansi dalam rangka mewujudkan Pendidikan di Kabupaten Sumedang.



4. Memperketat batasan usia ketika pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
5. Memperketat pemberlakuan zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
6. Pemerintah daerah mempermudah ijin belajar untuk guru, serta memberikan beasiswa dan kemudahan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 untuk menempuh pendidikan. Bagi yang tidak memungkinkan (dikarenakan usia mendekati pensiun) dapat diberikan pelatihan agar kompetensinya dapat setara dengan guru D4/S1.
7. Pemerintah daerah memberikan pelatihan IT secara berkala kepada guru-guru melalui KKG atau MGPM dengan bekerja sama dengan berbagai tenaga atau rewalan ahli IT atau guru-guru IT, dan pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada KKG/MGMP yang aktif mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi guru.
8. Pemerintah daerah meredistribusi guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan guru, atau melakukan rotasi guru secara berkala.
9. Pemerintah daerah bersama DPRD Komisi Pendidikan membuat aturan khusus terkait rotasi guru secara berkala, misalnya 3 atau 5 tahun sekali berdasarkan analisis kebutuhan sehingga semua guru pasti dirotasi dan mengurangi intervensi politik, serta mengalokasikan dana untuk pembangunan dan renovasi perumahan yang layak bagi guru di daerah terpencil.
10. Pemerintah daerah menerapkan multigrade dan multisubject, guru bisa mengajar mata pelajaran serumpun dan mengajar di kelas jenjang berbeda.
11. Pemerintah daerah melakukan analisis populasi anak usia sekolah dengan satuan pendidikan terdekat, dan pemerintah daerah mengambil sikap terkait sekolah yang hanya memiliki siswa kurang dari 10 pada setiap kelas, baik melakukan merger sekolah serta menyarankan siswa tersebut untuk bersekolah di sekolah lain atau membina sekolah tersebut agar mendapatkan siswa sesuai kondisi sekolah.
12. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan pemetaan kondisi ruang kelas berdasarkan zona pendidikan. Sesuai dengan hasil pendataan dan pemetaan. Pemda memberikan prioritas alokasi anggaran kepada pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas berdasarkan kondisi ruang yang rusak berat, dan Penambahan ruang kelas baru dari anggaran APBD.



13. Sekolah dalam satu zona saling mendukung baik secara infrastruktur maupun PTK melalui sharing resources dan redistribusi guru.
14. Memperkuat peran Gotong Royong tripusat pendidikan dalam zona dengan mendorong orang tua dan masyarakat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.
15. Pembangunan harus memperhatikan isu gender dan difabel, serta Pengembangan mulok yang ramah anak.
16. Pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk membantu PAUD yang belum terakreditasi, serta memetakan PAUD di masing-masing zona pendidikan yang belum terakreditasi sehingga dapat dilakukan prioritas percepatan akreditasi.
17. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Himpaudi dan IGTKI untuk mendorong lembaga-lembaga paud untuk akreditasi serta berkoordinasi dengan BAN untuk di tambah kuota.





## A. BIDANG URUSAN KESEHATAN

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 2 ayat (3), Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara pada usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan berat (ODGJ) yang terlayani kesehatan	Persen	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%

### 2. Target Pencapaian SPM

#### 1. Target

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada



Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

## 2. Perhitungan Pembiayaan

Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM, tetapi dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan untuk tidak *double counting* pembiayaan, seperti yang telah dialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhan SPM, contoh : biaya obat program, obat TB, vaksin yang dibiayai oleh pusat tidak perlu diperhitungkan, selain itu untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sama pada kegiatan SPM seperti pendataan, ATK, dll dalam satu perhitungan pembiayaan sehingga alokasi dapat efisien dan efektif.

Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan daerah tersebut telah disiapkan tools costing SPM dalam bentuk sistem informasi yang tersedia. Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah daerah dalam perencanaan pelaksanaan SPM.

## 3. Realisasi Capaian

Dari dua belas indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang sudah ditentukan sesuai Peraturan menteri kesehatan, belum semua bisa mencapai target 100%.

Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan tahun 2022 adalah sebesar 94,37%.

Capaian paling rendah adalah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, yaitu hanya sebesar 72,23% dan yang paling tinggi adalah capaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sebesar 100 %.





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total
-1	-2	-3			-4
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>				93.81 %
<b>01.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>				100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	15,816	15,816	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				20.00 %
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	
		-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	15,816	15,816	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah	15,816	15,816	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	15,816	15,816	0	100.00 %
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	15,816	15,816	0	100.00 %
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	15,816	15,816	0	100.00 %
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	35	35	0	100.00 %
	7 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	8 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>81,164</b>	<b>81,164</b>	<b>0</b>	<b>800.00 %</b>
<b>02.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>				100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	15,988	15,988	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				20.00 %
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	
		-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Formulir Partograf	15,988	15,988	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	15,988	15,988	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	15,988	15,988	0	100.00 %
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	9	9	0	100.00 %
	5 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	6 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>50,022</b>	<b>50,022</b>	<b>0</b>	<b>600.00 %</b>
<b>03.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>				100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	15,662	15,662	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				20.00 %
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	
		-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	15,662	15,662	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	15,662	15,662	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	15,662	15,662	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	15,662	15,662	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	15,662	15,662	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	15,662	15,662	0	100.00 %
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	67	67	0	100.00 %
	8 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	9 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>96,088</b>	<b>96,088</b>	<b>0</b>	<b>900.00 %</b>
<b>04.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>				99.73 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	81,53	81,53	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total
-1	-2	-3			-4
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.73 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	98.65 %
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	81,53	81,53	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	81,53	81,53	0	100.00 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	81,53	81,53	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru	81,53	81,53	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah	81,53	81,53	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	17,357	16,274	1,083	93.76 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	17,357	14,922	2,435	85.97 %
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	81,53	81,53	0	100.00 %
	9 . Peralatan Anafilaktik	81,53	81,53	0	100.00 %
	10 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	11 . Dokter	283	283	0	100.00 %
	12 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	13 . Ahli Gizi	64	64	0	100.00 %
	14 . Guru PAUD	1,857	1,857	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	1,972	1,972	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>611,649</b>	<b>608,131</b>	<b>3,518</b>	<b>1,479.73 %</b>
<b>05.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>				<b>72.23 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	152,296	104,413	47,883	69%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>17.38 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	86.90 %
	1 . Buku raport kesehatanku	152,296	104,413	47,883	68.56 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	152,296	104,413	47,883	68.56 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	152,296	104,413	47,883	68.56 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	152,296	104,413	47,883	68.56 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	152,296	104,413	47,883	68.56 %
	6 . Dokter/Dokter gigi	45	45	0	100.00 %
	7 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	8 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	9 . Ahli Gizi	64	64	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	86	86	0	100.00 %
	11 . Guru	6,008	6,008	0	100.00 %
	12 . Kader Kesehatan	1,972	1,972	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>771,704</b>	<b>532,289</b>	<b>239,415</b>	<b>1,042.80 %</b>
<b>06.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>				<b>97.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	739,511	717,52	21,991	97%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total
-1	-2	-3			-4
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.38 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	96.88 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	739,511	717,52	21,991	97.03 %
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	739,511	717,52	21,991	97.03 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	739,511	717,52	21,991	97.03 %
	4 . Dokter	283	283	0	100.00 %
	5 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	6 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	64	64	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	86	86	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	277	224	53	80.87 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,221,292</b>	<b>2,155,266</b>	<b>66,026</b>	<b>871.96 %</b>
<b>07.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>				<b>84.72 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>67.43 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	159,665	134,571	25,094	84%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>17.30 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	86.49 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	159,665	134,571	25,094	84.28 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	159,665	134,571	25,094	84.28 %
	3 . Buku kesehatan lansia	159,665	134,571	25,094	84.28 %
	4 . Dokter	283	283	0	100.00 %
	5 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	6 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	64	64	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	86	86	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1,191	304	887	25.52 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>482,668</b>	<b>406,499</b>	<b>76,169</b>	<b>778.36 %</b>
<b>08.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>				<b>98.58 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>79.13 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	230,491	227,972	2,519	99%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.45 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	97.26 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	230,491	227,972	2,519	98.91 %
	2 . Tensimeter	312	259	53	83.01 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	230,491	227,972	2,519	98.91 %
	4 . Dokter	283	283	0	100.00 %
	5 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	6 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	86	86	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>463,712</b>	<b>458,621</b>	<b>5,091</b>	<b>680.83 %</b>
<b>09.00</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>				<b>98.65 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78.77 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	62,1	61,143	957	98%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total
-1	-2	-3			-4
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				19.88 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	99.42 %
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	62,1	61,143	957	98.46 %
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	62,1	61,143	957	98.46 %
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	62,1	61,143	957	98.46 %
	4 . Dokter	283	283	0	100.00 %
	5 . Bidan	828	828	0	100.00 %
	6 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	64	64	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	86	86	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>188,782</b>	<b>185,911</b>	<b>2,871</b>	<b>795.38 %</b>
10.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				95.66 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78.56 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,614	1,585	29	98%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				17.10 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	85.48 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	1,614	1,585	29	98.20 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	1,614	1,585	29	98.20 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	1,614	1,585	29	98.20 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1,614	1,585	29	98.20 %
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	347	120	227	34.58 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,803</b>	<b>6,46</b>	<b>343</b>	<b>427.38 %</b>
11.00	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				80.78 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus</b>	<b>Jumlah Total Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>65.30 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	14,142	11,544	2,598	82%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				15.48 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang terlayani	
		-1	-2	-3	77.39 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	14,142	11,544	2,598	81.63 %
	2 . Reagen Zn TB	14,142	11,544	2,598	81.63 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	14,142	11,544	2,598	81.63 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	14,142	11,544	2,598	81.63 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	14,142	11,544	2,598	81.63 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	14,142	11,544	2,598	81.63 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	35	35	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	8	8	0	100.00 %
	9 . Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	115	115	0	100.00 %
	11 . Penata Rontgen	5	0	5	0%
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	86	86	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	1,704	277	1,427	16.26 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>88,026</b>	<b>71,006</b>	<b>17,02</b>	<b>1,006.04 %</b>
12.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				98.33 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	19,73	19,73	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total
-1	-2	-3			-4
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>18.33 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang terlayani -3	91.63 %
1.	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	19,73	19,73	0	100.00 %
2.	Tes cepat HIV (RDT) pertama	19,73	19,73	0	100.00 %
3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	19,73	19,73	0	100.00 %
4.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	19,73	19,73	0	100.00 %
5.	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2	2	0	100.00 %
6.	Perawat	1,221	1,221	0	100.00 %
7.	Bidan	828	828	0	100.00 %
8.	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	115	115	0	100.00 %
9.	Tenaga kesehatan masyarakat	86	86	0	100.00 %
10.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1,704	277	1,427	16.26 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>82,876</b>	<b>81,449</b>	<b>1,427</b>	<b>916.26 %</b>



#### 4. Alokasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Pada dasarnya seluruh anggaran dari berbagai sumber yang dialokasikan untuk bidang kesehatan adalah untuk memenuhi SPM baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang secara langsung menembak SPM adalah sebesar Rp. 14.193.328.810 ( Empat Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah ). Dari anggaran tersebut realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.091.146.860 ( Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah ) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 99,19%, dengan rincian tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal 2022 Sub Bidang Kesehatan**

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI ( Rp )	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp )	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
<b>1</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>									
		1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	98,26%	-	-	-	-	2.392.465.450	2.434.927.500
		2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	53,27%	-	-	-	-	751.228.000	1.410.234.000
		3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	93,67%	-	-	-	-	577.137.900	616.159.500
		4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	98,57%	-	-	-	-	2.698.912.210	2.738.080.650
		5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	99,33%	-	-	-	-	1.720.599.508	1.732.147.108
		6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	91,38%	-	-	-	-	1.634.154.040	1.788.395.050
		7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	88,43%	-	-	-	-	492.523.050	556.955.000
		8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	93,59%	-	-	-	-	588.330.500	628.600.000
		9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	93,41%	-	-	-	-	321.214.750	343.870.000
		10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	97,52%	-	-	-	-	472.476.950	484.485.000
		11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	98,46%	-	-	-	-	734.572.000	746.055.000
		12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	99,17%	-	-	-	-	707.532.500	713.420.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>92,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,091,146,860</b>	<b>14.193.328.810</b>



## 5. Dukungan Personil

Seluruh tenaga (personil) di Dinas Kesehatan ikut terlibat dalam upaya pencapaian SPM Bidang Kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang terlibat langsung adalah beberapa jenis tenaga fungsional seperti; dokter, bidan, perawat dan tenaga fungsional lainnya dengan jumlah sebanyak 1.902 orang yang tersebar di 35 Puskesmas.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

- a. Kesulitan menentukan target  
Dari beberapa indikator SPM Bidang kesehatan, ada beberapa indikator yang mengalami kesulitan untuk menentukan target capaian. Misalnya untuk Kematian Ibu, terjadi kesulitan apakah akan menggunakan angka kematian ibu, ratio kematian ibu atau jumlah kematian ibu. Setiap pilihan indikator memiliki ketentuan dan rumus yang berbeda dan akan menimbulkan hasil analisis dan interpretasi yang berbeda-beda juga.
- b. Sebaran SDM yang belum merata  
Dari tiga puluh lima UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang, memiliki karakteristik dan sebaran tenaga (SDM) kesehatan yang berbeda dan belum merata baik dari jumlah maupun kualitas/kemampuan dalam menunjang pencapaian target SPM bidang kesehatan.
- c. Sarana dan prasarana pendukung yang masih belum optimal  
Begitu pula dari sisi sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk menunjang pencapaian target SPM bidang kesehatan yang sudah ditentukan.

### Solusi

- a. Konsultasi dan koordinasi untuk menentukan target  
Agar dapat menentukan dan memilih salah satu target dari beberapa pilhan, maka dilakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan lintas sektor seperti Badan Pusat Statistik maupun ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun ke Kementerian Kesehatan.
- b. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan  
Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan maka dilaksanakan beberapa pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan seperti pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatus (PPGDON), dan



sebagainya. Selain itu dilaksanakan pula beberapa sosialisasi dan seminar serta transfer pengetahuan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan ke beberapa tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas

c. Melengkapi sarana dan prasarana

Secara bertahap dilakukan penambahan sarana prasarana pendukung untuk mencapai target SPM bidang kesehatan. Pengadaan alat kesehatan, penambahan beberapa ruangan pelayanan di Puskesmas dan lain-lain.

Sumber anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana tersebut ada yang dari APBN melalui DAK Bidang Kesehatan, Bantuan Provinsi, APBD Kabupaten maupun dari BLUD Puskesmas.







## B. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 Jenis Pelayanan dasar merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

Adapun Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

#### 1.1 Jenis Pelayanan Sumber Daya Air

- a. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat dengan indikator sebagai berikut :
  - Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

#### 1.2 Jenis Pelayanan Jalan

- a. Penyediaan Jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator sebagai berikut :
  - Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; dan
  - Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota

### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tingkat Pemerintah Kabupaten/kota sebagai berikut :



1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Pemenuhan data SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tidak bisa terdokumentasikan dengan maksimal, dikarenakan kegiatan yang menyangkut urusan tersebut dilaksanakan oleh SKPD yang lain. Adapun SKPD yang melaksanakannya meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Sumedang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang.

### 3. Realisasi Capaian

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum</b>			
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	100	52,10%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persen	100	90,14%

### 4. Alokasi Anggaran

#### 4.1 APBN

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN (DAK Reguler) Kabupaten sebesar Rp. 5.870.078.000,00. Anggaran dimaksud dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2022.



**Tabel 4.5**  
**Capaian Realisasi Anggaran APBD dan APBN Penerapan SPM Tahun 2022**  
**Sub Bidang Pekerjaan Umum**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>				71.12 %
<b>01.00</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>				52.10 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>			<b>42.70 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,176,018	627,645	<b>548,373</b>	53%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				9.40 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	47.00 %
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1,176,018	627,645	548,373	53.37 %
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1,176,018	627,645	548,373	53.37 %
	3 . Jaringan perpipaan	1,176,018	403,574	772,444	34.32 %
	4 . Jaringan bukan perpipaan	1,176,018	552,114	623,904	46.95 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,704,072</b>	<b>2,210,978</b>	<b>2,493,094</b>	<b>188.01 %</b>
<b>02.00</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>				90.14 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>			<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	550	550	<b>0</b>	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				10.14 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	50.72 %
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	294,92	6,352	288,568	2.15 %
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	1	1	0	100.00 %
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	294,92	6,352	288,568	2.15 %
	4 . Sub-sistem pengangkutan	294,92	0	294,92	0%
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	0	100.00 %
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	86	86	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>884,848</b>	<b>12,792</b>	<b>872,056</b>	<b>304.30 %</b>



NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI ( Rp )	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp )	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
<b>1</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
		1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
		1. Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	100%	-	-	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
		2. Perluasan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	100%	-	-	-	-	5.870.078.000	5.870.078.000
		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>								
		1. Rehabilitasi /peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	100%	99,78%	-	-	-	-	3.853.345.000	3.845.051.250
		<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>99,93%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.223.425.609</b>	<b>12.215.131.654</b>

#### 4. Dukungan Personil

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 498 Orang, terdiri dari 176 orang Pegawai Negeri Sipil dan 322 orang Pegawai Honorer.

Adapun personil yang dimiliki lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 4.6**  
**Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2022**

NO	JABATAN	PANGKAT / GOL / RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Kepala Dinas</b>	<b>Pembina Utama Muda - IV/c</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	<b>Plt.</b>
2	<b>Sekretariat</b>			<b>24</b>	
	<b>Sekretaris</b>	<b>Pembina - IV/a</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	
	- Perencana Ahli Muda	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	- Pengelola Program dan Kegiatan	Pengatur Tk. I - II/d	D 3	1	
	<b>Kepala Sub Bagian Umum</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 1</b>	<b>1</b>	
	- Pranata Komputer	Penata Muda - III/a	S 1	1	
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata - III/c	S 1	1	
	- Pengadministrasi Kepegawaian	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	2	
	- Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Pengatur - II/c	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Persuratan	Pengatur - II/c	SLTA	1	
	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 1</b>	<b>1</b>	
	- Bendahara Pengeluaran	Penata Tk.I - III/d	S 2	1	
	- Bendahara Penerimaan	Penata - III/c	S 1	1	
	- Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	Pengatur Tk. I - II/d	D 3	1	
	- Pengelola Gaji	Penata Muda Tk.I - III/b	D 3	1	
	- Pengelola Keuangan	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
		Penata - III/c	S 1	2	
	- Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	4	
	- Pengadministrasi Penerimaan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
3	<b>Bidang Bina Marga</b>			<b>16</b>	
	<b>Kepala Bidang Bina Marga</b>	<b>Pembina - IV/a</b>	<b>S 2</b>	<b>-</b>	<b>Plt.</b>
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Muda	Penata Tk.I - III/d	S 1	2	
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Pertama	Penata Muda - III/a	S 1	5	
	- Analis Jalan & Jembatan	Penata Muda - III/a	S 1	1	
	- Pengawas Jalan & Jembatan	Penata Muda - III/a	S 1	2	
	- Pemeriksa Jalan & Jembatan	Penata Muda - III/a	S 1	1	
	Pengelola Pembangunan & Peningkatan Jalan	Penata Muda - III/b	D 3	1	
	Penilik Jalan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	4	
4.	<b>Bidang Sumber Daya Air</b>			<b>21</b>	
	<b>Kepala Bidang Sumber Daya Air</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	
	Teknik Pengairan Ahli Muda	Penata Tk.I - III/d	S 2	2	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Penata Muda - III/a	S 1	2	
	Analisis Sumber Daya Air	Penata - III/c	S 1	1	
		Penata Muda - III/a	S 1	1	
	Pengawas Irigasi	Penata Muda - III/a	S 1	4	
	Pengamat Operasi dan Pemelihara	Penata Muda Tk.I - III/b	S 1	1	
	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pengatur - II/c	D 3	2	
	Pengelola Sumber Daya Air	Pengatur - II/c	D 3	1	
	Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Penata Muda Tk.I - III/b	SLTA	1	
		Pengatur Tk.I - II/d	SLTA	4	
	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Pengatur Tk.I - II/d	SLTA	1	
5.	<b>Bidang Cipta Karya</b>			<b>20</b>	
	<b>Kepala Bidang Cipta Karya</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 1</b>	<b>1</b>	
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Penata Tk.I - III/d	S 1	1	
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda - III/a	S 1	2	



NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKA N FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata – III/c	S 1	1	
	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1	
	Pengawas Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	2	
	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1	
		Penata Muda – III/a	S 1	3	
	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Pengatur – II/c	D 3	2	
	Pengadministrasi Pemelihara Gedung Kantor	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	3	
<b>6.</b>	<b>Bidang Tata Ruang</b>			<b>12</b>	
	<b>Kepala Bidang Tata Ruang</b>	<b>Penata Tk.I – III/d</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	
	Teknik Penata Ruang Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 2	2	
	Teknik Penata Ruang Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	Pengawas Tata Ruang	Penata – III/c	S 1	1	
	Analisis Tata Ruang	Penata – III/c	S 2	1	
	Analisis Pemanfaatan Ruang	Penata Muda Tk.I – III/b	S 2	1	
	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penata Muda – III/a	S 1	1	
		Pengatur – II/c	D 3	2	
	Perencana Teknis Tata Ruang Kota dan Desa	Penata Muda – III/a	S 1	1	
<b>7.</b>	<b>Bidang Bina Konstruksi</b>			<b>8</b>	
	<b>Kepala Bidang Bina Konstruksi</b>	<b>Penata Tk.I – III/d</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	2	
	Penelaah Mutu Konstruksi	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	Pengelola Jasa Konstruksi	Penata Muda – III/a	D 3	1	
		Pengatur – II/c	D 3	2	
	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	1	
<b>8.</b>	<b>UPTD</b>			<b>74</b>	
	<b>UPTD Peralatan &amp; Perbengkelan</b>			<b>20</b>	
	<b>Kepala UPTD Peralatan &amp; Perbengkelan</b>	<b>Penata – III/c</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	<b>Plt.</b>
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>				
	Operator Alat Berat	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	13	
		Pengatur – II/c	SLTA	4	
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTA	1	
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda – II/a	SLTP	1	
	<b>UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</b>			<b>3</b>	
	<b>Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</b>	<b>Penata – III/c</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	<b>Plt.</b>
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>				
	Pengelola Pemelihara Laboratorium	Penata Muda Tk. I – III/b	S 1	1	
	Penguji Laboratorium, Tanah, Aspal dan Beton	Penata Muda Tk. I – III/b	S 1	1	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari</b>			<b>6</b>	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari</b>	<b>Penata – III/c</b>	<b>S 1</b>	<b>1</b>	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata – III/c</b>	<b>S 1</b>	<b>1</b>	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1	
	Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Pamulihan</b>			<b>5</b>	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Pamulihan</b>	<b>Penata Tk.I – III/d</b>	<b>S 1</b>	<b>1</b>	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata Tk.I – III/d</b>	<b>S 1</b>	<b>1</b>	
	Pemelihara Jalan	Pengatur – II/c	SLTA	2	
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTA	1	



NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	<b>UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota</b>			5	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 1</b>	1	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata Muda TK. I - III/b</b>	<b>S 1</b>	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur - II/c	SLTA	1	
	Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
		Pengatur - II/c	SLTA	1	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Cimalaka</b>			4	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Cimalaka</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 1</b>	1	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 1</b>	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
	Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Conggeang</b>			6	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Conggeang</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>S 1</b>	1	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata - III/c</b>	<b>S 1</b>	1	
	Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda Tk. I - II/b	SLTP	1	
		Pengatur - II/a	SD	1	
		Juru Tk. I - I/d	SD	1	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta</b>			4	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta</b>	<b>Penata - III/c</b>	<b>S 2</b>	1	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	-	-	-	Pensiun
	Pemelihara Jalan	Penata Muda - III/a	S 1	2	
		Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Tomo</b>			9	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Tomo</b>	<b>Penata - III/c</b>	<b>S 2</b>	1	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata - III/c</b>	<b>S 1</b>	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	2	
		Pengatur - II/c	SLTA	2	
	Pemelihara Jalan	Pengatur - II/c	SLTA	3	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Situraja</b>			8	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Situraja</b>	<b>Penata Tk.I - III/d</b>	<b>SLTA</b>	1	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata - III/c</b>	<b>S 1</b>	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
	Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	4	
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda - II/a	SLTA	1	
	<b>UPTD PUTR Wilayah Wado</b>			4	
	<b>Kepala UPTD PUTR Wilayah Wado</b>	<b>Penata Tk. I - III/d</b>	<b>S 2</b>	1	
	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	<b>Penata - III/c</b>	<b>S 1</b>	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
	Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I - II/d	SLTA	1	
	<b>Honorier</b>			<b>322</b>	
			S 2	19	
			S 1	62	
			D3	14	
			SLTA	84	
			SLTP	5	
			SD	2	
	<b>Jumlah PNS</b>			<b>176</b>	
	<b>Jumlah Honorier</b>			<b>322</b>	
	<b>Jumlah Total</b>				

Sumber : DUK Per 29 Desember Tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sumedang



#### **Keterangan :**

Pada Tahun Anggaran ini ada beberapa pejabat yang merangkap 2 jabatan dikarenakan ada kekosongan, jabatan tersebut antara lain :

- Plt. Kepala Dinas PUTR merangkap Jabatan dengan Inspektur Kabupaten Sumedang;
- Plt. Kepala Bidang Bina Marga merangkap Jabatan dengan Sekretaris Dinas PUTR;
- Plt. Kepala UPTD Peralatan & Perbengkelan merangkap Jabatan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan & Perbengkelan;
- Plt. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi merangkap Jabatan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- Dipertengahan tahun anggaran 2022 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta telah pensiun namun dikarenakan untuk pelaksana tidak boleh menjabat Plt. Maka jabatan tersebut kosong.

#### **4.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
  - a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
  - b. menetapkan kebijakan teknis tentang pembangunan perkotaan dan perdesaan yang mengacu kepada kebijakan nasional dan provinsi;
  - c. mengawasi pengelolaan sumber daya air;
  - d. menetapkan pengaturan jalan kabupaten meliputi perencanaan umum dan pembiayaan, penetapan status, pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten.
  - e. menetapkan rekomendasi teknis untuk :
    - (1) Ijin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kabupaten
    - (2) Ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air permukaan





- (3) Ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air dan penambangan pada wilayah sungai dalam kabupaten
  - (4) Ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dibantu oleh :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Bina Marga;
  - c. Bidang Sumber Daya Air;
  - d. Bidang Jasa Kontruksi;
  - e. Bidang Tata Ruang;
  - f. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan serta Irigasi;
  - g. UPT Laboratorium Pemeriksaan Bahan dan Pekerjaan;
  - h. UPT Peralatan;

## 5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan :

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga kegiatan sangat sulit dilaksanakan disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut :

1. Dalam menyusun perencanaan anggaran SPM belum sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. RKA dan KAK belum dibuat oleh OPD pengampu
3. Lambatnya koordinasi dari bidang-bidang yang bersangkutan
4. Keahlian atau kemampuan Sumber daya manusia terbatas.
5. Untuk pencapaian target SPM pada pelayanan jalan tidak ditunjang dengan rencana kegiatan yang optimal.
6. Ketersediaan anggaran tidak optimal sehingga mempengaruhi capaian fisik dilapangan sehingga sangat sulit untuk mencapai target indikator yang ditentukan.

### b. Solusi :

Adapun solusi yang ditawarkan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a) Antara SKPD terkait harus ada koordinasi yang baik
- b) Diadakan konsultasi dan studi banding kepada daerah lain berkaitan dengan SPM.



- c) Perlu dilaksanakan Bintek dalam penyusunan SPM dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi.
- d) Harus ada kegiatan penyusunan data base terhadap indikator terkait.
- e) Harus ada penambahan alokasi anggaran dari pusat
- f) Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA.
- g) Penerapan SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan kerjasama semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Serta diperlukan dukungan alokasi anggaran yang baik dari pusat, provinsi maupun Pemerintah Daerah sehingga target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dapat tercapai.

## **C. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman terdiri dari sebagian Sub Bidang Perumahan kawasan Permukiman, Tata Bangunan dan Pertanahan yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota ;
- b. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **2. Target Pencapaian SPM**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksud untuk point a di atas yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang dalam indikator yang menggambarkan sasaran/target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu memerlukan beberapa tahapan dimulai dari :

1. Perencanaan Anggaran.
2. Pencarian dan pengkajian lahan baru yang aman dari bencana.
3. Pembebasan dan perubahan status Lahan.
4. Pembangunan dan penyerahan rumah yang layak huni bagi korban bencana.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 anggaran untuk penerapan SPM baru malaksnakan Pembebasan lahan untuk korban bencana di wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan pendatatan tingkat kerusakan adapun pembangunannya akan dilaksanakan pada Tahun 2022 .



**Tabel 4.7**  
**Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022**  
**Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman</b>					
1.	Pendataan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Masyarakat terkena dampak korban bencana di wilayah Kabupaten Sumedang	1. Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi 3. Bagi Korban Bencana.	Persen	100 %
2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah di Wilayah Kabupaten Sumedang	1. Subsidi Uang Sewa 2. Penyediaan Rumah Layak Huni 4.	Persen	100%

### 3. Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran SPM Tahun 2022

Total alokasi anggaran tahun 2022 untuk pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dilaksanakan untuk Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 250.000.000,00, realisasi Rp. 243.337.000,00 dengan capaian kinerja realisasi anggaran sebesar 97,33%.



**Tabel 4.8**  
**Capaian Realisasi SPM Tahun 2022**  
**Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-2	-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>				99.41 %
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				98.81 %
	Ya Terjadi Bencana			
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78.81 %</b>
• Jumlah yang Harus Dilayani :	135	133	2	99%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>
	<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
	-1	-2	-3	100.00 %
1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	103	103	0	100.00 %
1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
1. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
2. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	30	30	0	100.00 %
<b>JUMLAH</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>200.00 %</b>
<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				100.00 %
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
• Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>
	<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
	-1	-2	-3	100.00 %
1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	0	100.00 %
2. Subsidi uang sewa	1	1	0	100.00 %
3. Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100.00 %
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>300.00 %</b>



NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI ( Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp )	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	97.33%	-	-	-	-	243.337.000	250.000.000
		1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	100%	98.84%	-	-	-	-	98.839.000	100.000.000
		2 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	100%	99.77%	-	-	-	-	49.886.000	50.000.000
		3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	100%	97.33%	-	-	-	-	48.667.000	50.000.000
		4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	100%	91.89%	-	-	-	-	45.945.000	50.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>97.33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.337.000</b>	<b>250.000.000</b>

#### 4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 117 orang terdiri dari 63 orang PNS dan 54 orang non-PNS.

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II/b	1 orang
2.	Eselon III/a	1 orang
3.	Eselon III/b	3 orang
4.	Eselon IV/a	11 orang
5.	Staf (PNS)	47 orang
6.	Staf (Honorar)	54 orang



## 5. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu :

- a. Belum optimalnya tingkat pemahaman regulasi tentang penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Belum optimalnya dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal dari mulai perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi;
- c. Belum pernah dilaksanakan bintek penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Keterbatasan anggaran yang tersedia;
- e. Keterbatasan sumber daya manusia
- f. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang membidik SPM merupakan SPM Dinas PUPR sehingga program dan kegiatan tersebut tidak menjadi target SPM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang pada Tahun 2022.

### b. Solusi

Solusi atas permasalahan tersebut di atas adalah :

- a. Semua OPD pengampu perlu dilaksanakan bintek penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
- b. harus diadakan kegiatan penyusunan data base tiap bidang yang melaksanakan SPM;
- c. mengupayakan tambahan anggaran untuk program/kegiatan yang membidik langsung pencapaian SPM;
- d. memprioritaskan pendanaan pada program dan kegiatan yang membidik SPM;
- e. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan secara optimal agar capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.



## D. BIDANG URUSAN SOSIAL

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Bidang urusan sosial ada beberapa jenis pelayanan dasar yang menjadi pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permensos No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial pada tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pusat antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

### 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2022 tercantum dalam tabel 2.7 berikut :

**Tabel 4.9**  
**Target SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1.	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Dasar	100%
2.	Program Perlindungan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat jelas target pencapaian SPM setiap Jenis Pelayanan Dasar dan kegiatan beserta indikator nya ditargetkan 100%.



### 3. Realisasi Capaian

Target yang dapat dicapai/ direalisasikan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2022 tercantum dalam tabel 4.10 berikut :

**Tabel 4.10**

**Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2022**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>				98.27 %
01.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				95.53 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	782	782	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				15.53 %
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
		-1	-2	-3	77.64 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	782	782	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan permakanan	782	553	229	70.72 %
	5 . Penyediaan sandang	78	17	61	21.79 %
	6 . Penyediaan alat bantu	782	189	593	24.17 %
	7 . Penyediaan persediaan kesehatan	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	782	782	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	782	782	0	100.00 %
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	78	7	71	8.97 %
	11 . Akses ke layanan pendidikan	234	91	143	38.89 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	7	7	0	100.00 %
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	7	7	0	100.00 %
	14 . Layanan rujukan	7	7	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,325</b>	<b>3,228</b>	<b>1,097</b>	<b>1,164.54 %</b>





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
02.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				98.04 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	317	317	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>18.04 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	90.18 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	317	317	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	317	262	55	82.65 %
	3 . Penyediaan sandang	100	20	80	20.00 %
	4 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	317	317	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	317	317	0	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2	1	1	50.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan	317	317	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	23	23	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	23	23	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	23	23	0	100.00 %
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,761</b>	<b>1,625</b>	<b>136</b>	<b>1,352.65 %</b>
03.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				97.81 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	736	736	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>17.81 %</b>
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	89.03 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	736	736	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	736	736	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	220	25	195	11.36 %
	5 . Penyediaan alat bantu	220	53	167	24.09 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	736	736	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	736	736	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	51	51	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	51	51	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	51	51	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,543</b>	<b>3,181</b>	<b>362</b>	<b>1,335.45 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
04.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	8	8	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
		-1	-2	-3	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan	14	14	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3. Penyediaan pemakanan	8	8	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	8	8	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	8	8	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	8	8	0	100.00 %
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	14	14	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	14	14	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	14	14	0	100.00 %
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>1,500.00 %</b>
05.00	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5,283	5,283	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>
		<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
		-1	-2	-3	100.00 %
	1. Penyediaan pemakanan	5,283	5,283	0	100.00 %
	2. Penyediaan sandang	1,558	1,558	0	100.00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	4	4	0	100.00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1	1	0	100.00 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	5,283	5,283	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,129</b>	<b>12,129</b>	<b>0</b>	<b>500.00 %</b>



Dari tabel diatas dapat terlihat realisasi/capaian kinerja SPM setiap indikatornya dan dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar adalah sebesar 18,30%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 5.692 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 1.042 orang dengan rincian bantuan 993 Orang bantuan regular dari Kemensos (Sembako+PKH), 15 Orang mendapat bantuan Non Reguler UEP dari Anggaran APBD Provinsi, 27 Orang Mendapat bantuan dari Anggaran APBN dan 7 Orang mendapat bantuan UEP non Reguler APBN.
- b. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya adalah sebesar 51,65%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 211 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 109 orang.
- c. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya adalah sebesar 9.6%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 38.865 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 3.729 orang.
- d. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya adalah sebesar 83,33%, dengan jumlah orang yang berhak mendapat layanan (target tahun 2021) adalah 18 orang, sedangkan jumlah orang yang terlayani pada tahun 2021 adalah 15 orang.
- e. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dilakukan penanganan dan penanggulangan bencana secara maksimal dengan persentase 100%.



#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial berjumlah dengan anggaran APBD sebesar Rp. 2.171.330.900 dan realisasi sebesar Rp. 1.922.992.061 dengan dengan realisasi Capaian anggaran sebesar 88,56%.

**Tabel 4.11**  
**Capaian/Realisasi SPM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang 2022**

NO	PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI (Rp)	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
					APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
1	<b>DINAS SOSIAL</b>									
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	99,70 %	-	-	-	-	1.723.592.200	1.921.330.900
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-	-	199.399.861	250.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>99,44%</b>	<b>266.125.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.922.992.061</b>	<b>2.171.330.900</b>



## 5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah 6 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti TKSK (26 orang) Pendamping Disabilitas (7 orang), Pendamping lanjut usia (1 orang), Sakti Peksos (2 orang), TAGANA (51 orang) dan PSM (277 orang). Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang menangani Orang Terlantar, Orang dengan Tempat Tinggal Tidak Tetap, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Masih ada beberapa permasalahan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial dengan permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya SDM Profesional dan sarana prasarana yang menangani urusan sosial, sehingga dalam penanganan dan pencegahan terjadinya PMKS belum optimal;
- b. Belum terpilah dan terverifikasinya data PMKS di BDT sehingga belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
- c. Masih kurangnya keberfungsian PSKS dalam menangani PMKS di Kabupaten Sumedang.

### b. Solusi

Dari permasalahan tersebut di atas, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan PMKS serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Usulan verifikasi dan validasi data BDT;
4. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.



## E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota, adalah Bidang Urusan " *Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* ". Dan pada Tahun 2017 terjadi Perubahan SOTK sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dimana salah satunya dengan adanya bidang baru yaitu bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran, dan secara otomatis bertambah pula tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

### 2. Target Pencapaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Setiap Tahun
		2. Jumlah Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat daerah	100	Setiap Tahun
		3. Jumlah Capaian SPM	100	Setiap Tahun

### 3. Realisasi Capaian

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan " *Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* ". pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :



KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			90.00 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				90.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	1,154,000	1,154,000	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>10.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>50.00 %</b>
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	9	9	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	28	28	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	120	120	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS UTAMA			98.67 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				96.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	691,534	691,534	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>16.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>80.00 %</b>
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	26	26	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	691,534	691,534	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100	100	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	691,534	691,534	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	691,534	691,534	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>100.00 %</b>
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	133	133	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	35	35	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>



KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	421	421	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>100.00 %</b>
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	421	421	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2	2	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	2	2	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	421	421	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>	BELUM TUNTAS			49.33 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				49.33 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>40.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	8	4	<b>4</b>	<b>50.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>9.33 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>46.66 %</b>
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	19	8	<b>11</b>	<b>42.11 %</b>
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	2	<b>1</b>	<b>66.67 %</b>
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	29	5	<b>24</b>	<b>17.24 %</b>
	4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	165	100	<b>65</b>	<b>60.61 %</b>

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100	100%
		1. Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	84,16%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2. Jumlah Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	100	6,63%





Formulasi Perhitungan :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K-3/87 Kasus}}{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K-3/87 Kasus}} \times 100\% = 100\%$$

2. a. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten /Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Bidang Penanggulangan Kebakaran/85 layanan

$$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 (101 Kejadian)}}{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten /Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Bidang Penanggulangan Kebakaran/85 layanan}} \times 100\% = 84.16\%$$

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja/7 Pelayanan

$$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 (101 Kejadian)}}{\text{Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja/7 Pelayanan}} \times 100\% = 6.63\%$$

3. Jumlah Pencapaian SPM

$$\begin{aligned} &= \text{Point (a) + (b)} \\ &= 84,16\% + 6,63\% \\ &= 91,09\% \end{aligned}$$

Realisasi Pencapaian SPM pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat:

a. Kontribusi Pemerintah Daerah:

- Adanya dukungan kebijakan berupa produk Hukum dalam pelaksanaan tugas;
- Adanya dukungan pendanaan program dan kegiatan dari Anggaran APBD.

b. Kontribusi Swasta/masyarakat

- Adanya Respons dari masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan Perda nomor 7 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

**4. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk penerpan Standar pelayanan Minimal di Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berjumlah

Rp. 4,031,625,800,- Realisasi sebesar Rp. 3.912.781.700,00 dengan capaian realisasi sebesar 97,73%, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:





ANGGARAN KEGIATAN SPM DINAS TRANTIBUMLINMAS KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022					
NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. SUMEDANG	2,848,506,516,538			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	15,659,257,102	0.55 %		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4,031,625,800		0.14 %	25.75 %
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	4,031,625,800			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINYA	4,031,625,800			



**Tabel 4.12**  
**Capaian/Realisasi SPM Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Sumedang 2021**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
	<b>KAB. SUMEDANG</b>				<b>7,144,915,800</b>	<b>3,548,636,800</b>	<b>49.67 %</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>				<b>2,212,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,530,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
		<b>1</b>	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	650,000,000	0	0%
		<b>2</b>	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	600,000,000	0	0%
		<b>3</b>	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	0	0%
		<b>4</b>	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	100,000,000	0	0%
		<b>5</b>	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	80,000,000	0	0%
		<b>6</b>	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		<b>7</b>	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		<b>8</b>	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		<b>9</b>	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
		<b>1</b>	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		<b>2</b>	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		<b>3</b>	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	600,000,000	0	0%
	<b>3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>			<b>82,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
		<b>1</b>	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	82,000,000	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				3,113,290,000	3,056,636,800	98.18 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			195,000,000	192,927,750	98.94 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	99,381,000	99.38 %
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	95,000,000	93,546,750	98.47 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,030,790,000	1,002,015,000	97.21 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	155,000,000	154,294,000	99.54 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	275,790,000	271,197,000	98.33 %
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	350,000,000	328,233,000	93.78 %
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	125,000,000	124,077,000	99.26 %
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	50,000,000	50,000,000	100.00 %
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	75,000,000	74,214,000	98.95 %
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1,625,000,000	1,601,772,500	98.57 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	925,000,000	924,440,000	99.94 %
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	500,000,000	479,101,500	95.82 %
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	200,000,000	198,231,000	99.12 %
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			262,500,000	259,921,550	99.02 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	25,000,000	24,147,650	96.59 %
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	97,500,000	97,500,000	100.00 %
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	140,000,000	138,273,900	98.77 %
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



## 5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yaitu :

### a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kompisisi Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menurut tingkat pendidikan, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No	Gol	Jml	Pendidikan Umum						Jenis Kelamin		Pendidikan Penjurangan			
			SD	SMP	SMA	D.3	S1	S2	L	P	Diklat Struktural			
									PIM IV			PIM III	PIM II	
1	IV-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-b	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-
	IV-a	5	-	-	-	-	4	1	4	1	3	1	-	-
2	III-d	15	-	-	1	-	12	2	13	2	14	-	-	-
	III-c	4	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	-	-
	III-b	9	-	-	2	-	7	-	9	-	-	-	-	-
	III-a	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-
3	II-d	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	II-c	17	-	-	17	-	-	-	17	-	-	-	-	-
	II-b	3	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	II-a	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4	I-d	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

### b. Pegawai Non PNS/Tenaga Tidak Tetap

Jenis Kelamin	Jml	Pendidikan Umum						Diklat Kesamaptaaan Polisi PP
		SD	SMP	SMA	D.3	S1	S2	
Laki-laki	108	-	-	106	1	1	-	-
Perempuan	14	-	-	10	2	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

#### 1. Faktor Internal

##### a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil

- Masih kurangnya Pejabat dan Staf yang belum mengikuti latihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
- Masih kurangnya tenaga PPNS dimana sementara ini hanya ada 2 orang.

##### b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.

##### c. Masih perlunya penambahan Anggaran.

#### 2. Faktor Eksternal

##### a. Masih adanya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.



- b. Masih adanya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Masih adanya peredaran minuman keras.
- d. Masih Terjadinya unjukrasa dan persengketaan

#### **b. Solusi**

1. Mengusulkan para Pejabat Struktural dan Staf untuk mengikuti Diklat Teknis Ke-Satpol PP-an;
2. Mengusulkan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang untuk mengikuti Diklat PPNS maupun Diklat Teknis Pemadam Kebakaran;
3. Membuat surat usulan Penambahan Personil Kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang terutama yang sudah memiliki Sertifikat selaku PPNS;
4. Membuat surat usulan penambahan Sarana dan Prasarana Kantor;
5. Membuat surat usulan Penambahan Anggaran;
6. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah terutama yang menyangkut gangguan Ketentraman dan Ktertiban Umum serta Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Sumedang;
7. Mengantisipasi adanya unjuk rasa;
8. Mengantisipasi secara dini akan terjadinya bencana alam dengan melakukan himbauan – himbauan kepada masyarakat.

## **F. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu :

Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan Vyang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah



melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu :

Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan). Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimalnya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau pemenuhan pelayanan dasar harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan masing-masing Lembaga. Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya, dengan melaksanakan SPM, maka penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf 'e' menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta





perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sebagai berikut:

1. Bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.
2. Pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal
3. Merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah
4. Memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personel, peralatan dan anggaran)
5. Pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran secara integrative

## **2. Indikator dan Nilai SPM**

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang urusan Bencana dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :





## 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pengurangan Indeks Risiko Bencana	1. Jumlah Desa /Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel
			2. Jumlah / Desa Kelurahan Tangguh Bencana	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel	5 Desa/ Kel
			3. Persentase Kecepatan Respon Bencana Kurang dari 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase Korban Bencana Yang Diberikan Bantuan	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Berhasil di Realisasikan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Tersebar nya informasi penanggulangan bencana ke Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel	277 Desa/ Kel
3.	Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Kajian Risiko Bencana (KRB)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Yang Diinformasikan Sesuai Jenis Bencana Ancaman Bencana	0 Titik	128 Titik	128 Titik	128 Titik	128 Titik
5.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana Yang Siaga	Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana yang Siaga	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang



### 3. Realisasi Capaian

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Bencana Kabupaten Sumedang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 5.1.1 Realisasi target caaian SPM urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKARTOR PENCAPAIAN /OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3			4	5
1.	Pelayanan informasi rawan bencana • Jumlah yang harus dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	Persentase capaian	
		642.744	642.744	0	100%	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian	
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	4.195	4.195	0	100%	
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	691.534	691.534	0	100%	
	3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	691.534	691.534	0	100%	
	4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	94	94	0	100%	
5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana						
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Jumlah yang harus dilayani :	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	Persentase capaian	
		1.919	1.919	0	100%	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian	



NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKARTOR PENCAPAIAN /OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.919	1.919	0	100%	
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Jumlah yang harus dilayani :					
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	Persentase capaian	
		976.510	976.510	0	100 %	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian	
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.821	2.821	0	100%	
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2.821	2.821	0	100%	
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1.164	1.164	0	100%	
	4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1.164	1.164	0	100%	
	5. Pelaksanaan pencarian, evakuasi korban bencana pertolongan	2.821	2.821	0	100%	
	6. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	965.719	965.719	0	100%	



#### 4. Alokasi Anggaran

##### a. APBD

Alokasi anggaran tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 1.837.135.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.13**  
**Capaian/Realisasi SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang 2021**

PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM
				APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)		
<b>1</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			<b>TOTAL ANGGARAN</b>					
	1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			<b>137.580.000,00</b>				<b>137.580.000,00</b>	<b>137.580.000,00</b>
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%	98.580.000,00	-	-	-	98.580.000,00	98.580.000,00
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	18 Titik Daerah Rawan Bencana	100%	39.000.000,00	-	-	-	39.000.000,00	39.000.000,00



PERANGKAT	SPM (URAIAN CAPAIAN)	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TARGET	TOTAL ANGGARAN PERANGKAT				TOTAL REALISASI DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM	TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN PENCAPAIAN SPM		
				APBD II (Rp)	BANTUAN PROVINSI (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA (Rp)				
<b>1</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			<b>TOTAL ANGGARAN</b>							
	<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>544.470.000,00</b>	-	-	-	<b>544.470.000,00</b>	<b>544.470.000,00</b>	
		1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kabupaten/Kota	Rencana Bencana	2 Dokumen	100%	195.080.000,00	-	-	-	195.080.000,00	195.080.000,00
		2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		3 Desa/ Kelurahan	100%	154.160.000,00	-	-	-	154.160.000,00	154.160.000,00
		3. Penyusunan Rencana Kontijensi		2 Dokumen	100%	195.230.000,00	-	-	-	195.230.000,00	195.230.000,00
	<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				<b>1.155.085.000,00</b>	-	-	-	<b>1.155.085.000,00</b>	<b>1.155.085.000,00</b>
		1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		35 orang	100%	1.006.745.000,00	-	-	-	1.006.745.000,00	1.006.745.000,00
		2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		3 Jenis	100%	148.340.000,00	-	-	-	148.340.000,00	148.340.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>100%</b>	<b>1.837.135.000</b>				<b>1.837.135.000</b>	<b>1.837.135.000</b>



## 5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebanyak 60 orang dengan perincian :

No.	Uraian	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Pelaksana	Esselon III,a	1
2.	Sekretaris	Esselon IV,a	1
3.	Kepala Seksi	Esselon IV,a	3
4.	PNS	Fungsional Umum	10
5.	NON PNS	-	10
6.	PHL (PUSDALOPS)	-	35

Jumlah tenaga PNS/ CPNS sebanyak 16 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	: 1 orang
2.	S 1	: 5 orang
3.	D3	: 3 orang
4.	SLTA	: 6 orang

## 6. Permasalahan dan Solusi SPM

### a. Permasalahan

Ada beberapa Indikator SPM Bidang Urusan Bencana yang tidak mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan/ program sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

- Prosedur operasional penanggulangan bencana;
- Sarana prasarana penanggulangan bencana;
- Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
- Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

### a. Solusi

Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh Biaya SPPD yang bersumber dari APBD. Memaksimalkan kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Penanggulangan Bencana tahun yang akan berjalan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur sesuai amanat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sistematika penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 15 Desember 2022 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Apabila mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun tersebut disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan dan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga dalam perjalanan masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama para stakeholder sebagai modal dasar dalam pelaksanaan percepatan sehingga hasilnya dapat semakin optimal. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2022 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang di Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk melaksanakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang untuk mencerminkan dan memperlihatkan kinerja yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2022, sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sumedang pada khususnya.





Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif untuk mengisi pembangunan Kabupaten Sumedang di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi.

Semoga dengan segala bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan Kabupaten Sumedang **“SIMPATI” (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, Kreatif)** pada tahun 2023 Alloh Subhanahu Wata’ala selalu memberikan bimbingan dan rahmat hidayahnya kepada kita semua.

Sumedang, 29 Maret 2023

BUPATI SUMEDANG,

**Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST, MM**

